EDISI NO. 35/TH.XVII/2002

MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

BALAIRUNG

MENENGOK TRADISI PESISIR

ISSN: 0215 - 076X

Rp.7.500

Surat Kabar Mingguan

Minggu Pagi

Enteng Berisi

Alamat Redaksi
Jl Pangeran Mangkubumi 40-42-44 Yogyakarta
Telp. (0274) 565685 (Hunting)
E-mail: mp@kr.co.id

Bagian Iklan: Psw. 127
Bagian TU Langganan: Psw. 117

Kunjungi situs kami di http://www.kr.co.id/mp

Alamat Perwakilan

Jakarta
Jl Utan Kayu 85, Jakarta Timur
Tel. (021) 8653515, 8653602

Kedu Utara
Jl Achmad Yani 9, Magelang
Tel. (0293) 363552, 362502

Surakarta
Jl Bhayangkara 13, Surakarta
Tel. (0271) 718015

Semarang
Jl Lampersari 55, Semarang
Tel. (024) 315769

Purwokerto
Jl Achmad Yani 14, Purwokerto
Tel. (0281) 37347

Kedu Selatan
Jl Tentara Pelajar 107, Purworejo
Tel. (0275) 23422

Kulonprogo
Kompleks Ruko Gawok 29, Wates
Tel. (0274) 774738

Klaten & Boyolali
Jl Pandanaran 10, Klaten
Tel. (0272) 320302

Gunung Kidul
Jl Sumarwi 34A, Wonosari
Tel. (0274) 394287

punya mas Abid
http://avicenia.8m.com
avicenia10@yahoo.com

SEE OTHER SIDE OF THIS PAGE

EXPERIENCE
NEW WAY
HOW WE
RE-DESIGN
OUR **MAGAZINE**

Divisi Produksi
BALAIRUNG
RETHINK!NG

comment us! all critics are welcome! mail us @ divprodbal@yahoo.com

Beberapa hari ini kami belajar filsafat Pantene. Produk pencuci rambut internasional itu, menurut klaim, merupakan produk terlaris di kelasnya. Pada mulanya Pantene cukup percaya diri dengan warna-warna pastel yang *cool*. Tapi tiba-tiba saja, di awal tahun 2002, mereka datang dengan warna-warna baru yang lebih kilap. Warna dasar produk tetap sama, tapi desain baru, kemasan baru membuat *shampoo* ini seakan *the rising star* dalam bisnis kompetitif itu.

Apa yang kami pelajari dari Pantene? Keberanian untuk mencoba hal-hal baru, meski berisiko *nggak* laku dan *latah*. Dan itulah yang kami coba sekarang. Dalam dunia pemasaran, desain produksi merupakan aset yang penting dalam kompetisi pasar. Dalam dunia manajemen, perubahan merupakan variabel penentu kemajuan. Dan di Edisi 35 ini, kami hendak mewujudkan perubahan-perubahan itu dalam hal desain dan perwajahan kami.

"Seniman-seniman" kami, alias awak produksi BALAIRUNG, ingin sekadar bereksperimen, mencoba nakal, membuat garis gelap-terang dengan perspektif baru, semangat baru, keluguan baru, dan pencarian baru.

Agak kaget mungkin. Tapi ya inilah dialektika, kata Hegel. Kami tidak sekadar ingin memperbarui desain produksi, kata ilmu *marketing*, kami ingin *refreshment*, penyegaran kembali, *reinventing our teens spirit*, mengutip Nirvana. Untuk proyek ini, kami patut berterimakasih pada INSIST, terutama pada Roem Tomatimasang atas pinjaman foto-foto karya Tan Jo Hann.

Selain itu, Pembaca, kami ingin bercerita tentang beberapa hal. Salah satunya tentang Jurnal kami sebelumnya, yang membahas tentang industri buku di Yogyakarta. Jurnal spesial kami itu akhirnya dapat diluncurkan ke publik dengan sukses. Bahkan kami sempat kewalahan menyelenggarakan *launching* dan seminar Jurnal edisi 34 itu. Peserta benar-benar membludak! Maklum, kami mengundang selebritis cantik penulis novel *Supernova*, Dewi "Dee" Lestari.

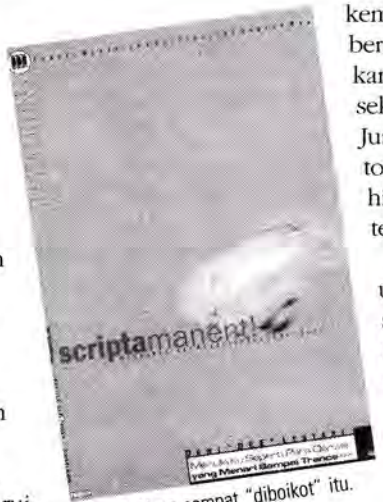

Jurnal. Yang sempat "diboikot" itu.

Namun, kehebohan ternyata tak hanya berlangsung sebelum dan selama *launching*. Beberapa hari setelah itu, markas kami didatangi beberapa orang yang mengaku berasal dari sebuah penerbitan di Jogja. Jurnal kami yang mencoba menguliti *sisik-melik* industri perbukuan itu ternyata telah membuat banyak penerbit Jogja kebakaran jenggot. Isi Jurnal dinilai mereka sangat menyudutkan.

Para penerbit yang biasanya saling sikut, kemudian bersatu menjadikan kami musuh bersama. Bahkan ada isu, mereka akan menuntut kami ke meja hijau. Kami sempat *shock* sekaligus prihatin juga dengan hal itu. Apalagi Jurnal kami juga "diboikot" oleh sebuah distributor besar di Jogja. Namun, *toh* selalu saja ada hikmah yang terselip; BALAIRUNG jadi makin tenar.

Pembaca. Agar kami tak kehabisan nafas untuk berkarya, kami kembali melakukan suksesi. Jajaran Dewan Pimpinan yang kemarin dipegang orang-orang Mars, kini dipegang mahluk-mahluk manis dari Venus. Tak heran jika teriakan manja dan jeritan-jeritan melengking kerap mewarnai rapat-rapat kami kini. Hanya Dave, satu-satunya rekan pria yang masuk jajaran De-Pe. Kasihan!

Ramadhan lalu kami juga telah "membaptis" awak baru 2001. Mereka adalah sedikit dari sekian banyak peminat yang bisa lolos kualifikasi sampai akhir. Muka-muka baru itu makin membuat kami muda kembali. Kami menjadi makin bertenaga untuk segera menyelesaikan hidangan terbaru yang sedang Anda pegang kini. Kali ini kami hendak mengajak Anda menerawang Indonesia, tidak dari ranah-ranah abstrak yang mengawang, tapi dari sesuatu yang dekat dengan pelupuk; laut. Meski mungkin hanya berbisik, kami ingin bisikan kali ini mengoyak kesadaran terdalam kita; Indonesia Baru tak datang dengan sendirinya. Salam.

Penjaga Dapur

BALAIRUNG
MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Penerbit: Badan Penerbitan Pers Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BPPM-UGM) BALAIRUNG **Izin Penerbitan Khusus:** SK Menpen RI No. 1039/DIRJEN PPG/STT/1986; SK Rektor UGM No. UGM/82/7798/UM/01/37 tgl. 14 Desember 1985 **ISSN:** 0215-076X **Pelindung:** Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA (Rektor UGM) **Penasihat:** Ir. Bambang Kartika (WR III UGM); Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri; Amir Effendi Siregar, M.A.; Ir. Abdul Hammid Dipopramono **Pemimpin Umum:** Veronica Kusuma **Sekretaris Umum:** Ririn Tri Astuti **Pemimpin Redaksi:** Nurul Aini **Sekretaris Redaksi:** Nanik Supriyanti **Redaktur Pelaksana:** Maesita Maharani, Mahfud Ikhwan **Staf Redaksi:** N. Budi Baskoro, Iqbal Aji D., Fauzul Muhammad, Indradya S.P., Ita Mutiara Dewi, Riky Ferdianto, M. Thowaf Z., Zaenal Afifudin **Redaktur Bahasa:** Anas Abdul Ghafur, Tarli **Pemimpin Perusahaan:** Shiza Taufa **Sekretaris Perusahaan:** Primakrisna T. **Kabag Keuangan:** Widhi Budhiartati **Kabag Sirkulasi:** Prima Laksmitasari **Kabag Promosi:** Anna Fardiana **Kabag Iklan:** Fika Ariani Utami **Staf Perusahaan:** M. Ardiansyah, Yudho Baskoro, Agung Marhaenis, Jatu Arum Sari **Kepala Litbang:** Nurhidayati **Sekretaris Litbang:** Sugi Siswiyanti **Staf Litbang:** Hasan Bachtiar, Iwan Achmad Ambiya, Rony Wijaya, Hary Mulyana, Sofyan Rosyidi, Samsul Ma'arif, Raisnain Ali **Kepala Produksi:** Dave Ardian Seta **Staf Produksi:** Adi Baskoro, Efendi, Sayid Munawar, Imam Karyadi Aryanto **Fotografer:** Ika R. Hilal **Awak 2001**: Affan, Amin, Amri, Anna, Astri, Asty, Ayudia, Bambang, Bondan, Dandi, Daniel, Dian, Dyah, Dyna, Gusti, Haidy, Hanni, Hariyanto, Harun, Hendi, Heny, Herdiyanto, Heru, Ihsan, Indarti, Indi, Intan, Iqbal, Irfan, Jamal, Lesa, Lili, Lutfah, Maesaroh, Melani, Mumu, Muna, Nanang, Oji, Pandu, Pramuditya, Pristi, Puspitasari, Putri, Ratih, Retna, Retri, Reza, Ria, Rika G., Rika, Rini, Rofi, Suryo, Susy, Tia, Tyas, Widyatama, Yudistira. **Rekening:** Tahapan BCA Yogyakarta No. 0372072120 (a.n. Widhi Budhiartati) **Alamat Redaksi & Perusahaan:** Bulaksumur B-21 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 901077 Faks. (0274) 566171 **E-mail:** balairung.ugm@eudoramail.com, balkon.ugm@eudoramail.com (BALAIRUNG KORAN) **Kunjungi situs kami di http://www.balairung.org**

Redaksi mengundang pembaca untuk menuangkan gagasan kritis, konstruktif, dan analitis. Artikel diketik spasi rangkap pada kertas kuarto (minimal empat halaman), disertai identitas dan foto diri penulis. Naskah lebih disukai jika dikirim dalam bentuk disket (format RTF) atau melalui e-mail. Untuk tulisan Balairung online, bisa dikirim langsung lewat web. Redaksi berhak menyunting tulisan.

BALAIRUNG

DOK. INSIST

Berita Tema

Menengok Tradisi Pesisir

Laut, dalam kajian sejarah, ternyata bukan sekadar fenomena geografi semata, melainkan juga sebuah entitas kebudayaan yang mandiri. Sayangnya, kebanggan terhadap tradisi lokal makin menjadi ruang yang menyempit, dan laut pun lalai dikaji. Padahal, dengan bercegang pada sea-systeme, kita bisa terhindar dari sejarah yang berdasarkan pulau demi pulau dan kesukuan.

14

DAVE

Teknologi

Mengais Limbah, Berburu Faedah

Fenomena meningkatnya permintaan kadar oksigen—BOD (Biological Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand)—menjadi risiko yang dihadapi negara pengekspor hasil laut seperti Indonesia. BOD dan COD merupakan salah satu indikator tingkat pencemaran lingkungan, terutama pencemaran yang terjadi di perairan. Bagaimana solusinya?

44

DOK. BALAIRUNG

Budaya

Pesisir dalam Kesusastraan Indonesia Modern

Mengapa sastrawan yang mengusung warna laut jadi minoritas? Dan, yang minoritas itupun muncul dengan suara-suara yang minor pula? Tentang kesakitan pesisir, tentang keterpinggiran nelayan, tentang keterpurukan laut?

66

DOK. BALAIRUNG

Pendidikan

Memberi Ruang bagi Wawasan Kelautan

Pendidikan yang menjauh dari realitas masyarakatnya akan membuahkan proses lupa komunitas. Demikian pula yang terjadi pada masyarakat pesisir. Pendidikan melalui sekolah tak mampu mengajari mereka tentang arti penting lingkungan yang menghidupinya itu.

76

Dapur *3* Kontak *6* Panggung *11* Isu *12* Politik *22* Hukum *29* Ekonomi *34* Jepret *49* Temu Wicara *53* Wawancara Tema *58* Humaniora *62* Lingkungan 72 Artikel Tema 80 Artikel Lepas 84 Insan Wawasan 88 Resensi 92 Apresiasi 94 Lintas 96 Jerat 98 Anekdot 100

LAUT

TANTANGAN, HARAPAN DAN MASA DEPAN BANGSA

PERLU PARTISIPASI SEMUA KOMPONEN BANGSA

HIMBAUAN INI DISAMPAIKAN OLEH
KEPALA STAF TNI ANGKATAN LAUT

Mohon Dikirimi BALAIRUNG

Salam demokrasi buat rekan-rekan BALAIRUNG. Saya adalah awak Tabloid Berita Mahasiswa *TAJAM*, dari Fak. Dakwah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Setelah beberapa kali membaca BALAIRUNG yang dipinjami seorang kawan, teman-teman *TAJAM* sangat tertarik untuk bekerja sama.

Lewat surat ini, kami memohon kesediaan kawan-kawan BALAIRUNG untuk bertukar media dengan kami. Insya Allah, kami akan mengirimkan *TAJAM* edisi terbaru secepatnya. Adapun alamat kami adalah:

Redaksi TBM TAJAM
Kompleks Fak. Dakwah IAIN Ar-Raniry
Jl. Syeh Abdul Rauf Kopelma Darussalam
Banda Aceh 23111 Telp. (0651) 52548
<red.tajam@eudoramail.com>

Akhirnya, kami menghaturkan terima kasih atas kerja samanya.

Nurul Inayah
inayah.nurul@eudoramail.com

---Terima kasih atas apresiasi rekan-rekan TAJAM. *Tunggu saja kiriman kami.*

Portal tentang Kemanusiaan dan Konflik dari Harvard

Universitas Harvard, Cambridge, Amerika Serikat, telah mendirikan Program Kebijakan Kemanusiaan dan Penelitian Konflik (PKKPK). Program ini bertujuan memberikan jasa penelitian, konsultasi mengenai strategi pencegahan konflik, serta pengelolaan krisis kemanusiaan dan perlindungan warga sipil di daerah konflik.

Salah satu proyek kunci dari program ini adalah pendirian portal jaringan Prakarsa Pencegahan Konflik (*Conflict Prevention Initiative*, CPI). Anda bisa mengaksesnya pada alamat *<www.preventconflict.org/portal>*. Sebelumnya, Anda akan diminta untuk mendaftarkan diri waktu mengakses portal ini.

Di sini Anda bisa menempatkan data tentang diri atau pun organisasi. Silakan klik pada bagian "*Contact us*".

Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas lain dari portal ini, di antaranya:
- Akses ke berita-berita lokal dan internasional.
- Data mengenai artikel-artikel yang bisa ditelusuri.
- Data tentang para ahli penting dalam berbagai bidang.
- Peta interaktif.
- Latar belakang informasi mengenai isu-isu yang sedang diperdebatkan.

Portal ini kami perbarui setiap hari. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi kantor kami *<hpcr@hsph.harvard.edu>*. Kami tunggu kunjungannya.

Claude Bruderlein
Direktur Program

Mohon Informasi S2 Fisipol UGM

Salam sejahtera.

Saya berkeinginan untuk melanjutkan studi S2 di Jurusan Ilmu Politik. Karena itu, saya membutuhkan informasi mengenai Program S2 Fisipol UGM, Jurusan Ilmu Politik Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah. Di mana saya bisa mendapat informasi mengenai program tersebut?

Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Rijel Samaloisa
rijelsam@yahoo.com

---Silahkan Anda buka situs <www.otonominet.com>, *atau hubungi bagian Program Pascasarjana Ilmu Politik Fisipol UGM, Jln. Sosio Yustisia 2, Bulaksumur, Yogyakarta 55281. Telp. (0274) 563362. e-mail: s2plokal@isipol.ugm.ac.id*

Portal untuk Mahasiswa

Perkenankan kami memperkenalkan situs portal vertikal yang didedikasikan untuk memberikan informasi dan meningkatkan wawasan serta aktivitas di dunia kampus, *<www.mahasiswa.com>*.

Situs ini menyediakan fitur-fitur menarik yang berguna buat mahasiswa, yaitu: *e-mail* gratis; *Freelance*, untuk yang ingin memburu uang di waktu luang, tersedia bermacam jenis lowongan pekerjaan paruh waktu; *e-card*, untuk menyatakan kepedulian Anda kepadanya; *Iklan Baris*, untuk menjual dan mencari jasa atau produk secara gratis; *Kencan*, arena mencari atau mengenal teman dari kampus lain; *Forum Diskusi*, tempat mempublikasikan komentar Anda.

Di samping itu masih ada beberapa saluran informasi berupa, seperti *Info Terkini, Beasiswa, Olahraga, Funzone, Mahasiswaku, Perpustakaan, Horoscope, Biorithms, Organisasi, Gaya Hidup, Chat, Jajak Pendapat, Kalender*. Anda juga dapat mengirimkan berita atau artikel seputar aktivitas kampus Anda. Kirimkan ke alamat *e-mail <dewa@mahasiswa.com>*

Romy Sadewa
Pengelola Mahasiswa.com

Surat dari Marketbiz

Halo BALAIRUNG,

Saya menyarankan agar BALAIRUNG, kalau bisa, jangan *make* domain *<.org>*, soalnya tanggung jawab sosialnya sangat besar. Domain tersebut tidak bisa digunakan untuk mencari uang. Pakai saja domain *<.com>*. Kalau sudah pakai *<.com>* tapi di-*hack*,

kirim surat?

Ruang KONTAK disediakan untuk menampung segala permasalahan pembaca, terutama yang berkaitan dengan dunia kemahasiswaan dan masyarakat. Mekanismenya? Semudah anda mengirimkannya ke redaksi kami: **Bulaksumur B-21, Yogyakarta 55281** atau melalui e-mail ke **balairung.ugm@eudoramail.com**. Redaksi berhak melakukan penyuntingan terhadap surat yang masuk, dan pastikan anda mencantumkan salinan identitas diri!

transfer saja domainnya pakai *hosting apache*. Transfernya di <*www.techscape.co.id*>. Mengenai triknya, baca saja buku yang kemarin kita berikan.

Oke, semoga sukses *deh*.

R. Ustadiyanto
marketbiz@postmark.net

Program MM di Jakarta

Saya pernah dapat informasi bahwa UGM akan membuka Program MM Kelas Jakarta. Apakah informasi tersebut benar? Mohon penjelasannya. Atau, adakah rencana ke arah itu?

Terima kasih atas informasinya.

Sutrisno
sutrisno@m01.garuda-indonesia.com

---Program MM UGM memang telah membuka Kelas Jakarta sejak beberapa tahun lalu. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa klik di <www.mm.ugm.ac.id>. *Atau menghubungi lewat surat ke bagian admisi Jln. Teknika Utara Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 511035, 515536, 562222 Faks. (0274) 564388,* e-mail: *master@mm.ugm.ac.id.*

Menyoal Tarif Telepon

Berkaitan dengan rencana kenaikan tarif telekomunikasi, ada beberapa hal yang harus kita cermati. Alasan kenaikan tarif, seperti disampikan pemerintah dan pihak Telkom, adalah untuk investasi infrastruktur. Namun, saya melihat ada beberapa hal yang terasa sangat janggal.

Pertama, dalam bisnis, beban investasi dibebankan pada tarif setelah invesatasi itu dilakukan. Sedangkan di Indonesia, tarif (dalam hal ini telepon) dinaikan sebelum investasi dilakukan.

Kedua, jika benar tarif ini untuk investasi, sampai kapan investasi ini dilakukan, dan sampai kapan tarif akan terus naik? Sebab, logikanya, jika investasi telah selesai dan telah ditutup tarif, perusahaan selanjutnya harus melakukan efisiensi untuk menurunkan tarif. Kemudian, karena adanya faktor inflasi yang tiap tahun berubah, perhitungan kenaikan tarif telepon

KLIKunik!

Tepatnya menakutkan, bukan unik. Tepatnya lagi, ini juga bukan acara usung si mati, melainkan pertunjukan unik jathilan di Imogiri. Oleh-oleh fotografer kita, Ika R. Hilal, dari Imogiri.

(setotal 54%) juga perlu ada revisi, sebab angka itu dihitung berdasar data tahun lalu.

Ketiga, ada riset (kalau tidak salah dari MIT) yang menyatakan bahwa Indonesia, saat ini, sudah tidak layak lagi untuk investasi baru bidang telekomunikasi. Alasannya, kemampuan ekonomi masyarakat dan optimasi infrastruktur yang ada sudah tidak mendukung. Tapi kenapa pemerintah *kok* tetap nekat investasi?

Keempat, kemampuan ekonomi dan kebutuhan telekomunikasi antartempat memiliki perbedaan. Untuk itu, perlu dikaji model penarifan yang sesuai.

Kemudian, isu ke depan untuk masalah tarif adakah mengenai *flat tariffing* dan *IP-based tariffing*. Seperti kita ketahui, elemen dalam tarif telepon kita ada yang *flat* (abonemen) dan yang variabel (pulsa, *airtime*, dan layanan tambahan). Ide *flat* tarif ini justru disosialisasikan oleh pelaku telekomunikasi selular. Misalnya, adanya *fixed-cellular* untuk perumahan, ataupun *mobile-cellular* di daerah KTI. *IP-based tariff* berkaitan dengan perkembangan TCP/IP yang merasuki berbagai lapisan teknologi. Perhitunganya bukan lagi berdasar lamanya waktu, tetapi berdasar transaksi, berdasar besarnya data yang dialirkan. Misalkan, jika Warnet mengaplikasikan *billing* dengan tipe ini, maka orang yang ber-MIRC dengan orang yang *download* untuk waktu yang sama akan mendapat charge yang berbeda.

Odi Dasa Fitrianto
Mantan Sekum Pokja KTI-I (Reformasi Telekomunikasi dan Informasi Indonesia)
STT Telkom
odidasa@xxxxxxxx.com

Tolong dong!

Saya adalah anggota UIKPM Universitas Andalas. Saya sedang mencari info tentang Program S-1 Ekstensi Jurusan Teknik Elektro UGM. Mohon bantuannya. Terima kasih.

Mira Usri
namira1980@yahoo.com

---Anda bisa menghubungi Bagian Akademik Teknik Elektro UGM, Jln. Grafika No. 2 Yogyakarta 55281, atau silahkan klik di <www.te.ugm.ac.id>.

Kumpulan Cerpen Pilihan BALAIRUNG

Saya dari komuitas Kliping Sastra dan Kebudayaan Banyuwangi ingin mendapatkan secara tetap Majalah Balairung. Bagaimana caranya berlangganan? Pasalnya, saya sempat menghadiri Kongres Cerpen Indonesia II di Negara, Bali. Di sana ada peserta yang membawa BALAIRUNG edisi [illegible] sekali (*par* [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible]

saja tidak sehat. Kami merasa kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan perangkat desa. Yang memprihatinkan, kepala desa kami, sejak diangkat tiga tahun lalu, belum pernah melakukan kunjungan, khususnya ke dusun saya. Saya sendiri, selama ini sekalipun belum pernah bertatap muka dengannya.

Kami telah berusaha memecahkan masalah ini. Dua tahun lalu, dari hasil musyawarah empat dusun (yaitu Dusun Banjaran, Trowono A dan B, serta Dusun Namberan), kita menyepakati untuk segera meminta pemakaran menjadi satu desa. Seluruh warga desa telah memberikan tanda tangannya, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak yang berwenang.

Wilayah kami sebenarnya cukup potensial untuk mandiri. Sentra ekonomi terbesar di Gunung Kidul bagian selatan, yaitu pasar Trowono, ada di wilayah kami. Pasar itu menjadi pasar induk bagi empat kecamatan di wilayah selatan. Wilayah kami ada sentra ekonomi terbesar khususnya di wilayah Gunung Kidul Bagian selatan.

Kami berharap, dengan dimuatnya surat ini, pihak pemerintah segera merespon aspirasi warga kami. Kami juga meminta bantuan saran dan dukungan dari berbagai pihak untuk memberi solusi atas permasalahan yang sedang kami hadapi.

Atas dukungan dan masukannya, kami ucapkan terima kasih.

Jazim Yulianto
Ketua Karang Taruna Dusun Banjaran, Desa Karang Asem, Kec. Paliyan, Gunung Kidul, Yogyakarta
jazimyk81@Yahoo.com

Mau Menulis di Jurnal

Terima kasih atas informasi ISSN (*International Series Serial Number—Red.*)-nya. Informasi itu sangat membantu saya. O ya, ngomong-ngomong saya bisa *nulis* di Jurnal BALAIRUNG *nggak*? Atau, itu hanya untuk mahasiswa UGM saja? Soalnya saya tertarik untuk ikutan *nimbrung* menulis.

Selain itu, saya juga tertarik untuk berlangganan BALAIRUNG. Kalau boleh, bisa *nggak* saya dikirimi beberapa edisi lama sebagai contoh/perkenalan. Terima kasih atas jawabannya. Salam buat teman-teman di Jogja.

Ngurah Suryawan
Jln. H.O.S. Cokroaminoto No. 168
Ubung
Denpasar, Bali 80116
ngurah_suryawan@yahoo.com

BALAIRUNG Klasik

Dari manakah kuasa Eropa bermula? Orang mengira dari kegairahan yang meletup-letup setelah pembekapan khazanah ilmu pengetahuan oleh doktrin gereja pada era kegelapan (*dark age*). Lantas dari manakah nafsu untuk menjelajah sains itu muncul? Apakah langsung begitu adanya—seperti katak yang lahir dari kolam—sebagaimana diimani Aristoteles? Tentu saja tidak.

Muasal pencerahan Eropa, tak sekadar lahir dari hiruk-pikuk pertanyaan Immanuel Kant, "*Was heiss aufklarung?*", tahun 1784 di Berlin. Atau, dari kegetiran hidup Galileo yang diinkuisisi dan dikafirkan oleh gereja. Tentunya, Copernicus tak dengan sendirinya mencetuskan paradigma *helio sentris*-nya dari langit kosong. Rene Descartes tak bisa tiba-tiba mencetuskan postulat *cogito ergo sum*-nya tanpa sebab.

Para penggagas pencerahan itu mesti berterima kasih kepada rahib-rahib di biara ordo Santo Benedictus—yang penuh dengan labirin perpustakaan. Hampir seluruh hidup mereka diabdikan untuk menyalin naskah-naskah kuno menjadi buku. Para rahib ini mentranskrip khazanah peradaban Islam, Persia, Yunani, serta belahan dunia lain, lantas menerjemahkan dalam bahasa ibunya. Tugas utama mereka adalah mencari naskah dan mentransfer ilmu ke tradisi Eropa.

Mereka inilah yang mengembara ke Negeri Timur Jauh dan menyelamatkan warisan pengetahuan itu. Kelak, transkrip naskah—yang telah menjadi buku—itulah yang ditelan oleh filosof dan ilmuwan Eropa masa pencerahan untuk menandai suatu era: Modernitas Eropa!

Tulisan para rahib itu, bersamaan dengan ditemukannya risalah guttenberg, melatari dan memberi fondasi gagasan besar tentang zaman modern: ilmu pengetahuan, nasionalisme, rasionalisme, sekularisme, dan segenap turunannya. Bagaimana mereka—kaum kaukasoid itu—mengembangkan ide dan menyebarluaskan kesadaran untuk meninggalkan masa lalu tanpa surat wasiat? Ben Anderson mengungkapkan, peradaban modern terbangun melalui kapitalisme cetak.

kalau ada yang bilang, kami paling tahu soal mahasiswa

jangan langsung percaya.

DESAINCINTA@YAHOO.COM

ILUSTRASI DIKERJAKAN OLEH GUN UNTUK MAJALAH BALAIRUNG

Laut

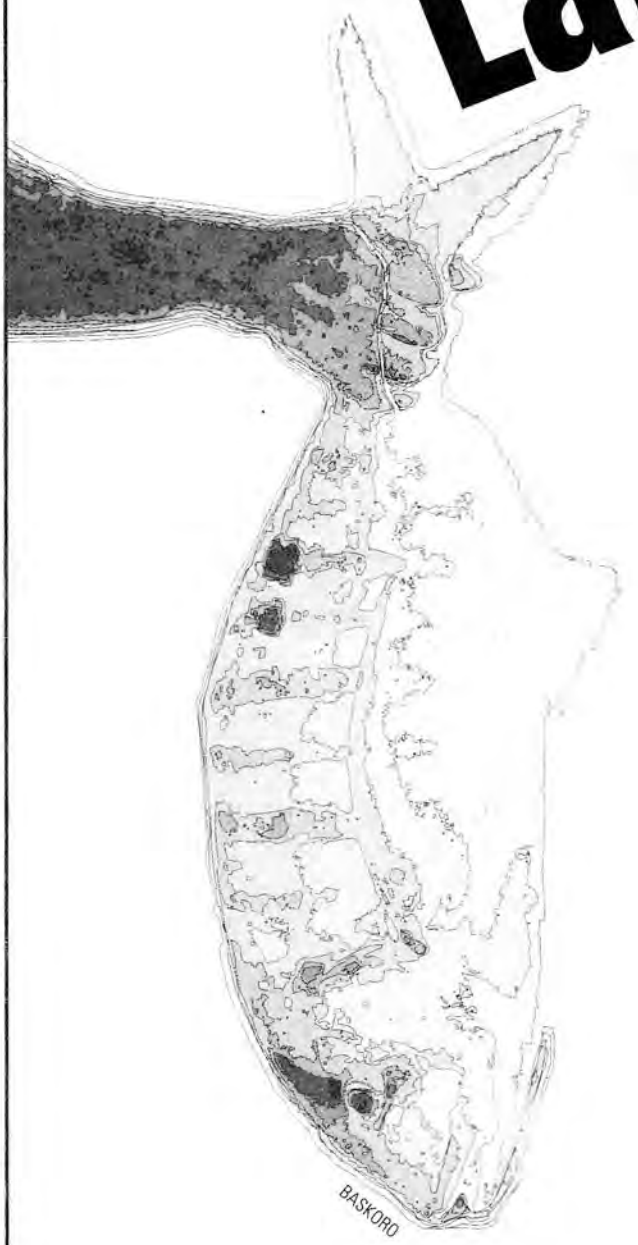

Yesaya, dalam surat yang ditulisnya untuk kaum Israel, menggambarkan laut yang bergelombang, selalu berganti, tak pernah damai, merupakan gambaran hati manusia yang terdalam. Hati yang tidak pernah tenang, selalu berambisi, penuh kompetisi, dan persaingan.

Kawasan Teluk yang terletak di zona subtropik, yang digambarkan Yesaya, adalah pusat perdagangan abad 14, saat di mana Eropa diliputi "abad kegelapan". Sebelum dunia didera gelombang pencerahan, rasionalisme, dan modernisme, dunia merupakan kapal ekonomi yang dihidupi oleh peradaban-peradaban laut. Tentu saja bukan semata peradaban nelayan, tapi juga perdagangan laut dan sirkulasi ekonomi bahari.

Peradaban-peradaban Timur Tengah, India, Yunani, Romawi, juga Nusantara telah menciptakan barisan sejarah tak terlupakan: kapal-kapal dagang, senjata, kompas, teknik navigasi, kedokteran, geografi, dan bahasa.

Kapitalisme yang mulia, berdarah-darah tapi bejat, itupun tak lepas dari perkembangan kebudayaan *marin* ini. Ia dibesarkan, disusui, dikembangbiakkan oleh penjelajahan-penjelajahan samudera, penemuan kompas, pewatasan-pewatasan wilayah perairan, dan perkembangan teknologi perkapalan. Membiaknya gilda-gilda yang merupakan embrio unit-unit ekonomi modern, tak lepas dari peradaban Venezia, Milan, Manchester, Marseille yang notabene terletak di pantai atau bersandar pada ekonomi kelautan.

Bagi bangsa Indonesia sendiri, laut bukan hanya sebuah mitos. Ia adalah darah dan sumsum yang menghidupi catatan-catatan perjalanan sejarah yang cukup panjang. Pada awalnya, ia memang semata basis ekonomi perikanan. Sejarah yang berputar dan seting geografis yang mendukung, membuat Indonesia menjadi raja lautan, sebuah kombinasi eksponensial dari nelayan, pedagang, teknisi, navigator, propagandis, dan laksamana. Pramoedya Ananta Toer dalam *Arus Balik* (Hasta Mitra,1995) menggambarkan bahwa peradaban laut telah menciptakan kebalikan sejarah. Ia menulis,

Dahulu di zaman kejayaan Majapahit, arus bergerak dari selatan ke utara, dari Nusantara ke Atas Angin. Majapahit adalah kerajaan laut terbesar di antara bangsa-bangsa beradab di muka bumi ini. Kapal-kapalnya, muatan-muatannya, manusianya, amal dan perbuatannya, cita-citanya—semua, itulah arus selatan ke utara. Segalanya datang dari selatan. Kapal besar hanya dibikin oleh kerajaan besar. Kapal kecil dan kerajaan kecil menyebabkan arus tidak bergerak ke utara, sebaliknya, dari utara sekarang ke selatan. Karena Atas Angin lebih unggul, membawa segala-segalanya ke Jawa, termasuk penghancuran, penindasan, dan penipuan. (*Arus Balik*, hlm. 738)

Laut, bagi bangsa-bangsa Nusantara seperti Bugis, Melayu, Aceh, bukan saja tempat mencari kehidupan, dialah puncak peradaban yang pernah diukir bangsa ini. Kejayaan laut "bangsa" Indonesia merupakan kebalikan dari apa yang tak mungkin terjadi sekarang, yakni penguasaan negara-negara selatan yang disebut negara dunia ketiga itu oleh negara-negara pertama, alias Utara.

Tapi jelas ini romantis. *All that solid has melt into the air.* Sejarah itu telah berlalu. Laut itu hanya ada dalam puisi dan kisah-kisah lagu melankolis-sentimental.

Yang kini nyata, berdasarkan data FAO, produk perikanan laut Indonesia mencapai 3,698 juta ton pada tahun 1998. Lima kali dari total produk itu tercuri oleh kapal-kapal berbendera asing. Belum terhitung sumber tambang lepas pantai yang dirampas begitu saja oleh TNC-TNC (Trans-National Corporation). Isu kelautan juga tambah seksi saat pencemaran lingkungan akibat industri, makin parah. Kerusakan ekosistem laut akibat racun perkapalan, limbah industri, dan tumpahan minyak menjadikan kerugian kita semakin besar.

Tetapi satu hal yang paling penting, fakta bahwa nelayan dan orang-orang yang hidup dari sektor kelautan menjadi orang-orang yang paling miskin, paling marjinal, paling terpinggirkan dalam setiap lini kehidupan. Selama 57 tahun kita belajar hidup berbangsa bernegara, kita termasuk negara yang tidak pernah memperhitungkan keberadaan mereka di antara kita.

Hendak menyalahkan siapa? Kita telah bergeser ke darat. Bahkan bahasa yang sedang digunakan untuk mendikotomikan peradaban laut dan darat barangkali juga adalah bahasa darat. Kita pun telah kehilangan bahasa laut, jauh ke setiap centimeter dari tubuh kita. Dan celakalah bangsa yang telah melupakan mimesisnya sendiri.

Tak perlu menyalahkan siapa-siapa. Karena kita telah cukup memiliki setan-setan kesalahan itu: pemerintah Orde Baru, Sultan Trenggono, Mataram, birokrasi, sistem kapitalisme, dll. Yang perlu diingat, kita masih punya *autonomious history*, catatan yang hilang di antara serak buku sejarah kita yang morat-marit. Tak ada kemampuan cukup untuk melaporkan berapa kekayaan laut kita, atau berapa yang telah menghilang, atau bagaimana prospeknya ke depan. Lebih-lebih, sebuah tawaran konsep pemberdayaan masyarakat pinggir laut.

Mari bersama membayangkan, kita masih memiliki harga diri selain menjadi pengemis yang dengan mulia kita sebut *good boy* itu. Laut, mungkin bisa digunakan untuk setidaknya mencicil utang—yang tak sekadar nominal uang semata—kita yang tidak terbayangkan.

Satu hal yang lebih jelas dan paling penting, kita mesti menjadikan laut sebagai bagian dari diri kita. Manusia-manusia yang berkehidupan dari dunia maritim yang mesti kita ajak memberdayakan dirinya sendiri, menjadikan kita dan mereka sebagai orang-orang merdeka.

Ya, menurut firman Tuhan lewat Nuh, kita ditakdirkan untuk menguasai kehidupan air. Dan kita memang menguasai bahasanya, geografinya, lagu-lagunya, setiap desah dari deru gelombangnya, setiap senja dari catatan sejarahnya. Tapi, kita tak akan pernah bisa menyelesaikan setiap tetes dari proses meluasnya, setiap detik dari hidup dan matinya.

Atau bahkan, seperti kata Pablo Neruda, kita melihat dan membiarkannya benar-benar mati, tapi kita tak pernah bisa menguburnya.

Veronika Kusuma

Menengok Tradisi Pesisir

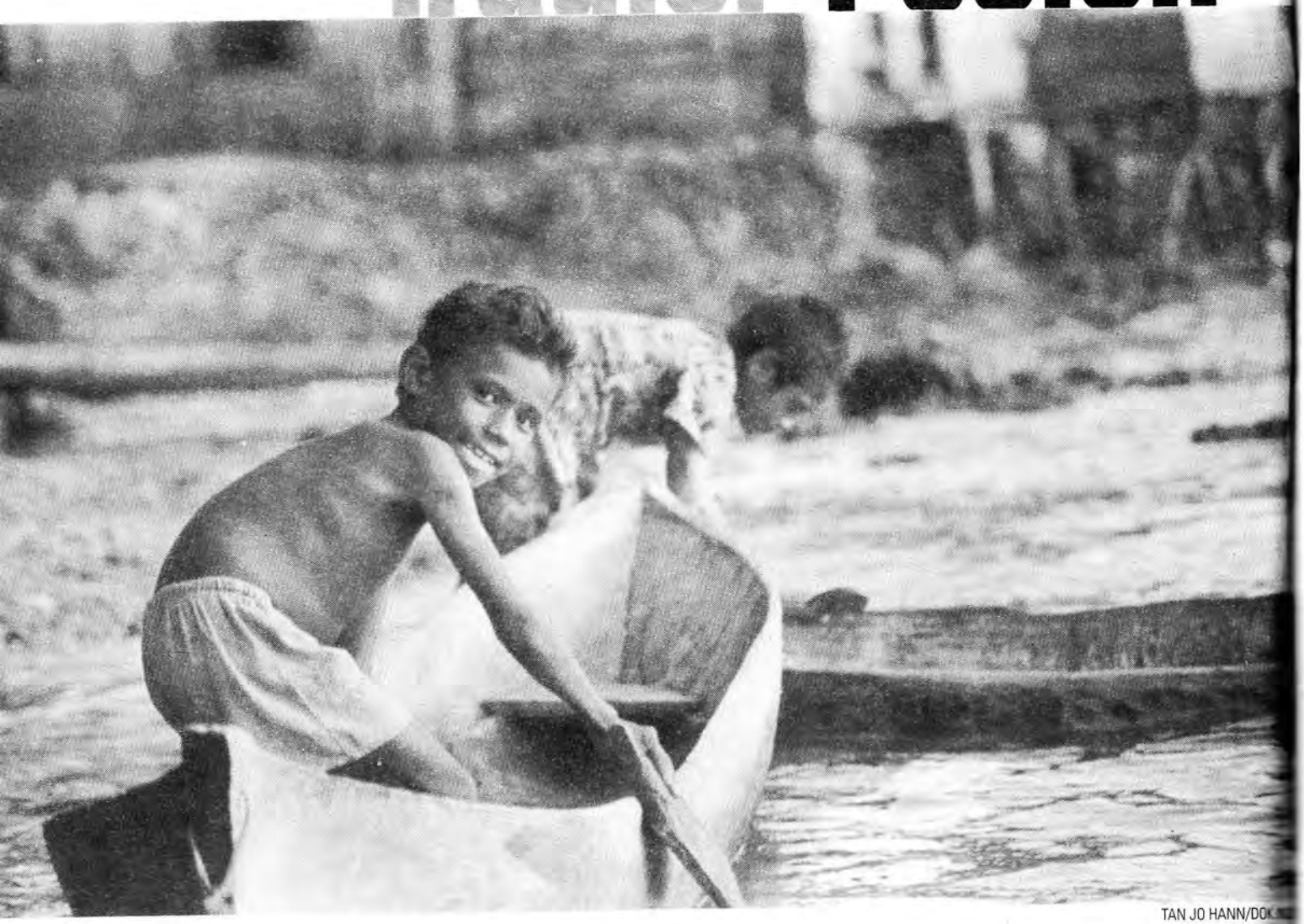

TAN JO HANN/DOK.

Laut, dalam kajian sejarah, ternyata bukan sekadar fenomena geografi semata, melainkan juga sebuah entitas kebudayaan yang mandiri. Sayangnya, kebanggan terhadap tradisi lokal makin menjadi ruang yang menyempit, dan laut pun lalai dikaji. Padahal, tradisi ini bisa dijadikan sumber inspirasi penataan bangsa.

Setelah Indonesia tersungkur pada jurang krisis yang tak terukur dasarnya, hampir semua elemen bangsa memimpikan tentang sebuah "Indonesia" yang "Baru". Ide-ide demokrasi, keterbukaan, dan pluralisme pun muncul berjejal-jejal. Sayangnya, ruang-ruang kebebasan yang kini lebih melebar ini tak banyak dimunculkan gagasan-gagasan korektif. Kita kadung menelan dan kenyang dengan kemapanan yang terbangun. Pembenahan yang sedang kita lakukan, jika layak disebut demikian, tak menyisihkan banyak ruang bagi alternatif yang selama ini diabaikan.

Sebagai negara agraris, sistem budaya yang jamak dianut selama ini cenderung memunculkan kultur feodal, baik dalam sistem politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Kultur "pedalaman" inilah yang berhasil diadopsi dan dideskripsikan secara sempurna oleh Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaannya.

Cap bahwa kultur agraris feodalistik bukan sekadar tuduhan tak berdasar. Hampir semua sosiolog dan sejarawan menuliskan laporan dan hasil kajian yang sama mengenai kultur masyarakat petani. "Seorang sejarawan bahkan pernah menulis, masyarakat petani di manapun di dunia memang tak pernah bisa demokratis," ujar Gerry van Klinken, direktur ACICIS (Australian Consortium for In Country Indonesia Studies). Itu, tambahnya, merupakan fenomena umum, khususnya terjadi di negara-negara berkembang.

Sikap-sikap feodal—meski tak lagi mengacu pada hak milik tanah, sebagaimana dimaksudkan Marx atau Bloch—tetap bertahan dan muncul dalam bentuk berbeda. Umar Kayam menyebut pelembagaan baru itu sebagai "*Beambten-Staat*", yang diterjemahkan Franz Magnis Suseno sebagai "Negara Pegawai". Sebagai ganti faktor tanah, pada seting baru tersebut, digunakan alat kekuasaan.

Paparan yang lebih simpel diungkapkan sosiolog Ignas Kleden. "Negara memanfaatkan birokrasi untuk kepentingan politiknya. Jadi, ada politisasi birokrasi," kata Ignas. Faktor inilah yang dianggap Ignas sebagai faktor penting kukuhnya feodalisme. Ignas juga menyepakati, tipikal kultur agraris memang cenderung berealisasi pada pemuliaan kekuasaan dan status sosial. Sementara, soal tanggung jawab tak ditekankan. Dan ini terus berlanjut hingga sekarang.

Bertolak belakang dengan kultur agraris yang feodalistik, kebudayaan maritim-pesisir lebih meluangkan napas keterbukaan, kebebasan dan demokratisasi. Dia menjadi tempat bertemunya berbagai bangsa, ideologi, tradisi, kebudayaan, dan bermacam identitas. Hal ini dilontarkan oleh Dr. Muchlis PaEni, Kepala Badan Arsip Nasional. Ia mengatakan, posisi geografis berpengaruh langsung pada kultur masyarakat pesisir. Interaksinya yang elastis dengan dunia luar menyebabkan serapan dan referensi budaya masyarakat pesisir lebih kaya dan dinamis. Sedangkan pedalaman memang disekat oleh geografi yang membuatnya lebih tertutup.

Antagonisme kultur feodal petani dengan kultur egaliter pesisir disebut sejarawan Perancis, Denys Lombard, sebagai titik penting pada kajian sejarah Indonesia. Lombard, dalam *Nusa Jawa: Silang Budaya* (2000), bahkan menyebut bahwa antagonisme itu merupakan salah satu kunci utama sejarah kejawaan ataupun keindonesiaan. Pasang surut keduanya harus dibaca sebagai faktor yang bukan hanya mempengaruhi entitas sosial besar dan tua seperti petani dan nelayan, melainkan juga pasang surut bangsa ini.

Sejak zaman kuno, kepulauan Nusantara telah menjadi tempat persilangan jaringan lalu-lintas laut yang menghubungkan benua Timur dengan benua Barat. Gugusan kepulauan menjadi titik temu berbagai gagasan dan kebudayaan. Berkembangnya pelayaran samudera pada masa itu terjadi karena teknologi navigasi dan ilmu perbintangan mengalami perkembangan pesat.

Navigasi yang berkembang pada masa awal pelayaran adalah navigasi yang disebut Sartono Kartodirdjo sebagai navigasi "menyusur pantai". Dalam pelayaran, tempat-tempat transit pada jarak tertentu sangat diperlukan untuk singgah, menumpuk barang, dan mengganti perbekalan. Semenanjung Malaya, Selat Malaka, pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, Selat Sunda, dan perairan timur Nusantara adalah tempat transit yang ramai.

Adanya pola angin muson di Indonesia, membuat pola pelayaran antara Timur dan Barat jadi teratur, berpola tetap dan memapankan jalur-jalur pelayaran di Nusantara. Hasil-hasil bumi

DOK. HELLO BALI MAGAZINE

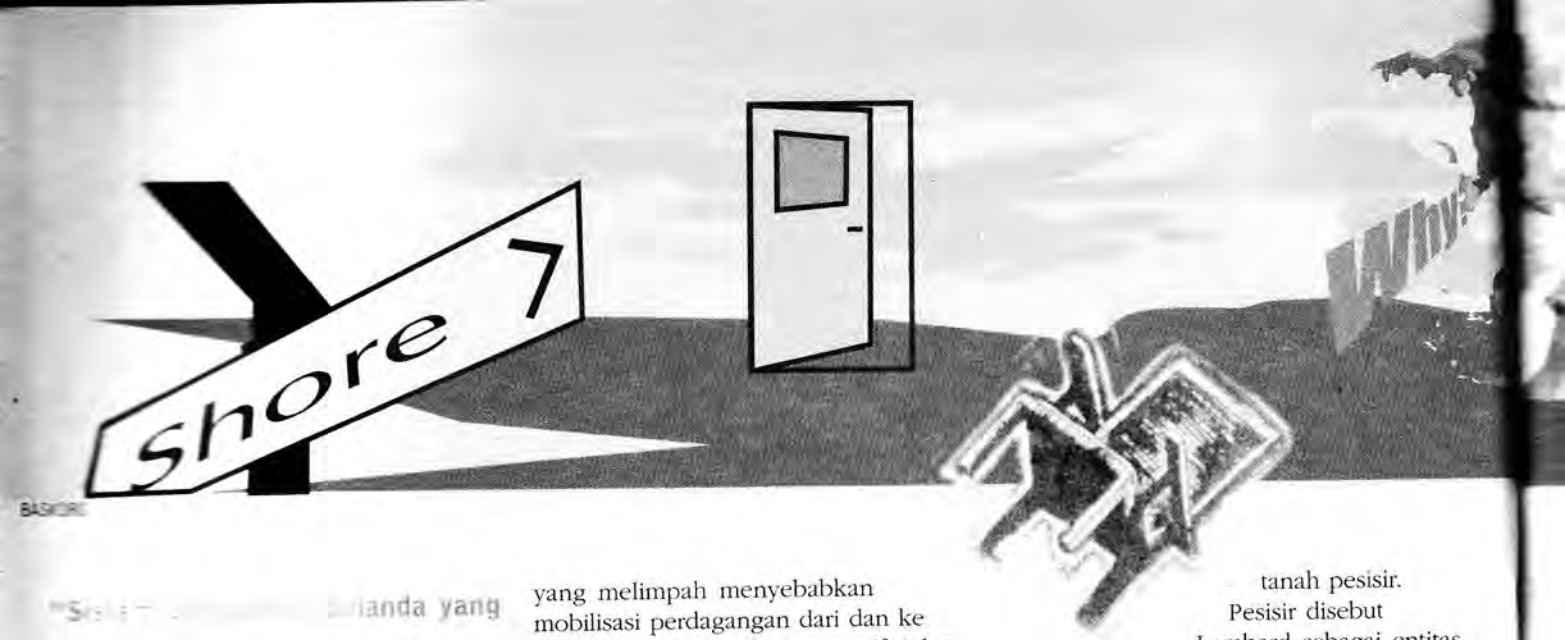

BASORI

"Sistem ... Belanda yang mengatur pola penguasaan tak langsung lebih memungkinkan terjadi ... dalam bidang pertanian. Belanda tidak perlu berjuang mati-matian untuk mengatur rakyat miskin, sebab para bupati tetap memerintah. Hanya saja, memerintahnya atas nama dan untuk kepentingan pemerintah Belanda," tegas Ignas.

yang melimpah menyebabkan mobilisasi perdagangan dari dan ke wilayah Nusantara begitu massif. Jalur perdagangan pada waktu itu, seperti yang berpangkal mulai Teluk Parsi, Gujarat, Malabar, Koromandel, Benggala, sampai ke semenanjung Malaya, memang menuju atau melewati Nusantara.

Munculnya kota-kota pelabuhan juga membawa implikasi pada banyak hal. Basis-basis ekonomi dan politik bermunculan di sepanjang pesisir Nusantara. Pusat-pusat kekuasaan yang berpusat di sekitar pesisir pun mulai bermunculan. Di sinilah perdebatan menarik seputar kultur masyarakat pesisir mencuat.

Persinggungannya dengan banyak kultur, seperti disebut Muchlis, dan keadaan alamnya, memang mendukung kultur egaliter yang berkembang di masyarakat pesisir. Daerah pesisir, dan juga kota-kota pelabuhan, pendek kata, telah menjadi kosmopolit akibat persilangan pelbagai pengaruh. Lombard mencatat ada ruang-ruang bagi kebebasan individual dan hak milik pribadi yang amat lapang dalam masyarakat pantai.

Jauh sebelum Lombard, Sartono, dalam *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500—1900* (1988), juga menyebut bahwa laut dan pesisir adalah tempat bertemunya berbagai "simbol keterbukaan". Faktor-faktor seperti agama, politik, dan perdagangan, mempengaruhi citra egaliter kebudayaan tepi laut.

Saking egaliter dan signifikannya peran pesisir pada waktu itu, Lombard sampai membagi kelompok sosial budaya besar di pulau Jawa menjadi tiga entitas. *Pertama* adalah tanah Pasundan, *kedua* tanah Jawa yang sebenarnya (Jateng, DIY, Jatim) dan yang *ketiga* tanah pesisir. Pesisir disebut Lombard sebagai entitas kebudayaan sendiri yang sama sekali "otonom" dari daratan.

Eksistensi budaya pesisir di Nusantara juga bisa ditengarai dari sumber-sumber tertulis yang ditinggalkan. Setelah prasasti tahun 1486, tatanan agraris kerajaan pedalaman sebenarnya mengalami keremangan. Sumber-sumber Barat lebih banyak menyebut pesisir dan perniagaan dibanding dengan pertanian. Dan itu terus berlangsung sampai abad ke-18.

Faktor-faktor lain yang turut membentuk pesisir adalah interrelasi antara agama, politik, dan—terutama—perdagangan. Ketiga faktor ini saling berkait dengan riwayat kebudayaan yang kelak lahir. Dalam analisis Marxian, menurut Arief Budiman, perdagangan memang merupakan basis material yang potensial memunculkan demokratisasi, keterbukaan, dan segenap variannya. Arief, yang kini guru besar ekonomi-politik di Universitas Melbourne, Australia, dalam diskusi dengan BALAIRUNG menyebut bahwa perdagangan di Indonesia memunculkan borjuasi pesisir. Adanya kapitalisme dalam dunia perdagangan ini potensial mendorong munculnya demokratisasi. Sebab, tak ada perdagangan yang berjalan sehat dalam sistem yang otoriter.

Meskipun kerajaan-kerajaan pedalaman juga melakukan perdagangan, pola perdagangan dalam kerajaan maritim sangat berbeda. Dalam buku *Rakyat dan Negara* (1992), Onghokham menulis, bila kesultanan pesisir hanya memungut bea cukai dan melindungi pedagang-pedagang perorangan, maka perdagangan negara

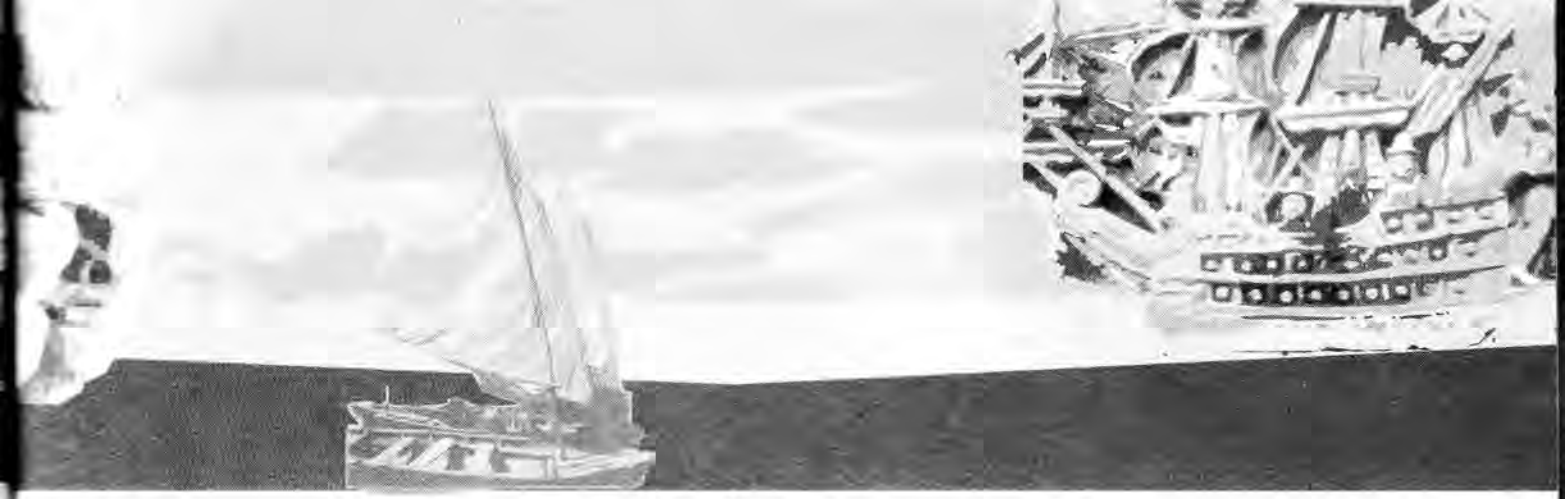

agraris banyak mendapatkan tekanan dari kaum birokrat. Selain harus mengisi kas negara, para pedagang juga harus mengisi kocek para pejabat. Tekanan inilah yang menyebabkan keterbelakangan kalangan usaha di negara-negara agraris.

Kerajaan Aceh menjadi deskripsi yang menarik untuk menggambarkan perbedaan tipikal itu. Ong menyebut bahwa para penguasa di Aceh tidak menarik pajak ataupun berhak atas tenaga kerja rakyat setempat. Ikatan-ikatan feodal dengan rakyat hampir tidak ada, kecuali dalam peperangan. Pada kasus Aceh, para pedagang merupakan entitas yang independen dan dapat menekan sultan jika ia membuat aturan-aturan atau perjanjian yang merugikan mereka. Perjanjian-perjanjian dengan pihak asing, seperti VOC dan lain-lain, bisa saja dihapuskan atas tekanan-tekanan *hulubalang* (orang kaya aceh) kepada sultan. Hal ini, sebut Ong, berbeda sekali dengan di Mataram yang berbasis pertanian. Posisi rakyat dependen dan pasif terhadap negara.

Hal yang menonjol dari negara-negara maritim dibanding agraris adalah semangat Pan-Nusantaranya (semangat untuk mempersatukan nusantara) yang begitu gigih. Semangat ini merupakan sebuah pola pandang yang maju. Sebab, bagi sebuah negara kepulauan, menurut Onghokham dalam pengantar buku *Pusat, Simbol, dan Hirarki Kekuasaan* (1989), kekuasaan umumnya cenderung *sentrifugal* atau terpecah belah. Imaji-imaji kesatuan itu adalah sebuah mimpi politik yang strategis bagi kondisi geografis seperti itu.

Dalam bukunya, *Sejarah Asia Tenggara*, D.G.E. Hall, Guru Besar Emiritus Universitas London, mencatat bahwa sebelum Majapahit muncul sebagai simbol imperium maritim terbesar dalam sejarah Nusantara, lama sebelumnya Kertanegara dari Singasari telah merintis penyatuan Indonesia lewat berbagai ekspedisi. Sejak 1275, Kertanegara telah menyusun rencana ekspansi untuk mempersatukan Nusantara. Hanya saja, sebut Hall, rencana Kertanegara itu lebih karena untuk berjaga-jaga menghadapi serangan Cina.

Untuk merealisasikan rencananya, Kertanegara tak melulu menggunakan cara-cara militer dan penaklukan. Bali dengan Sunda, misalnya, dirangkul Singasari lewat sebuah persekutuan menghadapi ancaman Cina. Banyak trik politik dalam ekspedisi pamalayu Kertanegara, dinilai Sartono sebagai politik luar negeri yang sebenarnya.

Sejak Singasari gencar melakukan ekspedisi, supremasi Singasari kemudian mampu mengukuhkan diri di bekas wilayah Sriwijaya di Sumatra. Sartono menyebut bahwa hal itu merupakan peletakan dasar-dasar hegemoni Majapahit. Dalam struktur kekuasaan hierarki piramidal, disintergrasi pusat kekuasaan yang memegang supremasi memang dapat mengalihkan supremasi kepada kekuasaan lain yang muncul kemudian.

Cita-cita Pan-Nusantara yang eksplisit, dan benar-benar paling berhasil, dicapai pada masa kekuasaan Majapahit di bawah Hayam Wuruk, dengan mahapatihnya Gajah Mada. Pada 1331, setelah memadamkan pemberontakan di Jawa Timur, di hadapan menteri-menteri istana Gajah Mada mengucapkan sumpahnya yang terkenal: *Sumpah Palapa*. Politik baru itu disahkan dengan pemindahan patung Aksobhya, simbol politik damai Kertanegara untuk Nusantara—dari tempat penguburannya di Candi Jawi, dan pendirian patung Raksasa Camunda. Sejak itu penyatuan Nusantara menjadi politik luar negeri yang terus digulirkan dan sukses.

Pengabaian terhadap potensi kebudayaan pesisir menurut Ignas Kleden terjadi sejak masuknya kolonialisme ke Nusantara. "Sistem penjajahan Belanda yang menganut pola penjajahan tak langsung lebih dimungkinkan terjadi dalam bidang pertanian. Belanda tidak perlu berjuang mati-matian untuk mengatur rakyat miskin, sebab para bupati tetap memerintah. Hanya saja, memerintahnya atas nama dan untuk kepentingan pemerintah Belanda," tegas Ignas.

Penelikungan kolonialisme secara nyata terhadap kebesaran peradaban maritim Nusantara bisa dilihat dengan nyata, misalnya dalam perjanjian Bongaya antara Raja Gowa, Hasanudin, dengan Belanda. Butir-butir perjanjian, yang lebih tepat disebut pemaksaan itu, benar-benar membungkam budaya pesisir. "Raja Gowa diminta untuk menyuruh penduduknya membangun rumah 10 mil dari pesisir," ungkap Muchlis PaEni. "Itu *'kan* upaya penjajah agar kita menjadi agraris!" tambahnya. Selain itu, masih menurut Muchlis, rakyat Makassar juga dipaksa untuk tidak membuat kapal yang lebih dari 30 ton. "Padahal, kapal perang kita itu dulu bobotnya 35 ton. Ini semakin mengarahkan rakyat hidup dengan pertanian?!" tandas Muchlis.

Melorotnya kebudayaan Nusantara sejak waktu itu juga disetujui Mochtar Pabotonggi sebagai akibat politik kotor Belanda. Lewat penetrasi ekonomi-politik yang mengeduk habis-habisan kekayaan dan menyalurkannya ke negeri Belanda, "Kehidupan kebudayaan kita pun merosot drastis."

tulis Mochtar. Kebudayaan hanya hidup di kantong-kantong istana lokal. Itupun, memang sengaja dipelihara oleh pemerintah kolonial demi kepentingan eksploitasinya (*Ulumul Qur'an,* No. 4, 1997).

Dari kantong yang masih diberi penghidupan pun, menurut Mochtar, telah terjadi "pembunuhan budaya" yang halus sekali. Ada dua distorsi yang diberlakukan. *Pertama,* yang tumbuh di situ hanyalah bidang kebudayaan artistik, bukan bidang kebudayaan yang produktif dan eksploratif yang berpotensi mentransformasikan cara-cara produksi dan melipatgandakan akumulasi modal. *Kedua,* bidang kebudayaan artistik itupun sifatnya sengaja mengasingkan diri dari kehidupan rakyat. "Ia menciptakan dan mengeraskan penjenjangan sosial serta aliensi rakyat banyak," ujar Mochtar.

Marjinalisasi kebudayaan dalam berbagai bidang itu, kemudian memasung kreatifitas kebudayaan leluhur selama ratusan tahun. Lahirnya pergerakan nasional, tulis Mochtar, itupun hanyalah pencerahan bagi segelintir kalangan pendahulu setelah dinamika perdagangan interinsular dan internasional dihentikan secara paksa. Munculnya kelas-kelas pedagang dan perniagaan lokal pun dibungkam. Begitupun integrasi antarkepulauan dan antarkerajaan.

Namun Mochtar juga mengkritik keras asumsi bahwa hanya kebudayaanlah yang menjadi terdakwa dalam hal ini. Antara sistem nilai dengan gejala sosial tidaklah berlaku determinasi satu arah. Terbelakangnya budaya kita merupakan akibat langsung dari praktek-praktek oleh dan pada bangsa kita sendiri, selain warisan praktek pemerintah dan negara kolonial.

Denys Lombard menekuri hal ini dengan paparan bahwa *pukulan pertama* yang telah menimpa dinamika "kapitalis" di pesisir tidak datang dari VOC, tapi justru dari Mataram. Teeuw, dalam pengantar *Nusa Jawa,* secara jelas juga mencatat, bahwa kembalinya kerajaan Mataram merupakan faktor utama melemahnya dinamika kapitalis di pesisir. Akhirnya, VOC menguasai perdagangan Jawa dengan dunia luar. Terbunuhnya dinamika kapitalis pesisir persis bersamaan dengan melemahnya budaya pesisir yang egaliter sekaligus tumbangnya kekuasaan-kekuasaan

Marjinalisasi kebudayaan dalam berbagai bidang itu, kemudian memasung kreativitas kebudayaan leluhur selama ratusan tahun.... Munculnya kelas-kelas pedagang dan perniagaan lokal pun dibungkam. Begitupun integrasi antarkepulauan dan antarkerajaan.

berbasis pesisir.

Seperti halnya dengan kekuasaan Cina, yang kekuatan maritimnya surut sejak akhir abad ke-15, setelah ekspedisi-ekspedisi yang dimulai oleh Zheng He dihentikan, dinamika maritim Nusantara—seabad kemudian—mula-mula terancam oleh surutnya kekuasaan Demak. Di Jawa, kehancuran Surabaya oleh tentara Sultan Agung tahun 1625 membawa tradisi pesisir runtuh. Meskipun, dalam konteks keindonesiaan secara umum, menurut Muchlis Paeni, kehancuran total kerajaan maritim terjadi sekitar 1669, ketika kerajaan Gowa di Indonesia Timur runtuh. "*Great traditions* kemaritiman kita hilang sudah," sesalnya.

Mengenai sebab kekalahan para pedagang, terutama oleh kaum kolonial, Sartono berpendapat ada sebab yang sama yang berlaku untuk seluruh pedagang Asia. Para pedagang Asia dapat dikalahkan karena dalam pengembangan kekuasan dan nafsu berkuasa, para pedagang Asia berbeda dengan para pedagang Eropa. Mereka tak pandai mengembangkan atau merambah kekuasaan secara lebih mendalam, sehingga mereka tertinggal oleh para pedagang Eropa pada abad ke-19.

Banyak laporan dan penelitian sejarah, termasuk yang ditulis oleh sejarawan Belanda sendiri, menyebutkan para pedagang di pantai utara Jawa sebenarnya bisa dikatakan lebih pandai daripada Belanda. "Hanya pedagang kita *'kan* pedagang betulan, mereka tak punya tentara, tak punya meriam," cetus Ignas. Sedangkan VOC, dipaparkan dengan jenaka oleh Ignas, membawa meriam dan dukungan serdadu bayaran. "Makanya kita kalah," ujarnya.

Sejalan dengan makin kuatnya penetrasi kolonialisme, ekspansi Mataram sedang giat-giatnya menghancurkan kota-kota pesisir yang menjadi musuhnya. Permusuhan Mataram dengan pesisir disebabkan karena keterbukaan masyarakat pesisir menjadi faktor yang mengurangi kekuatan sistem feodal. Selain itu, setelah runtuhnya kekuasaan Demak, sebagai kerajaan maritim terakhir, para penguasa pelabuhan tak lagi memiliki ikatan yang kuat dengan penguasa pusat. Kesempatan emas ini tak disia-siakan, dan mendorong ekspansi Mataram.

Mengenai hal ini, Sartono mengkritik proses sejarah itu sebagai sebuah strategi yang menjadi bumerang karena melumpuhkan perdagangan dan meniadakan sumberdaya ekonomi, sesuatu yang menjadi dasar struktur kekuasaan kerajaan sebelumnya (dan yang sezaman), seperti Sriwijaya, Majapahit, Malaka, Aceh, dan Makasar.

Meski menjadi kekuatan politik yang hegemonik di Jawa pasca-keruntuhan kerajaan maritim, Mataram tetap bukan merupakan kekuatan yang mengancam Belanda, terutama dalam hal perdagangan. Bahkan kehancuran pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur memberi peluang bagi VOC untuk mengembangkan pusat baru di pantai utara Jawa. Secara umum, tulis Sartono, politik Mataram terhadap pesisir memang memberi peluang bagi VOC menjadi makin kukuh.

Apalagi pada fase-fase berikutnya, saat Mataram menghadapi banyak pemberontakan daerah pesisir. Bahkan, menurut Lombard, pemberontakan daerah pesisir pada abad ke-17, hanya dapat diatasi setelah Belanda turun tangan. Impian Mataram menyatukan Jawa pun tinggal kenangan. Berbagai perjanjian dengan Belanda, pertikaian dalam dinasti keraton, menyebabkan Mataram terpecah-belah. Seluruh Jawa Barat, pantai utara, dan ujung timur Jawa dikuasai Kompeni. Mulai 1830, Lombard menulis bahwa Mataram telah menjadi format baru, meskipun tetap merupakan penerus tradisi besar Jawa. Begitu pula halnya dengan pesisir, telah diformat baru pula. Kondisi ini bertahan dengan wajah kolonial sampai abad ke-20.

Gejala pertama modernitas tidak datang bersama Portugis atau Belanda, atau secara umum Barat, tetapi sudah masuk jauh sebelumnya melalui para pedagang Islam. Penawaran visi universal yang dibawa Islam, seperti diuraikan Lombard dalam penutup karya monumentalnya, juga ide penyebaran gagasan tentang waktu yang linier dan tentang ruang geografis yang sebenarnya, merupakan gagasan modernisasi pertama yang masuk Nusantara. Jadi, dengan sendirinya, gagasan bahwa dunia Barat merupakan satu-satunya perintis "zaman modern" menjadi pupus.

Ingatan kita akan semua kemolekan sejarah itu mungkin telah lama lapuk atau karatan. Seperti halnya istilah Teeuw, imaji-imaji itu bisa saja hanya merupakan impian dalam angan yang tak pernah terjadi. Kita telah lama melupakan laut dan kadung mempercayai bahwa daratan adalah segalanya, pusat segala aktivitas dan sekian pentas budaya diperankan. Budaya yang diimani selama ini diyakini sebagai sesuatu yang *everything is well organized.*

Hanya saja kita harus ingat bahwa

TAN JO HANN/DOK.INSIST

kebudayaan tidak bersifat *complete in self*, melainkan selalu berada dalam keadaan terbuka (*opended*). Mochtar Pabottinggi menilai hanya kebudayaan yang mati saja yang *complete in self*. Kebudayaan selamanya ditandai oleh inkonsistensi, inkoherensi, serta sisi-sisi yang maknanya bagi daya kognisi kita masih dalam proses *menjadi*. Pada titik ini koreksi atas segala kealpaan selama ini menemui argumennya. Tinggal, ke arah mana koreksi itu akan ditarik.

Azyumardi Azra, dalam kolomnya di Gatra (No. 52/Th. VII/2001), menulis bahwa era kebebasan yang di alami Indonesia sekarang ini merupakan terbukanya "kotak pandora" yang menyimpan berbagai cacat sejarah (*historical deficiencies*) bangsa selama tiga dekade. Namun, bila dikaji ulang kembali riwayat kita, cacat itu bisa jadi tak hanya sependek hitungan tiga dekade. Ada ratusan tahun yang mengendapkan banyak cacat dan kemuakan.

Sejarah pada titik ini bukan hanya sekadar menawarkan kritik atas kebenaran masa lalu, atau pembenaran-pembenaran abstrak. Sejarah dapat juga menawarkan semacam visi dan perspektif baru tentang masa silam yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya di masa kini, dan harapannya untuk masa depan. Pada titik ini, penemuan (*invention*) dan penemuan kembali (*reinvention*) sejarah, tegas Azyumardi, merupakan keniscayaan bagi bangsa yang ingin menciptakan masa depan lebih baik. *Episteme*, jika meminjam istilah Foucoult, memang harus berdasar kontekstualitas kekinian. Artinya, konsep-konsep yang dibangun mesti mewadahi potret impian kontemporer, dan bukannya konstruk-konstruk *ageman* yang hendak dikoreksi. Pun halnya ketika hendak mengkoreksi jejak-jejak kelam masa lampau.

Pudjo Semedi, dosen antropologi UGM, mengingatkan bahwa perspektif kelautan yang ditawarkan mungkin saja hanya ekpresi kegagapan kultural. "Itu bisa juga merupakan indikasi kebingungan kita. Kok selama ini kita sepertinya cuma *ungkap-ungkep* dalam korupsi, kolusi, dan sebagainya. Kita kemudian ingin menjadi sesuatu yang lain. 'Kalau selama ini kita menjadi bangsa yang orientasinya ke daratan, maka mari sekarang berubah menjadi bangsa yang orientasinya kelautan'. Ini merupakan kebingungan sosial-kultural. Kita capek dengan diri kita yang ini dan kemudian mencoba mencari alternatif yang lain," jelasnya panjang lebar.

TAN JO HANN/DOK.INSIST

Kultur pesisir sendiri bukannya tanpa kritik. Ignas yang menawarkan pola kepemimpinan "Kapitan Perahu" juga membuka peluang bagi adanya kritik. Karena pada titik tertentu, kepemimpinan ala "kapitan perahu" bisa juga disebut otoriter. "Yang menjadi masalah adalah kita harus keluar dari *framework* feodalisme dan mencari alternatif lain. 'Kapiten Perahu' hanya salah satu alternatif. Kita harus mencari kemungkinan-kemungkinan baru yang tersedia pada tradisi kita," ujarnya. Pesisir dan agraris menurut Ignas lebih pada budaya. "Ini bukan kaitan geografis, ada sistem budaya yang lain. *Cultural system* keduanya berbeda, *political cultural*-nya berbeda."

Adanya antagonisme memang tak berarti harus saling meniadakan. Begitu pula dengan dikotomi agraris dan maritim. Kontestasi, meminjam istilah Ignas, merupakan suatu kewajaran dalam sebuah keterbukaan. Perdebatan, pergumulan ide, adalah aktivitas yang wajar dalam pencarian identitas kebangsaan yang kini banyak digugat. Hanya saja, kita semua tentunya sepakat bahwa membangun Indonesia Baru tidaklah melulu dengan frasa-frasa abstrak, idiom-idiom besar, dan resep-resep dari luar yang belum tentu manfaatnya. Kemandirian, dengan menghitung dan membaca potensi yang kita miliki, lebih aman dilakukan. Kebanggaan (*pride*) terhadap budaya sendiri bisa menjadi modal untuk beranjak maju dengan kepala tegak.

Proses *invention* dan *reinvention* memang mengandung idealisasi sejarah. Tapi dalam konteks keindonesiaan sekarang, kita mungkin sepakat dengan Azyumardi bahwa yang kita perlukan kini adalah *sense of togetherness* dan *sense of puspose* dalam kehidupan bernegara. Kita perlu perekat yang melekatkan segenap keberagaman dan heterogenitas. Sebuah tawaran untuk itu harus terus digulirkan. Dan laut, pernah menjadi media komunikasi yang efektif menghubungkan orang dengan orang dari berbagai latar belakang budaya.

Tarli
N.Budi Baskoro,
Mahfud Ikhwan, RirinTri Astuti

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Ujung tombak universitas untuk berkembang menjadi universitas yang unggul dan *international competitive* dengan Program Pascasarjana yang terkemuka.

Program Studi Kelompok Ilmu-ilmu Humaniora
1. Ilmu Sastra
2. Sejarah
3. Pengkajian Amerika
4. Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa
5. Ilmu Filsafat
6. Antropologi
7. Linguistik
8. Arkeologi

Program Studi Kelompok Ilmu-ilmu Matematika dan Pengetahuan Alam
1. Biologi
2. Ilmu Fisika
3. Geografi
4. Ilmu Farmasi
5. Ilmu Kimia
6. Penginderaan Jauh
7. Matematika *)
8. Ilmu Komputer

Program Studi Kelompok Ilmu-ilmu Pertanian
1. Agronomi
2. Ekonomi Pertanian
3. Fitopatologi
4. Ilmu Hama Tumbuhan
5. Ilmu Kehutanan
6. Ilmu dan Teknologi Pangan
7. Ilmu Tanah
8. Ilmu Peternakan
9. Mekanisasi Pertanian/Teknik Pertanian
10. Sain Veteriner
11. Teknologi Hasil Perkebunan
12. Magister Manajemen Agribisnis **)

Program Studi Kelompok Ilmu-ilmu Sosial
1. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*)
2. Ilmu Administrasi Negara
3. Ilmu Akuntansi *)
4. Ilmu Hukum
5. Ilmu Politik
6. Manajemen *)
7. Psikologi
8. Sosiologi
9. Magister Manajemen**)
10. Magister Administrasi Publik
11. Magister Ekonomika Pembangunan**)
12. Magister Hukum
13. Magister Kenotariatan

Program Studi Kelompok ilmu-ilmu Kesehatan
1. Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedis
2. Ilmu Kedokteran Gigi
3. Ilmu Kesehatan Kerja
4. Ilmu Kesehatan Masyarakat**)
5. Ilmu Kedokteran Klinik
6. Ilmu Kedokteran Tropis

Program Studi Kelompok Ilmu-ilmu Antar Bidang
1. Ilmu Lingkungan
2. Studi Kependudukan
3. Ketahanan Nasional
4. Bioteknologi
5. Ilmu Perbandingan Agama

Program Studi Kelompok Ilmu-ilmu Teknik
1. Teknik Kimia*)
2. Teknik Sipil *)
3. Teknik Arsitektur
4. Magister Perencanaan Kota dan Daerah**)
5. Teknik Elektro*)
6. Teknik Mesin*)
7. Teknik Geologi*)
8. Magister Sistem dan Teknik Transportasi**)

Keterangan
- *) Mengadakan test tertulis dengan pembiayaan di luar biaya pendaftaran, dan diatur oleh Program Studi yang bersangkutan.
- **) Program Studi dengan tambahan Magister menitikberatkan pengembangan kemampuan profesional dengan pembiayaan khusus dan lamaran langsung ditujukan ke Program Studi dengan persyaratan akademis dan administrasi yang berbeda.
- ***) Khusus Program Studi ini IPK minimal 3,00 dan skor/nilai TOEFL minimal 475

Waktu Pendaftaran:
- Desember sampai April
- Beberapa Program Studi S2 menerima mahasiswa baru Semester II
- Program S3 pendaftaran sepanjang tahun

Keterangan lebih lanjut hubungi:
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Jl. Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta Telp. (0274) 544975, 564239, Fax. (0274) 564239
e-mail: ppsugm@sat.net.id *homepage:* http://pps.ugm.ac.id

Sayup-sayup terdengar, laut kembali dibicarakan. Ingatan pun ditajamkan, sejarah dikais, untuk kemudian dibandingkan. Ketika orang mulai sadar, Indonesia telah lama terkungkung oleh tradisi feodalistis dan konsep kekuasaan yang konsentris. Mampukah kesadaran tentang laut jadi alternatif?

MENGGUYUR PEDALAMAN, Menggusur Budaya Feodal

"Tahun 530-an, Pangeran Makassar membeli meriam pantai untuk diletakkan di atas benteng Kerajaan Goa. Semua benteng pantai menghadap ke laut. Dari 12 benteng yang dimiliki oleh Kerajaan Makassar, salah satunya, yang bernama *sobaoku*, diisi 225 meriam yang dibeli dari Turki. Semua benteng pantai menghadap ke laut."

Apa yang dituturkan Muchlis PaEni, pakar sejarah maritim yang juga Kepala Arsip Nasional RI ini menunjukkan, secara historis, bangsa kita pernah berjaya dengan tradisi maritimnya. Sebuah tradisi yang sekarang lebih sering didengar dalam dongeng atau sekadar slogan: nenek moyangku orang pelaut!

Dalam pemaparan yang agak panjang, Muchlis menjelaskan bahwa leluhur kita adalah masyarakat laut. Merujuk disertasi A.B. Lapian, sejarawan yang ahli tentang masyarakat pesisir, Muchlis menuturkan bahwa dalam dinamika kehidupan laut terdapat tiga komponen utama. Ketiga komponen itu ialah orang laut, bajak laut, dan raja laut.

Orang laut merupakan rakyat laut sejati. Tak ubahnya petani di daratan yang menggantungkan hidup pada tanah garapan, orang laut hidupnya tergantung pada laut. Laut adalah dunia mereka. "Laut adalah saudara, laut adalah sahabat, laut adalah obat pelipur lara," jelas Muchlis. Sementara, bajak laut adalah komunitas terorganisir yang memiliki pemimpin. Mereka punya kekuatan yang dapat mengontrol sebagian kehidupan di laut. Bahkan,

DOK. INSIST

pada titik kekuatan tertentu mereka bisa memberontak terhadap raja laut (penguasa teritorial tertentu yang memiliki kekuatan dan tatanan organisatoris lebih kompleks) dan menjungkirbalikkan kekuasaannya.

Dinamika kehidupan laut berjalan liruk-pikuk dan telah memiliki pola yang mapan dan dinamis jauh sebelum kedatangan bangsa barat di perairan Nusantara. Dalam dinamika kehidupan masyarakat laut, sangat dimungkinkan terjadi kenaikan status sosial. Bajak laut bisa menjadi raja laut jika memiliki kekuatan yang memungkinkan untuk menggulingkan raja laut. Sejarah mencatat, Lamak Dukeleng—seorang bajak laut Bugis, yang karena punya kekuatan, kekayaan, serta pengaruhnya, berhasil menjadi sultan Kerajaan Pasir di Kalimantan Timur. Sejarah terbesar tentang naiknya bajak laut menjadi raja laut tentu saja adalah kemenangan Alfonso D'Albuquerque di Malaka dan Cornelis de Houtman di Batavia.

Tak hanya itu. Laut tak sekadar tersisa sebagai fisik belaka, air, pasir, dan karang-karangnya. Ia meruap oleh perbendaharaan kultural yang kaya: dari arsitek, iptek, religi, filsafat, sampai sastra. Jangan dilupakan pula, ia tak bisa lepas dari sifatnya yang terbuka, egaliter, dan penuh dinamika.

Sayang beribu sayang, nilai-nilai itu tampaknya telah amblas tak berbekas. Kebanggaan akan bangsa bahari hanya sebatas slogan saja. *Jalesveva jayamahe* (justru di laut kita jaya) sekadar slogan bagi TNI Angkatan Laut yang justru lebih sering tak becus dalam mengawal perairan nusantara. Kebanggaan sebagai bangsa maritim sudah cukup diwakili oleh Perahu Damar Sagara yang sukses melakukan ekspedisi keliling dunia pada ulang tahun emas Indonesia. Sementara, corak keterbukaan, egalitarian dan demokratis pada masyarakat bahari tak pula menjadi ciri bangsa yang memiliki garis pantai terluas dan pulau terbanyak di dunia ini.

Sejarah bisa jadi cermin. Bangsa ini pernah besar oleh tradisi lautnya. Puncak-puncak pencapaian pernah diraih ketika laut masih jadi bagian yang tak terpisahkan. Majapahit, meski tak mungkin dinafikan memiliki sisi otoriter, penguasaannya terhadap Nusantara cenderung dijalankan secara federatif. Bukan bersifat membumihanguskan potensi-potensi lokal kerajaan-kerajaan taklukannya. Pasca runtuhnya Majapahit, seiring dengan perkembangan Islam di tanah Jawa pada akhir abad ke-15, Demak di sebagian awal pemerintahannya, teristimewa pada masa kepemimpinan Pati Unus, masih melanjutkan tradisi ini. Perkembangan Demak sebagai negara maritim yang terbuka sangatlah nyata. Pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Jawa berjalan dengan dinamis. Catatan historis yang dipapar Denys Lombard dalam *Nusa Jawa Silang Budaya* mengungkapkan bahwa kekuatan armada maritim Pati Unus sangat merepotkan Portugis di Malaka. Bahkan, armada Pati Unus yang menyerbu kekuatan Portugis di Malaka pada 1513 merupakan armada terbesar yang dihadapi Portugis.

Namun, raja-raja penerusnya perlahan menafikan kekuatan laut itu. Sialnya, justru itu terjadi tatkala raja-raja di Nusantara harus menghadapi bajak-bajak laut Eropa yang berkekuatan dan berteknologi tinggi. Malahan, raja-raja penerus itu lebih memprioritaskan agenda-agenda ekspansionis terhadap kerajaan-kerajaan lainnya. Adalah Trenggono, pengganti Pati Unus, yang memulakannya.

Setelah Sultan Trenggono, lambat-laun pusat kekuasaan bergeser masuk ke pedalaman. Sultan Hadiwijaya, yang akrab dengan sebutan Jaka Tingkir, memindahkan pusat kekuasaan Demak ke Pajang, di pedalaman Jawa Tengah. Kemudian dilanjutkan oleh Sutawijaya atau Panembahan Senapati, yang setelah berhasil menaklukkan Pajang dengan memindahkan pusat kekuasaan ke daerah Kota Gede, Yogyakarta. Perpindahan kekuasaan itu membawa konsekuensi tertentu. Filsafat kekuasaan dan corak masyarakat dengan budaya maritim pun tanggal. Ia digantikan oleh corak pemerintahan yang bertopang tradisi agraris yang identik dengan feodalisme yang otoriter, konsentris dan sentralistik.

Untuk kasus ini, Mataram Islam membuktikannya. Kerajaan agraris yang ditopang konsep kekuasaan Jawa yang konsentris dan sentralistik ini melakukan serangkaian penaklukan terhadap daerah periferi di tepian pantai utara Jawa. Penaklukan-penaklukan terhadap daerah periferi itu—yang dengan gencar dilakukan pada masa Sultan Agung—sekaligus melumat habis potensi-potensi lokalitas periferi itu. Penyatuan itu dilakukan dalam rangka pengkonsentrasian kekuatan yang merupakan pola dari konsep kekuasaan Jawa. Hal ini ditegaskan oleh Guru Besar Sejarah UGM, Joko Suryo. "Kekuasaan kesultanan di Jawa ingin membangun konsep kesatuan dunia dalam satu kekuasaan," kata Ketua Pusat Studi Korea UGM ini. Menurut Joko Suryo, konsep kesatuan dunia dalam satu kekuasaan dilambangkan dari gelar-gelar

ISTIMEWA

"...Mataram menghendaki agar rakyatnya jangan sampai memiliki kekuatan-kekuatan ekonomi yang memungkinkan terbangunnya kekuasaan di luar keraton. Bila ini terjadi, maka pemberontakan sangat berpeluang terjadi."

ARIEF BUDIMAN

raja seperti Paku Buwono (pasak dunia), Hamengku Buwono (memangku dunia), Paku Alam (pasak alam), dll.
"Kerakusan" dan sentralisme kekuasaan Jawa sangat jelas diusung oleh gelar Raja Mataram, *Senapati Ing Alaga Khalifatullah Sayidin Panatagama*. Raja Mataram adalah pemimpin militer, penguasa dunia yang mewakili Tuhan, juga pengatur kehidupan beragama!

Arief Budiman, dosen University Of Melbourne, lebih memandang permasalahan ini dari basis materialnya. Menurut mantan dosen Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga ini, penaklukan yang dilakukan Mataram terhadap daerah pesisir merupakan bentuk kekhawatiran terhadap kekuatan borjuasi-borjuasi pesisir. Mataram menghendaki agar rakyatnya jangan sampai memiliki kekuatan-kekuatan ekonomi yang memungkinkan terbangunnya kekuasaan di luar keraton. Bila ini terjadi, maka pemberontakan sangat berpeluang terjadi.

Kebijakan politik yang hampir serupa pula yang diterapkan Belanda di Nusantara. Pribumi tak diberikan peluang untuk menguasai perekonomian. Lantas, kekuatan-kekuatan ekonomi ini diberikan pada kelompok etnis Cina yang notabene minoritas. Tak pelak, keadaan ini memungkinkan Belanda mengontrol golongan etnis Cina secara politis. Ketika borjuis-borjuis Cina mulai kuat basis ekonominya dan dinilai telah membahayakan, politik *devide et impera* pun dilancarkan. Hasilnya, tahun 1740, terjadi pembantaian etnis Cina di Batavia.

Barangkali cerita akan lain andai saja kala itu perkembangan borjuasi-borjuasi tidak dimatikan. Namun, karena kekuatan Mataram yang membumihanguskan kekuatan pesisir, ditambah lagi politik *devide et impera* VOC, maka habislah potensi budaya egalitarianisme dan demokrasi yang benihnya ada pada komunitas pesisir. Tergantikan dengan sistem budaya feodalisme dari masyarakat agraris.

Ironisnya, meski Indonesia telah membentuk suatu bangsa yang merdeka—lebih dari setengah abad, budaya feodalisme itu masih terjaga. Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto melakukan gaya berpolitik seperti yang pernah dipraktikkan Mataram. "Soeharto itu neo-mataram, persis benar! Sikapnya pada orang Cina dipelihara, tapi juga dibikin kebencian rasial. Sehingga, mereka minta perlindungan pada *state*. Karena itu, gampang diperas," tukas Arief Budiman.

Berbicara soal feodalisme, Dawam Rahardjo berpendapat bahwa apa yang disebut feodalisme dalam masyarakat kita, berbeda dengan terminologi feodalisme yang terjadi di Eropa (*Ulumul Qur'an*, No. 4/VII/1997). Menurutnya, feodalisme yang terjadi di Eropa merupakan proses transisi menuju masyarakat kapitalisme. Dan, ini tidak terjadi di Indonesia. Sebenarnya gejala kehadirannya baru akan muncul, tapi segera terberangus ketika kolonial menancapkan kuasanya di Nusantara. Secara politik, pengertian feodalisme di Eropa berlainan dengan terminologi feodalisme yang ada di Indonesia. Di Eropa, feodalisme merupakan fenomena penguasaan tanah oleh aristokrat dan militer. Beda halnya dengan di Indonesia pada masa kolonialisme. Kaum bangsawan lebih pada penguasaan terhadap *cacah* atau penduduk yang menghuninya.

Sementara itu, pada bagian lain, Dawam tak menampik jika secara budaya sisa-sisa feodalisme masih ada dalam masyarakat Indonesia sekarang. Menurut mantan Pemimpin Redaksi *Prisma* itu, feodalisme, sebagai sistem sosial, telah berakhir seiring kemerdekaan Indonesia. Mungkin saja masih ada sisa-sisa feodalisme, namun bukan sebagai sistem sosial, melainkan sebagai sistem nilai. Bahkan, praktik budaya feodal sekarang telah berganti pelaku, bukan lagi mereka yang punya darah keturunan bangsawan, bukan pula mereka yang sempat mencicipi hidup di zaman kolonialisme. Yang menghidupkan kembali budaya feodal itu adalah golongan baru. Karena sebagai "orang kaya baru" (OKB), mereka mencari pegangan nilai. Dan yang diperoleh adalah sistem nilai feodal, tulis Dawam.

Rasanya, tak berlebihan apa yang ditulis Dawam itu. Orde Lama dan Orde Baru merupakan contoh terang untuk kasus ini. Proses demokratisasi misalnya, yang teraktualisasi melalui kuatnya parlemen dalam dekade 50-an, akhirnya kandas oleh kekuatan seorang Soekarno. Maka, lahirlah yang disebut Demokrasi Terpimpin. Keadaan ini memungkinkan seorang Soekarno untuk berlaku otoriter dan sentralistik dalam memerintah. Pada bagian lain, praktik nepotisme antara pemerintah dan konglomerat kian merajalela. Tak heran, interaksi elit itu melahirkan kolusi. Budaya ini kemudian dengan sangat mencolok mewarnai 32 tahun pemerintahan Orde Baru.

Umar Kayam, dalam risalahnya pada Jurnal *Ulumul Qur'an* (No. 4/VII/1997), melihat bahwa feodalisme di Indonesia merupakan sintesis dari dua kutub kebudayaan yang berbeda. Dua model budaya yang bersintesis itu ialah model *mataraman* dan *beambten-staat*.

Model *mataraman* yang kukuh teguh memegang konsep budaya Jawa berpadu dengan konsep *beambten-staat* yang secara efektif diterapkan pasca keruntuhan VOC. Karenanya, dalam praktik pemerintahan kala itu, terjadi percampuran antara manajemen birokrasi modern dengan budaya halus-kasar khas Jawa. Terjadi percampuran antara budaya adiluhung dengan protestanisme Belanda. Elit pemerintahan pun merupakan kolaborasi antara elit kolonial dengan elit Jawa yang notabene golongan

bangsawan keturunan Mataram. Akibatnya, rakyat terkondisikan untuk selalu patuh dengan sistem kekuasaan yang sangat kuat.

Sekian lama laut kita terlupakan. Tak hanya kekayaannya yang tersia-sia. Tak pula masyarakat pesisir yang mayoritas kaum nelayan miskin saja yang terabaikan. Juga, corak budaya dan filosofi dari kehidupan orang laut itu. Kini, dalam era Indonesia yang paling baru, gagasan untuk memperhatikan kembali corak masyarakat pesisir atau maritim samar-samar mulai terdengar. Terlepas apa motivasinya, Abdurrahman Wahid sempat meninggalkan satu kebijakan untuk yang mulai berpaling ke laut dengan terbentuknya Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP). Belakangan, dibawah kepemimpinan Megawati, departemen itu berganti nama menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).

Entah ada hubungannya atau tidak, gagasan alternatif yang bersumber dari prinsip-prinsip masyarakat bahari turut mengemuka. Meski lebih banyak berkutat dengan soal ekonomi, iklim ini selayaknya disambut positif.

Adalah Ignas Kleden, cendekiawan yang kini menjabat direktur *The Go-East Institute* (Lembaga Lintas Timur) Jakarta, salah satu yang menyuarakan [illegible]. Gagasan itu sempat dituangkan [illegible] dalam sebuah artikel di majalah *Tempo* [illegible] Edisi Khusus, 19/8/01) dengan judul [illegible] Laut dengan Kapitan Perahu".

Gagasan Ignas itu terinspirasi oleh [illegible] kebudayaan pesisir oleh Prof. Dr. [illegible]lada. Gagasan kepemimpinan [illegible]an Perahu sangat berbeda dengan [illegible]mpinan dengan latar belakang [illegible]. Paling tidak, menurut Ignas, ada [illegible]pek yang ditawarkan oleh corak [illegible]mpinan ini. Pertama, [illegible]mpinan kapitan perahu sulit [illegible]n karena *dropping* dari atas, [illegible]entukan dari atas. Artinya, tingkat [illegible]ntuk menjadi pemimpin [illegible] ketat: hanya yang benar-benar [illegible]enguasai segala tentang [illegible]h yang dapat menjadi [illegible].

[illegible]aknya, gagasan ini merupakan [illegible]praktik rekruitmen politik [illegible]. Waktu itu, pemimpin-[illegible]erah, partai-partai politik, [illegible]apapun sering merupakan hasil *dropping* dari atas. Kriteria yang dipakai adalah atas dasar nepotisme dan *koncoisme*.

Pada bagian lain, seorang kapitan perahu dituntut untuk dapat mengambil keputusan dengan tegas pada saat segenting apapun. Ketika menghadapi badai atau gelombang besar misalnya, ia tak sempat lagi untuk berdiskusi dengan awak perahu lainnya untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Lambat, apalagi salah bertindak, maka kapal akan karam. Tepat atau tidaknya keputusan akan teruji saat itu juga. Jadi, akuntabilitas seorang kapitan perahu akan segera terbukti secara alamiah, saat itu juga.

Seorang kapitan perahu adalah juga seorang yang setia dengan segala risiko posisinya. Tatkala kapalnya karam, maka terlebih dahulu ia harus menyelamatkan para penumpang dan awak kapal lainnya. Ia tak akan rela selamat sementara banyak penumpang dan awak lainnya tewas. Contoh kasus ini adalah Kapten Rivai, nakhoda kapal Tampomas II, yang karam pada 1982. Ia tewas dengan tegar di anjungan kapal yang karam pada detik-detik akhir menyelamatkan penumpang dan awak kapalnya.

Gagasan senada juga dilontarkan Jakob Soemardjo. Dosen Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, ini justru berpendapat lebih ekstrim. Dalam artikelnya bertajuk *Seorang Presiden Melayu* (*Kompas*, 28/8/01), Jakob memaparkan dengan ekstrim perbedaan watak budaya maritim dengan budaya agraris. Budaya Melayu dengan atribut kemaritimannya dengan budaya Jawa yang kental warna agrarisnya. Oleh karenanya, polemik politik di Indonesia pada dekade 50-an disinyalir sebagai konflik antarpemimpin bangsa yang berbeda watak budayanya. Perpecahan Soekarno-Hatta adalah pertentangan budaya maritim dan budaya agraris, tulis Jakob.

Ia menjelaskan bahwa orang pesisir dengan enteng mudah memasuki alam pikiran modern Barat. Ini karena kultur konflik, persaingan, mobilitas yang dinamis, dan tinggi daya adaptasi, telah mendarah daging dengan masyarakat berbudaya maritim. Beda halnya dengan budaya persawahan. Terikat ruang, sulit menghapus warna lokal dan beradaptasi adalah sekian ciri bagi masyarakat persawahan ini. Segala konflik berakhir dengan harmoni. Menang tanpa mengalahkan. Kaya tanpa memiliki. Berkuasa tanpa memerintah. Dunia batin lebih penting dari materi. Perangkat kesadaran kolektif ini harus berkonflik dengan modernitas, tulis budayawan yang lebih dikenal sebagai kritikus sastra ini lebih lanjut. Cenderung dikotomis, memang!

Sebagai wacana alternatif, ini sangatlah menarik. Beberapa tokoh yang ditemui BALAIRUNG memberi tanggapan yang beragam terhadap tesis Ignas dan Jakob di atas. Pro dan kontra

DOK INSIST

ISTIMEWA

"...demokrasi dan watak egalitarianisme memang tak hanya terbatas pada hal teknis pengaturan mekanisme politik secara formal. Tak hanya masalah rekruitmen kepemimpinan politik, tapi juga bagaimana hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin."

IGNAS KLEDEN

mengemuka. Pudjo Semedi, doktor yang sekaligus dosen Jurusan Antropologi UGM, tak bersepakat dengan gagasan Ignas Kleden. Bagi pria yang dikenal dekat dengan mahasiswanya ini, sangatlah sulit menjalankan bangsa ini dengan menggunakan analogi menjalankan kapal. Baginya, dalam menjalankan kapal, yang ada adalah pola-pola otoriter. "Kapal adalah unit militer, unit yang sangat terejimentasi," sanggahnya.

Dengan nada agak kontra, Muchlis PaEni mengritik pendikotomian antara laut dan darat. "Bagaimanapun, sumber daya dari kekuatan maritim ada di *hinterland*, yaitu darat. Dia berhubungan dengan sumber-sumber darat," bantah Muchlis. Lebih lanjut, Muchlis menekankan bahwa hubungan antara laut dan darat tak bisa dilihat secara kaku. Darat memerlukan laut, dan sebaliknya, laut memerlukan darat.

Dengan lebih mendalam, Muchlis meragukan gagasan untuk ke tradisi maritim. Menurut alumnus Jurusan Sejarah UGM tahun 1975 ini, keterputusan *great traditions* kemaritiman bangsa kita merupakan kendala utama untuk membangun kembali tradisi kemaritiman pada generasi sekarang. Sedari keruntuhan kerajaan-kerajaan bahari kita, maka sejak itu pula *great traditions* kemaritiman kita hilang. *Great traditions* itu diganti dengan *great traditions* baru dari pelaut-pelaut Eropa itu. Jadi, untuk mengembalikan *great traditions* itu sangatlah sulit.

Apa yang disangsikan Muchlis bukannya tidak disadari Ignas. Demokrasi dan watak egalitarianisme memang tak hanya terbatas pada hal teknis pengaturan mekanisme politik secara formal. Tak hanya masalah rekruitmen kepemimpinan politik, tapi juga bagaimana hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Tidak dalam kerangka formalitas saja. Artinya, hal-hal yang bersifat kultural pun turut menentukan. Hal inilah yang tampak menjadi pertimbangan Ignas Kleden dalam menggagas kepemimpinan yang bercorak masyarakat maritim. "Jadi, misalnya seorang kapitan perahu sewenang-wenang, ia akan mendapatkan perlawanan dari anak buahnya. Disobedien atau bahkan terjadi konflik," tegas Ignas saat dikonfirmasi BALAIRUNG.

Gagasan untuk kembali pada corak maritim memang tak semudah membalik telapak tangan. Salah-salah malah memperlebar jurang dikotomi antara budaya maritim dangan budaya agraris. Indonesia, kini, merupakan entitas bangsa yang tidak memiliki keseragaman kolektif. Wajar saja, karena entitas itu terdiri dari beragam suku-suku bangsa dan budaya. Batasan antara watak keterbukaan yang dicirikan masyarkat maritim dengan watak halus yang sangat menjaga perasaan khas masyarakat agraris, kian tipis saja. Percampuran antarbudaya telah banyak terjadi. Dan, Jawa sebenarnya berada dalam persilangan budaya itu. Jawa juga menyerap banyak ragam budaya. "Kalau menerima kebudayaan dari luar itu bukan hanya pesisir, orang Jawa juga," tukas Pudjo Semedi.

Joko Suryo sepakat dengan apa yang dilontarkan Pudjo. Joko tak menjamin, andai kata bangsa ini dipimpin oleh orang yang berbasis kebuadayaan maritim, demokrasi akan dapat dilangsungkan. "Masyarakat kita sekarang sudah *blur*; sulit mengidentifikasi kepesisiran atau kepedalamannya," jelasnya.

Memperlebar jurang dikotomi antara budaya maritim dan agraris adalah suatu hal yang tak diinginkan. Sebab, sama halnya dengan memperdalam jurang perbedaan kesadaran kolektif dari entitas bangsa yang beragam ini. Hanya saja, memilah kultur yang memungkinkan untuk bersikap terbuka dan egaliter untuk menopang demokratisasi adalah hal yang sangat wajar. Untuk itu, selayaknya, corak kultur seperti itu—yang terdapat dalam masyarakat pesisir—dijadikan referensi laku budaya baru. Bukan kerena budaya maritimnya, tapi karena kultur semacam inilah yang mungkin dibutuhkan bagi proses demokratisasi.

Tentu, juga tak mudah menjadikan itu sebagai budaya baru, atau sebagai budaya lama yang dipungut kembali. Dibutuhkan strategi yang jitu. "Kita perlu mengonsepsikan secara jelas apa yang dimaksud dengan negara maritim. Kalau kita mau jadi bangsa pelaut, pedagang, mungkin saja. Tapi, kalau mau jadi bangsa nelayan, ah, repot. Melarat!" tukas Pudjo Semedi sengit.

Barangkali, proses transformasi budaya itu bisa dimulai melalui lembaga-lembaga pendidikan. Seperti rekomendasi Muchlis, penelitian dan publikasi ilmiah tentang masyarakat maritim mesti digalakkan. Inilah cara yang cukup efektif untuk menyambung keterputusan *great traditions* kemaritiman itu.

Begitulah, untuk mengubah tradisi bangsa ini mesti ada upaya sendiri. Kitalah yang menciptakan dialektika budaya tersebut. Tak ada salahnya jika memulainya dari (kalau tak boleh dikatakan kembali kepada) pesisir. "Kebudayaan adalah suatu proses dialektis yang dinamis. Kebudayaan bukanlah suatu yang *given*, yang dengan sendirinya ada dan tidak akan berubah selamanya. Kebudayaan akan berubah dan bergeser. Namun, mencairkan suatu kemapanan sosok kebudayaan akan tergantung dari ramuan dialektika berbagai sistem," kata Umar Kayam.

N. Budi Baskoro
Tarli, Ririn Tri Astuti, Mahfud

Jangan CobaCoba Melawan CocaCola

SpotCommunications. Marketing.0201

Kalau Tak Tahu Kiatnya

Sebelum menantang, Anda perlu tahu bagaimana strategi Coca-Cola menguasai dunia. Dwimingguan MARKETING mengungkapkan strategi, tren, konsep terbaru, analisis, bedah kasus, kiat, tip, profil tokoh, serta konsultasi dan diskusi di bidang pemasaran dan penjualan.

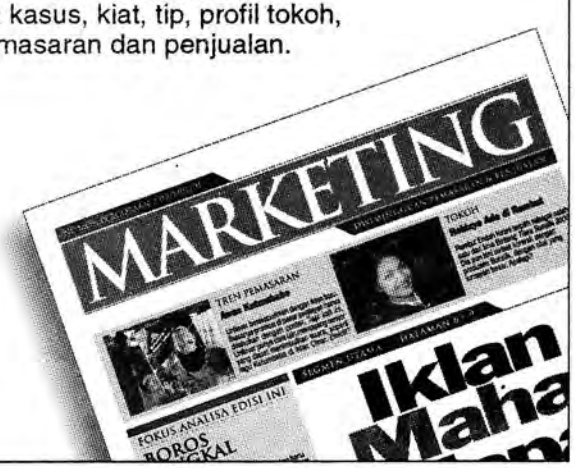

Terbit Perdana 15 Februari 2001

Untuk berlangganan hubungi sdr. Anto di 021-345 3321

Composite

Hukum Laut Indonesia Tak Berenang Mati Kehausan

Meski memiliki sejarah yang heroik, wajah hukum laut Indonesia terkesan suram. Ada bopeng di sana-sini. Hal ini ditambah dengan penegakan yang lemah. Masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus digarap. Pemerintah sempat tersita ketika presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid, menyisipkan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) dalam susunan kabinetnya. Tanggapan pun segera bermunculan. Namun kebanyakan suara-suara itu cenderung bernada positif. Orang-orang kembali menoleh pada persoalan kelautan.

Ketika Gus Dur turun dan digantikan Megawati, ada sementara kekhawatiran apakah Gus Dur itu akan segera kembali terbenam. Kekhawatiran itu ternyata tak terjadi. Cuma namanya saja yang berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).

Sayangnya, langkah pemerintah ini belum benar-benar didukung oleh langkah-langkah yang lebih konkret dan menyeluruh. Munculnya DKP tak segera diikuti oleh kesadaran akan pentingnya arti laut.

Menengok jauh ke masa silam, kesadaran akan laut ini antara lain karena buah karya penjajah Belanda. Dalam konteks ini, Dr. Marsudi Triatmodjo LL.M. memberi contoh pengaruh pemerintah kolonial terhadap pencapaian yang dilakukan bangsa ini. "Prestasi para leluhur yang sudah mampu berlayar sampai Pulau Madagaskar di Afrika dan kawasan Pasifik seakan diputarbalikkan faktanya dan dikurangi sekadar sebagai upaya coba-coba," tutur dosen Fak. Hukum UGM ini. Langkah seperti ini tentu saja bisa mengikis sedikit demi sedikit rasa cinta terhadap laut di hati rakyat.

Apa yang dilakukan Belanda ini sebenarnya demi kelancaran dalam mengeksploitasi kekayaan alam tanah jajahannya. Penerapan peraturan *Territoriale Zee Marietieme Kringen Ordonantie* (TZMKO) tahun 1939 menjadikan wilayah antarpulau Indonesia terpecah-pecah. Lebar laut teritorial (terletak di luar garis pangkal, dari mana setiap zona kelautan diukur ke arah laut lepas) tiap pulau yang hanya sejauh tiga mil membuat sebagian wilayah laut pedalaman Indonesia, seperti Laut Jawa yang dilingkupi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan dan Sulawesi, berstatus sebagai laut lepas. Status ini menjadikannya bebas dilayari dan dieksploitasi oleh negara manapun. Akibatnya, keamanan negara terancam. Dalam bahasa Hasyim Djalal (1997), Guru Besar Hukum Internasional FISIP Unpad, pada waktu itu kita baru sebatas berdaulat atas "tanahnya", belum atas "airnya".

Oleh karena itu, setelah merdeka, pemerintah RI segera berinisiatif untuk melakukan perombakan terhadap sistem TZMKO ala Belanda itu. Tanggal 13 Desember 1957 TZMKO diganti dengan Deklarasi Juanda. Dalam deklarasi ini, tercantum konsep Wawasan Nusantara yang memandang seluruh laut, yang terletak di antara pulau-pulau Indonesia, sebagai wilayah Republik Indonesia yang menjadi satu kesatuan dengan daratan pulau-pulaunya. Pergantian peraturan ini menandai perubahan aturan main dalam batas wilayah laut. Bertambah panjangnya jarak laut teritorial menjadi sejauh 12 mil diharapkan memperkuat pertahanan negara. Apalagi UU No.4/Prp/1960, yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia, dipergunakan untuk melapisi deklarasi ini. Bertambah luasnya wilayah Indonesia sejumlah 3,1 juta km^2 berkat penambahan jarak laut teritorial membuat daerah eksploitasi sumber daya kelautan Indonesia semakin luas.

Namun manuver yang ditempuh Indonesia ini tak segera dengan mulus terealisasi. Hal ini terkait dengan wilayah laut suatu negara (kepulauan) yang lazimnya juga menjadi batas wilayah dengan negara lain. Oleh karena itu, klaim suatu negara atas wilayah lautnya memerlukan pengakuan dari dunia internasional agar tak tumpang-tindih.

Untuk menggolkan Deklarasi Juanda tidaklah mudah. Berbagai negara kelautan di dunia menentangnya. Apalagi, waktu itu, lontaran pihak Indonesia ini dianggap terlalu revolusioner. Delegasi yang dikirim untuk menghadiri konferensi Hukum Laut Internasional PBB tahun 1958 pulang dengan tangan hampa. Peristiwa 30 September 1965, semakin

DOK. PRIBADI

Dr. Marsudi Triatmodjo LL.M

DOK. CAKRAWALA

menenggelamkan wacana ini.

Berbagai masalah yang muncul pada akhir dekade '60-an seperti pencemaran laut, peningkatan teknologi penambangan sumber daya laut, juga ancaman Perang Dingin kembali membangkitkan semangat pemerintah RI untuk terus memperjuangkan kepentingannya. Alhasil, penantian selama 37 tahun tersebut akhirnya membuahkan hasil. Tahun 1982, lewat Konvensi Hukum Laut PBB, jarak laut teritorial sejauh 12 mil telah disepakati secara internasional.

"Kemenangan" ini secara tidak langsung menaikkan citra bangsa Indonesia. Lebih-lebih, Konvensi tersebut juga menyinggung penambahan wilayah dalam bentuk Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan Landas Kontinen. Wewenang Indonesia atas kekayaan laut pun bertambah. Dan, dengan begitu, wilayah Indonesia tambah mekar 2,7 juta km^2.

Malang tak dapat ditolak, yang terjadi dalam dunia hukum laut Indonesia terjadi sebaliknya. Jerih-payah para cerdik-cendekia dalam memperjuangkan perbaikan hukum laut di tingkat internasional justru tak berbalas di negeri sendiri. Lemahnya penegakan hukum telah menjadi masalah klasik.

Bagi Marsudi, salah satu penyebab kelemahan ini adalah kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) penegak hukum di laut. "Kendati peralatannya lengkap, tapi kalau SDM-nya kurang, maka penegakan ini tidak akan berjalan. Sementara kondisi di laut berbeda dengan di darat. Di darat, orangnya yang dipersenjatai, sementara di laut, 'kan peralatannya yang 'diorangi'," ucapnya memberi alasan.

Ia tak mungkir bila alasan pendanaan juga menjadi penyebab yang lain. Ini terbukti dalam kasus pencurian ikan oleh kapal asing. Jangan

terkejut bila nelayan-nelayan asing sudah kembali memasuki perairan kita, mulai dari nelayan Thailand yang masuk kelas rendah—namun merepotkan karena saking banyaknya—sampai yang kelas berat seperti Jepang dan Korea. "Kapal mereka itu termasuk berteknologi tinggi. Panjang jaringnya saja mencapai lima kilometer!" kata Kapten Yuli Dharmawanto dari Dinas Hukum (Diskum) TNI-AL tanpa bermaksud menakut-nakuti.

Modus operandi pencurian ikan sendiri berubah-ubah. "Ada model-modelnya, seperti *ship-to-ship*. Jadi kapal asing yang masuk di Indonesia itu tidak mencuri ikan tapi beli ikan dari kapal-kapal yang ada di sekeliling," demikian papar Marsudi. Biasanya, kapal nelayan Indonesia mentransitkan hasil tangkapannya ke kapal asing. Alasannya cukup rasional. "Daripada dibawa ke darat, sudah biaya operasionalnya tinggi, lebih baik mereka mendapat uang dengan cara seperti itu," jelas Marsudi. Selain dengan model *ship-to-ship* tadi, cara lain yang ditempuh adalah penyalahgunaan izin kapal. Kapal yang meminta izin keberadaannya fiktif dan izin itu digunakan oleh kapal asing.

Pihak AL bukannya tak menyadari hal itu. Menurut Mayor Ismay H., dari Diskum TNI-AL, jajaran AL sendiri berencana supaya tiap kapal asing itu diberi alat yang bisa digunakan TNI AL untuk melacak lokasi perburuan ikan kapal tersebut. Namun, tampaknya, sebagaimana yang sudah-sudah, AL selalu saja kalah sigap. Kasus penambangan pasir ilegal di perairan Riau, misalnya. Seperti yang dilaporkan dalam investigasi TEMPO, 14 Oktober 2001, *Automatic Vehicle Locater* (AVL) yang dipasang pada kapal-kapal pengeruk pasir bisa dipindahkan dengan mudah ke kapal lain. AL pun kecolongan lejak. Sehingga, dengan bebasnya kapal-kapal itu beraksi.

Penambangan pasir ilegal di kepulauan Riau memang sudah tak ketulungan. Pernah 400 juta meter kubik pasir dicuri dan diekspor tanpa izin. Tak tanggung-tanggung, hanya dari pajak yang tak terbayar, negara dirugikan tak kurang dari Rp2 triliun per tahun. Angka itu tentu saja akan semakin mencengangkan jika pasir-pasir yang dicuri itu dihitung.

Bukan itu saja. Barang bawaan kapal yang karam di dasar laut tak luput dari jarahan. *Ngacirnya* Michael Hatcher, bos United Sub-Sea Services—sebuah perusahaan pengangkatan harta karun laut—dengan membawa US$ 15 juta atau sekira Rp157, 5 miliar hasil pelelangan isi kapal Der Geldermalsen adalah contoh rapuhnya penegakan hukum laut kita. Penjarahan kapal yang tenggelam pada masa VOC adalah salah satu rekor tertinggi dari sekian kasus yang lain.

Namun, lagi-lagi aparat terbentur dengan fasilitas yang terbatas. Kapal asing yang melakukan pengangkatan harta karun laut di perairan Anyer, Banten, yang bisa mendeteksi benda sedalam 50 m di bawah lumpur laut, hanya membuat aparat melongo. "Kita nggak punya kapal dengan peralatan seperti itu," keluh Ismay.

Keadaan diperparah oleh penegakan hukum yang amburadul dari aparat sendiri. Aparat kerap sekali kecolongan, terutama dalam hal bagi hasil. Meski mengantongi izin dari Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga (Pannas), pengusaha kapal pemburu harta karun biasanya enggan melaporkan hasil angkatannya. "Seandainya melapor, tidak dengan jumlah sebenarnya. Padahal dengan pemerintah 'kan perjanjian pembagiannya *fifty-fifty*," jelas Ismay lagi.

Ada kesan, koordinasi di antara pihak yang terkait tidak kuat. AL lebih memilih menunggu laporan dari Menkopolkam sebagai pihak pemberi izin. Koordinasi yang sudah payah ini diperburuk lagi dengan ditemukan adanya indikasi permainan antara pihak pengusaha dengan aparat TNI-AL, sebagaimana yang diungkap TEMPO (27 Agustus 2000). Mulai dari digunakannya prajurit TNI-AL sebagai tenaga penyelam sampai kerja sama tingkat tinggi dari cukong dengan pihak Pangkalan AL.

Untuk tudingan ini, pihak AL berdalih, peraturannyalah yang lemah. "Masalahnya, (dalam peraturannya—*Red.*) yang berwenang menyidik pengangkatan harta karun laut itu hanya pegawai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Depdiknas. Sementara Depdiknas-nya *nggak* punya orang dan kapal." Walhasil, dari sekian kasus hukum laut yang menumpuk, hanya beberapa saja yang sempat diproses sampai ke pengadilan. Pada tahun 2001, dari 405 kapal yang diperiksa, tercatat cuma 100 kapal yang sempat diproses (lihat Tabel 1).

Tabel 1

Perlakuan Terhadap Kapal

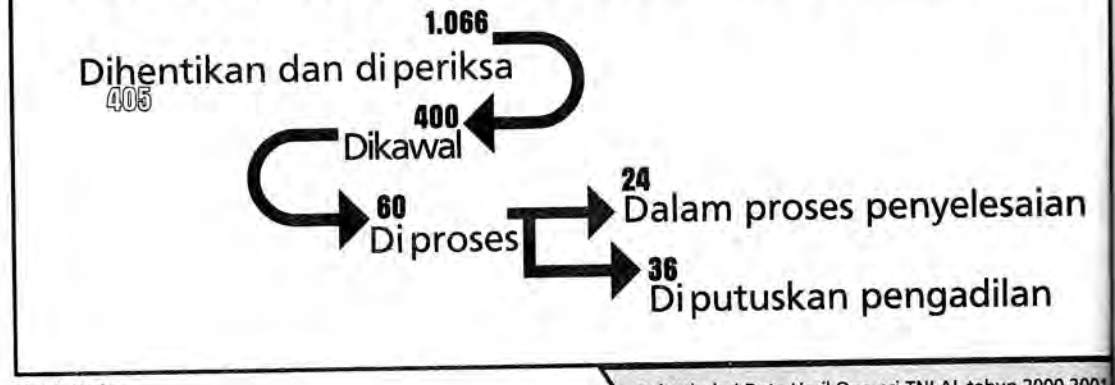

GRAFIS: FENDI

Rekapitulasi Data Hasil Operasi TNI-AL tahun 2000-2001
Sumber: Diskum TNI-AL

Bila sulitnya proses penyidikan jadi kendala dalam penanganan kasus perburuan harta karun, maka untuk kasus perompakan kesulitan itu terjadi sejak proses penangkapannya. Perompakan yang sampai saat ini masih ramai, terutama di tempat-tempat strategis seperti Perairan Selat Malaka, dengan bebas merajalela. Jangan dibayangkan bajak laut masa kini masih setia menggunakan pedang dan dengan bangga mengibarkan bendera hitam berlogo tengkorak kepala. Mereka telah melengkapi diri dengan senapan mesin, dan GPS *(Global Positioning System)*—semacam piranti untuk menentukan lokasi sasaran. Berdasarkan data Biro Kelautan Internasional (IMB) pada tahun 1999, dalam waktu tujuh tahun, serangan bajak laut telah meningkat 40% (lihat Tabel 2). Kembali, aparat tak bisa berbuat banyak.

Sebagaimana kejahatan hukum laut yang lain, modus operandi perompak itu pun sangat bervariasi. "Ada yang cuma diambil barangnya, ada juga yang kapalnya dibawa ke luar negeri dan dijual. Untuk itu sangat penting kehadiran kapal patroli kita disana. Ini akan memberikan pengaruh bagi orang yang berniat melakukan kejahatan itu," jelas Ismay.

Namun, tampaknya ungkapan Ismay masih terlalu jauh panggang dari api. AL hanya punya 150-an buah kapal untuk mengawasi kawasan perairan Indonesia yang mencapai 3 juta m^2. Ini berarti, setiap satu kapal AL harus mengawasi 20 ribu m^2 wilayah laut Indonesia. "Padahal, itu masih harus didukung dengan sarana radar untuk mendeteksi seluruh wilayah," sambungnya. Sialnya, penyediaan radar pun ternyata masih belum memadai.

TNI-AL sebenarnya tak tinggal diam. Meski belum menunjukkan hasil yang diharapkan, berbagai langkah telah ditempuh. Mulai dengan melakukan patroli koordinasi dengan negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia, sampai melaksanakan operasi intelejen di daerah-daerah yang dicurigai sebagai tempat beroperasinya bajak laut.

Meski dianggap sudah cukup memadai, Marsudi merasakan masih ada ceruk-ceruk permasalahan dalam hukum laut Indonesia yang perlu segera ditambal. Sebagian substansi UU No.1/1971 tentang Landas Kontinen Indonesia, misalnya, berbeda dengan yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Dasar ukuran landas kontinen—dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorial sampai dengan jarak tertentu—antara keduanya berbeda. UU No.1/1971 masih menganut hasil Konferensi Hukum Laut PBB tahun 1958 yang menyebutkan landas kontinen sampai batas kedalaman laut 200m. Padahal aturan tersebut sudah disempurnakan dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 yang justru dipelopori Indonesia sendiri. Dalam Konvensi tahun 1982 tersebut, batasan landas kontinen adalah jarak sejauh 200 mil laut bagi negara yang pantainya curam dan 350 mil laut bagi negara yang pantainya landai.

Peraturan otonomi daerah (Otda) mengenai wilayah laut yang termaktub dalam UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah juga merupakan bagian terlemah dari hukum laut Indonesia. UU mengenai garis pantai dan garis dasar ini menggunakan garis pantai sebagai pedomannya. Menurut Marsudi, hal ini tentu saja rancu dengan hukum laut internasional yang justru mengunakan garis pangkal—garis dari mana setiap garis maritim diukur—sebagai dasar penarikan wilayah kelautan suatu negara. Padahal garis pantai—yang berpedoman pada pasang-surut air laut—memiliki banyak kelemahan dibanding dengan garis pangkal yang lebih stabil.

Belum lagi, dalam peraturan tersebut disebutkan, daerah berhak mengklaim sepertiga dari jarak laut teritorial sejauh 12 mil. Peraturan ini rawan sekali menimbulkan konflik Gejala-gejala awal, seperti perselisihan antarnelayan telah terjadi di beberapa daerah. Menurut data Diskum TNI-AL, kasus ini sempat muncul di Banyuwangi, Bangka, Cilacap, Tegal, dan beberapa daerah nelayan lainnya di pelosok Indonesia.

Untuk mengatasinya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Rohmin

Tabel 2

Serangan Terhadap Kapal Di Perairan Indonesia

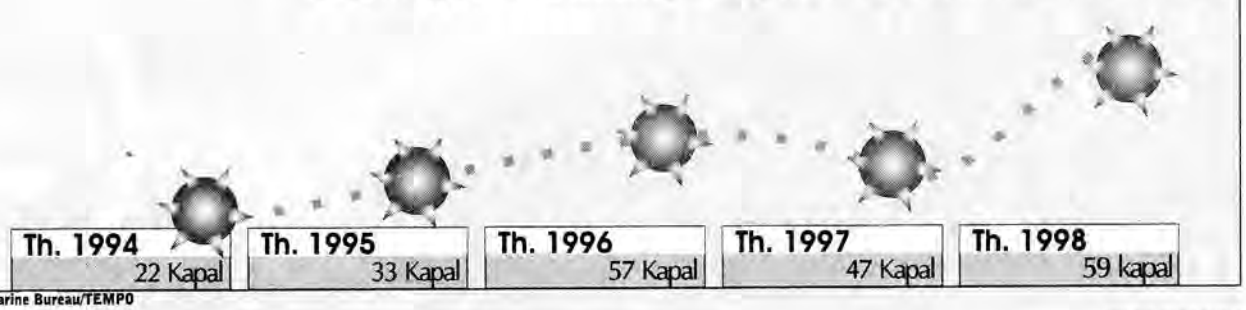

Sumber: International Marine Bureau/TEMPO

GRAFIS: DUNIANOEL

DOK. CAKRAWALA

Dahuri—yang waktu itu masih menjabat Dirjen Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil (P3K), dalam sebuah makalah yang disampaikan pada Seminar "Kebijakan dan Upaya Peningkatan Ekspor Perikanan", 28 Maret 2000, menyarankan agar antar-pemerintah daerah (Pemda) melakukan negosiasi untuk mengatasi hal ini. Itupun harus didukung dengan sikap proaktif dalam menyusun rencana pengelolaan sumber daya perikanan secara terpadu. Caranya, dengan membuat Rencana Strategis (Renstra), yaitu menyusun zona kawasan pesisir dan laut, menyusun rencana pengelolaannya, dan membuat rencana aksi yang menampung kepentingan berbagai pihak.

Dalam pandangan Marsudi, upaya penyebaran informasi mengenai hukum laut dalam konteks Otda menjadi permasalahan pokok. Ia mewanti-wanti, "Jangan sampai pemerintah daerah hanya tahu di perairan yang jadi wilayahnya itu hanya berlaku hukum nasional. Di situ, berlaku pula hukum internasional."

"Persoalan kemudian muncul," masih kata Marsudi, "jika peraturan yang dibuat bertentangan dengan hukum internasional, misalnya dengan tidak memberi akses kepada kapal asing untuk melewati wilayah perairannya. Ini perlu kebijakan dari pihak pusat maupun daerah."

Ia juga menekankan, seharusnya pemda menyadari bahwa konteks pengkaplingan wilayah itu dalam hal pemanfaatan, bukannya dalam hal kewenangan wilayah. Bentuk pemanfaatan itu, bisa berupa pajak terhadap kapal penangkap ikan. "Pajak itulah yang kemudian hasilnya dibagi untuk Dati I, Dati II , dan pemerintah pusat," tandas pengajar Hukum Internasional itu.

Apa yang diaparkan Marsudi direspon positif oleh pihak AL. AL siap untuk ikut melakukan sosialisasi ini. "Kami memiliki Dinas Potensi Maritim untuk melakukan tugas itu," tegas Kapten Joko Sulistyo dari Diskum TNI-AL berusaha meyakinkan.

Kesiapan aparat TNI-AL di atas semoga bukan *lip-service* belaka dan menjadi pertanda ketergugahan semua pihak yang terkait untuk memikirkan kembali masalah kelautan kita.

Menumpuknya masalah yang membenamkan hukum laut Indonesia tentunya menuntut semua pihak untuk turut ambil bagian. Selain pencurian ikan, pengerukan pasir, perampokan harta karun, dan perompakan, laut kita masih direcoki oleh sekian masalah lain yang tak mungkin diabaikan. Mulai dari lingkungan laut yang makin rusak akibat pencemaran limbah industri, hancurnya terumbu karang, hingga yang paling hangat: imigran gelap! Jangan sampai laut yang menjadi bagian terbesar tanah air bangsa ini justru sama sekali tak bisa dinikmati. Jangan sampai, sebagaimana yang diumpamakan oleh Hasyim Djalal, Indonesia jadi itik yang berenang, tapi mati kehausan.

Fauzul Muhammad
Mahfud Ikhwan

IKLAN INI MEMANG SENGAJA DIBALIK

Dapatkan Kartu Pelanggan...! Rebut Bonus
Suvenir dan Diskon Khusus Setiap Kali Pemesanan Bus Maupun Paket Wisata

sargede
Tours and Travel
Jl. Pramuka 30 Umbulharjo - Yogyakarta
Ph.0274 - 372550, 417009, Fax.372214
e-mail: Sargede@idola.net.id

menyediakan
Bus Wisata
Paket Wisata Jawa, Bali, Lombok
Tiket Pesawat, Kapal, Kereta Api
Dokumen Perjalanan dan Hotel Reservation
dll.

DUNIANOEL | BAL

Boleh ngaku ekstrem kreatif asal ada buktinya!

EXTREME CONTENTS

Sorry! We're BLANK!
Jika tidak kreatif: out!
Saatnya mengikat kepala, lalu mulai bergerilya
Amazing! di 21% kedua desain grafis = desain rumah
Menciptakan trend, tidur dulu baru mimpi
Tibor Kalman: *Design provocateur* abad ini
4 langkah menjadi desainer grafis (plus) sungguhan
Desain grafis itu apaan sih?
Membom otak desainer grafis
Mess 56: Reportase + 10 teguk sunrise
Jangan pernah mencintai kambing
Benchmark: Santi, Sarif, Robert, Zuki
Send or be scent

supported by:
BALAIRUNG PETAKUMPET Advertising · Illustration · Multimedia

WARNING:
This Magazine is seriously dangerous for people with old habit and dead mind.
We encourage the extreme content of the text and visual elements.
If u could not punch your brain till blank, wasting your money to buy this magazine is prohibited.

EMPOWER CREATIVE PEOPLE THROUGH
EXTREME VISUAL PERSPECTIVE

1st issue launch:
GRAPHIC DESIGN ATTACK
Promo Price: **Rp 12.500,-**

ready on bookstore near you at **april 21st 2002**
get it here: artdico, toga mas, gramedia, tiga serangkai, etc.
hotline: blank magazine (0274-373847)

Sektor kelautan, selama lebih dari 32 tahun, adalah satu hal yang selalu termarjinalkan dari diskursus developmentalisme Orde Baru. Ia tenggelam dalam hingar-bingar proyek industrialisasi, restrukturisasi perbankan, swasembada pangan, dan penjelajahan sumber-sumber perekonomian lain. Negara miskin ini begitu lama menyia-nyiakan harta paling melimpahnya. Ironi.

Kekayaan Laut Indonesia

Tabungan Tak Termanfaatkan

Keterpinggiran sektor kelautan ini memang sesuatu yang janggal. Padahal, secara geografis, dua per tiga luas wilayah teritorial Indonesia merupakan lautan. Enam puluh persen masyarakat Indonesia, atau sekira 120 juta jiwa, bermukim di wilayah pesisir. Dan, 16 juta jiwa di antaranya, menggantungkan hidup mereka dari berkah lautan.

Menurut data Dirjen Perikanan (1997), tenaga kerja di sektor perikanan, baik perikanan laut lepas (nelayan), budidaya, maupun perairan umum sekira 4,8 juta jiwa.

Jika dilacak dari jejak pertumbuhan ekonomi pada skala makro, pada tahun 1987 sektor kelautan telah memberikan kontribusi sebesar Rp36,6 triliun atau senilai 22 % dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 1992 angka ini meningkat mencapai Rp45 triliun (24 % dari PDB). Persentase arus pendapatan ini dinilai relatif kecil. Mengingat potensi kelautan nasional secara keseluruhan sebenarnya cukup berlimpah. Beberapa diantaranya bahkan belum tergarap sama sekali.

Asumsi ini bukan omong kosong. Menurut penelitian yang dirilis Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Perikanan Laut (Komnas Kajiskanlut) pada tahun 1998, total potensi lestari perikanan Indonesia sedianya mampu menghasilkan 6,18 juta ton per tahun. Sementara pada tahun yang sama, volume produksi perikanan hanya mencapai 3,6 juta ton. Angka ini tentunya akan merentang jauh jika kita komparasikan dengan Jepang yang pada tahun 1989 saja mampu menghasilkan 10,3 juta ton ikan (FAO, 1998).

Selain itu, usaha akuakultur (pertambakan dan budidaya laut) pun masih tertinggal. Dari 830.000 hektar potensi budidaya tambak yang ada, Indonesia baru memanfaatkan sekitar 300.000 hektar saja.

Demikian juga halnya dengan 5,8 juta km² lahan potensial yang cocok untuk usaha budidaya laut (marikultur). Melalui teknik ini, Indonesia sebenarnya bisa memperoleh berbagai jenis ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi,

seperti udang, tuna/cakalang, dan komoditas unggulan lainnya, tanpa harus bersusah payah mengarungi lautan lepas. Hanya, potensi sebesar ini lagi-lagi tak dilirik, baik oleh pemerintah maupun investor.

Jika dijumlahkan secara total, sektor perikanan sejatinya memiliki nilai ekonomi sebesar US$32 miliar setiap tahunnya.

Angka sebesar ini merupakan angka mentah. Kebanyakan produk kelautan seperti ikan masih diperdagangkan dalam bentuk ikan segar. Sehingga, nilai tambahnya kecil. Usaha untuk meningkatkan nilai tambah melalui industri bioteknologi tidak berjalan sesuai harapan.

Selama ini usaha tersebut hanya terbatas pada bidang penelitian saja. Padahal di beberapa negara lain, berbagai jenis organisme laut seperti *cyanobacteria, microalgae,* dan *macroalgae* telah lama dikembangkan menjadi produk biopigmen (pewarna biologis) dan biopolisakarida (sejenis karbohidrat)

Produk olahan organisme laut tersebut antara lain bermanfaat sebagai bahan dasar industri kosmetik dan farmasi. Di samping itu, organisme jenis ini banyak mengandung vitamin dan asam amino yang biasa digunakan sebagai bahan tambahan pada makanan.

Kegagalan Indonesia dalam mencapai target perolehan ikan dari keseluruhan potensi lestarinya merupakan tambang emas bagi nelayan asing. Menurut ketentuan *United Nation Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS, 1982), setiap negara pantai harus menetapkan kemampuan untuk menangkap ikan menurut jumlah yang diperbolehkan di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).

Jika negara pantai yang bersangkutan belum mampu mendulang hasil tangkapan secara keseluruhan, maka negara pantai memberikan kesempatan kepada negara lain untuk memanfaatkannya melalui suatu perjanjian.

Walhasil, pada tahun 1995 tercatat 341 unit kapal asing yang beroperasi di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Konsekuensinya, Indonesia menangguk kerugian jutaan dollar akibat beroperasinya kapal-kapal asing ini.

Untuk subsektor pariwisata laut, Indonesia hanya membukukan angka Rp7,1 triliun, atau sekira 2% PDB. Lebih kecil dibanding Malaysia, Thailand, dan Filipina yang mencatat angka 5% PDB. Rekor buruk ini diperparah dengan subsektor transportasi kelautan yang hanya efektif terpakai 2,3% dari total 288 juta ton yang harusnya bisa diangkut armada ekspor-impor Indonesia.

Kondisi ini memang patut disesalkan. Mengapa negara sekaya Indonesia bisa melakukan miskalkulasi demikian? Apa yang salah?

Menurut Daniel Mohammad Rosyid (40), dosen Teknik Kelautan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya, salah satu penyebab kegagalan pengelolaan sektor kelautan adalah lemahnya *policy* (kebijakan) pemerintah. Selama ini, logika developmentalisme yang diskemakan cenderung berorientasi daratan (*terresterial orientation*).

Pemerintah lebih memprioritaskan sektor industri darat dan mengandalkan sumber keuangan lain yang lebih instan seperti pajak, pertambangan, dan utang. Sementara, investasi pemerintah pada sektor perikanan dianggap berisiko. "Pemerintah tidak melihat potensi laut karena *mindset*-nya *mindset* darat. Jadi, ya, wajar kalau kebijakannya tidak pernah memihak laut," ungkap doktor yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor IV ITS ini.

Kondisi ini tak ayal berimbas pada rendahnya kualitas dan produktivitas sektor perikanan secara keseluruhan. Permasalahan lain yang cukup mendasar adalah fakta bahwa selama masa pemerintahan Orde Baru belum tercipta sebuah departemen pun yang bertanggung jawab secara khusus menangani masalah kelautan. Perangkat kelembagaan tersebut baru terakomodir pada masa pemerintahan Kabinet Persatuan Nasional Abdurrahman Wahid.

Selain faktor kelembagaan, kecilnya volume produksi perikanan nasional juga berkait-kelindan dengan jumlah armada perikanan yang ada. Secara kuantitatif jumlahnya memang cukup banyak, namun sebagian besar kapal yang beroperasi adalah kapal-kapal tradisional yang belum menggunakan motor. Kemampuan tangkap jenis kapal ini jelas sangat terbatas. Tanpa penggunaan teknologi, praktis mereka hanya mengandalkan faktor cuaca, musim, dan tentu saja nasib baik.

Ketidakmampuan nelayan tradisional mengikuti kultur perekonomian modern sudah menjadi permasalahan klasik. Akumulasi kapital yang mereka timbun tiap harinya hanya mungkin untuk mencukupi kebutuhan harian. Menurut liputan RCTI (16/9/01), pendapatan nelayan Indonesia rata-rata per bulan berkisar antara Rp85 ribu hingga Rp250 ribu.

Nilai ini tak seberapa jika dibanding harga sebuah kapal besar dengan *inboard motor* senilai Rp200 juta atau alat tangkapnya yang berbandrol Rp50 juta. Dengan hasil serendah ini, mereka tidak akan pernah mampu menjangkau mahalnya alat-alat produksi.

Gambaran kusam kondisi nelayan tradisional tersebut merupakan sejumput permasalahan (baca: kemiskinan) yang tak kunjung terentaskan. Rendahnya daya jangkau nelayan terhadap kemajuan teknologi bukannya tidak beralasan.

Selama ini struktur sosial yang ada tidak menyisakan sedikit pun ruang bagi mereka untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia. Akses pada sumber daya, baik modal, teknologi, informasi, dan pasar hanya berpusar pada segelintir orang yang memiliki posisi sosial tinggi. Kondisi ini semakin menjebak nelayan tradisional pada bentuk-bentuk kemiskinan struktural (*stuctural poverty trap*)

IOBAL/BAL

Daniel Mohammad Rosyid

Sementara pada kutub lainnya, korporatisme pemerintah dengan pengusaha perikanan kelas kakap semakin kokoh. Semua permintaan pengusaha besar dikabulkan oleh pemerintah. Mereka dimanja habis-habisan.

Demi mulusnya pembangunan, kucuran modal diperlancar, hubungan bilateral dengan negara importir dibuka, perlindungan hukum atas segala jenis industri yang berorientasi ekspor dijamin.

Di balik usaha pemberdayaan sektor perikanan, kelompok borjuasi pesisir (juragan kapal, tengkulak, eksportir) inilah yang sebenarnya banyak mengenyam keuntungan. Ditangan mereka mekanisme pasar ditentukan, mata rantai distribusi diciptakan, dan aktivitas ekspor dijalankan. Sudah barang tentu, gemerincing laba selalu mengalir deras ke brangkas.

Proteksi berlapis yang diberikan pemerintah terhadap pelaku ekonomi di tingkatan atas bukannya tanpa maksud. Jika ditelusuri dari sudut pendapatan nasional, kelompok ini merupakan penyumbang devisa yang cukup besar. Melalui hubungan perdagangan dengan negara-negara importir, mereka mampu memberikan pemasukan bagi kas negara. Kemampuan pihak eksportir untuk melakukan ekspansi mudah dimengerti, sebab selama ini mereka lebih menguasai informasi tentang pesaing, selera konsumen, dan segmen pasar.

Sayang seribu sayang, lemahnya kemampuan pihak eksportir dalam menganalisis pasar (*market intellegence*) menyebabkan aktivitas perdagangan lebih dominan ditentukan oleh para pembeli (*buyer market*). Pada derajat tertentu, ketidakstabilan jumlah pasokan turut menciptakan "*market glut*"—suatu kondisi pasar dimana ketika suplai produk meningkat harga jual justru menungkik tajam, begitu pun sebaliknya. Akibatnya, harga jual produk perikanan seringkali merugikan pihak produsen (nelayan/petani ikan).

Secara keseluruhan, laju pertumbuhan ekspor perikanan nasional dinilai masih datar. Menurut catatan, pada tahun 1998 volume ekspor Indonesia hanya mencapai 41,7% dari keseluruhan potensi ekspor yang seharusnya. Nilai ekspor perikanan pada tahun 1998 secara keseluruhan mencapai US$2,1 miliar.

Salah satu ganjalan yang terdeteksi adalah jaringan distribusi dan pemasaran yang tidak terlalu luas. Selain untuk mencukupi kebutuhan domestik, sampai saat ini hubungan perdagangan internasional baru dijajaki dengan Jepang, negara-negara ASEAN, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Berlangsungnya hubungan perdagangan internasional bukannya tanpa risiko. Terlebih ketika tuntutan liberalisasi perdagangan semakain kencang. Persaingan kualitas produk adalah keniscayaan yang tak terhindarkan.

Kondisi ini merupakan peluang sekaligus ancaman bagi perekonomian nasional. Pasalnya, liberalisasi menuntut adanya penghapusan subsidi dan proteksi dari pemerintah. Tanpa adanya hambatan tarif dan non tarif, akses produk-produk domestik ke pasaran internasional jelas akan semakin besar.

Namun mengingat lemahnya kemampuan produksi dan pasca-produksi nelayan, hal ini menjadi ancaman besar bagi produk perikanan nasional. Kelak mereka tidak akan berkutik sama sekali.

Untuk kondisi Indonesia, infiltrasi pemerintah pada dunia usaha masih merupakan suatu keharusan.

Dalam konteks pembangunan sektor kelautan, pemerintah memiliki kontrol pada pemberian fasilitas dan insentif suku bunga kepada para investor perikanan.

Sedang instrumen kebijakan pada wilayah fiskal yang diselenggarakan melalui lembaga perpajakan tidak hanya berperan untuk menguras produk perikanan yang berorientasi ekspor. Devisa yang disedot dari pelaku ekonomi mestinya dikembalikan dalam bentuk pemberian kemudahan fasilitas fiskal.

Kebijakan fiskal yang dimaksud antara lain pengurangan hambatan bea masuk berbagai komoditas yang menjadi faktor penunjang produk perikanan. Desain kebijakan ini dengan sendirinya akan memberikan dukungan terhadap industri perikanan rakyat.

PRODUKSI PERIKANAN *SUB SEKTOR PERIKANAN LAUT DAN DARAT*

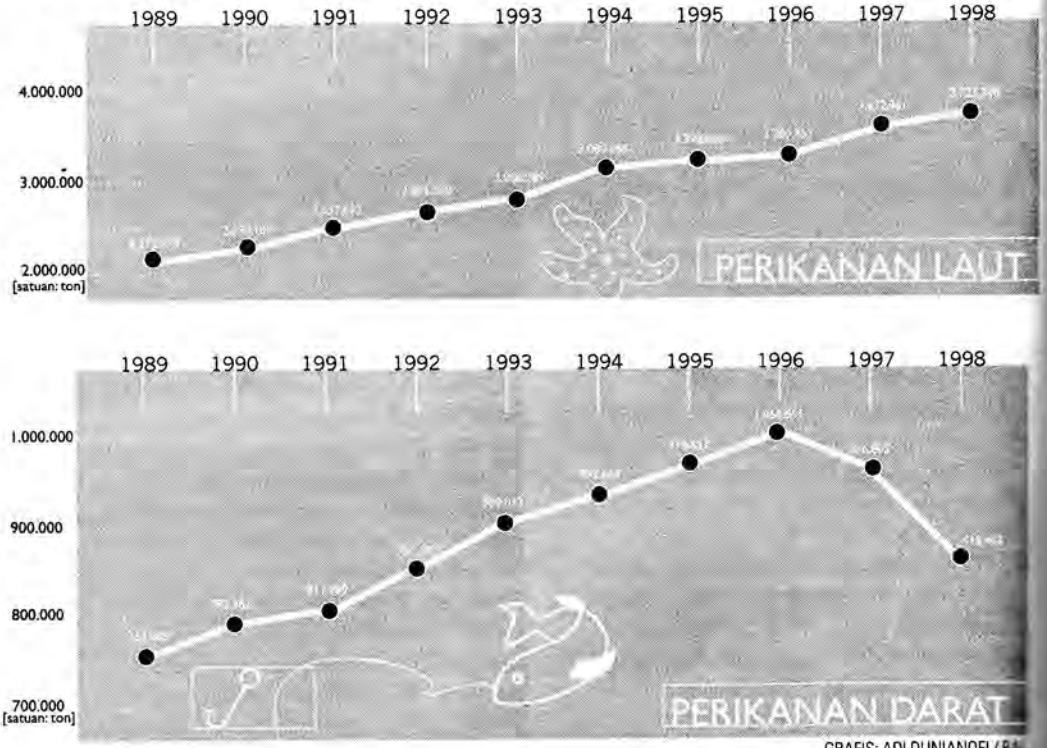

GRAFIS: ADI DUNIANOEL/ BA

Sementara, mantan Menteri Eksplorasi Laut di masa pemerintahan Gus Dur, Sarwono Kusumaatmadja menjelaskan, "Faktor lain yang tak kalah vital adalah pengadaan investasi oleh pemerintah. Investasi publik ini berfungsi untuk rehabilitasi lingkungan pesisir pantai."

Menurutnya, kebijakan ini bisa dilakukan dengan pembangunan infrastruktur kawasan perekonomian seperti jalan raya, pengadaan air bersih, jaringan telekomunikasi, dan berbagai fasilitas vital lainnya. Hal ini bertujuan membangun tatanan perekonomian yang lebih mapan, merangsang produktivitas masyarakat, dan mendorong pihak investor untuk menanamkan modal.

Selain faktor kebijakan, keberhasilan sektor ini turut ditentukan oleh sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum, dan kelembagaan. Rokhmin Dahuri, anak nelayan Cirebon yang diserahi tugas memimpin Departemen Kelautan dan Perikanan, menyatakan bahwa strategi pemberdayaan menjadi pasal yang tak terhindarkan. "Bukan hanya jargon pembangunan berbasis komunitas, tapi juga pembaruan paradigma pembangunan yang lebih manusiawi, berorientasi pada manusia. Prinsipnya, peningkatan produktivitas pembangunan yang berpusat pada rakyat, strategi yang menempatkan rakyat menjadi subjek pembangunan perikanan dan kelautan,"tambah doktor yang jadi menteri pada usia 43 tahun ini.

Tetapi, aspek pemberdayaan masyarakat ini jelas tak lepas dari masalah pendanaan. Berbicara mengenai sue anggaran pem-bangunan, tentunya banyak sekali kepen-tingan yang terlibat. Selama ini, alokasi dana pembangunan didasarkan atas posisi tawar sektor yang bersangkutan. Besarnya kepentingan masyarakat menentukan besarnya jumlah anggaran yang disediakan. Sehingga, tuntutan akan pemberdayaan sektor-sektor perekonomian harus diperjuangkan sampai di tingkatan eksekutif.

Dalam perspektif ini, pemerintah pusat mengemban tiga tugas pokok, yaitu meningkatkan efisiensi, menciptakan pemerataan atau keadilan, serta memacu pertumbuhan ekonomi dan memelihara stabilitas. Ketiga hal itulah yang jadi parameter keberhasilan pembangunan ekonomi.

IQBAL/BAL

Untuk sektor kelautan, seiring dengan pengembangan sektor-sektor lain, pemerintah meluncurkan paket pember-dayaan daerah melalui UU No.22/1999 tentang otonomi daerah. Sesungguhnya, pemerintah pusat bermaksud baik untuk memberikan kebebasan daerah mengelola sumber dayanya sendiri, termasuk sektor kelautan.

Tetapi karena miskin sumber daya manusia dan tanpa kesiapan infrastruktur yang mapan, otonomi daerah malah menjadi bumerang bagi Indonesia sendiri. Laut dikavling-kavling, diperebutkan antardaerah. Kesenjangan tidak tertutupi, justru makin lebar, terutama antara kawasan Barat dan kawasan Timur Indonesia.

"Oleh karena itu, keseluruhan aspek tersebut memerlukan kemitraan antara masyarakat, aparat, dan swasta," tukas Rokhmin di sela-sela seminar Dies Natalis Fakultas Pertanian UGM, Oktober 2001 lalu. Pemerintah lebih utama. Melalui unsur kelembagaan yang ada, wacana pemberdayaan sektor kelautan menjadi tanggung jawab lintas sektoral. Tidak hanya Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, tetapi juga Departemen Riset dan Teknologi, dan departemen-departemen lainnya.

Beberapa catatan panjang atas kegagalan prestasi produk perikanan semakin menggiring nelayan pada jurang kehancuran—jika tidak cepat ditangani. Pembentukan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid merupakan sebuah harapan besar bagi peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan nasional.

Departemen yang pertama kali dikomandani oleh Sarwono Kusumaatmadja ini berjanji tidak akan mengulang kesalahan di masa lampau. Sejak dibentuk dua tahun lalu, beberapa paket kebijakan telah diluncurkan. Sasarannya, pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, kemandirian nelayan dan sektor industri turunan lainnya, dan tentu saja mendorong roda perekonomian masyarakat pesisir. Apakah ini akan mengubah paradigma pembangunan Indonesia atau sekadar tambal-sulam dari yang sudah ada? Kita tunggu saja.

Riky Ferdianto,Vero
Tarli, Fauzul, Mahfud, Ibas

Devisa Hutama
Dealer Resmi *Satelindo* GSM
Kartu Pasca bayar, Kartu Perdana, Voucher,
Handphone segala merk
Head Office:
Jl. Kemuning 11, Sawitsari
Jogjakarta 55283
Tel/Fax. (0274) 889128
email: devisa@indosat.net.id
Outlet:
Jl. C. Simandjuntak 80
Jogjakarta 55223
Tel. 0816-68-1660
email: devisa@indosat.net.id

Nelayan, Kenyataan, dan Kepasrahan

TAN JO HANN/ DOK. INSIST

Amis menyeruak dari deretan keranjang dan peti es. Lantai basah, licin, pertanda baru saja diguyur air. Sisa-sisa genangan darah telah menguap. Riuh teriak bakul-bakul berebut menawar harga, merubung seseorang yang mengatur jalannya pelelangan. Sementara, 50 meter di sebelah utara, puluhan kapal tampak berjajar tak beraturan, setelah berhari-hari lelah mengarungi samudera.

Siang malam, dengus nafas perekonomian berembus kencang dari bangunan terbuka itu. Rata-rata 100—120 ton ikan berbagai jenis setiap harinya tumpah ruah di lantai, menanti tawaran harga tertinggi. Puluhan juta rupiah pun berputar dari kantong ke kantong. Dari tempat itu pulalah, ribuan jiwa menggantungkan hidupnya. Mulai dari keluarga nelayan, pemilik kapal, pedagang besar dan kecil, hingga petugas-petugas dari Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Tani.

Itulah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Tani Brondong. Bangunan permanen dengan rangka terbuka itu terletak sekira 200 meter dari gerbang utama Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Sejak didirikan tahun 1975, aktivitas pendaratan perikanan laut untuk Kabupaten Lamongan dan sekitarnya terpusat di sana. Keramaian bandarnya telah mengantar TPI Brondong menjadi salah satu barometer harga pasaran ikan nasional.

Kapal-kapal nelayan yang beroperasi di Brondong pada umumnya adalah kapal motor (*inboard powered boat*) dengan volume 10–25 GT (gross ton). Ukurannya yang lumayan besar dengan fasilitas memadai—misal dengan adanya peti es penyimpan ikan, memungkinkan nelayan Brondong untuk melaut berhari-

hari, terkadang sampai ke Pulau Masalembo di dekat Madura, atau bahkan hingga ke dekat perairan Kalimantan. Wajar jika pendapatan mereka cukup lumayan. Setelah melaut selama satu minggu, tiap kapal bisa memuat hasil senilai tak kurang dari 5 juta rupiah.

Sistem bagi hasil antara nelayan pemilik kapal dan anak buah kapal (ABK) pun umumnya telah cukup jelas. Pendapatan kotor dikurangi dengan biaya operasional (bahan bakar, es pendingin ikan, dan perbekalan), biaya retribusi ke KUD, dan 5% untuk pembenahan kapal. Hasil bersihnya dibagi dua antara nelayan pemilik kapal dan ABK yang rata-rata 7–10 orang tiap kapal. Barulah, antar-ABK meratakan hasil melautnya.

Dengan sistem bagi hasil seperti ini, seorang ABK rata-rata bisa mengantongi 200 hingga 300 ribu rupiah sekali mendarat untuk melaut selama seminggu. Bila hanya melaut sehari semalam (*one day fishing*), 25 sampai 50 ribu pun bisa dipastikan masuk ke kocek. Walaupun musim yang menjanjikan banyak ikan tak terjadi sepanjang tahun, seorang awak kapal mampu menangguk pendapatan rata-rata 1,5 juta rupiah setiap bulannya.

"Profesi sebagai nelayan cukup menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami," ujar Mujiono (32), seorang nelayan pemilik kapal yang ditemui BALAIRUNG. Sebagai pemilik alat tangkap, tentu ia mendapatkan jatah yang lebih dari lumayan. Tapi, pendapatan ini tak begitu mudah diraih. Untuk mendapatkan satu buah kapal motor dengan volume 10 GT seperti milik Mujiono, seorang nelayan harus merogoh koceknya tak kurang dari 150 juta rupiah.

Sering karena tak pernah ada kredit yang datang dari pemerintah, patungan modal antarnelayan pun jadilah. Dari 4.000 orang nelayan Brondong, tak lebih dari 200 orang yang memiliki kapal.

Walau harus mengeluarkan modal hingga ratusan juta, kembalinya modal Mujiono seolah tinggal menunggu waktu saja. Sebab, setiap kali kapalnya mendarat, ia bisa mendapatkan hampir 50% bagian dari hasil bersih tangkapan nelayan yang memakai kapalnya. Apalagi kalau dia pun turut melaut, jatah yang diperoleh bisa lebih besar lagi.

Dalam sebulan, rata-rata 10 juta rupiah sukses diraup oleh Mujiono. Padahal, seorang ABK yang tak memiliki kapal hanya mendapatkan sekira 5% dari hasil bersih untuk sebuah kapal yang dioperasikan oleh sepuluh orang. Tak cuma itu saja. Antara pemilik dan pemakai kapal telah ada kesepakatan tak tertulis bahwa pemakai kapal harus membeli bahan bakar (solar) kepada pemilik kapal. Dan tak ayal, para juragan kapal seperti Mujiono pun memanfatkan kesempatan ini untuk menaikkan harga solar di atas harga resmi.

Kesepakatan "tahu sama tahu" antara pemilik kapal dengan ABK ini tentu saja menyudutkan posisi ABK sebagai pihak pengguna kapal. Pemasukan yang diperoleh antara pemilik kapal dengan pemilik tenaga begitu senjang. Namun, ABK sendiri sebagai "korban" tak pernah mengutak-atik masalah ini. Merasa telah memperoleh kecukupan nafkah, nasib diri yang banyak rugi jarang teringat. "Dengan lima puluh ribu sehari, saya sudah bisa menghidupi lima anak. Bahkan yang dua sudah *mentas* (mandiri—*Red.*)," pamer Marwan (52), awak kapal kelahiran Brondong.

Di TPI Mina Tani Brondong, nelayan langsung memasarkan hasil tangkapannya kepada para tengkulak. Tengkulak-tengkulak yang beroperasi di Brondong inilah yang nantinya akan menyalurkan hasil laut ke pasar-pasar ikan di sekitar Brondong, bahkan hingga jauh ke luar kota.

Menurut catatan KUD Mina Tani, hasil perikanan tangkap dari Brondong ini 60% didistribusikan untuk konsumsi masyarakat Jawa Timur, sedangkan di Jawa Tengah dan Jawa Barat masing-masing 20%. Jika sedang paceklik ikan—biasanya terjadi antara bulan Desember-Januari— tengah melanda Brondong, tengkulak cukup cerdik membalikkan alur distribusi dengan cara mengambil ikan di luar kota, lalu memasarkannya di TPI Brondong. Ikan-ikan "pendatang" ini biasanya berasal dari daerah Prigi, Muncar, Banyubiru, dan Pekalongan.

Meski tak perlu menyediakan modal berupa alat tangkap, seorang tengkulak pada umumnya memiliki strata ekonomi di atas nelayan biasa. Pantas saja karena tak semua orang mampu menggeluti medan usaha ini. Berbeda dengan nelayan yang cukup menyediakan kekuatan fisiknya untuk melaut hingga berhari-hari, tengkulak haruslah orang bermodal besar yang jeli dan lihai dalam melihat peluang-peluang pasar. Bahkan, acapkali golongan profesi ini menjadi mata rantai distribusi yang paling dominan dalam menentukan harga ikan di pasaran.

Asmono, misalnya. Saat ditemui BALAIRUNG, pria berusia 38 tahun ini mengakui, rata-rata Rp3 juta bisa digenggamnya dalam sebulan. Untuk itu, ia mengambil ikan dari nelayan lebih kurang 30 ton setiap bulannya.

Bersama 530 rekan seprofesinya yang beroperasi di TPI Brondong, Asmono menguasai satu-satunya pintu pemasaran hasil perikanan laut bagi lebih

IQBAL/BAL

dan 8.500 nelayan di desa Brondong, Blimbing, dan Kandang Semangkon. Sebab amat jarang—bahkan tak ada sama sekali—nelayan yang sekaligus berprofesi sebagai pedagang. Keberadaan KUD Mina Tani pun tak lebih sebagai petugas dari Pemda Lamongan yang turun ke lapangan untuk menarik biaya retribusi.

Dalam setiap transaksi di TPI, KUD sebagai pengelola TPI menarik retribusi sebesar 3% dari total nilai transaksi. Jumlah ini biasanya ditanggung oleh dua belah pihak: 1.5% oleh nelayan yang menjual hasil tangkapan dan 1,5% oleh tengkulak yang membeli. Sebagai gantinya, KUD, yang beranggotakan nelayan dan pedagang (tengkulak), memberikan beberapa fasilitas kepada anggotanya. Bantuan kesehatan, kecelakaan, kematian, dan bantuan masa paceklik adalah servis-servis yang berhak didapatkan oleh anggota KUD.

Karena KUD tak memiliki peran dominan dalam pengendalian harga, secara *de facto* Asmono dan semua rekannya sesama bakul (tengkulak) adalah penguasa mekanisme pasar di TPI Brondong. Mereka seolah bebas menentukan harga secara sepihak. Bahkan, tak tanggung-tanggung, kerapkali nilai sebesar 150% menjadi angka minimal yang dipatok sebagai target laba para tengkulak ini. "Kalau misalnya saya ambil barang seharga dua ribu, ya paling tidak saya harus menjualnya empat ribu lima ratus," aku Asmono. Itupun ia selalu menjual dagangannya dalam bentuk ikan yang sudah dikeringkan. Padahal, harga ikan yang telah dikeringkan bisa turun berlipat dibandingkan ketika masih segar.

Tanpa sadar, nelayan kecil Brondong tengah berhadapan dengan dua kelompok borjuis lokal yang menguras banyak hasil usaha mereka. Tengkulak, dengan otoritasnya mematok harga ikan di pasaran, hanyalah salah satu mata rantai distribusi yang memperpanjang rente perekonomian. Mafia pertengkulakan dengan leluasa mempermainkan harga. Nelayan sama sekali tak punya posisi tawar yang kuat untuk sedikit mengekangnya.

Juragan kapal pun mengambil bagian hasil yang jauh lebih besar. Mereka bisa menduduki posisi ini sebab memiliki akses kapital yang tinggi. Tak semua orang bisa mendapatkan segepok uang senilai 150 juta rupiah untuk membeli satu buah kapal seukuran 10 GT. Apalagi, ada juragan kapal yang mempunyai kapal hingga 5 buah.

Tak sedikit di antara mereka yang mendapatkan modal dari warisan keluarga. Bangunan ekonomi rumah tangga yang disusun berpuluh tahun dari hasil melaut juga. Maklum saja, pesisir Tuban dan sekitarnya (termasuk Lamongan) telah dikenal sebagai daerah pelabuhan yang maju semenjak ratusan tahun silam, baik sebagai pelabuhan dagang maupun perikanan.

Namun begitu, nelayan Brondong dan sekitarnya cukup merasa puas dengan

kondisi ini. Mereka merasa cukup bisa hidup layak dengan mengandalkan aktivitas satu-satunya: melaut. Di perkampungannya pun amat sulit ditemui pemandangan yang konon telah jadi stereotip kampung nelayan: kotor, kumuh, dan miskin. "Tingkat kehidupan nelayan di sini rata-rata makmur," ujar Ali Fauzi Ridlwan, S.H., Kepala KUD Mina Tani Brondong.

Walau nelayan Brondong menempati peran sebagai objek eksploitasi oleh berbagai pihak, cerita tentang nelayan Brondong relatif tampak sebagai sederet cerita kesuksesan. Akan sangat berbeda kisah yang terdengar manakala kita menengok sekira 85 kilometer ke arah timur. Kenjeran, nama ini pernah mencuat di bulan Juni 1999 karena menghebohkan jagad kelestarian lingkungan negeri ini. Melalui sebuah penelitian diketahui bahwa kandungan logam berat dalam perut ikan hasil tangkapan masyarakat di pesisir timur Surabaya ini telah jauh melewati ambang batas standar kesehatan yang ditetapkan oleh WHO (World Health Organization).

Seperti juga Brondong, sebagian besar warga Kampung Kenjeran mengepulkan asap dapurnya dengan mengharapkan limpahan berkah dari laut. Banyak faktor yang memaksa mereka untuk tak meninggalkan tanah pesisir yang telah dihuni semenjak puluhan, bahkan ratusan tahun silam.

Kemiskinan, selalu menjadi stempel tebal yang sulit terhapus dari wajah-wajah legam para penghuni pesisir ini. Sekilas, rumah-rumah permanen dengan lantai keramik warna-warni menghias setiap sudut kampung Kenjeran. Namun tampilan luar itu akan segera pupus manakala menyimak kisah pilu kehidupan ekonominya.

Di kawasan yang tercatat sebagai daerah IDT (Inpres Desa Tertinggal) ini, tak ada sambilan pekerjaan yang bisa mereka kerjakan saat paceklik tiba. Berbeda misalnya dengan nelayan di pantai selatan Yogyakarta yang bisa saling mempertukarkan antara aktivitas melaut dan bertani. Bagi warga Kenjeran, jangankan bertani, tanah yang mereka miliki pun kian sempit dari waktu ke waktu.

Kehadiran proyek Perumahan Pantai Mentari milik PT Jawa Nusa Wahana (JNW) pada tahun 1985 menderakan nestapa baru bagi Kenjeran. Tanah warisan moyang terpaksa dilepaskan dengan ganti rugi Rp1.250 per meter. Mencoba berontak, tak ada daya. Preman-preman berbaju loreng, bersepatu lars, dengan pistol di pinggang mengawal di sekeliling bos-bos PT JNW. Sukseslah Perumahan Mentari berdiri angkuh di samping Kampung Kenjeran.

"Pemerintah tak pernah memperhatikan nasib nelayan," keluh Sohib (39), nelayan Kenjeran. Diucapkannya kalimat sederhana itu bukannya tanpa alasan. Salah satu sumber kejengkelannya adalah masalah pengadaan air bersih.

Semenjak puluhan tahun silam, air minum dari PDAM tak kunjung bisa dinikmati. Padahal pada 1985 jaringan air bersih dengan lancar telah mengalir ke Perumahan Pantai Mentari. Sehingga, tiap pekannya, Sohib harus melepaskan uang tak kurang dari 3.500 sampai 4.000 rupiah untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi keluarganya. Beruntung dia memiliki modal berupa alat tangkap, satu unit perahu motor tempel (*outboard powered boat*) senilai 7 juta rupiah dengan kapasitas awak 2–3 orang. Dari modal satu-satunya itu, ia memperoleh penghasilan yang cukup untuk sekadar menyambung hidup.

"Nelayan itu cari uang sulit, penghasilan tak bisa dihitung. Kadang sehari bisa 200 hingga 250 ribu, tapi lebih sering tak dapat apapun, bahkan *nombok*," ujar Sohib. Seperti umumnya nelayan, silih bergantinya musim amat berpengaruh terhadap produktivitas kerja mereka. Memang, kedatangan musim yang menjanjikan banyak ikan adalah saat yang ditunggu-tunggu. Tapi ketika paceklik tiba, tak ada alternatif lain selain menganggur. Jadilah, perabotan yang gagah menghias rumah berpindah tangan demi keselamatan perut.

Sebenarnya, di antara warga Kenjeran pun telah banyak keinginan untuk beralih profesi, meninggalkan kehidupan pesisir. Selain tak menjanjikan penghidupan yang layak, risiko tinggi bekerja di laut termasuk alasan utama pula. Sering, lahan mereka direbut oleh kapal-kapal nelayan yang lebih besar.

Di lain waktu, ikan habis karena nelayan dari daerah lain bertindak ilegal dengan menggunakan bom atau racun untuk memperoleh tangkapan dalam jumlah besar. Kompetitor-kompetitor mereka itulah yang dengan enaknya menghadapkan nelayan kecil dengan kelangkaan sumber daya (*environmental scarcity*). Sumber daya menjadi langka bagi nelayan kecil karena keterbatasan sarana. Tapi bagi nelayan besar, hal itu tak begitu merisaukan.

Apalagi ketika nelayan liar menggunakan bahan peledak dan zat kimia, tak bisa pilih-pilih ikan yang mati. Baik ikan yang sudah cukup layak dikonsumsi maupun yang masih kecil, semua akan mati. Berbeda dengan nelayan Kenjeran yang masih menjunjung satu kearifan: pantang

TAN JO HANN

IQBAL/BAL

mengambil ikan yang masih kecil. "Kalau yang tertangkap ikan yang masih kecil, tangkapan tersebut harus dilepas kembali," jelas Sohib.Tak cuma itu saja risiko nelayan kecil. Yang paling parah adalah aksi perompak yang merampas perahu mereka.

Sama dengan nelayan Brondong, nelayan Kenjeran pun umumnya langsung memasarkan hasil tangkapannya ke tengkulak. Bedanya, di Kenjeran tengkulak-tengkulak langsung mendatangi rumah-rumah penduduk untuk mendapatkan barang dagangannya. Tak ada TPI di Kenjeran. KUD dan koperasi lain pun tak dapat hidup karena tak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Juni 1999, akibat pembuangan limbah industri di Surabaya, Kenjeranlah yang kena getah terpahitnya. Logam-logam berat semacam merkuri (Hg) mencemari perairan. Akibatnya, ikan-ikan tangkapan nelayan Kenjeran pun sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Tentu saja konsumen menolak. Ekonomi nelayanpun terpuruk. Di saat seperti itulah, mafia tengkulak dengan licik mengail di air keruh. Ikan dari Kenjeran tetap dibeli, namun dengan harga yang sangat murah (*Tempo*, 29/8/99).

Nelayan Kenjeran sungguh tak bisa lepas dari cengkeraman tengkulak. Banyak di antaranya yang bahkan telah memiliki juragan (tengkulak) tetap. Mengikat kontrak dengan tengkulak seringkali menjadi pilihan yang terpaksa ditempuh. Maklum, kala paceklik tiba tak ada sumber penghasilan yang layak bagi nelayan. Sementara, perut tak akan pernah bisa diajak berkompromi. Di saat kritis semacam ini, nelayan melakukan sebuah strategi mempertahankan hidup yang amat lazim terjadi di Kenjeran, yaitu meminjam uang kepada juragan.

Tengkulak tampil bak pahlawan. Pinjaman uang penyambung nafas mengalir dengan ringan. Konsekuensinya, sebuah syarat dari juragan tak boleh terlupa: nelayan yang bersangkutan harus memasarkan hasil tangkapannya hanya kepada juragan tersebut. Tentu saja, ketika tengkulak telah menggenggam erat hak monopoli semacam itu, lagi-lagi mereka leluasa untuk menjungkirbalikkan harga.

Selain akibat tak berfungsinya lembaga koperasi di Kenjeran, sepak terjang tengkulak kian leluasa karena Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai bank pemerintah juga tak menawarkan apa pun kepada nelayan. "Mau pinjam ke BRI sulit, birokrasinya berbelit-belit," tambah Sohib.

Lembaga koperasi yang mandul dan BRI yang tak membawa manfaat langsung bagi nelayan membuat tengkulak selalu tampil bak juru selamat. Kala paceklik datang, nelayan yang enggan mengikat kontrak dengan juragan akan *megap-megap* mempertahankan hidup. Kebingungan nelayan yang tak punya juragan ini membuka peluang munculnya kelompok baru, lintah darat, yang seringkali merupakan wajah lain dari tengkulak pula. Kepada nelayan yang tidak mengikat kontrak dengannya, ia memberikan pinjaman uang dengan bunga 10% per bulan. Sering tak ada pilihan lain bagi nelayan. Dan, dari hari ke hari posisi nelayan kecil kian terjepit.

Brondong dan Kenjeran hanyalah dua buah ilustrasi kecil tentang kehidupan nelayan Indonesia. Brondong relatif makmur dengan tingkat ekonomi di atas rata-rata. Kemakmuran yang datang akibat kepemilikan modal yang memadai serta fasilitas dari pemerintah yang (minimal) dapat menunjang kelancaran pemasaran hasil bagi nelayan. Kenjeran dengan sejuta deritanya mewakili gambaran dan warna kehidupan sebagian besar nelayan di Indonesia.

Ayam yang mati di lumbung padi, begitu mungkin pengibaratan yang paling pas untuk mencoretkan sketsa buram kehidupan nelayan. Karena kemiskinan justru diderita oleh golongan masyarakat penghuni sektor yang memiliki sumber daya sangat melimpah.

Kemiskinan yang diderita nelayan bisa diakibatkan oleh faktor struktural, kultural, maupun faktor alamiah. Akses modal yang rendah disebabkan oleh kedudukannya yang marjinal dalam struktur sosial. Akibatnya, kreditur tidak percaya, modal dari bank sulit diakses. Sebaliknya, semakin tinggi posisi mereka dalam struktur kelas, semakin besar pula akses mereka pada sumber daya, baik modal, teknologi, informasi, maupun pasar.

Ditinjau dari sisi kultural, banyak budaya lokal pesisir yang kurang mendorong kemajuan perekonomian nelayan. Budaya konsumtif dan demonstratiflah yang paling dominan. Sepanjang pengamatan BALAIRUNG di beberapa tempat, yaitu Brondong (Lamongan), Tuban, Kenjeran (Surabaya), dan Pantai Depok (Yogyakarta), kultur negatif ini begitu kental mewarnai kehidupan masyarakat pesisir.

Di Tuban, misalnya. Di kota pesisir ini sering digelar kesenian rakyat, Tayub. Untuk bisa menari berpasangan (*ngibing*) dengan penari Tayub, seorang laki-laki harus memberikan tips sesuai kebiasaan yang telah disepakati oleh masyarakat setempat. Seorang penonton laki-laki yang mampu memperlihatkan keroyalannya membayar mahal untuk bisa *ngibing*, akan terdongkrak prestisenya di mata masyarakat. Untuk itulah, seringkali nelayan menghamburkan hasil melautnya selama berhari-hari hanya untuk memperjuangkan gengsi di

lingkungannya.

Dalam bentuk lain, kegemaran berfoya-foya dengan menggunakan hasil melaut ini juga ditemui di ketiga tempat lainnya. Di Kenjeran dan Pantai Depok Yogyakarta, stempel kesuksesan akan didapatkan dengan mendemonstrasikan kepemilikan materi: rumah, perabotan, dan kendaraan.

Setelah sukses menangguk pendapatan yang besar dari hasil melaut, biasanya masyarakat nelayan di kedua daerah itu membelanjakannya untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut. Namun ketika paceklik tiba, karena tak ada jalan lain, barang-barang yang telah terlanjur mendongkrak gengsi itu dijual kembali demi kepulan asap dapur. "*Nggak* terpikir buat menabung," aku Tugiran (34), nelayan kecil di Depok, Bantul, Yogyakarta.

Faktor alam adalah faktor terakhir yang paling sulit diatasi. Mata pencaharian di laut yang sangat rentan akibat musim yang tak tentu, meyebabkan hidup mereka penuh ketidakpastian. Walhasil, penghasilan pun sangat fluktuatif. Selisih penghasilan antara musim panen ikan dengan musim paceklik terlalu jauh. Kembali, cara mengatasinya terbentur pada akses teknologi dan informasi.

Sebenarnya, andaikan mereka bisa mengakses teknologi yang cukup memadai, nelayan sedikit banyak akan mampu mengatasi kendala musim ini. Sebab, terkadang di satu tempat sedang paceklik, di tempat lain tengah datang musim panen. Apabila memiliki peralatan yang cukup canggih, niscaya mereka bisa melaut sepanjang musim.

Peralatan melaut memang menjadi kendala yang sangat serius. Namun hal ini lagi-lagi kembali pada permasalahan aksesibilitas. Akses modal, teknologi, dan informasi hanya dinikmati oleh mereka yang kian lama kian mendesak posisi nelayan.

Permasalahan ini diperparah dengan tingkat pendidikan nelayan yang rendah. Di Kenjeran, rata-rata tingkat pendidikan warganya hanyalah lulusan SLTA. Meski ada, namun amat jarang yang melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Bahkan masih ada yang memilih berhenti sekolah setelah lulus SD.

Kesadaran belajar masyarakat nelayan pada umumnya banyak terbentur pada kondisi ekonomi. Lingkaran setan kebodohan dan kemiskinan ini diperburuk dengan mutu pendidikan sekolah yang tak sedikit pun bicara soal kehidupan nelayan dan laut pada umumnya.

Nelayan, melalui bentangan layar dan tebaran jalanya, telah menyumbang 22% dari total GDP (*Gross Domestic Product*). Setiap tahun, pundi-pundi devisa negara pun dituanginya dengan US$2,2 miliar. Selayaknyalah program pemberdayaan masyarakat nelayan sungguh-sungguh bisa menjadi formula jitu untuk membalas budi yang tak kunjung terbalas. Dan nelayan, di manapun, segera berhenti memerankan lakon derita ini: menjadi termiskin di antara seluruh yang miskin.

Iqbal Aji Daryono
Nurul, Zaenal,
Ririn, Anas

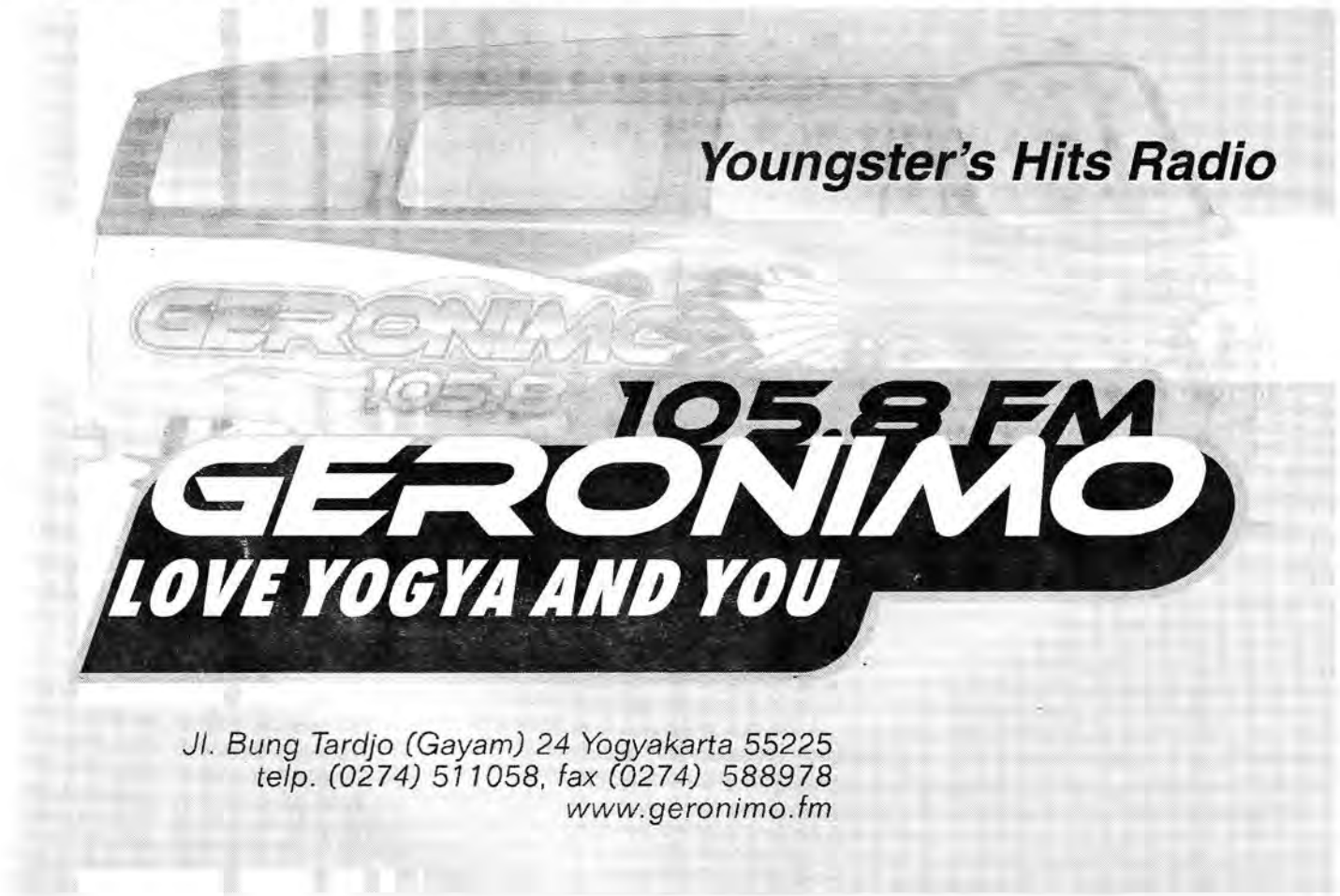

Chitin-Chitosan:
Mengais Limbah, Berb

Sosoknya tak enak dilihat. Bau busuk menyengat akibat NH_2 (senyawaan nitrogen) yang bersemayam di dalamnya. Belum lagi, ia juga termasuk berbahaya karena mengurangi kadar oksigen bumi. Itulah limbah produk kelautan, efek samping industri perikanan yang tak terolah.

Fenomena meningkatnya permintaan kadar oksigen—BOD (*Biological Oxygen Demand*) dan COD (*Chemical Oxygen Demand*)—menjadi risiko yang dihadapi negara pengekspor hasil laut seperti Indonesia. BOD dan COD merupakan salah satu indikator tingkat pencemaran lingkungan, terutama pencemaran yang terjadi di perairan. Produk samping industri perikanan, seperti pengolahan udang dan kepiting beku, yang berupa sisa-sisa cangkang kepiting, kulit, dan kepala udang, memang cenderung mengikat oksigen. Akibatnya, kadar oksigen perairan kemudian menjadi berkurang dan bisa membuat tumbuhan dan binatang air mati.

Seiring meningkatnya ekspor, intensitas limbah semakin menumpuk. Ekspor udang Indonesia pada 1997 tercatat sebesar 92.626 ton. Angka ini naik menjadi 127.535 ton pada tahun 1998. Dari angka tersebut, dihasilkan tak kurang dari 76.521 ton limbah pada 1998. Hal ini berlainan dengan ekspor kepiting. Pada 1998 ekspor kepiting hanya mencapai 1.636 ton, menurun dibandingkan 1997 yang sebesar 2.177 ton (lihat Tabel 1). Sejumlah 55%, atau sekira 899,8 ton dari produk kepiting di atas berupa limbah cangkang.

Sabda Shakespare, "*A sea change something rich and rare*", telah terbukti. Sekalipun berbentuk limbah, sisa-sisa produk itu tetap berguna. Sebenarnya, penanganan khusus limbah kelautan sudah dikenal sejak zaman *baheula*. Nenek moyang bangsa Indonesia telah memanfaatkan limbah dengan teknologi tradisional. Limbah-limbah itu digunakan untuk bahan campuran terasi, kerupuk, dan petis.

Cara lain untuk mengatasi limbah perikanan, khususnya udang, juga telah dikenal. Lebih mudah, murah, efisien, dan ramah lingkungan lagi. Udang dapat diolah dengan kulitnya, diblender, baru dicampurkan dengan makanan lain seperti bakwan. "Namun, cara ini tidak tersosialisasikan pada masyarakat," tukas Dr. Ir. Supadmo, M.S (48), ahli biokimia nutrisi Fakultas Peternakan (FPT) UGM.

Selain menggunakan teknologi tradisional, Indonesia juga telah menggunakan teknologi modern.

uru Faedah

Hasilnya, tepung kepala udang, hidrolisis protein ikan, dan perasa *(flavour)* makanan. Satu potensi menarik yang belum tergarap adalah *chitin* dan *chitosan*. *Chitin* dan *chitosan*, mungkin masih asing di telinga kita, tapi tidak bagi ilmuwan. Ini bukanlah produk makanan ringan. Orang biasa pun sering menjumpainya sebagai campuran produk lain.

Chitin digunakan sebagai bahan campuran lensa kontak dan *lotion* (pelembab kulit). Di bidang medis, *chitin* berperan untuk meningkatkan fungsi sel hewan guna melawan sel tumor dan bakteri patogen. Selain itu, *chitin* dipakai dalam pengolahan pangan sebagai pemantap sistem emulsi, pengikat air-lemak, pewarna makanan, dan sebagai bahan pengembang roti tawar.

Sementara, *chitosan* mampu mengakumulasi dan mengikat logam berat yang berbahaya, seperti merkuri (Hg), timbal (Pb), cadmium (Cd), dan uranium. Teknologi ini dapat diterapkan dalam industri air minum (PAM) untuk penanganan air limbah. Sari buah apel, bir, dan anggur pun bisa dijernihkannya. Di bidang medis, ia diperlukan untuk membuat benang dan kulit sintetis serta pembungkus obat (kapsul). Yang paling menarik, *chitin* dan *chitosan* dapat menurunkan kadar kolesterol darah.

Dari hasil penelitian Supadmo, *chitosan* lebih berpotensi dibandingkan *chitin* dalam menurunkan kadar kolesterol. Doktor yang sekaligus Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum FPT UGM ini mengadakan penelitian pada ayam *broiler* yang diberi pakan berkandungan *chitosan*. Ternyata, *chitosan* dapat mereduksi total kolesterol plasma (kolesterol jahat).

Indikator positif ini diperkuat hasil penelitian tahun 1994 yang dilakukan oleh Departemen Riset Dermatologi ARS Medicina (Helsinki, Finlandia). Asupan *chitosan* bisa menurunkan berat badan manusia hingga 8% dalam 4 minggu. Keuntungan lainnya, *chitosan* tidak berefek samping, aman bagi kesehatan.

Lebih jauh lagi, *chitosan* bisa menjadi bahan baku alternatif minuman berserat tinggi. Serat *chitosan* dapat diklasifikasikan sebagai serat hewani,

DOK. INSIST

tetapi uniknya mudah dihidrolisis oleh enzim pencernaan manusia dan mampu menurunkan kolesterol. *Chitosan* cocok dikonsumsi untuk program diet.

Secara kimia, *chitin* merupakan polisakarida (karbohidrat yang tersusun atas banyak gugusan gula) yang dijumpai dalam kulit udang-udangan (*Crustaceae*) dan serangga (*Insecta*). *Chitin* berbentuk serbuk putih kasar beraroma khas udang dan kepiting, sedangkan *chitosan* merupakan olahan lanjut dari *chitin* yang berbentuk serbuk halus. *Chitosan* didapat dengan menghilangkan gugus asetil *chitin*, memakai alkali (basa) kuat.

Chitin berbentuk polimer (gabungan molekul yang membentuk rantai panjang) 2-asetamindo-2-deoksi-D-glukan yang berikatan dengan 1—4 beta (lihat struktur *chitin* dan *chitosan*). *Chitin* bersifat unik, tidak larut dalam air dan pelarut organik pada umumnya, tetapi larut dalam basa dan asam encer.

Chitosan juga tidak larut dalam air, alkali jenuh, alkohol, dan aseton, tapi larut dalam asam lemah seperti asam format dan asam asetat. *Chitosan* tidak beracun dan bersifat *biodegradable* (bisa diuraikan alam). Karena sifatnya yang *biodegradable*, *chitosan* tidak mencemari lingkungan.

Pada dasarnya produk kelautan ini bergizi tinggi, kadar proteinnya 41,82%, lemak 4,12%, dan *metabolizable energy* (ME) 2.050 kkal/kg. Namun, pemanfaatannya belum tersosialisasikan dengan baik. Selama ini, sebagian besar makanan bergizi didapatkan dari tumbuhan. Proporsinya sebagai sumber makanan mencapai 98% kalori, 90% protein, 93% lemak. Sedangkan daging, telur, susu dan ikan, dimanfaatkan kurang dari 1%.

Alkisah, teknologi pengolahan *chitin* dimulai di Nancy, Perancis, pada tahun 1811. *Chitin* berlanjut menjadi *chitosan* di tahun 1939. Tetapi, ilmuwan mulai ramai membicarakannya pada tahun 1984 di seminar tentang *chitin-chitosan* dan enzim-enzim terkait yang diadakan di Delaware, AS. Pasca-seminar, pembuatan *chitin* cukup marak di negara maju dan terus berkembang menjadi *chitosan*.

Sedangkan di Indonesia, penelitian limbah perikanan ini dilakukan tahun 1992 oleh Suhardi. Peneliti dari Pusat Antar Universitas (PAU) Pangan dan Gizi UGM ini bahkan menulis monografi setebal 509 halaman tentang *chitin* dan *chitosan*.

Pada 1997, Y.S. Darmanto (50), guru besar madya dalam Ilmu Hasil-Hasil Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, juga melakukan hal yang sama. Penelitian *chitin* dan *chitosan* oleh Y.S. Darmanto diawali di Jepang, kemudian dilanjutkan di Indonesia bersama empat orang mahasiswanya.

Penelitian Darmanto ini metodenya mengadopsi Jepang. *Chitin* diperoleh dengan demineralisasi (memisahkan mineralnya) dan deproteinisasi (memisahkan ikatan protein) limbah untuk mendapatkan produk murni. Demineralisasi menggunakan HCl berkadar 10% dengan pH tak lebih dari 4,5. Proses ini dibantu juga dengan penggunaan reagen EDTA (*Ethylene Diaminetra Acetic Acid*).

Sedangkan proses deproteinisasi menggunakan larutan NaOH lebih dari 3,5%. Total waktu yang diperlukan sekitar 3–4 hari. Selanjutnya, untuk mendapatkan *chitosan*, dilakukan proses *deasetilisasi* (menghilangkan gugus asetil CH_2OH) dengan merendam *chitin* dalam larutan NaOH 60% (lihat bagan proses pembuatan *chitin* dan *chitosan*).

Indonesia berpotensi mengembangkan produk yang satu ini. Tetapi minimnya peralatan menjadi kendala yang serius. "Untuk mengeringkan produk saja, di Jepang sudah ada *fish dryer*, sedangkan di sini hanya menggunakan kipas angin. Sehingga, kadar air yang dihasilkan 15—16%, sedangkan di Jepang 8%," ujarnya. Kadar air yang tergolong tinggi berpengaruh pada rendahnya mutu produk selanjutnya.

Wakil Dekan II Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ini juga berkeluh, "Untuk mengaduk pun secara manual, menggunakan tangan bukan dengan mesin pengaduk khusus." Selain itu, kecepatan *centrifuge* (salah satu jenis alat pemisah) yang digunakan hanya 3000–4000 rpm (*rotation per minutes*, putaran per menit), lain dengan Jepang yang 100.000 rpm. Akibatnya, kadar air, kekentalan, derajat asetilisasi, dan kandungan lemak lebih buruk kualitasnya. Dari 100 gram limbah dihasilkan 20–30% *chitin*, yaitu 20–30 gram. Setelah menjadi *chitosan*, produk yang tersisa tinggal 60–70 % saja, yaitu 12–21 gram.

Selain *centrifuge*, *fish dryer*, dan pengaduk, diperlukan juga alat penggiling, *suction filter* (saringan dengan penyedot), pengayak, dan pemisah (separator). Alat-alat ini sebenarnya bisa dibuat di Indonesia oleh industri mesin dasar.

Secara umum, rata-rata kendala dalam

pemanfaatan limbah perikanan di Indonesia adalah teknologi yang tertinggal. Akibat minimnya peralatan, biaya, buku-buku, atau literatur, teknologi yang dikuasai tidak membuahkan hasil maksimal. *Chitin* dan *chitosan* hanyalah sedikit contoh.

Teknologi tradisional pun hasilnya tidak memuaskan. Terasi misalnya, hanya bisa dimanfaatkan untuk makanan. Jika ada penelitian lebih lanjut, kemungkinan bisa digunakan untuk berbagai produk. Hal ini tentu berdampak positif, minimal mengurangi intensitas limbah.

Pemerintah sebenarnya sudah cukup jeli memperhatikan sektor teknologi kelautan baik tradisional maupun modern. Menurut Umayati, pekerja industri terasi Tambakrejo, pengusaha mendapat bantuan modal dari KUD Mina Rp10 juta untuk 8 orang, sehingga masing-masing pengusaha mendapat pinjaman dana tanpa bunga Rp1,25 juta per tahun.

Hal ini cukup membantu kinerja masyarakat pengrajin dan meningkatkan produksi. Terlebih lagi anggaran pendidikan relatif meningkat, berimplikasi pada meningkatnya dana penelitian ilmiah. Bahkan sekarang ini banyak dijumpai advertorial dari perusahaan yang menawarkan bantuan biaya penelitian.

Memang sudah saatnya Indonesia menerapkan teknologi tepat guna, mengingat penguasaan teknologi yang bervariasi, mulai dari tradisional sampai modern. Tak hanya dalam pengolahan limbah ikan. Pakar-pakar Indonesia pun sudah mampu menguasai teknologi pengolahan dan produk perikanan, mulai dari pembekuan, pengeringan, pengasapan, penggaraman, pemindangan, pengalengan, dan pengemasan. Tetapi sayangnya, teknologi-teknologi ini belum tersosialisasikan pada nelayan (*Suara Pembaharuan*, 30/4/00).

Penelitian lanjutan dalam teknologi pengolahan limbah laut sangat diperlukan. Sebagai isyarat, bioteknologi harus dikembangkan, salah satunya dari potensi kelautan. Siapa tahu *chitin* dan *chitosan* bisa menjadi alternatif pangan masa depan.

Ita M.D.
Shiza Taufa, Tarli

Si Coklat dari LimbahTambakrejo

Lengang. Hanya sesekali terdengar suara-suara orang berceloteh dalam bahasa Jawa. Dengan tangan-tangan coklat semu kemerahan, perempuan-perempuan itu memegang benda berbentuk lontong. Dibungkusnya benda itu dengan daun pisang. Aroma amis menyengat seantero ruangan.

Usut punya usut, benda itu ternyata terasi. Aromanya khas, membuat pusing bagi yang tidak menyukai, tapi menambah nikmat masakan bagi yang menyukai. Terasi, adalah komoditas Indonesia yang khas. Akhir-akhir ini, terasi bahkan mulai dikenal di luar negeri dengan nama *shrimp paste*.

Perempuan-perempuan itu adalah warga kampung Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas—sekira 20 kilometer dari Pelabuhan Tanjung Mas—Semarang Utara, Jawa Tengah. Tambakrejo memang kurang terkenal sebagai penghasil terasi. Di pulau Jawa, nama-nama Juwana, Rembang, Cirebon, Semarang, Tuban, dan Sidoarjo lebih naik pamornya.

Jika ingin menemui produk yang unik, Tambakrejo adalah sasaran yang jitu. Pengrajin berani membuat terasi tanpa label yang *toh* tetap laku di pasaran. Cara mengemasnya sederhana, hanya dibungkus daun pisang. Zat-zat dalam daun pisang yang mengering menyebabkan terasi lebih harum dan berasa manis.

Terasi buatan Semarang ini berbentuk khas seperti lontong, berbeda dengan terasi daerah lain seperti Tuban yang berbentuk kotak. Uniknya lagi, terasi ini aman bagi kesehatan karena tidak mengandung bahan pengawet. Menurut Taslimah (25), pekerja industri terasi, pengawetnya adalah panas. "Dengan menjemurnya 3 kali, terasi sudah menjadi kering dan awet," jelasnya.

Bahan baku utama terasi adalah rebon. Rebon mengingatkan akan Cirebon, kota udang. Menurut penduduk Tambakrejo, rebon bukanlah udang. Wujudnya memang sama dengan udang, namun sungutnya lebih lancip dan ukurannya lebih kecil. Rebon tidak laku ekspor akibat dagingnya sedikit dan ukurannya kecil. Supaya tak sia-sia, para pengusaha memanfaatkan menjadi terasi. Dibanding udang, hasil terasi rebon lebih bagus kualitasnya.

Karena itulah, pengusaha terasi Tambakrejo lebih suka mengimpor rebon dari luar kota dibandingkan membuat terasi dari udang, meski udang dijumpai di laut setiap hari. Jika pasokan rebon benar-benar tidak ada, barulah mereka menggunakan udang sebagai bahan baku. Sebenarnya rebon juga bisa didapatkan di perairan sekitar Tambakrejo. Dahulunya, rebon bisa dipanen pada bulan Februari-April. Hampir seluruh perempuan Tambakrejo berprofesi sebagai pembuat terasi, sedangkan laki-lakinya pergi ke laut untuk mencari rebon.

Cara untuk memprediksi musim rebon biasa dilakukan dengan mengamati hujan. Apabila musim hujan berakhir, rebon bisa dipanen. Sekarang, panen rebon sudah tidak tentu musimnya. Terpaksa pengusaha terasi mengambil rebon dari Kalimantan dan Sumatera melalui pelabuhan Cirebon ataupun dari Madura.

Meski tidak musim, industri terasi tetap eksis. Setiap bulan pengusaha melakukan tiga kali siklus produksi, menghasilkan 4—5 ton terasi per siklus.

Berdasarkan bahan baku dan harganya, kualitas terasi Tambakrejo dibagi menjadi tiga kelas. Kelas pertama berasal dari rebon tambak yang berwarna hitam dan ukurannya besar, dijual Rp5.000 per kg. Kelas kedua berasal dari

rebon laut berukuran lebih kecil, dijual Rp8.000 per kg. Kelas ketiga berasal dari 50% rebon biasa dan 50% ikan, dijual Rp4.000 per kg. Memang cukup murah dibandingkan terasi Belitung yang per kg-nya Rp35.000.

Pembuatan terasi ini sudah dikenal sejak dulu. Prosesnya tidak mengalami banyak perubahan. Metodenya tergolong mudah dan sederhana. Untuk memproduksi sekilo terasi, diperlukan empat kilogram rebon, setengah ons garam, dan pewarna merah hati atau merah kebiruan secukupnya. Rebon digiling dan dijemur sebanyak 2 kali, baru diletakkan di atas saringan halus lalu digiling. Setelah dijemur sekali lagi, jadilah terasi.

Rebon digiling dengan mesin dan alat giling khusus, sehingga lebih cepat dan mudah. Dulu, terasi dibuat dengan menumbuk rebon menggunakan lesung. Memakan waktu lama dan boros tenaga pula. Dengan mesin, total waktu yang diperlukan untuk sekali produksi sekira satu minggu, termasuk proses pencetakan dan pengemasannya.

Industri terasi Tambakrejo merupakan usaha turun-temurun. Mulai berlabel industri atau usaha resmi sekitar tahun 80-an. Sumito (39), salah seorang pengusaha terasi, mengaku bahwa usahanya didirikan sejak 1984.

"Memang tak semua penduduk Tambakrejo menjadi pengrajin terasi. Adapula yang menjadi nelayan maupun pengusaha ikan asin," katanya. Dahulu, banyak orang menjadi pengrajin ikan asin. Karena hasilnya tidak menguntungkan, maka mereka banting setir ke usaha terasi. Harga bahan bakunya lebih murah, hasilnya laku mahal, dan selalu dibutuhkan orang.

Harga dasar rebon normalnya berkisar Rp1.250–1.500 per kg, apabila naik, harganya menjadi Rp1.800–1.900. Sekilo terasi berasal dari 4 kilo rebon, setengah ons garam, pewarna secukupnya, daun pisang, dan karet. Total biaya produksi sekira Rp6.500, sementara harga jual Rp8.000. Jadi, keuntungan per kg terasi Rp1.500.

Industri terasi Tambakrejo tak lepas dari persaingan. Persaingan terjadi dalam perolehan bahan baku maupun pemasaran. Bahan baku yang berasal dari luar kota bisa dimanipulasi. Misalnya, seorang pengusaha langsung mendatangi pemilik bahan baku di Madura. Ini menimbulkan kesan rebon sangat dibutuhkan, sehingga harga dasar dinaikkan. Ini cukup merugikan pengusaha lain yang mengambil bahan baku. Padahal cukup via telepon dan tawar-menawar harga, rebon sudah bisa didapatkan.

Untuk pemasaran, persaingan terjadi tatkala distributor terasi dari satu pengusaha diambil alih oleh pengusaha lain. Iming-imingnya tentu saja harga lebih murah. Meski mutunya belum tentu baik, distributor tetap membeli. Karena, distributor kurang jeli membedakan terasi. Akibatnya, mau-tidak mau pengusaha lain harus menurunkan harga terasinya. Jika tidak, terasi menjadi tidak laku. Kalau tidak mau rugi, terasi harus ditimbun. "Ditimbun tidak menjadi masalah karena semakin lama, terasi semakin sedap aromanya," kata Sumito.

Bahan baku pun sering ditimbun dari sisa produksi sehingga bisa digunakan untuk produksi selanjutnya. Ini merupakan salah satu strategi pertahanan untuk mengantisipasi kekurangan bahan baku dan anjloknya harga. "Biasanya bahan baku bisa ditimbun selama dua bulan setelah musim rebon," ungkap Umayati (30), salah satu pekerja industri terasi.

Terasi memang bisa menjadi salah satu alternatif pemanfaatan produk kelautan. Teknologi pembuatannya termasuk sederhana. Namun, bisa membantu meminimalisir jumlah limbah perikanan berupa rebon maupun ikan kecil yang tak laku ekspor.

Sayangnya, terkadang mata masyarakat Indonesia belum jeli. Penelitian uji gizi terhadap terasi pun sangat jarang, jika tak ingin dikatakan belum, dilakukan. Lebih parah lagi adalah kurangnya publikasi.

Sudah saatnya para pengusaha, pemerintah, dan dunia akademis memfokuskan perhatian pada produk ini. Dengan pengembangan lebih serius pada skala industri, terasi bisa menjadi salah satu komoditi ekpor yang cukup menjanjikan. Industri kecil maju, rakyat pun terberdayakan.

Ita Mutiara Dewi
Shiza Taufa

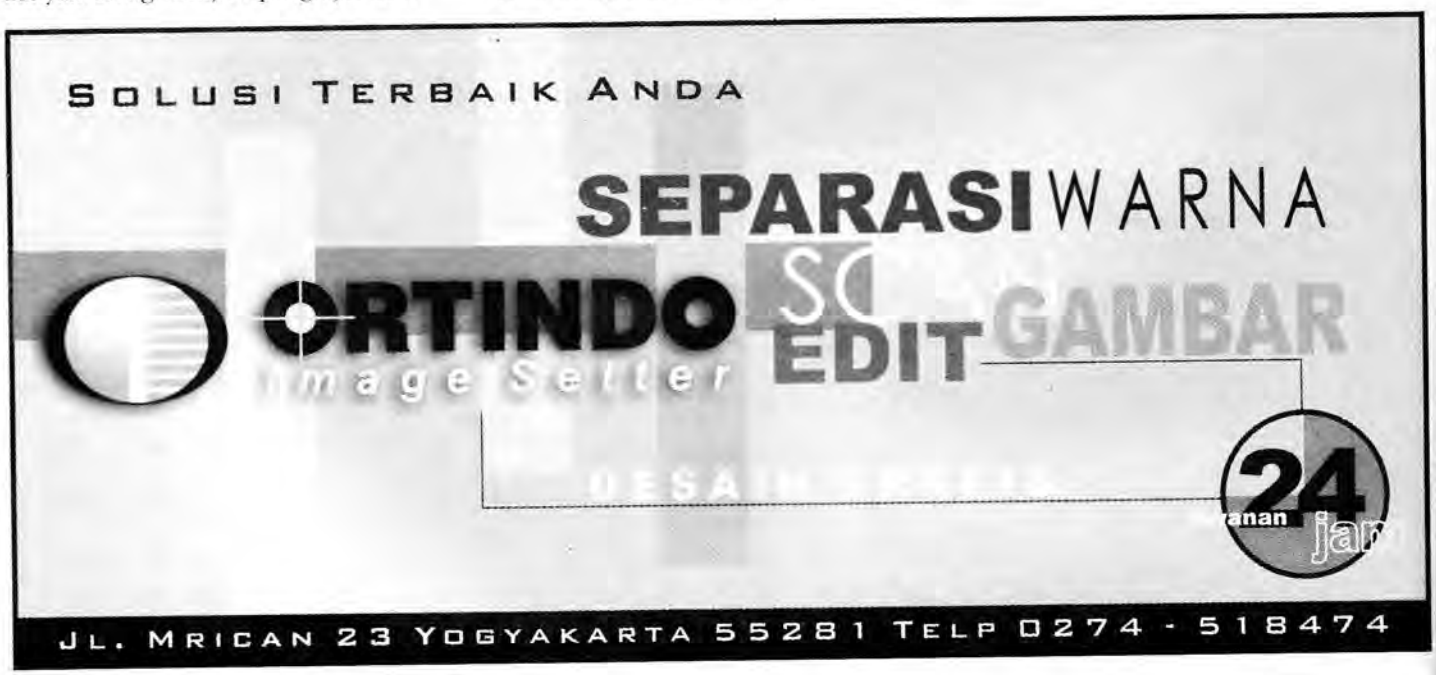

BERHARAP PADA LAUT

SUNDA KELAPA TAK LELAH BANGUN
MENGGELIAT TERUS, BERPACU MELULU
MESKI BELUM SEPENGGAL UFUK TIMUR BERWARNA
MUATAN MUSTI BERLAYAR SEGERA
ANGKAT, HE, ANGKAT BARANGN'YA!
BONGKAR, LALU MUAT, SEPERTI ITU SEHARIAN
BUKAN UNTUK MENGANGKAT DERAJAT SOO BURUH GENDONG, ITU PASTI!

KESEKIAN KALI, INI TERPAKSA DIPILIH
BEKERJA DENGAN KEMEJA TANPA DASI
CUKUP NYAMAN TUTUP KEPALA RAPAT
LUSUH YANG TERLALU NYAMAN
MENGHALAU PANAS TANPA AC
TAPI INGAT: SEMANGAT KERJA KERAS KAMI
ADALAH DASI HIDUP "TERMAHAL"
DIMANAPUN

BERSEGERALAH
TAK PERLU BERDISKUSI APALAGI
ORASI
TOH TETAP BERSETIA MENITI
BAGIAN PERAN DARI DALANG
BERBEKAL DUA PULUH LIMA RIBU
TIAP BONGKAR MUAT
COBA JALANI PERAN PEMILIK
MODAL YANG BEBAS
MENJADIKANNYA SIA-SIA:
JUDI, MABUK, JAJAN BERAHI
ANAK BINI, YA NANTI, LAH
MASIH ADA PINISI BERLABUH,
MASIH ADA DUA PULUH LIMA RIBU
LAGI

LAPAR, LELAH, PAYAH, GERAH, ...
WALAU SEJENAK, ISTIRAHATLAH
TAK SALAH BILA MENGGAULI MAKANAN BERLIMPAH
DIJAJAKAN KELILING BAKUL DI TAMPAH

TUAN, BUKAN PILIHAN KAMI MENJADI KULI
NASIB INI YANG SETIA MENGGELAYUTI
KARENA HIDUP TERJERAT DALAM BELITAN TALI
KUAT SEKALI!
MEMANG PERSIMPULAN KEHIDUPAN KERAS LAGI NYERI
NAMUN TAK ADA DAYA KAMI

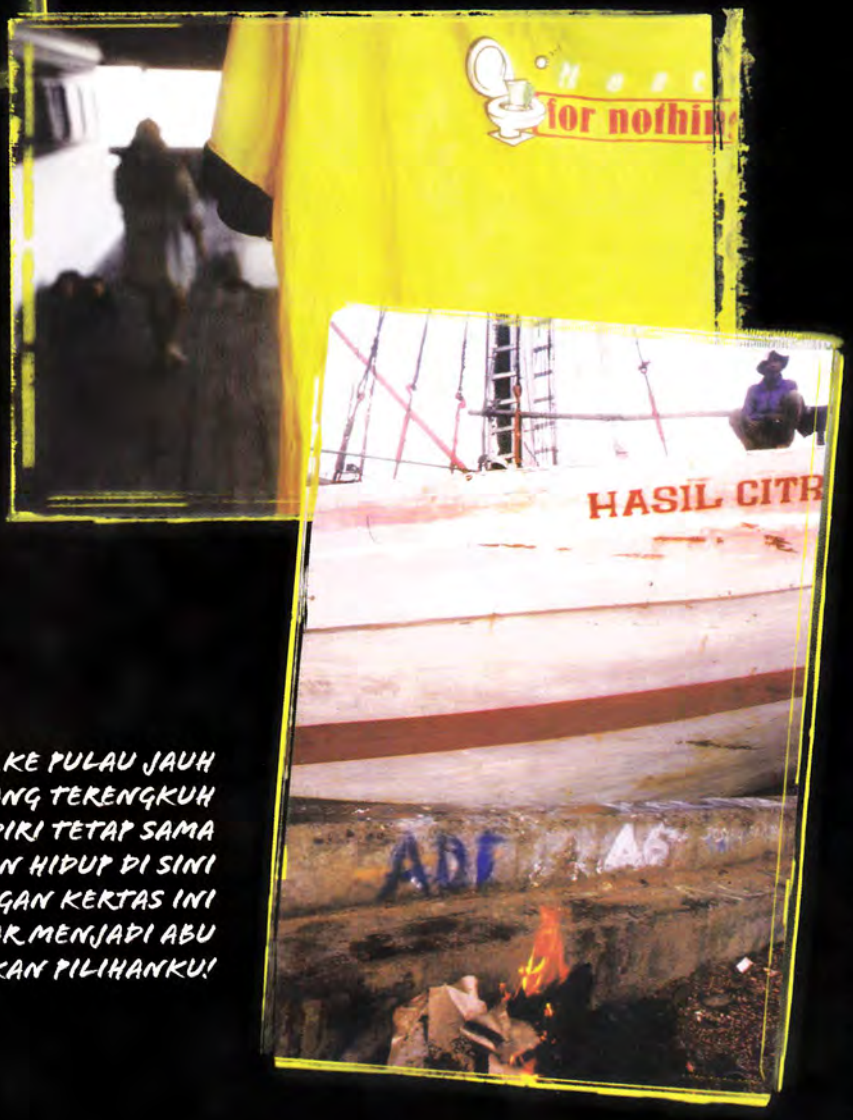

KAWAN, BENAR KATANYA:
MONEY FOR NOTHING
DIKEJAR, DIDAPAT, PASTI DIBUANG
DENGAN DUIT SEMUA BERHAK BAHAGIA
WALAU SEDIKIT DAN MESKI SESAAT

TIBA GILIRAN KAPAL PINISI BERLAYAR KE PULAU JAUH
DAN LAGI-LAGI KESIA-SIAAN YANG TERENGKUH
UANG TERHAMBUR DAN DIRI TETAP SAMA
SIA-SIA MELABUHKAN PILIHAN HIDUP DI SINI
KARENA, APA BEDA DENGAN KERTAS INI
SIA-SIA TERBAKAR MENJADI ABU
YA, BUKAN PILIHANKU!

FOTO: IKA HILAL **NARASI:** NANIK **DESAIN:** DAVE

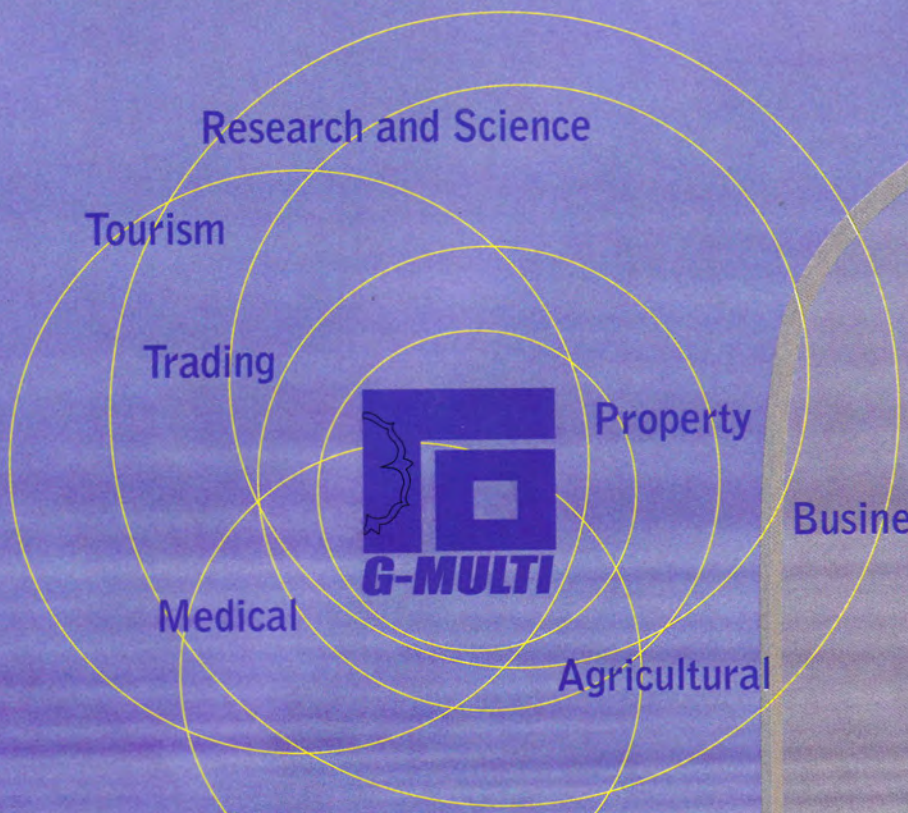

GMUM

Turut meningkatkan kualitas pendidikan di UGM

Divisi

- >Teknologi
- >Industri
- >Agrobisnis
- >Keuangan
- >Properti
- >Jasa
- >Perdagangan

PT. GAMA MULTI USAHA MANDIRI

Unit Bisnis Universitas Gadjah Mada

Bulaksumur H-5, Jogjakarta 55281 Telp. 0274 549426, 901970, 902573 Fax. 0274 549427 E-mail : g-multi@ugm.ac.id

Laut tak Sekadar Ekonomi

ADI-DUNIANOEL/BAL.

Dunia tidak meragukan lagi bahwa Indonesia adalah negara maritim yang berbentuk kepulauan (Archipelago state). Hal ini cukup beralasan, karena hampir dua per tiga luas wilayah Indonesia adalah lautan yang dengan sekira 15 ribu pulau besar dan kecil menaburinya. Banyak pakar bahkan menyebut Indonesia sebagai "Benua Maritim".

Jika perhitungan luas wilayah laut yang menjadi ukuran, maka tak salah lagi, Indonesia bisa disapa dengan negara maritim. Hanya tampaknya, sebutan itu tinggal *image* yang malah mengganggu ketimbang membanggakan.

Dalam perjalanan sejarah ekonomi politik bangsa ini, laut menjadi bagian yang termarjinalisasikan. Denyut kehidupan kolonial yang panjang di Indonesia, menyisakan kenyataan ini. Kolonial Belanda cenderung mengekploitasi sumber daya perkebunan seperti gula, kopi, rempah-rempah. Sejak *cultursteelsel*—yang memaksa rakyat untuk menanam hasil perkebunan yang laku di pasaran dunia—bangsa Indonesia mulai berpikir betapa besar keuntungan sektor agrikultur ini. Kita lebih dikenal sebagai negara agraris dibanding negara maritim. Politik Orde Baru, juga bisa dikata tak memberi porsi yang cukup menguntungkan bagi potensi kelautan.

Setelah reformasi—walaupun terhitung terlambat—Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI mengingatkan akan pentingnya laut. Mengembalikan laut sebagai basis kehidupan bangsa kita, disebut-sebut sebagai alternatif keluar dari kemelut krisis. Maka, dibentuklah Departemen Perikanan dan Kelautan serta Panglima TNI yang berasal dari Angkatan Laut..

Kebijakan pemerintah yang lebih sensitif terhadap bidang maritim, sering dituding sekadar mengganti baju dari pola *continent* menuju pola maritim. Kekhawatiran yang mengemuka adalah terjadinya industrialisasi dengan semangat developmentalisme ala Orba. Dimana kebijakan dibuat tanpa mempertimbangkan realitas sosial masyarakatnya.

Konflik masyarakat maritim tak juga pernah surut. Yang paling sering terjadi,

Maruli
Mahasiswa Perikanan '96

"Terjadi *over fishing* di beberapa wilayah di Indonesia seperti Pantai Utara Jawa, selat Bali, pantai selatan Sulawesi dan sekitar selat Malaka. Tetapi, di wilayah timur Indonesia pengembangannya masih sangat minim."

misalnya—sekadar mengingatkan, adalah konflik antarnelayan kapal besar dengan nelayan kapal kecil dalam memperebutkan lahan penangkapan ikan. Ini sedikit banyak membuktikan bahwa kebijakan memang belum menyentuh aras akar rumput.

BALAIRUNG pun mengundang beberapa kelompok dalam diskusi bertajuk " Dari Laut Membangun Indonesia". Anak-anak muda memadati Ruang Sidang II Gelanggang Mahasiswa UGM, 4 Oktober 2001 untuk membincangkan masa depan kelautan Indonesia. Kelompok yang hadir diantaranya Kelompok Studi Laut (KSL) Fakultas Biologi, Keluarga Mahasiswa Perikanan UGM, Lingkar Studi Geodesi Alternatif (LSA), Pusat Teknologi Kelautan (Pustek Kelautan), Yayasan *Community of Aquatic Resources Research and Empowerment* (CARE), Majalah Sintesa, mahasiswa, dan akademisi. Berikut catatan diskusi yang dimoderatori Iwan Achmad Ambiya tersebut.

Perbincangan dimulai dari sudut pandang sejarah yang dituturkan oleh Suwadi. Staf pengajar jurusan Perikanan UGM ini mengatakan, sekira abad 16 mayoritas masyarakat Jawa menggantungkan hidup dari sektor kelautan dan perikanan, baik sebagai nelayan maupun pedagang. Kebutuhan hidup tercukupi pada masa itu. Sebab, *pertama*, tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. *Kedua*, adanya dukungan lembaga kekuasaan. *Ketiga*, adanya jaringan yang kuat antarnelayan. Ini sangat tampak di pantai utara Jawa seperti Banten, Probolinggo dan Madura. Namun, kejayaan sektor kelautan ini mulai meredup sejak Mataram Islam berdiri. Kebijakan politik Mataram—yang tak lepas dari pengaruh VOC, Belanda—lebih berorientasi pada bidang pertanian.

Setali tiga uang dengan Mataram, pola kekuasaan yang sama dilakukan Soeharto di masa Orde Baru. "Sektor perikanan dan kelautan hanya menjadi lampiran dari suatu kebijakan," tandasnya. Dualisme pembangunan di sektor perikanan dan kelautan menemukan momentumnya pada pertengahan tahun 1970-an hingga awal 1980. Laut dijadikan milik bersama (*common property*) dengan akses terbuka (*open access*). Produksi ikan di berbagai daerah terus digenjot sedemikian rupa dengan melibatkan pemodal. Walhasil, terjadi pengambilalihan wilayah nelayan. Nelayan kecil dengan kapal tradisional harus berhadapan dengan nelayan berkapal besar/trol. Banyak nelayan kecil harus kehilangan lahannya. Buntutnya, konflik antarnelayan tak terhindarkan.

Maruli, mahasiswa perikanan angkatan 1996 menambahkan soal ketidakseimbangan dalam eksploitasi sumber daya ikan. "Terjadi *over fishing* di beberapa wilayah di Indonesia seperti Pantai Utara Jawa, selat Bali, pantai selatan Sulawesi dan sekitar selat Malaka. Tetapi, di wilayah timur Indonesia pengembangannya masih sangat minim," ujarnya. Maruli juga menilai pemberdayaan wilayah pesisir dan pemanfaatan *recources* di dalamnya masih sangat kurang. Menurut catatan Komisi Nasional Indonesia di bawah Departemen Perikanan dan Kelautan, persediaan ikan nasional sebesar 6,1 juta ton per tahun, namun baru dimanfaatkan sekira 58%. "Ada tiga hal pokok untuk membenahinya, yakni sumber daya kapital, sumber daya teknologi dan sumber daya manusia," tukasnya.

Ketiga hal inilah yang tak dimiliki oleh kebanyakan nelayan. Akses mereka pada sumber daya kelautan masih sangat terbatas. Salah satu sebabnya adalah minimnya pengetahuan nelayan tentang dunia yang digelutinya. Selain itu didukung pula oleh faktor ketidakmenentuan alam. "Karakter laut itu sulit diprediksikan oleh nelayan, bahkan berdasarkan pengalaman dan data-data statistik sekalipun," ujar Maruli.

Laut memang tak selamanya ramah pada nelayan kecil. Pasar sering tidak berpihak pada kelompok lemah ini. Mata rantai ekonomi lebih menguntungkan tengkulak atau pedagang besar. Mereka bisa membeli dan menjual dengan harga lebih murah karena modalnya lebih besar dibandingkan nelayan tradisional. Selain pasar yang diskriminatif, keamanan di laut juga tidak selamanya terjamin. Pencurian ikan oleh mafia kejahatan ataupun kapal asing semakin akrab saja di telinga. Lebih lanjut, Ruli mengatakan, pemerintah yang seharusnya menjadi "bapak" ternyata mandul karena pemerintah tidak memiliki data sosio-kultural masyarakat nelayan yang cukup dan program yang jelas.

"Pemerintah sangat berperan dalam memarjinalkan peran nelayan kecil," ujar Mahfud Ikhwan, mahasiswa Sastra Indonesia '98. Kontrol pemerintah yang lemah berdampak pada kehidupan nelayan kecil. Nelayan-nelayan bermodal besar dan berteknologi tinggi secara alami menyingkirkan nelayan-nelayan tradisional. Bagi Mahfud, yang juga koordinator umum BALKON mengatakan, ada tiga faktor utama penyebab marjinalisasi nelayan tradisional dalam relasi dengan kekuasaan pemodal. *Pertama*, kedekatan pemodal dengan birokrasi, sehhingga pemerintah berpihak pada pemodal. *Kedua*, kedekatan pemodal dengan teknologi. *Terakhir*, kedekatan pemodal dengan sumber daya manusia.

"Pemerintah melihat laut hanya sebagai lahan yang patut dieksploitasi untuk menopang ekonomi nasional," ujarnya. Pemukiman nelayan tidak sedikit disulap menjadi *resort* dan daerah wisata. Ujung-ujungnya, kembali para pemodal yang menikmati hasilnya. Oleh sebab itu, posisi laut perlu direkonstruksi. "Laut harus dikembalikan fungsinya sebagai bagian integral dari suatu bangsa dan memiliki peran penting di berbagai sektor kehidupan," tandas Mahfud.

Satu lagi faktor kultural, cetus Mahfud, kita banyak dihidupi oleh stereotipe. Nelayan distigmakan mempunyai karakter yang susah diatur. Mempunyai Sumber Daya Manusia yang rendah dan etos kerja yang buruk. Tampaknya anggapan ini pulalah yang dianut sebagian besar pembuat kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Kebijakan dibuat tanpa melibatkan nelayan dengan alasan kemampuan mereka rendah.

Ilmanayadi dari Kelompok Studi Laut (KSL) Fakultas Biologi berpendapat bahwa sebenarnya laut mempunyai potensi yang cukup banyak—bidang perikanan, pariwisata, perindustrian dan pertambangan, perdagangan, ataupun pertanian. Hanya saja belum dimanfaatkan maksimal baik konservasi maupun pengolahannya. "Kualitas SDM yang rendah membuat kondisi makin parah. Dari hasil survai, 75% nelayan di Gunung Kidul berpendidikan di bawah SMP. Bahkan banyak yang tidak sekolah. Tidak heran banyak terjadi inefisiensi," tandasnya.

Masih menurut Ilmanayadi, "Masa segar ikan yang pendek dan ketidaktahuan cara pengelolaan lanjut hasil tangkap menyebabkan harga jual ikan sangat rendah. Tidak sebanding *cost* produksi oleh nelayan. Pendek kata, nelayan masih sangat tergantung pada kondisi alam. Belum lagi kalau ada perampokan di laut." Kemudian tradisi upacara selamatan berbiaya tinggi sering diadakan. Ini mengurangi kemampuan finansial nelayan. Tuntutan ekonomi membuat kerusakan biota laut menjadi tinggi. Di situlah dibutuhkan peran pemerintah," kata Ilmanayadi.

Menanggapi permasalahaan yang dipaparkan oleh Ilmanayadi, Suwadi mencoba memberi solusi. "Permasalahan para nelayan kecil bisa diatasi dengan membentuk kelompok usaha. Dibutuhkan juga sistem pengelolaan bersama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam usaha maksimalisasi pengembangan potensi laut. UU otonomi daerah telah memberi zona eksklusif sepanjang 4 mil di kabupaten.

"Masa segar ikan yang pendek dan ketidaktahuan cara pengelolaan lanjut hasil tangkap menyebabkan harga jual ikan sangat rendah. Tidak sebanding *cost* produksi oleh nelayan. Pendek kata, nelayan masih sangat tergantung pada kondisi alam. Belum lagi kalau ada perampokan di laut."

ILMANAYADI
KELOMPOK STUDI LAUT (KSL), FAKULTAS BIOLOGI, UGM

"Permasalahan para nelayan kecil bisa diatasi dengan membentuk kelompok usaha. Dibutuhkan juga sistem pengelolaan bersama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam usaha maksimalisasi pengembangan potensi laut. UU otonomi daerah telah memberi zona eksklusif sepanjang 4 mil di kabupaten. Ini dapat digunakan sebagai *traditional center* yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan kecil. "Sehingga invasi dari nelayan pengusaha besar dan tingginya pencurian ikan—tahun 2000 mencapai 4 miliar dollar—dapat dihilangkan."

Suwadi
(Mahasiswa Jur. Perikanan UGM)

Ini dapat digunakan sebagai *traditional center* yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan kecil. "Sehingga invasi dari nelayan pengusaha besar dan tingginya pencurian ikan—tahun 2000 mencapai 4 miliar dollar—dapat dihilangkan."

"Kekayaan laut yang melimpah sebenarnya bisa menyejahterakan nelayan. Namun, pemerintah selalu menerapkan kebijakan *top-down*-nya. Carut-marut laut cukup dirapatkan para elit, masyarakat tidak lebih menjalankan. Celakanya, ini malah menjadi ajang tarik ulur antara kepentingan departemen pariwisata dan departemen pertanian. Kebijakan yang dibuat tidak pernah sesuai dengan kondisi riil masyarakat nelayan dan sumber daya laut itu sendiri. Masyarakat selama ini hanya menjadi penerima informasi dari atas. Sehingga tidak pernah bisa menyelesaikan masalah," ujar Setyo Widodo, delegasi dari yayasan CARE.

Masih menurut Setyo, "Sebaliknya para ahli—terutama antropologi—memberi solusi yang mengutamakan *bottom-up*. Permasalahan hanya dilihat dari kondisi lapisan *grassroot* nelayan yang sebenarnya bersifat lokal dan khas. Sehingga, sistem nasional dan *policy* terhadap sektor inipun seringkali terabaikan," tafsirnya.

Setyo percaya jika sinergi antara masyarakat nelayan dan pemerintah bisa terbentuk dalam pengelolaan bersama. "Sudah saatnya pengguna sumber daya dan pemerintah duduk bersama. Sistem harus mampu mengantarkan aspirasi masyarakat dan ditindak lanjuti secara riil. Pengelolaan bersama ini berpotensi dilakukan oleh masyarakat dan Pemda, mulai dari perumusan masalah hingga menjalankan kebijakan."

Lebih jauh lagi Setyo mengungkapkan, "Pada kenyataannya mereka tidak melihat pentingnya sekolah. Tanpa sekolah pendapatan mereka bisa tinggi. Berbeda dengan kondisi masyarakat perkotaan."

Membicarakan perikanan dan laut apakah selalu dari sudut pandang ekonomi—yaitu penguatan komunitas nelayan dan bagaimana memasarkan hasil laut—dipertanyakan oleh Gerry dari Lingkar Studi Geodesi Alternatif. "Kita sering lupa membicarakan pelestarian ikan pada permasalahan *upland*. Kota dan daerah aliran sungai (DAS) pada kenyataannya memberi andil yang besar bagi kerusakan ekologi laut. Ketika sungai masih menjadi bak sampah maka laut akan tetap menjadi tempat pembuangan akhir. Permasalahan *water* manajemen ini sampai sekarang masih sama saja. Pembuangan sampah dan kontaminasi pestisida pertanian pada aliran sungai akan menjadikan kebijakan otonomi daerah tentang kekayaan laut dan pengkaplingan areal laut tetaplah omong kosong."

"Terlihat kebijakan *common property* yang diwujudkan dalam UU No. 92 tidak bisa dijalankan di pesisir, karena karakteristik laut berbeda dengan darat. Lalu, hampir tidak ada fasilitas-fasilitas umum yang dibangun di daerah pesisir. Bahkan pengenalan teknologi dilakukan oleh LSM dan jaringan sosial lain," tegas Gerry.

Yuswono dari PUSTEK akhirnya tergelitik untuk menanggapi. "Permasalahan awal yang dihadapi oleh laut berupa simplifikasi cara pandang. Kita hanya tahu bahwa di laut terdapat ikan. Cara pandang ikan sentris telah meminggirkan potensi pengembangan laut lebih luas. Banyaknya institusi yang mengurusi laut bisa memberi cara pandang berbeda tentang laut. Tetapi yang terjadi di Indonesia malah perebutan lahan laut oleh setiap institusi tersebut."

"Sebagi contoh adalah OTEC (*Ocean Technology and Energy Convertion*), yaitu teknologi yang memanfaatkan suhu dingin di dasar laut dengan suhu panas di permukaan laut kemudian dikonversi menghasilkan energi. Bagi masyarakat awam teknologi tersebut masih sangat asing, tetapi tidak di masyarakat negara maju. Singkat kata, sebenarnya kita belum paham tentang

kekayaan laut mulai dari sumber daya hingga cara pandang. Belum lagi taman laut yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pariwisata.

Ketidaktahuan kita akan manfaat laut sangat tinggi menjadi faktor tingginya tingkat pencurian di sektor laut. Tetapi sampai sekarang kita tidak tahu akan hal itu. Padahal, orang asing sering mengambilnya untuk dijadikan bahan obat, contohnya kanker. Meskipun Indonesia dikenal memiliki *mega biodiversity*—kekayaan hayati laut yang sangat tinggi—tetapi sistem konservasi yang dijalankan baru berupa program COREMEP (*Coral Reef Rehabilition and Management Program*) yang baru dimulai tahun 1995. Artinya, hanya untuk rehabilitasi. Terlihat bahwa pemanfaatan laut kita masih amburadul," tandas Yuswono.

Tidak adanya konsep pengelolaan yang integral dan hukum terhadap penyalahgunaan menyebabkan tingginya pencurian di perairan kita menjadi wajar. Dari 400 buah kapal yang dibutuhkan untuk mengawasi perairan Indonesia, TNI AL hanya memiliki 150 buah. Itupun tidak semua aik operasi. Undang-undang yang mengatur tentang kelautan, seperti UU No. 5 /1990 tentang lingkungan hidup dan UU No. 23 /1997 tentang keanekaragaman hayati, hingga kini tidak terealisasi. Sekadar catatan, konvensi *biodiversity* tahun 1992 di Rio de Janeiro telah mengatur negara berkembang mendapat insentif dari negara pengembang atas sumber daya laut yang dimilikinya.

Nurul Aini, awak BALAIRUNG, ikut memberikan pandangannya. Tidak mudah mengharapkan peran pemerintah. Dari masa penjajahan Belanda pun kita tidak mempunyai visi maritim. Dan sekarang, Otda dengan UU No. 22 dan 25-nya tidak cukup mampu memberikan porsi lebih pada sektor ini. Pengkaplingan laut malah menyebabkan konflik perebutan wilayah dan ikan. Sedangkan UU No. 9/1985 tidak menambah fungsi AL.

"Pengembangan potensi berbasis komunitas harus menggantikan pengembangan berbasis industrial. Di pihak nelayan sendiri, taraf pendidikan yang rendah membuat pasar tidak berpihak pada mereka. Justru tengkulak yang berperan penting. Dan nelayan tidak bisa melakukan kritik terhadap pemerintah ketika kebijakan pemerintah berbasis *land sources*. Maka struktur birokrasi harus dibenahi," ujarnya.

Pendidikan juga memudahkan akses teknologi yang berakibat areal melaut lebih luas. Steoretipe bahwa laut adalah ikan perlu diubah karena laut adalah sesuatu yang kompleks, tandas Nurul.

Pendapat Nurul ditambah oleh Mahfud. Laut bukan hanya lahan ekonomi tetapi juga kultural. Pendidikan mutlak diperlukan untuk memperbaiki pola hidup mereka. Pemerintah harus menempatkan posisi seperti yang masyarakat inginkan. Tetapi, sampai saat ini hal ini belum juga terlaksana. Pemerintah hanya menjadi penampung keluh-kesah dan saran dari masyarkat nelayan tanpa ada aksi.

Secara umum, diskusi yang digelar tadi memang belum memberikan solusi detail dalam menyikapi masalah kelautan. Tetapi setidaknya, *sharing* wacana ini dapat memberikan angin baru bagi kita dan laut. Semoga!

Sofyan Rosyidi
Iwan Ahmad Ambiya

Cara pandang ikan sentris telah meminggirkan potensi pengembangan laut lebih luas. Banyaknya institusi yang mengurusi laut bisa memberi cara pandang berbeda tentang laut. Tetapi yang terjadi di Indonesia malah perebutan lahan laut oleh setiap institusi tersebut."

Yuswono
Pustek Kelautan UGM (Pusat Studi dan Teknologi)

Pudjo Semedi
Negara Maritim Itu

Gagasan tentang negara maritim, meski lamat-lamat, kembali menyeruak di masyarakat. Romantisme masa lalu, eksistensi kebaharian, membaur kembali ke dalam bangsa yang sedang berubah ini. Dr. Pudjo Semedi, Antropolog dari Fakultas Ilmu Budaya UGM -yang beberapa kali melakukan penelitian tentang masyarakat pesisir- mencoba mengkritisi gagasan ini. Berikut petikan tuturannya.

Bagaimana konsep pembangunan negara maritim menurut Anda?

Jangankan maritim, pertanyaan apakah kita ini negara agraris saja masih jadi tanda tanya. Negara agraris *'kan* diasumsikan sebagai negara yang mayoritas penduduknya bertani, atau PDB (produk domestik bruto—*Red.*) terbesarnya berasal dari sektor pertanian. Nah, apakah Indonesia memenuhi kriteria itu? Saya kira tidak. Pengolahan tanah dan budidaya tanaman sebagai unit sosial yang mandiri tidak terjadi di Indonesia. Masyarakat kita hanya buruh tani, buruh perkebunan, buruh industri, dan petani gurem tak bertanah.

Jadi, saya kira *nonsens* kalau kita membayangkan negara maritim. *Nonsens* kalau kita ingin meletakkan eksploitasi laut sebagai sumber PDB terbesar dan menjadikan laut sebagai lapangan kerja bagi mayoritas penduduk Indonesia. Itu hanya angan-angan. Negara maritim itu hanya komoditas politik. Jika riil, konsepnya harus dimaterialkan. Seperti pembangunan, misalnya, dijabarkan apa maksudnya, bagaimana strateginya, apa targetnya. Itu semua harus jelas. Nah, negara maritim itu seperti apa masih belum jelas.

Dua per tiga wilayah Indonesia adalah lautan, tidakkah ini bisa dijadikan modal untuk menggagas negara maritim?

Laut sebagai wilayah terbesar bukan hanya ciri khas Indonesia. Dunia ini wilayah terbesarnya laut. Permukaan bumi sebagian besar juga air, bukan daratan. Tapi, kenapa manusia di bumi menjadi *homo sapiens*, tidak menjadi manusia laut, *aquanus* begitu? Wilayah terbesar kita memang laut! *So what?* Negara-negara lain juga sama. Jadi, hal itu tidak bisa dijadikan dasar untuk kemudian mengatakan, "Mari kita menjadi bangsa maritim!"

Bagaimana dengan jargon nenek moyangku orang pelaut?

Sejak abad ke-8 dan ke-9 memang telah ada prasasti yang menceritakan eksistensi nelayan di Jawa. Memang tidak langsung, sebab di prasasti hanya disebut sebuah makanan yang dibuat dari ikan Sotong (cumi-cumi—*Red.*), ikan Bawal, dan ikan Tongkol. Untuk menangkapnya *'kan* tak bisa hanya dengan tangan kosong, harus ada alat, perahu. Pada zaman Majapahit, juga ada prasasti tentang nelayan dan petani tambak. Atau para pelaut Spanyol yang mencatat bahwa pada abad ke-15 ikan kering menjadi salah satu komoditi ekspor yang penting dari Jawa. Begitu pula ketika Raffles berkuasa pada 1811-1814, ada sejumlah penduduk ujung utara Jawa Timur yang jadi nelayan. Jadi, kecuali orang Mongolia, semua bangsa di dunia yang punya pantai punya tradisi melaut, bukan hanya nenek moyang kita saja.

Soal bobot kepelautan nenek moyang, kita juga tidak pernah tahu ukurannya. Kita cuma tahu Majapahit wilayah politiknya sampai ke mana-mana. Gajah Mada itu punya laksamana satu atau dua orang. Demak juga pernah mengirim armada marinir ke selat Malaka. Tapi itu juga bukan ukuran. Memang kalau kita lihat Candi Borobudur, ada gambar orang naik perahu. Tapi kalau dihitung secara kuantitas, jumlah gambar orang yang diperahu dengan orang yang bekerja di daratan, lebih banyak di daratan. Jadi sebutan nenek moyangku seorang pelaut itu berlebih-lebihan.

Bagaimana harus memetakan komponen bangsa ini? Bangsa agraris atau bangsa maritim?

Saya tidak tahu. Kita itu punya banyak buruh tani, petani gurem, buruh dan nelayan. Tapi elemen sosial paling

Hanya Komoditas Politik

menonjol ya birokrat. Dan yang menciptakan istilah negara maritim *'kan* bukan nelayan di Pantai Drini (Gunung Kidul, Yogyakarta—*Red.*) atau nelayan di Pekalongan, tapi orang-orang di Istana Negara.

Tapi yang berkembang saat ini justru seolah-olah kita sedang mengabaikan potensi maritim dan kelautan yang kita miliki?!

Nggak ada yang *bilang* sumber daya pesisir terabaikan. Seluruh pesisir pantai utara Jawa itu sudah habis-habisan diubah jadi tambak sampai ekosistemnya rusak. Laut Jawa pun ikannya sudah habis. Mungkin terabaikan dalam arti tidak dipelihara, tapi tetap saja dieksploitasi.

Lagi pula, sumber daya alam bukan faktor krusial dalam pembangunan suatu bangsa. Singapura, Belanda, dan negara-negara Eropa tidak punya apa-apa. Sumber daya alam tidak layak ditempatkan sebagai argumen dasar bahwa kita adalah bangsa yang besar. Meski sumber dayanya banyak, tapi kalau orangnya bodoh, boros, dan tukang utang? Mau jadi apa?

Salah satu potensi kelautan kita adalah perikanan. *Carrying capacity*-nya bahkan mencapai 6 juta ton per tahun. Ini *'kan* bisa dimanfaatkan?

Tidak ada bukti kalau sumber daya ikan di laut sebesar itu. Sekarang ini, nelayan Jawa, harus ke Laut Natuna, bahkan sampai ke perbatasan Laut Cina, untuk menangkap ikan. Dari semua itu, total produksinya pun hanya 3 juta ton per tahun. *Carrying capacity* memang diperkirakan sebesar 6 juta ton. Maksudnya, kalau sumber daya yang dipetik dari laut sebesar 6 juta ton per tahun, kita masih bisa berproduksi secara

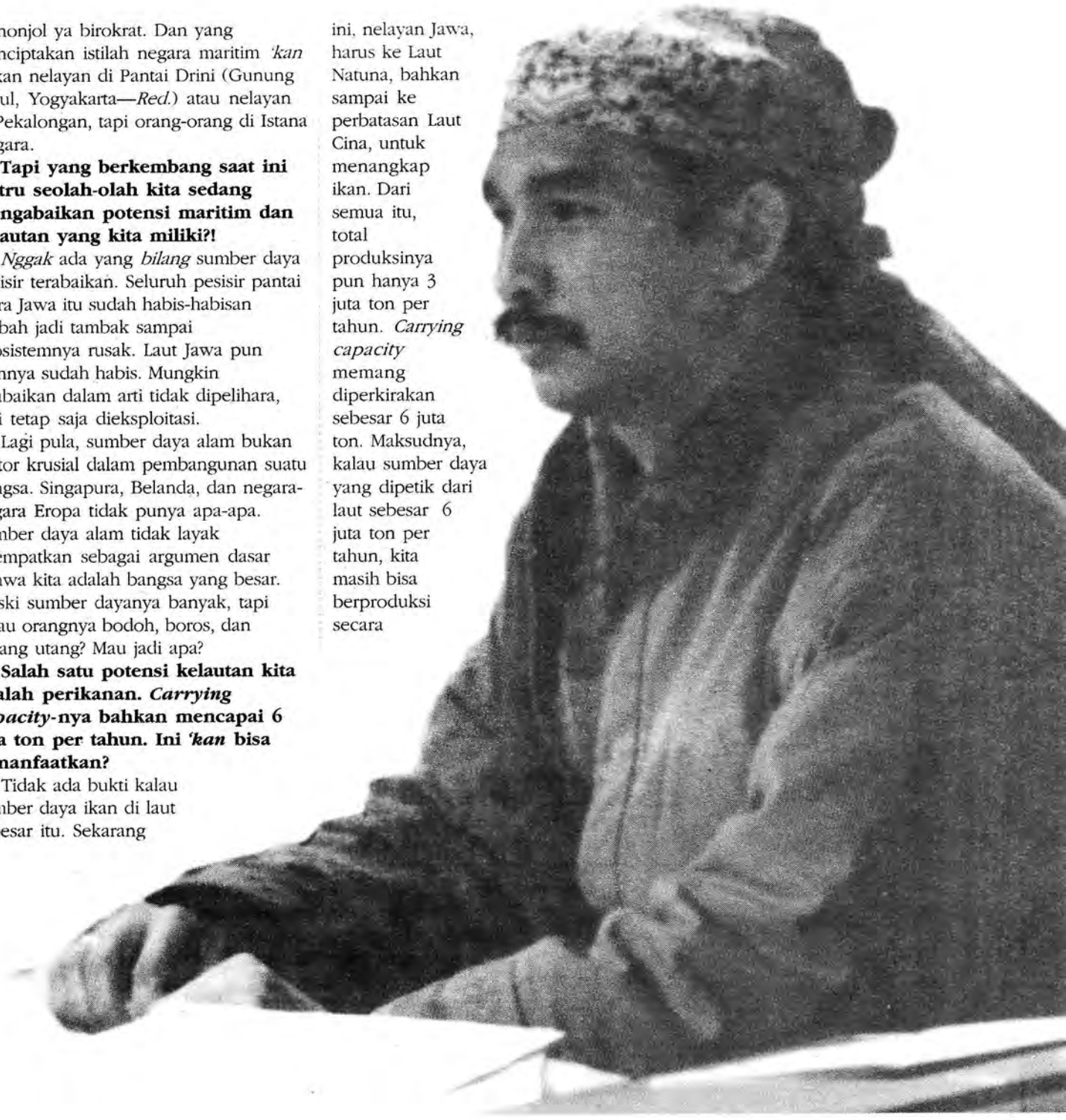

konstan, tidak mengalami penurunan produktivitas.

Tapi angka itu terlalu optimis. Kesuburan laut di Indonesia tidak sama. Dengan perhitungan 6 ton per tahun saja ternyata sudah terjadi *overfishing* di Laut Jawa, yang wilayahnya paling subur. Lagi pula, *nggak* pernah ada *'kan* biolog mengukur jumlah ikan seperti menghitung jumlah sapi di kandang. Itu hanya dugaan. Angka-angka nasional ini bisa bermakna sangat politis.

Ataukah itu hanya karena kita belum memaksimalkan penggalian sumber daya laut!? Karena keterbatasan teknologi, misalnya?!

Saya tidak yakin laut di Indonesia belum dieksploitasi secara optimal. Dalam pikiran saya, sebagian besar laut di Indonesia bahkan sudah *over exploited*. Pesisir pantai utara Jawa sejak 1870, kalau data saya tidak salah, sudah mengalami *overfishing*. Dan yang dilakukan oleh nelayan- nelayan pantai utara Jawa untuk tetap hidup adalah melakukan ekspansi, perluasan wilayah penangkapan ikan.

Di wilayah Pantai Selatan Jawa sekarang sedang berkembang satu gejala kampung-kampung nelayan baru. Koran lokal selalu melukiskan bahwa hasil tangkapan di sana banyak. Tapi saya yakin, dalam waktu singkat nelayan di sana akan jatuh miskin. Sebab, seperti yang diterangkan teori sumber daya milik bersama (*common property*), semua orang lalu akan berbondong-bondong menangkap ikan, jadi nelayan. Tapi ikannya ada apa tidak? Nelayan itu tidak pernah memelihara ikan, tidak pernah terlibat dalam pemijahan dan pemeliharaan ikan. Mereka hanya menangkap. Ini akan menghabiskan ikan. Ketika semua orang bersikap seperti ini, ya rusak sumber daya kita. Tidak usah menunggu puluhan tahun, dalam hitungan beberapa tahun lagi pasti juga akan rusak.

Menurut Anda, sejauh ini bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir, khususnya nelayan di Indonesia?

Nelayan sudah terlalu banyak jumlahnya, dan merupakan lapisan termiskin, *poorest of the poor*. Tapi, nelayan, kalau ditanya hasilnya berapa, dia pasti akan *ngomong* yang paling besar. Mereka memang punya watak besar omong. Selain itu mereka juga boros. Nelayan di Cilacap bahkan pernah sampai memakai bir untuk cuci tangan, karena dapat panen besar. Itu *'kan* gila. Hanya orang miskin yang dapat rejeki nomplok yang akan berbuat seperti itu.Menangkap ikan itu bukan kerja yang murah. Penangkapan ikan membutuhkan investasi luar biasa, dengan risiko usaha yang tinggi pula.

Pertama, harus beli perahu, yang hanya bisa bertahan 15 sampai 20 tahun. Kayu jati tua memang bisa tahan sampai 50 tahun, hanya saja harganya belum tentu terjangkau oleh nelayan. *Kedua*, perahu membutuhkan perawatan dengan risiko kerusakan tinggi. Jaring, misalnya. Jaring itu mahal, mudah rusak, dan harus sering diperbaiki. *Ketiga*, tingkat penghasilannya fluktuatif, tidak tetap.

Ini lain sekali dengan pertanian. Tanah sifatnya relatif tetap dan utuh. Tanah investasinya tetap, hasilnya *predictable*. Orang kalau disuruh memilih, pasti akan memilih jadi petani daripada nelayan. Riset saya menunjukkan bahwa nelayan di Jawa itu awalnya adalah orang-orang terpaksa. Menjadi nelayan karena tersepak dari daratan.

Maksudnya?

Menurut ahli sejarah, sampai 1820-an di Jawa baru ada kira-kira 25 ribu nelayan. Pada tahun 1860-1870, jumlahnya ternyata meningkat menjadi 250 ribu. Ada peningkatan sebesar 10 kali lipat, dan ini terjadi hanya dalam waktu lima puluh tahun. Mengapa? Sebabnya adalah politik tanam paksa. Pada masa itu tekanan-tekanan sosial, politik dan ekonomi di pedesaan sangat tinggi. Banyak petani kemudian mencoba mencari sumber penghidupan alternatif. Mereka lari ke pesisir, membuka kehidupan baru sebagai nelayan. Jika sebelum tanam paksa sudah ada nelayan, saya menduga itu hanya menjadi pekerjaan sampingan, sekunder. Kalau musim lagi baik mereka menangkap ikan, kalau musim lagi buruk mereka bertani. Adanya tanam paksa membuat nelayan menjadi pekerjaan primer.

Merujuk karakter geografisnya, Anda setuju kalau masyarakat pesisir dikatakan lebih egaliter dibanding masyarakat daratan?

Orang-orang laut sering dikatakan egaliter karena proses produksinya memang egaliter. Ini tercermin dari hubungan-hubungan kerja masyarakat nelayan. Pembagian keuntungannya dilakukan dengan cara *sharing*, bukan gaji tetap. Nelayan bisa pindah dari satu perahu ke perahu yang lain. Kalau seorang nahkoda perahu gagal, ia bakal ditinggalkan awaknya. Nelayan juga tidak suka bahasa yang berlapis-lapis. Tapi tidak usah jauh-jauh ke laut, proses di daratan akhir-akhir ini juga mulai menuju masyarakat yang egaliter.

Bagaimana dengan *local wisdom* masyarakat pesisisir, semisal pada pola kepemimpinan nakhoda kapal. Bukankah lebih egaliter?

Kalau pengelolaan bangsa dianalogikan dengan menjalankan kapal, kapal itu tidak dipimpin secara demokratis. Nakhoda itu harus seorang yang otoriter. Kalau ada awak kapal yang minta belok ke kanan sementara yang lain minta ke kiri, bagaimana? Jadi, nakhoda itu harus otoriter, panglima, penguasa tunggal.

Kapal adalah unit militer, unit yang teresimentasi. Nahkoda harus dipatuhi, sebab dia yang bertanggung jawab atas hidup mati serta keselamatan awak dan penumpang kapal. Artinya kalau kita mau berdebat soal-soal idealistis, gagasan tentang bangsa dan negara maritim itu yang seperti apa. Apakah bangsa maritim itu bangsa yang dikelola seperti menjalankan kapal? Justru mengelola kapal itu sangat otoriter. Memang batas antara demokratis dengan anarkis, antara otoriter dengan demokratis sangat tipis. Saya tidak yakin kalau bangsa dijalankan seperti mengelola kapal, kita lantas otomatis menjadi bangsa maritim.

Anda sepakat kalau karakter masyarakat pesisir itu dikatakan lebih terbuka dari masyarakat daratan?

Kalau kita membandingkan pesisir Asia dengan Mindland Asia, mungkin saja. Tapi untuk ukuran Jawa ini terlalu berlebihan. Jawa bukan pulau yang besar. Orang Jawa menyerap kebudayaan apapun yang masuk. Jadi, bukan hanya orang pesisir yang terbuka menerima kebudayaan dari luar. Memang ada kualitas kultural yang agak berbeda antara orang yang berada di dekat pusat kekuasaan keraton dengan masyarakat nelayan. Tapi harus dicatat, tidak semua orang pesisir itu nelayan

atau pelaut. Misal, Pekalongan itu daerah pesisir, tapi kebanyakan penduduknya menjadi buruh pabrik tekstil. Tidak otomatis pesisir itu berkebudayaan laut.

Budaya *'kan* totalitas infrastruktur, teknologi, ekonomi, penghasilan maupun sikap sosial. Sekarang ini di Jawa sama saja, di desa maupun di kota, di pesisir maupun di pedalaman. Memang ada sikap-sikap sosial yang berbeda. Nelayan dengan petani jelas berbeda. Petani itu punya sikap hemat. Kalau nelayan sebaliknya, boros dan royal. Dan juga ada sikap sosial orang pantai yang jika diukur dengan standar Jawa (baca: Keraton Yogya), seperti "*cedak watu adoh ratu*" (dekat batu jauh ratu—*Red.*). Artinya, ada orang-orang yang memang secara kultural bukan orang yang halus.

Tapi apakah itu berkaitan dengan asumsi bahwa masyarakat pesisir lebih terbuka terhadap setiap kebudayaan? Saya kira tidak. Orang Jawa umumnya terbuka dengan semua kebudayaan. Elemen-elemen kebudayaan Jawa yang ada sekarang pun bukan murni Jawa. Campuran dari berbagai macam elemen yang sudah tidak diketahui sumbernya. Ada Cina-nya, ada Jawa-nya, ada Arab-nya, ada Hindu-nya. Contohnya musik dangdut. Musik itu *'kan* campuran Arab, India, dan Melayu jadi satu.

Kalau begitu, bagaimana prospek kelautan Indonesia ke depan?

Kalau masa depan nelayan, saya katakan suram. Sebab, nelayan itu sifatnya mengambil. Kalau nelayan ingin makmur, yang harus dilakukan adalah mengurangi intensitas penangkapan dan memulai membudidayakannya. Di Jepang orang sudah mulai membudidayakan ikan tuna, meskipun tingkatnya masih untuk konservasi, belum pada tingkat eksploitasi. Soal masa depan negara maritim, itu masih omong kosong. Kita perlu mengkonsepsikan dengan jelas apa yang dimaksud negara maritim. Tapi, kalau kita jadi bangsa yang berorientasi pada laut, pada perdagangan, pada keterbukaan hubungan internasional, ya mungkin bisa saja.

Jadi, menurut Anda, konsep pembangunan negara maritim ini hanya sebuah kegenitan untuk mencoba mencari-cari celah atas himpitan kesulitan yang sedang mendera?

Ya, *pertama,* negara maritim itu tidak lebih merupakan komoditas politik dari penguasa. Penguasa menjual ide, tapi ide itu sendiri tidak pernah jelas. Masih sebatas pada slogan. *Kedua*, bisa jadi ini indikasi dari kebingungan kita. Kita ingin menjadi sesuatu yang lain. Jika selama ini bangsa kita orientasinya ke daratan, kita ingin berubah menjadi bangsa yang orientasinya ke kelautan. Ini adalah kebingungan sosial-kultural. Maka, kita mencoba alternatif yang lain.

Yang pertama kali melontarkan isu kelautan ini *kan* Abdurrahman Wahid waktu jadi presiden. Saya tidak sepakat dengan bangsa maritim seperti yang dianalogikan Ignas Kleden sebagai nahkoda kapal. Nahkoda kapal itu otoriter.Kalau mau jadi bangsa nelayan, nelayan itu isinya kemelaratan. Atau mau jadi bangsa yang isinya Angkatan Laut? Tapi mau melauti siapa? Inggris pernah punya Angkatan Laut yang jaya, tapi dengan mengorbankan bangsa-bangsa lain. Jika menggunakan laut sebagai jalur perdagangan, apa yang hendak diperdagangkan? Semua kan sudah kita jual. Ini realistis. Kita mau *ngapain* dengan konsep negara maritim, negara bahari? Kalau negara bahari itu artinya bahaya sehari-hari, itu sudah kita alami.

Ririn Tri Astuti
Anas Abdul Ghafur

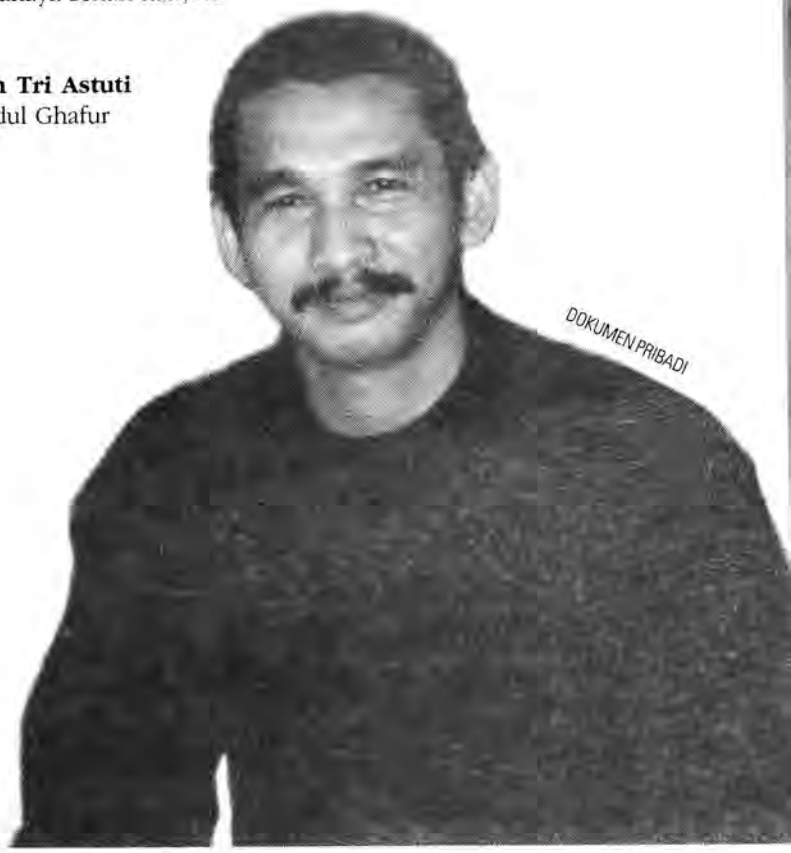

DOKUMEN PRIBADI

Membunuh Citra, Merayakan

Cuaca bulan September memang tak dapat dipastikan. Seperti malam itu, hujan baru saja turun, dan gerimis masih menyiram Tuban. Tak demikian halnya dengan desa Gesing, Wonorejo, kecamatan Semanding. Gerimis bukan halangan bagi desa yang terletak 14 kilometer di pinggir timur Tuban itu. Desa yang pernah memiliki riwayat sebagai lokalisasi pelacuran ini sedang bergembira. Malam itu Tandak akan dimainkan.

Ketika malam makin beranjak, keramaian semakin membuncah. Para penari tandak berjalan beriringan mendekati keramaian panggung. Penari tandak, sejenis tari tayub, di Tuban sering disapa *sindir* dalam bahasa kasar, atau *waranggana* dalam bahasa halus. Malam itu, Endang, Denok, Mirah, Indah, dan Indra Rukmana, tampak mencolok di tengah *make-up* yang tebal, bau harum yang menebar dan pakaian gemerlap. Bahu mereka yang terbuka ditutupi dengan sebuah selendang panjang tipis yang tak kalah harumnya dengan tubuh mereka. Mereka akan menari dan menyanyikan gendhing-gendhing Jawa.

Tak sulit menemukan kesenian tandak di kota Tuban, apalagi di pelosok-pelosok desanya. Pada setiap acara perkawinan, khitanan, syukuran, atau ritual desa, tandak pasti akan hadir meramaikan. Tak hanya di Tuban, kota-kota lain seperti Blora, Cepu, Lamongan, Ngawi dan kota-kota lainnya di Jawa Timur, juga mengenal jenis kesenian ini.

Sebagai sebuah kesenian rakyat, tandak telah bertahan ratusan tahun. Tak ada yang tahu persis bagaimana kesenian ini bermula. Tapi ada cerita, pada mulanya konon tandak adalah kesenian yang lahir dalam wilayah keraton. Dari kesenian tinggi yang hanya dinikmati kalangan keraton, tandak kemudian menyeberang menjadi kesenian rakyat yang bisa dinikmati secara massal. Prof. Dr. Edi Sedyawati (1989), seperti yang dikutip *Intisari*, memaparkan, ketika keluar dari pusat pemerintahan dan masuk ke lingkungan rakyat, tari ini tidak lagi mampu memperlihatkan keutamaannya. Ia menjadi kesenian rakyat yang kasar dan rendah, karena menampilkan hubungan laki-laki dan perempuan secara vulgar.

Claire Holt, dalam *Melacak Jejak Perkembangan Seni di Indonesia* (2000), memaparkan bahwa dalam tandak ada gadis penari yang dipesan khusus untuk menari bersama. Para penonton yang ikut menari (*pengibing*) akan berusaha mendekati si penari dan menyentuhnya. Setelah itu, ada saat-saat dimana pengibing bisa memberi tip. Caranya sangat erotis, *pengibing* memasukkan uangnya di antara payudara si penari. Cara ini disebut *suwelan*. Pada saat *suwelan* inilah *pengibing* berkesempatan memegang-megang payudara sang penari.

Hubungan antarseks yang kental semacam itu, membuat penari tandak kemudian sering dicitrakan sebagai pelacur. Meskipun, dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah ada yang secara eksplisit mengatakan bahwa mereka adalah pelacur. Kalau tidak dicap sebagai pelacur, cap yang sering dibubuhkan pada penari tandak adalah penggoda suami orang, gampang dibawa, dan mata duitan.

Masalah citra memang kadang lebih kuat dibanding ideologi, tulis Roland Barthez. Dan citra rendahan pada kesenian tandak juga terbukti tak mudah untuk dihapus. Bukan hanya penarinya saja ternyata yang dinilai rendah, komunitas pertunjukan tandak, seperti penabuh gamelan—apalagi penontonnya, tentu saja— juga sering mendapat penilaian miring. "Biasanya yang tidak setuju dengan permainan ini adalah tokoh agama, atau masyarakat yang sudah mendapat didikan agama," ujar Nurhadi

Tandak

35), seniman lukis asal Tuban.

Memang, pertunjukan tandak sering tidak terkontrol. Adanya ritual minum tuak pada pertunjukan tandak telah membuat tempat itu juga sekaligus sebagai ajang mabuk-mabukan. Dalam kondisi mabuk, perkelahian antarpenonton mudah sekali terjadi. Selain itu, mabuk juga sering dijadikan alasan untuk "melegalkan" perbuatan-perbuatan tak senonoh lainnya, semisal memeluk, mencium, ataupun sekadar memegang penari.

Namun, lain dulu lain sekarang. Jika dulu setiap pentas tandak digelar buntutnya adalah kerusuhan dan tindakan asusila, kini tandak hadir dengan wajah yang lebih santun. Konotasi mesum perlahan-lahan memudar. Nurhadi, yang juga banyak bergaul dengan seniman tandak, mengatakan bahwa sejak tahun 1990-an tandak sudah jauh lebih tertib. Sekarang jarang ada perkelahian dalam pertunjukan tandak. Sang penari juga tidak lagi mudah untuk dipegang-pegang saat pentas. Posisi tawar dihadapan penonton telah cukup tinggi.

"Penari tandak sekarang tak lagi diberi *suwelan*. Mereka sudah dibayar cukup tinggi oleh pemilik hajat, sehingga penonton tak perlu repot-repot memberi *suwelan*," tukas Nurhadi seraya menyebut angka 1 hingga 1,5 juta sekali main untuk penari senior. Jika ada yang ingin memberi *suwelan*, kebanyakan penari sekarang menolaknya. Mereka kini benar-benar bermain profesional. Para penari telah menyadari bahwa pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang memiliki etika profesi. "Lagipula, pemilik hajat akan merasa malu kalau ada tindakan asusila mewarnai acara mereka. Para *pengibing* juga segan untuk melakukan tindak pelecehan," sambung Nurhadi.

Rudy Sukariyono (39), warga Kutorejo, berujar bahwa menghilangnya konotasi mesum ini erat kaitannya dengan adanya peraturan pemerintah daerah, khususnya Tuban. Rudy yang aktif di Bengkel Seni Natyapratama ini mengatakan bahwa pemerintah telah mendata semua penari tandak yang ada di Tuban. "Mereka semua harus mendapat ijin pentas, juga berkewajiban membayar pajak penghasilan," terang Rudy. Ia menjelaskan bahwa semua penari profesional harus mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) tingkat kabupaten. Di situ dijelaskan aturan-aturan bagi seorang *waranggana*. Misalnya, Pemda melakukan jam malam untuk pertunjukan tandak, melarang *suwelan* dan mabuk-mabukan, juga melarang membawa senjata tajam di tempat pentas untuk menghindari perkelahian.

"Kalau ada *tanggapan* (pertunjukan—*Red.*) tandak yang besar, polisi datang untuk menjaga pertunjukan itu. Ya, maklum saja kalau sekarang jarang terjadi perkelahian, tandak di Tuban ini paling tertib *kok*!" tambah staf pengajar di SMP Tambakboyo ini.

Intervensi pemerintah dengan pendekatan normatif memang telah banyak menghilangkan gerakan sensual yang diidentikkan dengan tandak. Belum lagi pengaruh keberagamaan penduduk yang mau tidak mau akan mempengaruhi.

Tapi benarkah sensualitas dan konotasi mesum pada tandak sudah benar-benar menghilang? Tunggu dulu. Pada aras sosial tertentu hal ini ternyata masih berlaku. Lihat saja Grup Tandak Rukun Atom, pimpinan Satiman (50). Di wilayahnya, Kelurahan Latsari, Tuban, Satiman dikenal sebagai seorang *pengepul sindir*, orang yang mengasuh gadis-gadis yang ingin belajar tandak: belajar menari dan menyanyikan gendhing. Biasanya, pengepul tidak hanya mengasuhnya. Tapi memberi mereka makan dan tempat tinggal. Pada waktu-waktu tertentu, pengepul dan anak asuhnya mengamen ke tempat-tempat keramaian, misalnya di Pasar Ngebum, pesisir pantai, atau pada saat penebangan hutan jati.

Bila pemain tandak profesional dipanggil dengan sebutan *waranggana*, *sebutan* halus dengan konotasi yang lebih positif, maka pemain tandak ini disebut dengan *sindir*. *Sindir* adalah perempuan yang suka menggoda dengan sindirannya saat pentas. Sindir berkonotasi lebih buruk dibanding *waranggana*.

Para calon *sindir* yang mendatangi Satiman, tidak hanya berasal dari Tuban, tapi juga dari wilayah lain seperti Jatirogo, Blora, dan Rembang. "Kebanyakan yang datang ke saya gadis-gadis lulus SD yang tidak melanjutkan sekolah," ujar Satiman dengan bahasa Indonesia yang patah-

patah.

Ia menambahkan, banyak pula perempuan berstatus janda yang datang untuk belajar menjadi penari tandak. Satiman mengatakan, terkadang penonton lebih menyukai jika status penarinya janda. *Sindir* dengan status janda dimitoskan lebih *hot* dan gampang "dibawa".

Tapi yang jelas, Satiman tak hendak memandang status anak asuhnya. "Yang penting mau belajar joged dan dilatih *nembang* saja," tandasnya. *Toh*, tujuan para perempuan itu mendatangi Satiman bermacam-macam. Ada yang ingin belajar, ada yang ingin mencari pekerjaan, ada pula yang bermimpi kelak dapat menjadi penari tandak profesional. Bahkan, ada yang belajar nyindir supaya melupakan mantan suaminya.

Waktu mengamen artinya adalah waktu yang melelahkan. Dalam satu hari, mereka biasanya manggung pukul satu siang dan sebelas malam. Seperti telah jamak pada tandakan, satu hari adalah satu paket yang diisi dengan dua kali pentas. Kala pertunjukan dimulai, penonton pun berdatangan. Tukang becak, pedagang, nelayan, kuli pantai, atau orang yang hobi *cangkrukan* (nongkrong) di warung tuak adalah pasar yang biasa menjadi konsumennya.

Dengan perangkat karawitan yang minim, kostum seadanya, dan polesan menor kosmetik murahan, mereka bekerja, melintasi kerumunan demi kerumunan. Jangan berharap kondisi sopan tercipta sebagaimana halnya suasana pergelaran tandak di tempat hajatan. "Sering rusuh, karena pasti ada orang mabuk. Namanya saja orang mabuk," tukas Satiman ketika ditemui di rumahnya yang sederhana.

"Pemain dijahili penonton itu wajar. Batasnya adalah dicolak-colek atau dicubit. Sekarang juga masih ada yang menyelipkan uang di kemben. Bahkan pernah, ada yang *ngasih* uangnya pakai mulut dan harus diterima *sindir* dengan mulut pula," sambung Satiman, yang telah menjadi pengepul sejak 1990 ini.

Pendapat Satiman didukung oleh Ramijah (22). Menantu Satiman ini dulu pernah menjadi *sindir*, namun kini memilih berhenti karena telah mempunyai anak. "Banyak penonton *ngibing* yang sengaja menyakiti *sindir*. *Sindir* harus menerima semua tingkah penonton itu," ucap Ramijah lirih.

"Jadi penari tandak itu harus ramah, kalau ingin laris. Kalau digoda ya harus baik menanggapinya," sahut Satiman seraya menggambarkan bahwa pernah ada *sindir* yang menolak digoda dan *pengibing* tak pelak mengumpatinya. Sejak itu karirnya sebagai *sindir* pun habis sudah.

Penonton jahil menjadi warna khas tandak pengamen. Jika selesai pentas, misalnya, banyak kaum laki-laki yang mengajak kencan. "Kalau anak asuh Pak Man (sapaan akrab Satiman—*Red*), tidak ada yang seperti itu. *Nggak* saya kasih. Tapi kalau di luar jam kerja, ya terserah dia, saya *nggak* bisa memaksa," tegas Satiman. Katanya, tak sedikit pula yang tergila-gila pada *sindir*. Bahkan ada yang rela menghabiskan penghasilannya untuk memberi *suwelan*. Banyak pula yang tega melupakan anak istrinya demi *sindir* yang *dikecenginya*.

Tindakan tak senonoh, pelecehan saat kerja, hingga ajakan kencan memang tak pernah absen dari kehidupan para *sindir* pengamen ini. *Sindir* telah terlanjur dicitrakan sebagai perempuan penggoda dan mau dibawa oleh siapa saja. "Kita tak bisa menolak cap seperti itu," ujar Satiman sambil tertawa.

Hanya saja yang jelas, saking populernya tandak di tengah masyarakat, khususnya Tuban, banyak gadis-gadis bermimpi menjadi penari. Menjadi pemain tandak profesional, memang pekerjaan yang cukup menggiurkan. Di samping mendapat popularitas, penghasilan yang diperoleh bisa dibilang lebih dari cukup untuk hidup di kota kecil. Untuk pendatang baru saja, honor sekali pentas Rp 400 ribu hingga Rp 600 ribu, untuk yang senior atau primadona (ukurannya adalah kecantikan dan pengalaman), angkanya bisa berlipat menjadi Rp 1 juta sampai 1,5 juta. Itu pun dalam satu bulan, terutama pada bulan-bulan banyak hajat, bisa manggung sampai 26 kali. Tak heran jika rata-rata *waranggana* telah mempunyai rumah sendiri, kendaraan, dan hidup mewah dibanding masyarakat yang lain. "Rata-rata punya mobil di rumahnya," ujar Endang Sugiharti (44), sang primadona tandak di Tuban sambil menyebut angka 1,5 juta untuk bisa mengundang dirinya dalam hajatan. Sang anak, Denok Indah Yunita (14), yang baru satu tahun menceburkan diri dalam tandak profesional, sudah mendapatkan honor Rp500 ribu sekali main.

Karena tingginya penghasilan ini banyak gadis-gadis putus sekolah dari desa yang belajar menari pada pengepul. Mereka mengamen dari satu tempat ke tempat yang lain. Meskipun, dari segi penghasilan, dewi fortuna tidak mampir di tandak *ngamen* seperti halnya di tandak profesional. Penghasilan mereka tergolong minim. Kalau beruntung, sekali naik panggung akan mendapatkan uang hingga Rp100 ribu. Jika lagi sial, mereka harus puas dengan uang tiga sampai empat puluh ribu di kantong. Penghasilan itu harus dibagi untuk semua awak. Jika yang diperoleh Rp100 ribu, sekira Rp10—15 ribu akan mereka terima.

The *show must go on.* Imaji apapun

yang melekat, semangat untuk menghidupi tandak di kalangan seniman nya mampu menghasilkan buah manis. Tandak masih tetap populer. Tandak masih menjadi alternatif hiburan untuk rakyat. Waktu boleh terus berlalu. Saat panggung kesenian tradisional lain seperti wayang, ketoprak atau ludruk makin tergerus waktu dan makin sedikit penggemarnya, tandak justru hidup di tengah masyarakatnya.

Tak seperti kesenian tradisional lain, tandak membuka jalan bagi tumbuhnya kedekatan emosional. Ninuk Kleden, dalam *Seks dan Seni Pertunjukan* 1991) menunjukkan bahwa dalam kesenian sejenis tayub—tentu pula termasuk tandak, terdapat afinitas afektif. Artinya hubungan interrelasi antara pemain dan penonton diliputi dengan perasaan-perasaan ringan *pleasure*). Reaksi penonton yang cukup ekspresif, mendorong pemain lebih bergairah lagi dalam menunjukkan kemahirannya. Mungkin inilah yang menjadi muasal mengapa kesenian tandak tetap bertahan. Ia menjanjikan satu relasi intim pemain dan penikmatnya. Baik pemain maupun penonton berperan aktif dan terjadi *mutual symbolicum*, sesuatu yang saling melengkapi.

Tak hanya itu, kemampuan tandak melakukan kawin silang juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap eksistensinya hingga kini. Tandak mampu melebur dengan kesenian kontemporer. Tandak bisa seenaknya saja mengganti gendhing yang pakem dengan campursari. Atau jogednya bukan lagi gambyong, tapi lebih mirip joged dangdut. Bahkan, kalau perangkat gamelannya tidak ada, karaoke pun bisa menjadi benda substitusi.

Tandak juga pandai membangun regenerasi. "Anak-anak muda sangat menggemari pertunjukan tandak," ujar Sumardi (32), guru tari di SMPN 6 Tuban. Lihat saja pentas tandak malam itu. Desa Semanding, yang mungkin tak tercatat dalam peta dunia, merekam satu peristiwa penting, menjadi saksi bagi sebuah dunia yang silang-menyilang. Para penari mengenakan kemben penuh roncean manik-manik dengan selendang tipis penutup bahu. Penduduk desa dengan berbagai busana memadati tempat pertunjukan. Kaum tua banyak menggunakan baju batik, sementara kaum muda lebih beragam lagi. Perempuan umumnya mengenakan celana capri selutut, kaus ketat ala Jennifer Lopez, dan sepatu yang penuh tali-tali. Sedangkan pemudanya kebanyakan memakai celana jins, berkaus *junkies* atau bergambar "Jamrud", sebuah grup band lokal yang sedang populer. Untuk menambah penampilan, kadang rambut mereka dicat warna merah, dengan potongan model terbaru. Jika paginya mereka mendendangkan lagu yang biasa didengar dari radio atau televisi, maka malamnya mereka tak segan berjoged tandak.

Tapi efeknya menjadi sulit untuk menelusur bentuk asli kesenian tandak. Tidak ada pakem dalam bermain tandak. Urutan permainannya telah banyak dilanggar. Tak aneh, para penari pun tidak begitu peduli lagi dengan ritual permainan tandak. "Penari muda-muda sekarang banyak yang modalnya cuma cantik saja. Sebenarnya mereka *nggak* bisa menari. Suaranya juga belum terasah, sehingga *cengkok* gendhingnya tidak terasa," sambat Sumadi, yang juga lulusan pendidikan tari IKIP PGRI Tuban.

"Yang penting bergaul," mungkin ini adalah satu kata kunci untuk menikmati tandak yang memang sering disebut tari pergaulan. Jangan berharap kita akan mendapati penonton dan pemain dengan pikiran yang konservatif seperti kita menikmati suguhan tradisional lainnya. Tandak, mungkin lebih familier. Sebab, ia adalah anak dari hasil perkawinan budaya tradisional dan budaya populer. Masyarakat akan menerima tandak seperti halnya mereka menerima televisi.

Masyarakat menerima tandak sebagai ruang publik yang membuat mereka bisa bertemu dengan tetangga, bertemu dengan kawan lama, atau bahkan mendapatkan teman baru. Ini adalah sebuah tempat untuk melupakan sebentar saja kegetiran hidup, melupakan kemiskinan yang mendera. Hidup memang tak selamanya indah, tapi tandak adalah saat-saat yang harus dinikmati.

Nurul Aini
Iqbal Aji Daryono

PT Radio Swara Gadjah Mada
Lt.4 Graha Pantja Dharma
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta 55281
Tel. (0274) 549513 Fax. 549515

SWARAGAMA 98,45 FM
www.swaragama.com

"Terpupuk Tahi

MENUJU KE LAUT
Angkatan Baru

Kami telah meninggalkan engkau,
tasik yang tenang, tiada beriak,
diteduhi gunung yang rimbun
dari angin dan topan.
Sebab sekali kami terbangun
dari mimpi yang nikmat:

"Ombak ria berkejar-kejaran
di gelanggang biru bertepi langit.
Pasir rata berulang dikecup,
tebing curam ditantang diserang,
dalam bergurau bersama angin,
dalam berlomba bersama mega."

Sejak itu jiwa gelisah,
Selalu berjuang, tiada reda,
Ketenangan lama rasa beku,
gunung pelindung rasa pengalang.
Berontak hati hendak bebas,
menyerang segala apa mengadang.

Wahai muda kenali dirimu
Ialah perahu tamsil dirimu
Tiada berapa lama hidupmu
Ke akhirat juga kekal diammu

Bagi yang pernah mengenyam bangku sekolah menengah tentu hapal, atau paling tidak pernah mendengar potongan syair di atas. Itulah bait pembuka *Syair Perahu.* Syair yang dihubungkan dengan nama besar tokoh sufi Melayu abad 16, Hamzah Fansuri.

Selama ini, meski tak mendalam, syair ini selalu diperkenalkan, baik oleh guru maupun buku pelajaran Bahasa Indonesia sekolah menengah, sebagai syair yang memiliki aspek religius yang sangat dalam. nilai isoterisnya tentang hidup dan kehidupan begitu serius. Lebih jauh lagi, ia dilabeli sebagai sebuah karya Sastra Melayu Klasik yang bermuatan sufistik.

Hal ini tak salah. Para peneliti Sastra Melayu Klasik seperti Doorenbos, Brakel, Drewes, Al

Pesisir dalam Kesusastraan Indonesia Modern:
Kenyataan"

Attas, van der Tuuk, Braginsky, sampai Abdul Hadi W.M. pun mengatakan demikian. Terlepas dari keraguan yang belakangan muncul (bahwa syair ini bukanlah karya Hamzah Fansuri, tapi tulisan para muridnya), diakui, karya ini indah secara estetik dan dalam maknanya.

Namun, ada satu sisi yang tak pernah benar-benar dibahas lebih mendalam dari *Syair Perahu* ini. Terpusatnya pembicaraan pada nilai estetik dan aspek sufistiknya membuat *Syair Perahu* sering kali dilepaskan dari sisi yang lain: konteks sosial dan historisnya, yang bisa jadi tak kalah penting dan menariknya. Tak banyak dibahas apa latar belakang sosial ditulisnya *Syair Perahu*, dalam masyarakat seperti apa ia lahir dari tangan pengarangnya, atau apa relevansi sosial yang bisa diambil dari syair ini.

Mungkin tampak bodoh jika ada pertanyaan, mengapa syair itu berjudul *Syair Perahu*? Mengapa perahu diambil untuk membuat tamsil dari sebuah perjalanan hidup manusia? Mengapa bukan gerobak, pedati, truk, atau kontainer, atau yang lain?

Banyak yang menafsirkan *perahu* adalah idiom yang akrab dalam dunia kepenyairan sufistik. Ia banyak ditemui pada syair-syair sufi Persia maupun India, yang mana Kesusastraan Melayu Klasik mendapatkan pengaruhnya. Dan, bisa jadi kata *perahu* ini merupakan sebuah hasil keterpengaruhan itu.

Adanya pengaruh itu bisa jadi benar. Namun, yang tak boleh dilupakan adalah adanya sebuah kata kunci: *Barus, Baros*, atau *Fansur*. Inilah tempat di mana Hamzah Fansuri meng-identifikasikan diri. Dan, tentu saja sekaligus diacu sebagai tempat di mana *Syair Perahu* dilahirkan penulisnya (terlepas dari keraguan akan hubungan Hamzah Fansuri dengan syair ini).

Barus, Baros, atau Fansur terletak di Pantai Barat Sumatera, yang sekarang kira-kira terletak antara Sibolga dan Singkel. Kota ini pernah mengalami masa keemasannya sebagi bandar perdagangan internasional yang jadi penghubung Nusantara dengan belahan dunia yang lain. Tempat ini masyhur karena merupakan penghasil kapur barus dunia. Menurut sebuah laporan sejarah, Ptolomeus, sejarawan besar Yunani, menyebutkan bahwa kapal-kapal Athena telah singgah di Barus sekira abad 3 dan 2 M. Barus juga sering dihubungkan dengan tradisi mummi Mesir Purba. Tak heran jika kata "fansur" dapat ditemukan pada sebuah hadits Nabi Muhammad (abad 6 M), sekaligus diserap ke dalam bahasa Arab untuk menunjuk kapur barus. Saat Copernicus mencetuskan konsep heliosentris-nya pada abad 16 M, ia menyebutkan Barus pada peta dunia yang dibuatnya. Kebesaran Barus ini bertahan paling tidak sampai abad ke-18.

Jika melihat faktor sejarah ini, tak terlalu aneh jika kemudian *perahu* muncul menjadi sebuah simbol yang penting. *Perahu* tak sekadar muncul karena serapan dari sastra sufistik Persia maupun India. Lebih dari itu, ia merupakan representasi dari sebuah kehidupan yang akrab dengan laut, masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan pantai, manusia-manusia yang *survive* dengan aktifitas perdagangan, dengan pengembaraan, dengan perantauan.

Kalau *Syair Perahu* dibaca

DOK. BAL

"Sastrawan kita lebih banyak tinggal di kota. Mereka itu terpelajar, dan menyerap kebudayaan modern yang tak mengenal kebudayaan asal usul bangsanya. Mereka dibentuk sebagai *ambtenar-ambtenar* (pengawai)"

ABDUL HADI WM

keseluruhan, sebuah sketsa yang lebih jelas bagaimana representasi masyarakat pesisir akan ditemukan. ... *Ketahui olehmu hai anak dagang/ Riaknya rencam ombaknya garang/ Ikan pun banyak datang menyerang/ Hendaknya membawa ke tengah sarang*.... Tak hanya *perahu*, ada kata *anak dagang*, *riak*, *ombak*, atau *ikan*. Dan, tak bisa tidak, ini adalah idiom-idiom yang hanya lahir dari sebuah masyarakat yang dihidupi oleh tradisi pesisir.

Yang paling penting untuk dipahami, *Syair Perahu* hanya sebuah contoh. *Syair Perahu* mewakili karya-karya klasik lain yang memiliki corak fisik dan ideologi yang sejenis: semangat pesisir! Dan, bisa dikatakan bahwa semangat itu menghidupi hampir sebagian besar karya-karya klasik yang pernah ada di Nusantara ini.

Kalau seandainya benar bahwa *Syair Perahu* bukan karangan Hamzah Fansuri, maka pada syair-syair yang diyakini sebagai karya Hamzah Fansuri warna pesisir bahkan muncul jauh lebih kuat. Sebuah petikan syair Hamzah Fansuri berbunyi,... *Kenali dirimu hai anak dagang/ Jadilah markab (perahu) tempat berpulang/ Kemudi tinggal jangan kau goyang/ Supaya dapat hampir kau pulang*

Nuansa yang sama juga dengan mudah ditemukan pada karya-karya besar Hamzah semacam *Syarab al-Asyikin*, *Asrar al- Arifin*, atau *Almuntahi*. Pun pada *Syair Ikan Tongkol*. *Bahr al-Nisa* (*Lautan Perempuan*)—yang semula dianggap karya Hamzah Fansuri tapi kemudian juga diragukan kebenarannya, *Hikayat Malim Demang*, juga *Hikayat Hang Tuah*. Sementara, di luar Kesusastraan Melayu Klasik, suluk-suluk Sunan Bonang bisa juga dijadikan contoh dari karya yang memiliki nuansa pesisir yang kuat.

Sampai abad 19, kita juga masih bisa menemukan nuansa pesisir pada *Gurindam Duabelas*-nya Raja Ali Haji, *Syair Sinyor Kosta*, atau *Hikayat Abdullah* dan *Singapura Dimakan Api* karya Abdullah Bin Abdul Kadir Munsyi.

Tahun 1920, tatkala roman *Azab dan Sengsara* karya Merari Siregar terbit, dimulailah sebuah babakan kesusastraan Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Kesusastraan Indonesia Modern. Banyak sekali pendapat yang mendasari pemilahan tajam antara Sastra Melayu Klasik dengan Sastra Indonesia Modern tersebut. Namun, pendapat yang paling banyak dianut adalah karena adanya keterputusan (meskipun tak benar-benar bisa dikatakan demikian) gaya penulisan antara sastrawan yang menulis sesudah tahun 1920 dengan para pendahulunya.

Para penyair tak lagi menulis syair atau pantun dan menyanyikannya. Ia digantikan oleh bentuk puisi dan soneta yang tanah leluhurnya justru di Eropa. Sementara, para penulis prosa tak lagi menggubah hikayat. Mereka mengadopsi struktur novel yang secara intrinsik juga mengacu Barat.

Keterpisahan itu semakin dipertegas saat Sastra Indonesia masuk masa Angkatan Pujangga Baru. Orang-orang seperti Sutan Takdir Alisjahbana, Amir Hamzah, Sanusi Pane, atau Armjn Pane memperjelas sosok mereka sebagai penulis-penulis yang lahir dari rahim tradisi modern. Bahkan dengan ekstrim, Sutan Takdir menganggap bahwa masa silam haruslah ditinggalkan, karena masa silam telah mati semati-matinya. Jejak-jejak masa lalu yang masih bisa dilacak pada karya-karya Muhammad Yamin atau Rustam Effendi, semakin samar dalam sajak-sajak Sutan Takdir atau karya-karya Armjn Pane, juga pada Amir Hamzah.

Lalu, di manakah sastra yang dulu begitu kental dengan warna pesisir? Bagaimana keberadaannya pada iklim yang baru ini?

Meski terlihat mengkerut, warna pesisir dapat dikatakan masih tersisa. Sutan Takdir masih sempat menelorkan sebuah kumpulan puisi *Lagu Pemacu Ombak* atau sajak "Menuju ke laut". Amir Hamzah juga masih menulis kebesaran Hang Tuah di samudera dalam sajak "Hang Tuah". Jika boleh memaksa, di angkatan sesudahnya, kita masih bisa mengais warna pesisir itu pada sajak-sajak Chairil Anwar. Namun, dari sekian puluh sajak karya Chairil, jumlahnya begitu kecil. Dan karena itu, tak banyak dibicarakan sebagai bagian dari kebesaran Chairil.

Selanjutnya, untuk waktu yang tak pendek, warna pesisir ini sempat menghilang sampai kemudian muncul Sutardji Calzoum Bachri, Abdul Hadi W.M., atau D. Zawawi Imron di pertengahan dekade 60-an. Sampai masa paling mutakhir, warna pesisir dapat dilacak pada sajak dan cerpen-cerpen Taufik Ikram Jamil.

Pada ranah prosa, mulai dari roman, novel, atau cerpen, tampaknya agak sulit menemukan nuansa pesisir. Dalam ringkasan dan ulasan novel Indonesia modern yang dikerjakan oleh Maman S. Mahayana dkk., dari seratus judul novel, hanya dua yang bisa dicatat punya nuansa pesisir. Novel itu adalah *La Hami* karya Marah Rusli dan *Pulau* karya Aspar. Itupun, hanya *Pulau* yang bisa dikatakan benar-benar punya nuansa pesisir.

Yang jelas, secara kuantitas (dan mungkin secara kualitas), warna pesisir pada Kesusastraan Indonesia Modern kalah jauh dengan yang ada pada sastra lama. Belum ada memang yang membuat penelitian tentang berapa kira-kira karya-karya sastra Indonesia mutakhir yang bisa diidentifikasi memiliki nafas pesisir. Namun, jika kita menghitung, dalam rentang waktu mendekati 9 dekade ini, penulis-penulis yang mengusung nuansa pesisir dalam karya-karyanya tak akan lebih dari hitungan jari.

Dari segi kualitas, tampaknya tak ada parameter yang bisa digunakan untuk mengukurnya. Tapi yang perlu dicatat, ada banyak nuansa pesisir yang

ada pada karya-karya lama tak ditemukan pada karya-karya masa kini. Dalam karya-karya Hamzah Fansuri, *Syair Perahu*, atau *Hikayat Hang Tuah*, laut dilukiskan dengan begitu besarnya, begitu magis, ajaib, sekaligus transenden. Hal inilah yang sulit ditemukan secara utuh pada karya-karya mutakhir yang dianggap bernuansa pesisir. Nuansa transenden itu memang masuh kuat, misalnya pada sajak-sajak Zawawi Imron maupun Abdul Hadi. Namun, yang lebih banyak mencuat justru adalah kesakitan-kesakitan. Pesisir, dalam Kesusastraan Indonesia Modern muncul dengan wajah kusam dan muram. Kita bisa dapatkan ini pada puisi Chairil Anwar yang berjudul "Aku dan Temanku", pada "Exodus" karya Abdul Hadi W.M., pada "Gelombang-Gelombang Tak Habis Sesal"-nya Zawawi Imron, atau cerpen "Sebuah Cerita dari Pantai" karya Seno Gumira Ajidarma. (Meski tentu saja ini tak bisa jadi pijakan bahwa karya mereka mutunya di bawah karya-karya klasik yang mengusung nuansa yang sama).

Dalam "Exodus", Abdul Hadi W.M bertutur,... *Diantara teluk dan pantai pasir/ Serta sendja yang menutup dinding laut/ Kau mentjari/ Djejak nelajan/ Njiur tidak mendesir dan pelabuhan/ Sudah djarang dikundjungi kapal2/ Menjandang sepi ini disini/ Menjandang kesal pikiran dan kekatjauan ini/ Menjandang mainan/ Jang diberai ombak, sendja, teluk dan pasir hitam/ Seakan petjahan batu karang pada pantai jang legam*

Bandingkanlah suasana muram yang menyeruak dari sajak "Exodus" ini semangat optimistis yang ada pada *Syair Perahu* atau karya-karya Hamzah Fansuri. Sajak yang sangat memungkinkan diilhami oleh pantai timur Madura, di mana Abdul Hadi lahir, ini begitu murung. Ada kesepian, ada kesuraman, ada kekesalan, ada kekacauan, ada yang hilang. Ada nelayan yang sudah mulai sulit dicari jejaknya (sulit ditemui) di pantai. Ada pelabuhan yang telah mulai sepi, jarang dikunjungi kapal, jarang dikunjungi pelaut, juga nyiur yang tak lagi mendesir, sementara angin berhenti berhembus. Dan, tak ada kesakitan, yang melebihi pantai yang mulai sepi dari nelayan, pelabuhan yang mulai jarang dikunjungi kapal, dan nyiur yang tak lagi melambai. Suasana yang dibangun dalam "Exodus" inilah yang bisa dikatakan mewakili nuansa pesisir diusung dalam karya-karya sastra Indonesia mutakhir.

Mengapa sastrawan yang mengusung warna laut jadi minoritas? Dan, yang minoritas itupun muncul dengan suara-suara yang minor pula? Tentang kesakitan pesisir, tentang keterpinggiran nelayan, tentang keterpurukan laut?

Secara tersirat, Maman S. Mahayana menganggap, surutnya tradisi pesisir pada sastra Indonesia Modern tak lepas dari faktor politik, ekonomi, sosial, dan kultural bangsa. Faktor-faktor inilah yang kemudian berpengaruh terhadap orientasi sastrawan dalam menggarap karya-karyanya. Dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia yang dikenal *intens* dengan Kesusastraan Melayu ini menjelaskan, orientasi politik yang konsentris dan "daratan" membuat pesisir dilupakan. "Masalah yang muncul seakan-akan hanya masalah daratan. Karena itu yang diakrabi dan digeluti oleh para sastrawan kita, maka itulah yang diangkat dalam karya mereka," kata Maman.

Sementara, Abdul Hadi W.M. punya pendapat lain. "Sastrawan kita lebih banyak tinggal di kota. Mereka itu terpelajar, dan menyerap kebudayaan modern yang tak mengenal kebudayaan asal usul bangsanya. Mereka dibentuk sebagai *ambtenar-ambtenar* (pengawai)," ujar penyair sekaligus pakar sastra sufistik ini.

Kalaupun masih muncul nuansa pesisir pada sajak-sajak Sutan Takdir, Amir Hamzah, dan sedikit yang lain di awal pertumbuhan Kesusastraan Modern Indonesia, menurut dosen Universitas Paramadina Mulya Jakarta itu, lebih dikarenakan mereka lahir dan sedikit banyak masih mewarisi tradisi Sastra Melayu yang memang kental dengan nuansa pesisir. "Mereka itu orang Sumatera. Mereka pemakai bahasa Melayu aktif. Mereka lahir dan muncul dari Sastra Melayu," jelas doktor dengan disertasi kajian hermeneutik karya-karya Hamzah Fansuri ini.

Tapi, benarkah secara kuantitatif Sastra Indonesia Modern miskin akan nuansa pesisir? Hadi meragukan hal itu. Menurutnya, yang benar adalah kurangnya perhatian kritikus terhadap karya-karya sastra dengan warna pesisir. "Jumlahnya bukan sedikit. Tapi, kemunculannya tak banyak dibicarakan kritikus. Inilah yang membuatnya tenggelam," tegas Hadi

Sebagai contoh, Hadi menunjuk fenomena maraknya warna pedalaman pada karya-karya sastra yang muncul awal tahun 1980-an. Saat itu, baik penyair maupun novelis beramai-ramai mengusung warna lokal pada karya-karyanya. Di antara yang paling

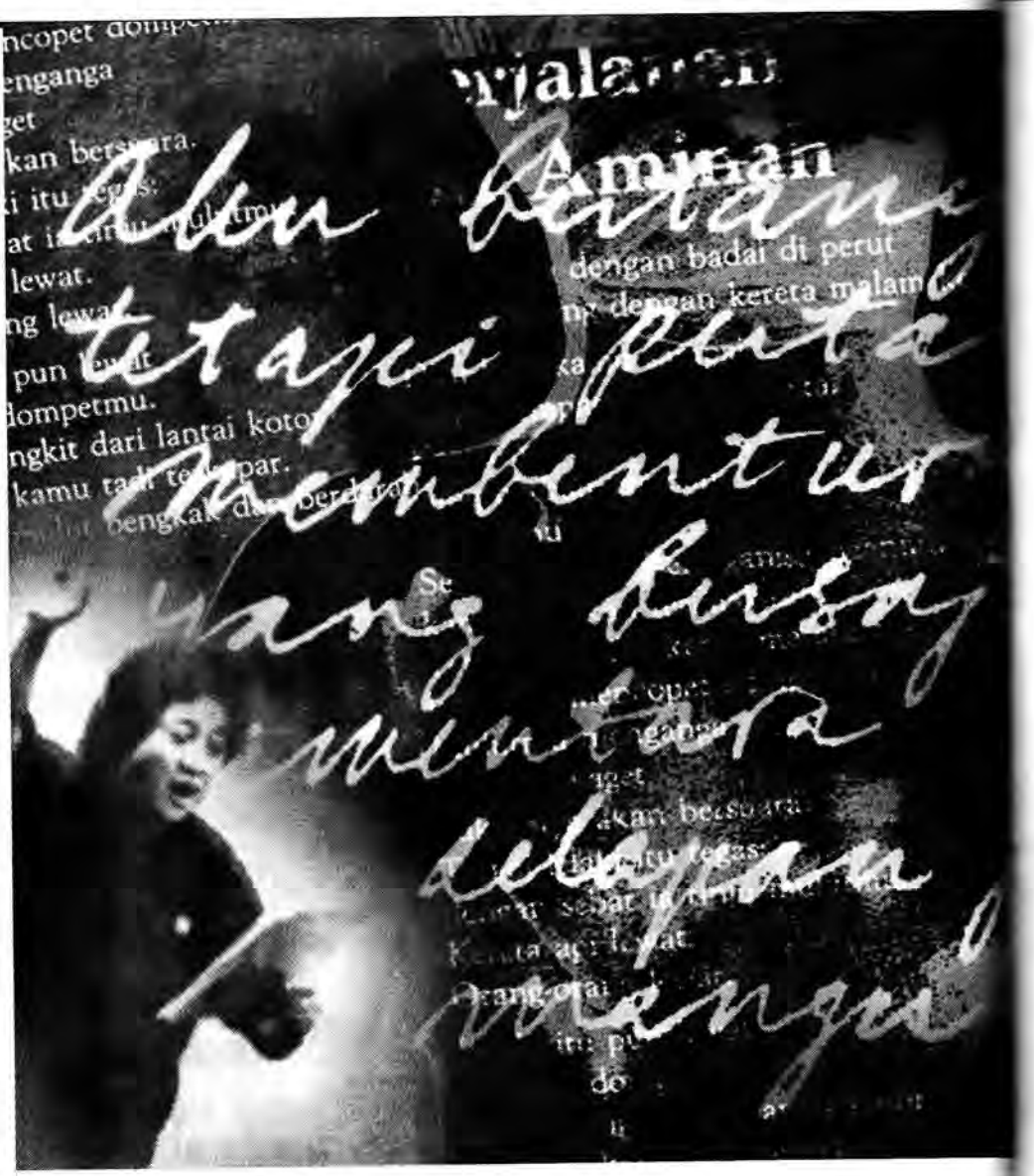

mencuat adalah Linus Suryadi AG., Umar Kayam, Darmanto Jt., Ahmad Tohari, dan beberapa nama lain. Nama-nama itu dengan mudah segera diidentikkan dengan Jawa dan tradisi pedalaman. Namun di lain sisi, pada iklim seperti ini, lokal pesisir ternyata tak turut mengemuka. "Masalahnya, perhatian kritikus hanya tertuju pada mereka (Linus dkk—*Red.*). Sementara, yang pesisir itu selalu diidentikkan dengan Melayu. Proses hegemoni Jawa terhadap Melayu tampak di sini," protes Hadi.

Apa yang diungkapkan Hadi tak berbeda dengan pendapat Sapardi Djoko Damono, Guru Besar Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Menurutnya, sastra dengan basis pesisir memang belum banyak dibicarakan. Penelitian kesusastraan yang pada dasarnya dirintis oleh sarjana-sarjana Barat lebih banyak bersentuhan dengan Sastra Kraton. "Orang-orang Barat berkenalan dengan pusat-pusat kekuasaan, sehingga penelitiannya juga kebanyakan di situ." Karena itu, Sapardi sepakat jika sebenarnya sastra dengan nuansa pesisir sebenarnya tidaklah sedikit, apalagi hilang. Ia tak nampak lebih karena ia tak banyak dibicarakan.

Yang kemudian jadi pertanyaan, apakah nuansa pesisir pada Kesusastraan Indonesia Modern bisa disamakan dengan nuansa pesisir yang ada pada Kesusastraan Indonesia Lama? Benarkah idiom-idiom yang digunakan oleh Sutan Takdir atau Amir Hamzah, lanskap pantai yang mempesona pada sajak-sajak Abdul Hadi dan Zawawi Imron, juga lukisan muram pesisir pada beberapa cerpen Taufik Ikram Jamil serta Seno Gumira adalah hal yang sama dengan apa yang ada dalam karya-karya Hamzah Fansuri, *Syair Perahu*, *Hikayat Hang Tuah*, suluk-suluk Sunan Bonang, atau gurindam-gurindam Raja Ali Haji?

"Kalau Anda bicara substansi, sastra pesisir tak pernah ada dalam Kesusastraan Indonesia Modern." tegas Abdul Wahid B.S., penyair Yogya kelahiran Lamongan yang juga seorang pengamat sastra. "Kalau Abdul Hadi bicara tentang laut, juga Zawawi, pun *pasemon-pasemon* pesisiran Goenawan (Mohamad—*Red*), itu tak lebih sebagi *local colour*," sambung empunya antologi puisi *Rumah Cahaya* ini.

Wahid memberi contoh pada kepenyairan Zawawi Imron, yang kebetulan memiliki kedekatan dengannya. Menurutnya, sajak-sajak Zawawi memang sarat dengan warna laut. Tapi, seorang Zawawi pada dasarnya bukan ingin menyampaikan "kelautannya".

"Ia ingin menyampaikan hal yang lebih besar, sesuatu yang universal! Dan, Zawawi mendapatkan satu simbol yang mampu mewadahi humanisme universal-nya, *human liberation*-nya, itu pada laut! Jadi, sesungguhnya Zawawi tidak dengan sengaja ingin memunculkan bagaimana budaya pesisir, tradisi bahari yang memberi alternatif terhadap tradisi pedalaman. Kenapa ia mengambil unsur-unsur laut? Ya, karena dia orang Madura, yang memang dekat dengan laut. Dan, seorang sastrawan yang baik tidak akan menulis dengan budaya yang dia sendiri tidak tahu," papar dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini.

Masih kata Wahid, sastra pesisir haruslah benar-benar dirasuki oleh tradisi pesisiran. Ia tak hanya sebagai kolase, tak hanya sebagai *setting*. *Local colour*-nya tak hanya lahiriah, tapi juga batiniah. Menurut Wahid, seorang penyair bahkan bisa saja menulis dengan tradisi pesisiran tanpa harus menggunakan idiom-idiom laut.

Suara yang lebih keras muncul dari Hamid Jabbar, penyair senior asal Sumatera Barat. Jabbar bahkan terkesan menolak adanya terminologi sastra pesisir. Menurutnya, membicarakan adanya sastra pesisir dan sastra pedalaman ,sama artinya memilah-milah dan memisahkan sastra itu sendiri. Penyair seangkatan Taufik Ismail ini menganggap bahwa kesadaran tiap sastrawan tak persis dipilah oleh

kesadaran geografis.

Baginya, tak penting apakah seorang sastrawan menulis tentang laut atau bukan. "Saya tanya, lebih penting mana mengkaji soal rendahnya ekspresi tentang kelautan dalam karya sastra dengan rendahnya ekspresi dan pergulatan kemanusiaan, apakah itu di laut ataukah itu di darat? Laut itu *kan* hanya kulit! Yang paling esensial adalah masalah pergulatan kemanusiaan. Di darat atau di laut itu *no problem*!" tandas penulis sajak "Proklamasi 2" ini.

Apa yang ditandaskan Jabbar lebih ditegaskan dengan ketidakpercayaannya dengan pendikotomian antara laut dengan darat atau pesisir dengan pedalaman. Baginya, laut dan darat sama saja, darat tak lebih jelek dari laut. Keduanya saling topang-menopang. "Kalau Kerajaan Mataram itu buruk, otoriter, bukan karena dia itu daratan. Mataram buruk karena filsafat kekuasaanya buruk. Soeharto seperti itu juga!" tukasnya keras.

Karena itu, ia tak sepakat kalau ada kalangan yang ingin mendobrak realitas politik kekinian Indonesia dengan mengangkat kembali sastra pesisir. "Kalau begitu (pengangkatan kembali sastra pesisir—*Red.*), kita kembali pada pertentangan semula, antara laut dan darat."

Dalam hal ini, Abdul Wahid punya pandangan berbeda. Menurutnya, pemunculan kembali sastra pesisir amatlah penting. Munculnya sastra pesisir nantinya diharap bisa jadi *counter of begemony* terhadap pikiran-pikiran pedalaman yang jadi alam bawah sadar baik elit penguasa maupun elit intelektual negeri ini. Wahid tampaknya berharap bahwa sastra pesisir saat ini bisa mengulangi fungsi sastra pesisir pada masa keemasannya.

Wahid menganggap, dalam diri sastra pesisir selalu ada perlawanan terhadap kekuasaan, terhadap dominasi. "Dalam sastra lama misalnya, sastra pesisir senantiasa ingin mendudukkan manusia sebagai manusia, tidak manusia sebagai dewa sebagaimana yang difigurkan di babad-babad Jawa," terangnya.

Sastra yang bagaimana yang bisa disebut sastra pesisir, sampai di sini masih sama sekali baur. Apa yang diungkapkan Maman S. Mahayana,

"Laut itu *kan* hanya kulit! Yang paling esensial adalah masalah pergulatan kemanusiaan. Di darat atau di laut itu *no problem*!"

HAMMID JABAR

Abdul Hadi W.M., maupun Sapardi Djoko Damono, tak bisa tidak, tetap merujuk pada pesisir sebagai sebuah entitas fisik dalam sastra, meski tentu saja mereka jauh lebih memilih warna pesisir dalam sastra itu sebagai sebuah spirit. Dan bersandar dari sini, semua karya sastra yang bersemangat pesisir, berwarna pesisir, bercerita tentang pesisir, beridiom-idiom pesisir, itulah yang disebut sebagai sastra pesisir.

Sementara, apa yang dikemukakan oleh Abdul Wahid, bahwa sastra pesisir belum pernah ada dalam Kesusastraan Indonesia Modern, tentu saja adalah hal yang sangat berbeda. Apalagi kemudian ia lebih memilih syair-syair protes Rendra sebagai karya pesisir dibanding dengan karya-karya yang nyata-nyata memuat idiom-idiom pesisir dan ditulis orang pesisir. Mungkin ia tak salah jika mengidentikkan sastra pesisir dengan perlawanan terdapat kekuasaan yang mapan. Namun, menganggap bahwa spirit perlawanan adalah yang terpenting dari sebuah karya sastra pesisir, tentu harus dikaji lebih jauh. Apakah perlawanan benar-benar identik dengan pesisir, lebih-lebih sastra pesisir? Apakah pedalaman, atau karya-karya bercorak pedalaman selalu identik dengan establisme dan tanpa pergolakan? Tidakkah pedalaman juga punya hak dan memiliki cara untuk melawan? Tentu sangat tidak adil jika Rendra yang lahir di Solo, besar di Yogya, dan menulis tentang kegigihan petani, tentang derita pelacur-pelacur Jakarta, dianggap bernafas pesisir hanya karena ia melawan!

Kalau bicara tentang karya-karya Hamzah Fansuri, Samsudin Samatrani, Abdul Rauf Singkeli, juga Sunan Bonang, sampai pada Raja Ali Haji, tentu benar kalau dikatakan sastra pesisir itu melawan. Namun, melawankah *Hikayat Hang Tuah* yang meletakkan raja seakan-akan Tuhan, dan justru membinasakan perlawanan itu sendiri? Melawankah *Syair Sinyor Kosta* yang justru tokoh utamanya seorang Portugis? Padahal adakah yang melebihi semangat pesisir dari dua karya itu? Begitu juga, apakah bisa diterima menolak karya Zawawi atau Abdul Hadi sebagai bagian dari sastra pesisir hanya karena mereka dianggap tidak melawan? Padahal, menganggap sebuah karya itu melawan sangat tergantung dari bagaimana ia ditafsirkan dan, tentu saja, siapa yang menafsirkan.

Mungkin benar apa yang dikatakan Hamid Jabbar bahwa memperdebatkan sastra pesisir dan sastra pedalaman tak banyak membawa manfaat. Ia hanya akan mempolarisasi sastra dengan kriteria-kriteria yang tak jelas. Agak naif jika hanya karena tempat yang berbeda dan apa yang ditulis berbeda, Umar Kayam dan Zawawi Imron misalnya, harus ditempatkan pada wilayah-wilayah yang saling berdikotomi.

Yang paling mendesak mungkin bukanlah memunculkan kembali apa yang disebut sebagai sastra pesisir. Tapi, membangkitkan kesadaran sastrawan dan kritikus kita bahwa ada bagian dari sisi kehidupan di sekitarnya yang tak banyak dielaborasi: pesisir atau laut! Sehingga, apa yang disebut sebagai topang-menopang antara darat dan laut oleh Hamid Jabbar tak hanya jadi sesuatu yang bias diidealkan semata. Tak pincang seperti selama ini. Dan, laut tak terus-terusan "hanya terpupuk tahi kenyataan" sebagaimana yang pernah ditulis dalam sebuah sajak Zawawi Imron.

Mahfud Ikhwan
Fauzul Muhamad

Menyelamatkan

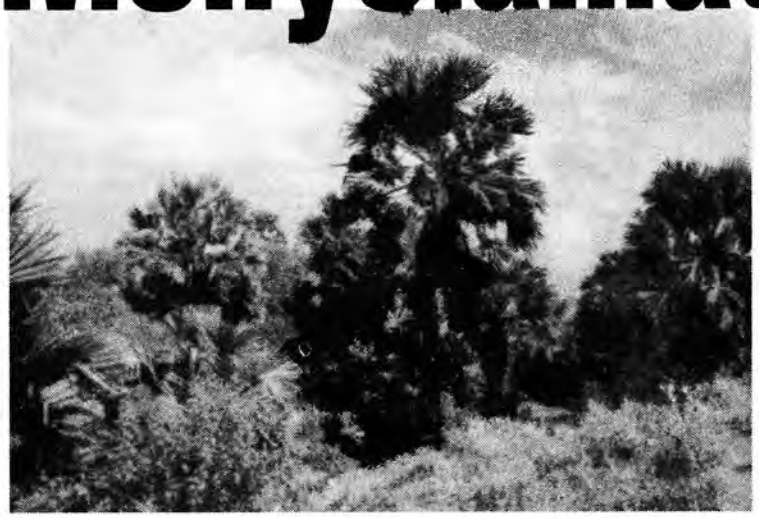

Di pantai selatan, sebelah barat Pantai Parangtritis, Ibu Sumartinem (41) tengah menyuapkan makanan pada anak gadisnya. Angin selatan berputar-putar menerjang rumah mungilnya yang bertembok batako. Seolah tak peduli, ibu satu anak itu tetap saja menyuapi anaknya sambil bercerita tentang laut.

Gurun Tropis

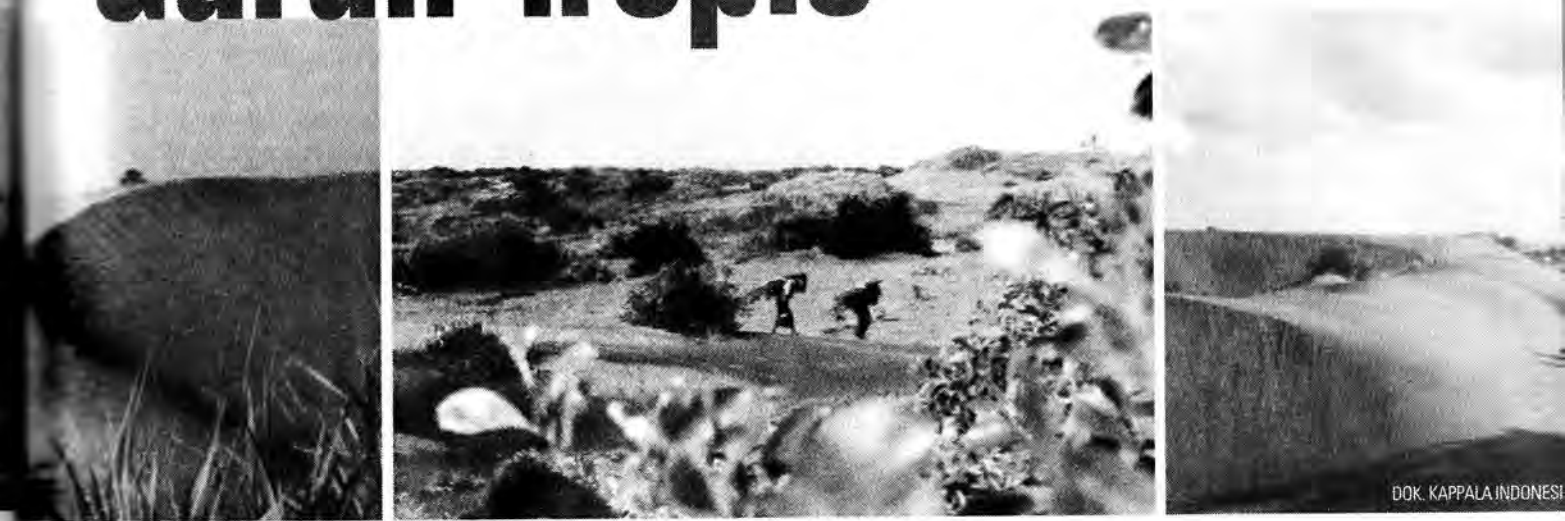

DOK. KAPPALA INDONESI

Pemandangan seperti itu merupakan satu dari sekian banyak aktivitas manusia di sekitar pantai Parangkusumo. Di tempat inilah, akan dijumpai fenomena alam yang menakjubkan, sebuah gumuk pasir (*sand dune*) yang membentang sepanjang pantai selatan.

Meski terletak di daerah tropis, Indonesia masih memiliki gumuk yang mirip dengan gurun, yang biasanya banyak dijumpai di daerah subtropis. Ketinggian gumuk pasir—umumnya tipe barkhan—setinggi empat meter, membentuk hamparan tanah mulai dari Parangtritis, Parangkusumo, sampai ke Muara Opak. Deretan bibir pantai ini membentuk sejauh satu jam perjalanan dari kota Yogyakarta.

Gumuk pasir adalah bentuk lahan (*lanskap*) yang berasal dari proses aktivitas angin (*eolin depositional landform*). Gumuk pasir yang ada di pesisir Parangtritis ini merupakan bentang alam yang unik dan langka, karena tidak didapatkan di daerah lain. Gumuk pasir ini akan terbentuk apabila ada tiga komponen pendukung, yaitu adanya material pasir, hembusan angin, dan tumbuhan pantai.

Menurut Van Zuidam, seorang ahli gumuk pasir dari Australia, gumuk pasir memiliki karakteristik tertentu, seperti relief morfologi (bentuk kristal) yang pendek, permukaan dengan lereng curam, dan topografi yang ireguler (susunan tidak teratur).

Proses pembentukan gumuk ini memang panjang. Material utama gumuk berupa pasir yang kemudian diangkut oleh angin. Ketika telah terjadi akumulasi, tanah terbentuk secara perlahan. Akumulasi pasir ini memiliki kandungan air permukaan yang sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Kadang-kadang terkandung juga air tanah.

Pada tahap awal suksesi, drainase (sirkulasi air) sangat baik, tidak memiliki vegetasi (tumbuhan) atau *land use*. Tetapi, di kaki gumuk yang tinggi terkadang dimungkinkan munculnya beberapa vegetasi.

Berdasarkan ada tidaknya vegetasi pada gumuk, gumuk pasir dibedakan menjadi dua jenis. Jenis pertama, gumuk mantap (*fixed dune*), yaitu yang ada vegetasinya, dan kedua gumuk aktif (*active dune*), yaitu yang tanpa vegetasi. Gumuk yang memiliki vegetasi disebut

DOK. KAPPALA INDONESIA

gumuk mantap, mengingat perubahan bentuk maupun perpindahannya yang sulit berlangsung.

Gumuk pasir yang banyak dijumpai di Pantai Parangtritis berbentuk bulan sabit (barkhan) dan memanjang (longitudinal). Gumuk longitudinal memanjang mulai dari Parangtritis sampai ke Kali Opak.

Gumuk tipe barkhan di kawasan selatan Kabupaten Bantul ini ada yang berekor. Mereka bergerak maju menyongsong arah angin. Hal ini disebabkan pada bagian muka terjadi sedimentasi (pengendapan), sedang pada bagian belakang terjadi erosi. Di tengah "gurun pasir" Parangtritis kadang-kadang ditemukan "oase", suatu genangan air tawar antargumuk. Daerah ini meluas ke utara sampai menutup sebagian ruas jalan Kretek- Parangtritis, di barat Parangwedang.

Gumuk pasir merupakan daerah perbatasan antara laut dan darat. Vegetasinya sangat spesifik. Suhu udara pada siang hari bisa mencapai 40° Celcius. Sementara pada malam hari sekitar 20° Celcius. Dengan amplitudo suhu yang sebesar itu, hanya tumbuhan-tumbuhan tertentu yang bisa hidup, seperti pandan, kradan, dan sidoduri.

Gerakan pasir dan debu sebagai suatu proses geomorfologis ditentukan oleh interaksi lima faktor. Kelima faktor tersebut yakni kecepatan angin, turbulensi (perputaran) angin, sifat kekasaran permukaan, kohesi (perekatan partikel sejenis), dan ukuran butir material permukaan.

Vegetasi akan menambah kompleksitas faktor tersebut. Vegetasi akan mengurangi kecepatan angin di dekat permukaan tanah. Komposisi mineral pada gumuk Pantai Parangtritis adalah *plagioklas*, *augit*, *hipershene*, fragmen batuan *andesit*, *magnetik*, *hornblende*, dan *glass vulkan* yang berasal dari Gunung Merapi.

Pembentukan gumuk pantai berasal dari proses angin yang membawa material yang terangkut oleh sungai ke muara dan dibawa oleh arus laut yang kemudian diendapkan menjadi *gesik*.

Apakah gumuk-gumuk pasir di Parangtritis memang sudah ada sejak zaman purba kala? Untuk menemukan bukti-bukti fisik kuantitatif keadaan paleogeografi, prosesnya tidak mudah dan perlu dana yang besar. Namun demikian, beberapa nama lokal dapat memberikan ihwal tentang hal ini.

Kalau kita menyusuri kaki perbukitan Parangtritis dari tenggara ke barat laut, kita akan menemukan nama-nama Parangendhog, Parangtritis, Mancingan, Parangkusumo, Parangwedang, Bibis, dan Grogol. Parangendhog (*parang*: bebatuan, *endhog*: telur), artinya daerah yang banyak memiliki batu berwarna putih menyerupai telur. Secara geologis, batuan ini terbentuk oleh batu gamping fragmental yang runtuh di pantai berbatu dan teragitasi (terserang) gelombang sehingga mengalami pembundaran.

Parangtritis (*parang*: bebatuan, *tritis*: menetes-netes secara memanjang), artinya gua batu yang airnya menetes-netes dari atapnya. Mancingan menunjukkan tempat orang memancing. Parangwedang (parang: bebatuan, wedang: air panas), merupakan sumber air panas. Urutan-urutan tempat ini menunjukkan garis evolusi geologis kawasan Parangtritis.

Parangtritis sebagai ekosistem pesisir menjadi lengkap dan bermakna istimewa bagi Yogyakarta karena juga terkait dengan mitos-mitos Jawa. Mitos sebagai aspek kultural teramat sulit ditinggalkan dalam siklus kehidupan keraton.

Adanya gumuk pasir tidak lepas dari keberadaan gunung berapi yang ada di Jawa bagian tengah. Pasir-pasir yang bertumpuk itu berasal dari Gunung Merapi. Saat Merapi mengeluarkan lahar, pasir dialirkan ke Kali Opak atau Kali Progo. Dari Sungai Progo mengalir ke laut dengan adanya arus tepi, dan dibawa oleh angin. Sampailah pasir-pasir itu di pantai, dan jadilah gumuk pasir.

Banyak mitos mengatakan, keraton Yogyakarta, pantai selatan, Kandang Menjangan, dan Gunung Merapi memiliki hubungan mistis. Jika ditarik garis di antara tempat-tempat itu, maka

akan terbentuk garis lurus. Dan gumuk pasir adalah pintu masuk ke pantai selatan.

Orang-orang pun kadang menghubung-hubungkan kejadian saat Merapi meletus. Abu letusan Gunung Merapi belum pernah sampai ke keraton. Secara ilmiah, hal ini terjadi karena arah angin tenggara yang menuju Gunung Merapi selalu bertiup kuat ke arah barat.

Menurut mitos Jawa, terjadi hubungan khusus antara raja pertama kerajaan Mataram Islam (sekarang Keraton Jogja--*Red.*), Panembahan Senopati, dengan penguasa Samudera Selatan, Nyai Roro Kidul. Demikian juga antara penguasa Merapi dengan penguasa laut selatan terjalin hubungan yang intim. Dan biasanya tempat pertemuan antara kedua penguasa itu di gumuk pasir sekitar Parangkusumo. Singkat kata, Merapi memiliki kedekatan yang intim dengan pantai selatan.

Bentuk-bentuk aktivitas yang terkait dengan budaya Keraton Yogyakarta sebagai bagian dari mitos masyarakat Jawa bagian selatan, ternyata telah memberikan warna tersendiri bagi keberadaan Parangtritis. Hinggga kini kepercayaan pada mitos-mitos itu masih terus berjalan dalam bentuk upacara sesaji labuhan pada bulan-bulan tertentu.

Gumuk pasir merupakan area nomaden, berpindah-pindah sesuai kekuatan dan kecepatan angin. Bentuk gumuk barkhan atau bulan sabit merupakan bentuk langka dan ini merupakan satu-satunya di Asia Tenggara.

Karena kelangkaannya inilah, Prof. Sutikno (51), mantan dekan Fakultas Geografi UGM, mengusulkan agar dilindungi. "Kawasan ini harus dilindungi. Selain langka, kawasan ini bisa dijadikan laboratorium alam,"jelasnya. Selain faktor kelangkaan, gumuk pasir mesti dilindungi karena bisa menanggulangi kerusakan akibat gelombang tsunami. Fakultas Geografi UGM sendiri telah membuat tim yang khusus ditugaskan untuk mengkonservasi kawasan ini. Urgensinya, pelestarian situs pendidikan dan penelitian untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Beberapa tahun yang lalu ada pemodal swasta yang ingin menyewa daerah itu. Tetapi banyak pihak menolak keinginan itu, termasuk Sultan Hamengku Buwono X (gubernur DIY), lembaga swadaya masyarakat, dan kaum akademisi.

Menurut Bambang Pratistho, mantan aktivis Mapala Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, keindahan gumuk pasir masih monumental jika dilihat pada tahun 1976. Kini, fenomena keindahan gumuk pasir tinggallah kenangan atau setidaknya banyak berkurang. Gumuk-gumuk telah menjadi rendah dan luasnya telah berkurang. Keaktifan gumuk juga mulai berhenti karena terhalang oleh vegetasi perintis, seperti rumput-rumput, kradan, sidoduri, pandan, dan rumah-rumah penduduk.

Kawasan gumuk pasir yang indah itu kini menyisakan banyak permasalahan. Banyaknya rumah-rumah liar menjadi persoalan yang dilematis. Di satu sisi rumah-rumah liar ini menghalangi pembentukan gumuk pasir, di sisi lain masyarakat sekitar merasa bahwa tanah yang mereka huni adalah tanah pemberian sultan dan telah memiliki izin.

Kawasan gumuk pasir sekarang memang telah dikapling-kapling. Ada satu cara unik pengkaplingan tanah, yaitu dengan meletakkan batu dan jika selama tiga hari tidak ada yang mengambilnya, maka tempat itu menjadi daerah mereka. Seperti yang dituturkan oleh Sumartinem (41), tanah ini adalah tanah sultan (*sultan ground*) dan dia sudah menempatinya sejak kecil. "Bahkan kita telah izin ke pihak keraton bersama-sama dengan tim konservasi," katanya emosional. Namun hal ini ditentang oleh Prof. Sutikno. "Mereka itu tidak resmi, *wong* kami saja belum izin." Ketika BALAIRUNG berkunjung ke lokasi, rumah-rumah liar itu banyak dipergunakan sebagai warung makanan dan penginapan.

Pembangunan rumah dan sarana-sarana fisik seperti jalan, banyak mempengaruhi kelestarian gumuk ini. Eksploitasi pesisir dalam derajat tertentu masih dapat dilakukan. Namun menetapkannya sebagai kawasan permukiman atau menanam modal besar untuk bangunan fisik tidaklah dianjurkan. Apabila pembangunan fisik tetap diteruskan, dikhawatirkan di masa depan, gumuk pasir akan punah.

Selain itu, kawasan ini sangat riskan dengan bahaya tsunami. Tentu hal ini tak pernah diharapkan akan terjadi. Dilematisnya, permasalahan ini berhadapan dengan kepentingan ekonomi banyak orang, terutama penghuni rumah-rumah liar. "Ya, kami di sini diizinkan Kanjeng Sinuwun (Hamengku Buwono—*Red.*) untuk mencari sesuap nasi," terang seorang penduduk *melas*. Ironisnya lagi, rumah-rumah liar di sekitar pantai juga banyak digunakan untuk praktik-praktik prostitusi.

Pemda Bantul sendiri membiarkan fenomena ini. Meski ke depan, Pemda berencana untuk menertibkan kawasan Parangtritis ini. Ketika hendak dikorfimasi, Idham Samawi, bupati Bantul, sedang tidak ada di tempat.

Hal ini menjadikan permasalahan bertambah rumit, antara berorientasi manusia dengan penyelamatan alam. Solusinya, manusia tak bisa dilepaskan dari konteks penyelamatan alam. Apabila ke depan kawasan gumuk pasir ini akan dijadikan daerah konservasi, maka pendekatan terhadap masyarakat sekitar merupakan agenda prioritas. Karena tanpa dukungan dan partisipasi mereka, penataan kawasan Parangtritis ini hanya akan menimbulkan permasalahan sosial lain.

Zaenal Afifudin
Iqbal Aji Daryono

BASKORO

Memberi Ruang bagi Wawasan Kelautan

Tiga belas siswa kelas dua SD Bungkus, Parangtritis, Kretek, Bantul, belajar menggambar. Ketika dikumpulkan, goresan mereka seragam: sepasang gunung dengan sawah di bawahnya.

Tak ada yang salah dari gambar gunung, tapi ini ironis bagi anak desa nelayan yang sering melihat laut. Lingkungan keseharian mereka ternyata tak terekspresi lewat gambar. Malah justru gunung yang jauh dari keseharian mereka yang lekat terekam. Pelan-pelan, lewat hal-hal kecil seperti itu, anak-anak nelayan, anak-anak pesisir, dijauhkan dari situs kehidupan sehari-hari mereka. Sekolah ternyata tak membuat mereka mengenal laut, ombak, dan ikan-ikan.

Fenomena ini bukan barang langka. Bukan hanya anak-anak laut yang "terpaksa" menggambar gunung. Anak-anak di tengah metropolitan pun menggambar hal yang sama. Muasalnya barangkali buruknya kreativitas. Tapi di luar itu, gejala ini menunjukkan sebuah anomali, penanda bagi sesuatu yang sangat mungkin: pendidikan Indonesia terpisah dari konteks yang hidup di masyarakatnya.

Pendidikan, yang menjauh dari realitas masyarakatnya, akan membuahkan proses lupa komunitas. Demikian pula halnya masyarakat pantai. Pendidikan, melalui sekolah, tidak mengajarkan pentingnya lingkungan pesisir yang menghidupinya. Pendidikan tak menjadikan anak-anak nelayan antusias pada lingkungannya.

Dalam aras pendidikan dasar, pengetahuan kelautan hanya dijabarkan pada bentuk-bentuk teks, sebatas pada pengertian teluk, misalnya, laut, karang, muara, dan jargon-jargon lain yang mesti dihapalkan oleh siswa. Dalam kurikulum pendidikan tingkat menengah, kondisi ini tidak berubah. Meskipun materi tentang kelautan banyak muncul dalam pelajaran Biologi, Fisika, dan Geografi, tapi dampaknya tak banyak berpengaruh pada siswa.

Berbicara lebih jauh, jangankan pada pendidikan dasar dan menengah, pada pendidikan tinggi, dengan bidang pembahasan yang lebih spesifik dan

diharapkan menyiapkan ahli kelautan, pun tidak bisa berbuat banyak. Banyak wawasan dan produk ilmu kelautan hanya dipelajari di sekolah dan susah diaplikasikan di masyarakat. Misalnya, banyak teknologi hasil "budaya sekolah", semacam produk studi teknik perkapalan, tidak mampu diaplikasikan ke lapangan.

Soal lulusan? Jangan harap lulusan perguruan tinggi jurusan kelautan, perikanan, atau perairan mau bekerja dan membangun wilayah laut dan pesisir. Lulusan sarjana lebih memilih bekerja di industri besar daripada mengembangkan ilmu kemaritiman di tengah masyarakat. "Setelah lulus kebanyakan berorientasi menjadi pegawai negeri yang bekerja di instansi," tutur Teguh Wahyono (21), mahasiswa jurusan Perikanan Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan '99.

Secara kualitatif, disiplin-disiplin ilmu yang berhubungan dengan laut memang belum menunjukkan peranannya dalam pengembangan sektor kelautan. "Pendidikan kelautan di perguruan tinggi itu tidak cukup. Karena sesungguhnya pendidikan tinggi itu fase-fase penyelesaian. Studi kelautan tetap dianggap tidak prospektif," jelas Daniel Mohammad Rosyid (40), dosen Teknik Kelautan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya.

Di UGM sendiri, masih terjadi praktik hegemoni terhadap studi-studi kelautan. Perikanan tidak dianggap sebagai bidang yang otonom. Belum golnya usaha jurusan Perikanan untuk menjadi sebuah fakultas merupakan salah satu bukti konkret terjadinya subordinasi laut oleh darat.

Sementara, pertanian, kehutanan, dan peternakan telah berdiri sebagai fakultas tersendiri. Kebetulan ketiganya memang berorientasi darat. Jurusan perikanan terpaksa harus berada di bawah fakultas pertanian, tunduk pada logika penyederhanaan dan penyeragaman. "Bayangkan, kita harus belajar klimatologi (ilmu tentang iklim) tanaman, bukan perairan," protes Netty (20), mahasiswa Perikanan UGM '99. "Padahal yang lebih kita butuhkan adalah yang berkaitan dengan iklim perairan," lanjut Teguh Wahyono, Ketua Keluarga Mahasiswa Ilmu Perikanan (KMIP) UGM.

Menurut Prof. Dr. Ir. Kamiso Handoyo Nitimulyo, M. Sc. (50), Ketua Jurusan Perikanan UGM, "Yang terpenting bukannya menjadi fakultas atau tidak. Tapi, bagaimana agar perikanan itu menduduki posisi yang sejajar dengan pertanian, peternakan, dan kehutanan. Yang diinginkan adalah kesejajaran dan otonomi."

Perdebatan di tingkatan konsep pendidikan formal masih saja terus berlangsung. Ini membuktikan visi kelautan dalam pendidikan kita hanya sebatas lips service. Jika di tingkatan internal saja perdebatan masih berlangsung, bagaimana dengan pretensi mengenalkan wawasan kelautan kepada masyarakat yang lebih luas?

Cara pandang seseorang bisa ditentukan oleh ilmu yang dimiliki. Ilmu inilah yang nanti menjadi kacamata dalam melihat kenyataan. Bangsa kita sejak awal berorientasi kontinental, sehingga laut tidak kelihatan.

"Orang kita beranggapan air laut adalah penghalang, laut itu ganas," demikian Namastra Probosunu, dosen Ekologi Laut di Jurusan Perikanan UGM berpendapat. Kebanyakan orang mengenal laut dengan rasa takut, laut sebagai misteri, penuh mitos, dan diceritakan hanya lewat dongeng-dongeng.

Kelautan dan bidang perairan tampaknya tidak mampu menarik minat masyarakat. Imaji yang terbangun bidang perairan tak mampu menjamin penghidupan. "Jika demikian halnya, siapa yang mau menjadi nelayan? Siapa pula yang mau susah-susah belajar tentang kelautan," kembali Netty berpendapat. Simak pula Sohib, nelayan Kenjeran, Surabaya. "Saya tak ingin anak-anak saya kelak menjadi nelayan," ujar bapak dua anak ini. Ia meyakini kehidupan tak jadi lebih baik jika menjadi nelayan, karena yang dibutuhkannya adalah pembebas dari rasa miskin.

Realitas memang menyatakan demikian. Jutaan masyarakat nelayan di sepanjang pesisir negeri ini merupakan kelompok termiskin dalam masyarakat Indonesia. Memprihatinkan. Kemiskinan justru terjadi pada orang yang bekerja di sektor yang berlimpah sumber daya.

Sebab-sebab itu kemudian kian diperburuk oleh sistem. Kondisi masa represif politik Orde Baru (Orba) selama 32 tahun menempatkan negara sebagai aktor sentral. Pendidikan tak lebih dilihat sebagai alat propaganda ideologi. Laut tak pernah dihitung sebagai kekuatan ideologi Orba.

"Sistem yang menganaktirikan laut tampak pada kebijakan pembangunan pemerintah sejak Indonesia di tangan Bung Karno, Soeharto, dan Habibie," ujar Drs. H. Sugito, M.Si. (51), Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta. Pada pemerintahan Gus

TANJO HANNY/INSIST

Dur yang pendek, terbentuklah Departemen Kelautan dan Perikanan. Sektor kelautan dan sekitarnya, setidaknya, mulai menapaki jalan terang, meskipun kontribusinya dalam aura pendidikan Indonesia masih belum dapat diraba.

Memang, sistem pendidikan yang sentralistis selama ini tidak menguntungkan berkembangnya wawasan kelautan. Sentralisasi kurikulum, yang menurunkan penyeragaman, jelas mengabaikan kebhinekaan yang menjadi ciri khas rakyat Indonesia. Maka tidak heran bila siswa tercerabut dari praktik budaya dan kebutuhan riil komunitasnya. "Kurikulum pendidikan sendiri tak memberi ruang lapang untuk wawasan kelautan," papar Drs. Anik Gufron, M.Pd (39), dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

N JOHANN/INSIST

Masalah pendidikan yang tidak kontekstual dengan komunitas kelautan ini diperparah dengan minimnya akses penduduk pesisir untuk mendapatkan pendidikan. Budaya sekolah yang bersifat intelektualisme dan elitis tidak sesuai bagi mereka. Sebab, yang mereka butuhkan adalah pengetahuan dan keterampilan praktis. Pendidikan menjadi menara gading. Sesuatu yang sulit dijamah. Maka tak heran kalau anak-anak pesisir lebih suka lari dari sekolah dan mencari kehidupannya sendiri di laut.

Tak adanya dukungan pendidikan bagi ranah kelautan ini mengancam tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. Tingkat pendidikan orang-orang yang bekerja pada bidang permaritiman tak bisa dikatakan tinggi. Hal ini masih ditambah lagi dengan keterampilan yang rendah, sehingga makin memperpuruk kualitas SDM bidang kebaharian.

Sebagian besar nelayan memang berpendidikan rendah. Dari data resmi yang tercatat, sekira 70% nelayan tidak sekolah dan atau tidak tamat SD, 19,59% tamat SD, 10,38% berpendidikan SMP dan SMU,dan hanya 0,03% yang mengenyam pendidikan tinggi, baik diploma maupun sarjana (Rohmin Dahuri: 2000).

Irwandi Idris, Direktur Bina Pesisir Departemen Kelautan dan Perikanan menuliskan, saat ini terjadi ketimpangan kualitas SDM kelautan. Para ahli kelautan (ahli eksplorasi, ilmu kelautan, pengelolaan teknologi kelautan, dan sosial ekonomi) telah memadai, namun tenaga pengimbang yang berada di lapisan tengah dan bawah belum mampu menunjang pemikiran-pemikiran pakar. Persebaran mereka juga belum merata.

Keterbatasan dan ketimpangan SDM tentu akan menyebabkan masalah-masalah klasik sektor kelautan sulit terpecahkan. Masalah penguasaan teknologi, perluasan akses pasar dan manajerial menjadi kekalutan yang belum berakhir. Alhasil, sumber daya laut tidak tertangani secara optimal dan terpadu. Eksploitasi yang berlebihan justru menjadi pil pahit yang harus rela ditelan.

Berangkat dari realitas kurangnya tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang kebaharian, pemerintah mestinya memberi perhatian serius pada pendidikan yang lebih sensitif. Perguruan tinggi, sebagai salah satu institusi formal, perlu menjawab kebutuhan tenaga terampil di masa datang. Saat ini memang baru beberapa universitas yang memiliki fakultas atau jurusan perikanan dan kelautan, padahal sektor perikanan dan kelautan masih memberikan peluang cukup terbuka. Data yang diperoleh dari Departemen Perikanan dan Kelautan menyebutkan, baru ada sekira 55 perguruan tinggi yang membuka studi perikanan di seluruh Indonesia.

Secara mendasar, reformasi sistem pendidikan juga harus diikuti perubahan pada tingkatan paradigma. Pada titik ini, pendidikan berbasis komunitas bisa menjadi alternatif pemberdayaan masyarakat. Pendidikan yang berorientasi pada komunitas ini menekankan pada pendidikan fungsional. Arah pendidikan dikembangkan sesuai kebutuhan dan konteks sosiogeografis komunitas masyarakat. Dengan paradigma seperti ini, pendidikan jelas tidak lagi bersifat sentralistis.

"Pusat hanya bertugas untuk menetapkan kebijakan umum dan mengembangkan kompetensi, selanjutnya dijabarkan dalam dokumen yang disebut kurikulum berbasis kompetensi," tutur Prof. Suyanto, Ph.D (53), rektor UNY. Ketua Komite Reformasi Pendidikan ini lebih lanjut memaparkan, "Daerah berhak untuk mengembangkan elaborasi kebijakan umum dan kompetensi menjadi silabus yang lebih operasional." Jadi, pelaksana pendidikan di daerah tingkat dualah yang seharusnya paling menentukan porsi pendidikan kelautan dalam aras

pendidikan lokal. Sehingga, daerah-daerah dengan kawasan pesisir yang luas akan lebih menitikberatkan pada pola pendidikan tertentu yang berbeda, misalnya, dengan kawasan lain yang lebih daratan.

Dari segi manajerial, pembangunan sektor pendidikan ini jelas sulit, tidak bisa hanya mengandalkan niat baik pemerintah pusat. Pemerintah daerahlah yang seharusnya berperan aktif melibatkan masyarakatnya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi sistem ini.

Peluncuran paket otonomi daerah memang bisa menjadi entry point bagi langkah-langkah pemberdayaan komunitas lokal. Desentralisasi pendidikan diharapkan mampu mengakomodasi karakteristik daerah, termasuk di dalamnya visi kelautan. Sistem ini memerlukan inisiatif yang besar dari masyarakat sipil.

Meski jalan ke arah sana sulit, tapi Moelyono, pelukis jebolan Institut Seni Indonesia, pernah mencoba mempraktikannya di tanah kelahirannya di Tulungagung. Dia mengajak anak-anak ke pantai dan membiarkan mereka melukis apa yang ada di hadapan mereka. Praksis pendidikan kesadaran ini menjadikan anak-anak pesisir lebih peka dengan lingkungan mereka dan mampu menerjemahkan apa yang mereka pikirkan.

Berbagai cara memang bisa ditempuh untuk mewujudkan cita-cita mulia ini. Beberapa pakar menanggapi kemungkinan wawasan kelautan dimasukkan sebagai muatan lokal di beberapa daerah. Filosofi muatan lokal sendiri adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya serta kebutuhan daerah. Muatan lokal benar-benar memperhatikan konteks keruangan setempat.

Wacana lain yang berkembang, wawasan kelautan akan disisipkan dalam mata pelajaran IPA SMU/SMK, sebagaimana dilontarkan Suhartati M. Natsir, staf Pusat Penelitian Kelautan LIPI, seperti dikutip Kedaulatan Rakyat (8/9/01). Pelajaran yang menyangkut kondisi, potensi dan budidaya laut Indonesia akan disisipkan bukan dalam bentuk mata pelajaran tersendiri.

TAN JO HANN/INSIS

Diharapkan anak di daerah pesisir dapat membantu kerja di laut setelah lulus. Jadi, masih dalam taraf pemahaman pentingnya laut ke generasi muda.

Meski ada kemajuan yang memberi harapan, tapi kebijakan ini ternyata masih sarat kritik. Otonomi pendidikan yang dirilis sejak setahun lalu memang menawarkan peluang kembali hidupnya pendidikan-pendidikan berbasis komunitas. Tetapi jika pendidikan kemudian hanya kembali dijadikan alat kekuasaan, bukan alat pembebasan, konsep pendidikan berbasis komunitas hanya berhenti sebagai dagangan politik. Tidak lebih.

Nanik Supriyanti
Shiza Taufa

Mengelola Pesisir dan Laut: Terpadu dan

Bentang laut seluas 5,8 juta km² dan rangkaian kepulauan mencapai 17.500 merupakan bukti tak terbantah jika Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Kenyataan ini membawa harapan besar untuk menyandarkan hidup pada sektor kelautan. Terlebih pada saat negara ini sedang terpuruk dalam krisis ekonomi yang parah. Impian tentang identitas negara maritim pun tak lepas dari fakta di atas, mulai mengemuka di saat negara sedang berkubang pada krisis multidimensional.

Jerry Yoestiadi
Koordinator Lingkar Studi Geodesi Alternatif (LSGA) Periode 1999-2001 dan Coastalwatch Groups Owner

Kondisi seperti itu selain menimbulkan harapan, di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran. Betapa tidak, aktivitas *over*-ekploitasi sangatlah mungkin terjadi. Semangat eksploitasi tersebut dikhawatirkan mengakibatkan ketimpangan antara upaya pemanfaatan dan upaya konservasi. Salah satu contoh adalah di kawasan pantai utara Jawa. Kondisi kelebihan daya tangkap ikan (*overfishing*) sempat terjadi, dan mengakibatkan kerugian tidak hanya bagi kelestarian ikan tetapi juga bagi masyarakat nelayan setempat (jangka panjang). Aktivitas penambangan dan eksploitasi pasir di kawasan pantai juga merupakan ancaman serius yang mendesak untuk ditangani.

Degradasi fisik kawasan pantai telah menjadi pemandangan sehari-hari pembangunan kelautan nasional. Erosi akibat abrasi pantai, maupun pencemaran laut karena tumpahan minyak serta limbah industri akibat yang paling mudah dijumpai. Tampaknya, permasalahan tata-ruang menjadi sumber permasalahan lingkungan, di samping ketidak konsistenan pengambil keputusan dalam merencanakan kemudian melanggarnya kembali tataguna lahan yang ada. Tak mengherankan jika kemudian muncul berbagai persoalan lingkungan yang pada akhirnya merugikan masyarakat itu sendiri.

Salah satu dampak paling nyata dan telah menjadi khas kawasan pesisir adalah persoalan air bersih. Fakta mengungkapkan, kawasan pesisir adalah lokasi yang strategis bagi aktivitas permukiman. Ini dapat dilihat dari angka, 60% dari total penduduk Indonesia bermukim di kawasan pesisir. Padatnya permukiman di daerah pesisir mengakibatkan ekploitasi air tanah (*groundwater*) yang berlebihan. Akibatnya, bahaya intrusi air laut selalu jadi ancaman.

Bicara mengenai pesisir, tentu harus pula membicarakan aktivitas di kawasan *up-land*. Keterkaitan antara kawasan *up-land* dengan kawasan di bawahnya (*low-land*) yang kemudian bermuara ke laut musti diperhatikan dengan cermat. Aktivitas permukiman, industri dan pertanian di kawasan *up-land* menghasilkan limbah (sampah rumah tangga, limbah industri, pupuk) yang kemudian dialirkan melalui sungai, yang sangat mempengaruhi ekosistem pesisir. Selama ini, Daerah Aliran Sungai (DAS) masih dijadikan pemandangan belakang rumah/pemukiman bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Ini bertolak belakang dengan masyarakat di negara-negara Eropa yang menjadikan sungai sebagai pemandangan muka. Karena itu, kebersihan sungai yang terjaga otomatis sekaligus mendukung estetika tata ruang kota, sebagaimana di Eropa, tak terjadi di sini.

Cukup menyedihkan jika kita perhatikan aliran sungai, terutama di kota besar semisal Jakarta dan Surabaya. Sungai umumnya hanya dijadikan keranjang sampah. Dan laut, tentu saja menjadi Tempat Pembuangan Akhirnya. Sampah, beserta partikel-partikel yang menyertainya bersama-sama dengan air mengalir menuju pantai, akhirnya membentuk sedimentasi. Akibatnya, bahaya banjir (*rab*) pun selalu mengintai kawasan pantai. Belum lagi ketika sistem pesisir tidak lagi dapat menetralisir limbah/racun yang diakibatkan oleh sampah, ekosistem laut (*biodiversity*) tersebut akan terancam keracunan. Kasus tingginya kandungan racun di sungai Kanjeran di Surabaya barangkali hanya sedikit contoh dari sebuah gunung es permasalahan limbah industri beracun.

Menurunnya kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir pun menjadi catatan tersendiri. Telah banyak disadari bahwa kemiskinan bukan hanya akibat

Berkelanjutan

rusakan lingkungan tetapi juga merupakan sumber bagi rusakan lingkungan. Kondisi ekonomi yang berat njadikan masyarakat tak sempat berpikir tentang gkungan.

Sektor kelautan, di tahun anggaran 2001, diharapkan dapat emberi kontribusi bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja gara (APBN) sebesar Rp5 triliun. Namun, sampai saat ini ng terealisasikan baru sekira Rp800 miliar. Hal tersebut ungkapkan Menteri Eksplorasi Kelautan dan Perikanan chmin Dahuri usai pelantikannya di Istana Negara (*Kompas*, Juni 2001). Potensi nerimaan dari sektor lautan disadari pemerintah ngat besar. Bukan hanya ri kekayaan ikan saja, spor rumput laut dan mbak udang saja apabila garap serius akan memberi ntribusi signifikan. Belum gi, industri dampingan perti wisata bahari, mbang, serta perhubungan. rtolak dari hal itu, saat ini merintah beserta seluruh mponen di sektor lautan sedang berlomba lakukan upaya ningkatkan ekplorasi tensi kelautan yang ada.

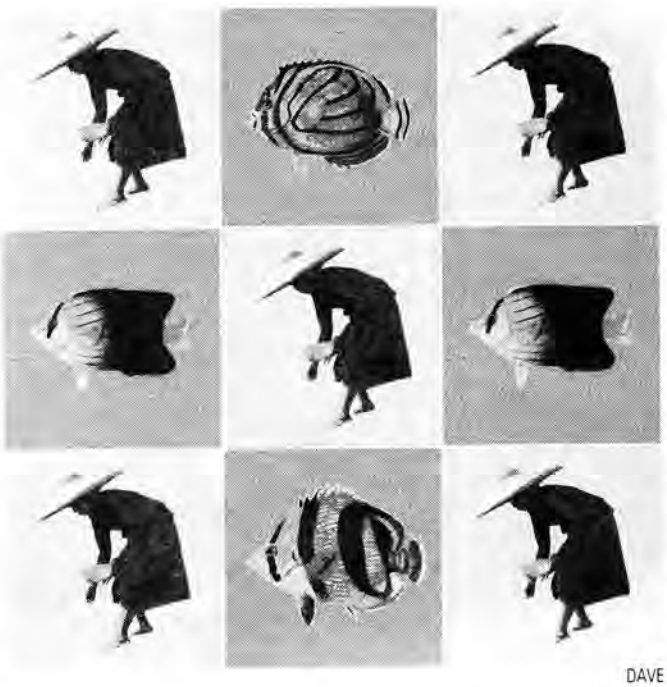

DAVE

Namun, kecemasan tetap ga membayang. Semangat ksplorasi cenderung njadi melulu eksploitasi kayaan laut. Karena, konomi (baca: uang) selalu saja menjadi ruh pengembangan ut. Sementara, soal lingkungan, lebih-lebih menyangkut epentingan masyarakat pesisir, jadi prioritas kesekian.

Hary Supriyono, dosen Hukum Lingkungan UGM, menyebutkan, dengan diberlakukannya UU Pemerintahan Daerah, pelestarian fungsi lingkungan dapat terganggu akibat implikasi dari hal-hal berikut. *Pertama*, terjadinya egoisme daerah yang berlebihan. *Kedua*, orientasi pembangunan yang semata-mata diarahkan pada peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). *Ketiga*, diabaikannya UUPLH (UU Pelestarian Lingkungan Hidup) sebagai "payung" pengaturan di daerah.

Tindakan latah yang mencerminkan semangat ekploitasi itu di antaranya adalah tentang rencana pencabutan Keppres No.39 tahun 1980 tentang larangan operasi pukat harimau oleh pemerintah. Seperti diungkapkan menteri kelautan dan perikanan, "Sektor perikanan tidak pernah maju, selama kita melarang masuknya teknologi perikanan di negeri ini. Karena, di seluruh dunia tidak ada satupun yang melarang pukat harimau. Negeri-negeri kecil yang tidak punya potensi laut bisa memperoleh pendapatan cukup besar di sektor perikanan, seperti Finlandia dan Thailand."

Meski baru sebatas wacana, serangan-serangan tajam menerpa rencana kebijakan tersebut, terutama dari pihak NGO pemerhati kelautan. Mereka menyayangkan ungkapan yang tidak berpangkal pada akar masalah itu. Nelayan Indonesia yang teknologi perikanannya jauh tertinggal tak bisa disamakan dengan nelayan negara-negara lain. Yang justru akan muncul hanyalah ancaman bagi kepunahan beragamnya biota perairan nusantara.

Penolakan juga terjadi di daerah. Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireun, Ir. Helmi Hamid, menolak rencana pencabutan Keppres No. 36 tahun 1980 tentang penghapusan izin usaha *boat* jaring pukat harimau (*trawl*). Ia berpendapat, akan terjadi ketimpangan bagi nelayan di daerahnya, baik secara biologis maupun sosial, antara nelayan tradisional yang menggunakan perlengkapan sederhana dengan nelayan bermodal raksasa. Komentar lain datang dari peserta pertemuan Forum Komunikasi Perusahaan Perikanan Swasta (FKPPS), 11-14 Juni 2001 di Kalimantan Timur. Melalui rumusan bersamanya, forum ini mendesak untuk meninjau kembali rencana pencabutan Keppres tersebut.

Belum lagi, pembatasan kewenangan daerah atas laut (UU No.22 Tahun 1999 pasal 10) yang bermasalah. Pada UU ini, antara rencana secara konsepsual dan implementasinya di lapangan tidak sinkron. Hal itu terungkap saat seminar nasional "Otonomi Daerah dan Industrialisasi Sektor Kelautan", 12 September 2001, di Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC). Sumiarso Sumiskun, Ketua DPP HNSI, mengungkapkan, akibat kebijakan pembatasan kewenangan di laut (12 mil bagi propinsi dan 4 mil bagi kabupaten), di lapangan telah terjadi upaya pengkaplingan laut antarnelayan

Pendekatan *community development* perlu diterapkan dalam proses pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Pola pembangunan yang berbasis komunitas harus dijadikan komitmen bersama. Komunitas tidak hanya dijadikan obyek pembangunan, namun juga sebagai subyek yang berhak memberikan ekpresi dan aktualisasi.

yang berbatasan daerah. Tidak jarang terjadi sengketa yang berakhir dengan kerusuhan dan pembakaran. Nada serupa pun diungkapkan Presiden Megawati dalam pertemuannya dengan Kagama di Yogyakarta. "Laut kok dikapling, sekalian saja ikan-ikannya suruh pakai KTP!" ungkapnya sebal.

Penyelenggaraan otonomi daerah seperti yang diangankan dalam UU No. 22 tahun 1999 sangat muluk: lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Secara konseptual, angan-angan tersebut sangatlah ideal. Namun, dalam tataran implementasi, masih sulit untuk direalisasikan. Untuk menegakkannya, banyak agenda yang harus dikerjakan.

Salah satunya adalah perangkat pendukung regulasi otonomi daerah. Tak adanya aturan pendukung menjadi kendala operasional di daerah. Di DI Yogyakarta, misalnya. Pada diskusi terbatas yang diadakan oleh Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia (LABH), 5 Oktober 2001, dalam analisa 13 kebijakan DIY, tak ditemukan Peraturan Daerah (Perda) yang pendukung bidang kelautan.

Masyarakat nelayan makin hajri terlihat semakin miskin. Donald K. Emerson (1979), dari penelitiannya di beberapa desa nelayan di Karesidenan Pati, Jawa Tengah, menyebutkan, golongan nelayan di daerah itu telah benar-benar ketinggalan dibandingkan dengan golongan lain di luar usaha perikanan. Keluarga nelayan lebih miskin daripada keluarga petani atau pengrajin. Hal serupa ditemukan Mubyarto (*et.al*) terjadi terhadap nelayan di dua desa di Kabupaten Jepara. Mubyarto menyebutkan bahwa pilihan untuk menjadi nelayan merupakan pilihan terakhir setelah mengalami kesulitan dalam usaha tani (*Kompas*, 30 April 2001). Apa yang terjadi di Pati maupun di Jepara tentunya hanya sedikit contoh kasus. Fenomena ini diyakini terjadi pula di banyak bagian di wilayah nusantara ini. Tak berlebihan jika dapat dikesimpulan bahwa masyarakat nelayan dimiskinkan secara struktural.

Kalau *toh* selama ini pembangunan kelautan dilaksanakan, maka pelaksanaannya kurang menyentuh masalah mendasar yang dihadapai nelayan. Selain itu, masyarakat nelayan hanya menjadi obyek pembangunan, yang cenderung bersifat fisik dan kurang diikutsertakan sebagai subyek pembangunan. Sementara, secara sosial dan kebudayaan masyarakat pesisir diabaikan.

Padahal, manusia sebagai mahluk yang berakal dan berbudaya membutuhkan rasa penguasaan dan pengawasan terhadap lingkungannya (*a sense of matery and control*). Kedua rasa tersebut merupakan faktor mendasar dalam menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*), untuk kemudian mempertahankan dan melestarikan. Bila masyarakat pesisir tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengeloaan kawasannya, tidak diberi kesempatan untuk berperan aktif memberikan cap pribadi atau kelompok pada lingkungannya, tidak memperoleh peluang untuk membantu, menambah, mengubah, menyempurnakan lingkungannya, akan kita dapatkan masyarakat pesisir yang apatis, acuh tak acuh, dan mungkin agresif. Pelibatan masyarakat penting untuk menumbuhkan harga diri, percaya diri dan jati diri (Eko Budiharjo, 1994).

Pendekatan *community development* perlu diterapkan dalam proses pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Pola pembangunan yang berbasis komunitas harus dijadikan komitmen bersama. Komunitas tidak hanya dijadikan obyek pembangunan, namun juga sebagai subyek yang berhak memberikan ekpresi dan aktualisasi. Hendaknya, setiap pembangunan diawali dengan suatu *community needs analysis*. Bentuknya dapat berupa penelitian partisipatif (*participatory research*), di mana seluruh kebutuhan komunitas diidentifikasi dengan dipahami interrelasi multi-*stakeholder*-nya.

Belakangan ini, keanekaragaman hayati (hutan mangrove, laguna, dsb.) di teluk Segara Anakan, Kabupaten Cilacap, terancam punah. Kepunahan disinyalir karena proses pendangkalan dari DAS yang mengalir menuju teluk. Sebagai upaya penanganannya, sungai Citanduy pun disudet. Sayang, proyek tersebut terhenti karena pandangan sektoral (perihal pembebasan lahan, serta fasilitas umum) yang berbeda antara Kabupaten Ciamis dan Cilacap, dua daerah yang dilalui sungai Citanduy (*Suara Pembaharuan*, 20 Oktober 2001). Proyek yang mencapai biaya ratusan milyar rupiah ini terancam dicabut kembali oleh ADB (*Asia Development Bank*) karena penanganannya dianggap kurang serius.

Kasus tersebut hanyalah satu dari tumpaukan kasus rumit yang banyak dijumpai akibat pendekatan pengelolaan yang tidak terintegrasi, baik itu secara sektoral, disiplin ilmu, ataupun keterkaitan ekologis. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu perlu diupayakan sebagai upaya menuju pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan meminimalisir kerugian jangka panjang. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah pengelolaan yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu (*integrated*) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan (Rochmin, dkk., 1996).

Jika dibanding pendekatan yang sektoral (IPCC, 1994), Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu (PWPLT) memiliki banyak kelebihan. Di antaranya, *pertama*, pendekatan pengelolaan secara terpadu dapat mengatasi konflik pemanfaatan ruang dan sumber daya alam yang

biasanya terjadi di kawasan pesisir. *Kedua*, PWPLT dapat mendorong pembangunan sumber daya pesisir dan laut, sekaligus dapat meminimalisir dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dan lautan. Hal ini disebabkan PWPLT memungkinkan untuk memasukkan pertimbangan kebutuhan serta aspirasi masyarakat terhadap sumberdaya pesisir dan lautan, baik masa sekarang maupun yang akan datang, ke dalam perencanaan pembangunannya.

Keunggulannya yang lain, PWPLT menyediakan kerangka yang dapat merespon segenap fluktuasi maupun ketidakmenentuan yang jadi ciri khas ekosistem pesisir dan laut. PWPLT juga dapat membantu pemerintah daerah maupun pusat dengan suatu proses yang dapat menumbuh-kembangkan pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Think *Globally, Act Locally. Toh,* tanggung jawab pengelolaan pesisir dan laut bukan semata tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab semua komponen negara ini: masyarakat setempat, pengusaha (swasta), NGO dan perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai pabrik pencetak sumber daya manusia memiliki tanggung jawab moral bagi masa depan pembangunan kelautan nasional. Selama ini, peran-perannya masih dianggap belum optimal terhadap bidang kelautan nasional. Perguruan tinggi belum berfungsi sebagai independen, sebagai salah satu institusi yang memperjuangkan mimbar kebebasan akademik dan kebenaran ilmiah, terutama atas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi—khususnya bidang kelautan.

Bahkan, kadang ego sektoral dalam praktek pembangunan kelautan nasional memiliki imbas terhadap ego keilmuan fakultas-fakultas di perguruan tinggi. Perguruan tinggi terlebih dahulu harus dapat melakukan keterpaduan antarsudut pandang keilmuan, sehingga pengelolaan pesisir kemudian dilaksanakan dengan pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approaches*), misalnya melibatkan disiplin ekonomi, biologi, ilmu bumi (geodesi, geografi, geologi), teknik, perikanan, sosiologi, hukum, dan lainnya yang relevan. Satu langkah nyata telah dimulai. Di Yogyakarta, tanggal 14 November 2001, telah dideklarasikan "Jaringan Studi Kelautan".

Visinya adalah pencapaian nilai ideal "menuju pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan secara terpadu dan berkelanjutan," dengan misi utama pertukaran informasi, pengembangan iptek dan wacana kelautan terpadu, melakukan *capacity building* SDM—dalam hal ini keterampilan dan keahlian di bidang kelautan. Kerangka advokatif disusun dalam misi berupa pembangunan kesadaran publik (*public awareness*) tentang pentingnya pengelolaan sumber daya pesisir secara terpadu dan lestari, serta melakukan penguatan komunitas (*community empowerment*). ■

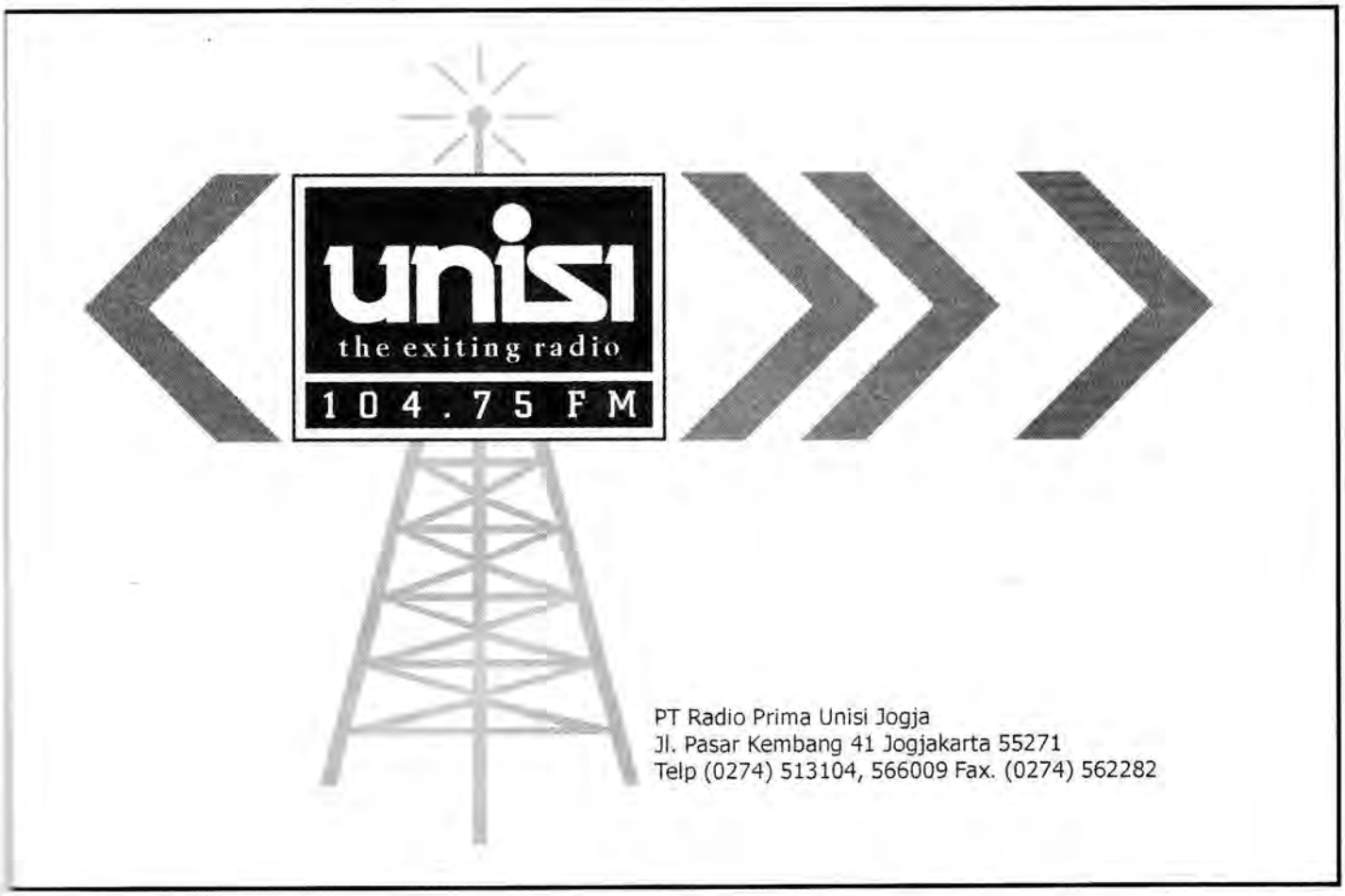
unisi
the exiting radio
104.75 FM
PT Radio Prima Unisi Jogja
Jl. Pasar Kembang 41 Jogjakarta 55271
Telp (0274) 513104, 566009 Fax. (0274) 562282

Demoralisasi Sejarah

Amin Mudzakkir
Mahasiswa Ilmu Sejarah UGM

Dalam kegenitan, atau mungkin di saat kegairahan, untuk memulung kebenaran memuncak, akan terasa juga bahwa sejarah itu memang betul-betul diperlukan. Bukan apa-apa: sekadar untuk lebih mengedepankan kearifan dalam mengarungi samudera kehidupan. Bahkan, pada saat-saat tertentu, sejarah barangkali akan—sengaja—dicari-cari orang. Tentu saja, untuk yang terakhir ini, banyak sekali alasan mengapa orang melakukannya.

Begitulah, dalam laju perjalanannya, sejarah ternyata bukan sekadar cerita para tetua di kala menunggu *bedug* Maghrib, atau buaian seorang ibu sewaktu meninabobokan anak tersayangnya. Lebih dari semua itu, sejarah sebagai ilmu adalah hasil rekonstruksi masa lampau yang dipengaruhi jiwa zaman (*zeitgeist*) yang mewadahinya. Karenanya, sejarah bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba dari masa lampau dengan segenap pernak-perniknya. Masa lampau tetaplah masa lampau yang unik, khas, tak terulang, dan tak akan terjangkau oleh sejarawan—sebagai orang yang secara formal bergumul dengan persoalan kelampauan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan, sejarah adalah produk masa kini. Ia tidaklah (berusaha) ditemukan, tetapi diciptakan (Munslow, 1997). Sudah pasti, dalam proses penciptaan ini, terdapat persoalan yang di kemudian hari menimbulkan perdebatan teramat rumit, yaitu: representasi. Perdebatan itu, biasanya, bersumber pada persoalan narasi. Yang dimaksud ialah medium yang

pakai sebuah diskursus realitas dalam merepresentasikan rinya. Dan, satu-satunya medium yang tersedia adalah hasa.

Nah, dalam titik narasi kebahasaan inilah terjadi saling- ang pemikiran yang luar biasa hebatnya. Salah satunya, yang ga mendasari ide awal tulisan ini, adalah pemikiran seorang nganut pascamodernis, Hayden White (1987). Berbeda ngan para pemikir modernis, yang berpendapat bahwa ntara subjek (sejarawan) dengan objek (teks tulisan dan an) terdapat keterjarakan, White berpendapat sebaliknya. lenurutnya, antara subjek dengan objek termanunggalkan lam diskursus zamannya.

Oleh karena itu, White sedari mula tak mempercayai danya keterwakilan realitas (masa lampau) dengan presentasi sejarah dalam bentuk narasi. Juga, White telah ngan nyaring memperingatkan kita untuk selalu mencurigai asa subjek (sejarawan) yang tertuang dalam narasi sejarah. ebabnya, demikian White menjelaskan, ketika sebuah realitas asa lampau) direpresentasikan dalam bentuk narasi ejarah), di sanalah subjektivitas sejarawan terlibat, yakni anakala sang sejarawan melakukan moralisasi realitas. khirnya, sudah pasti, kalau realitas diletakkan dalam camata moralitas, representasi yang dimunculkannya pun an menjejalkan pilihan-pilihan hitam-putih: baik atau jahat, nar atau salah, pahlawan atau pengkhianat.

Demikianlah, suasana dilematis pun bermula. Di tengah syarakat Indonesia yang masih meyakini adanya *historical rness*, "sejarah yang termoralisasikan" pun menjadi)wajar(kan) adanya. Namun, sayangnya, secara pistemologis, sejarah yang termoralisasikan tersebut elupakan satu hal yang justru paling asasi, yaitu diskursus oralitas itu sendiri. Banyak orang yang tak (ter)sadar(kan) hwa moralitas adalah suatu diskursus yang dibangun oleh ebentuk kekuasaan: negara, masyarakat, individu, dll. adahal, sudah jelas, masing-masing kekuasaan itu empunyai mekanisme dirinya sendiri-sendiri. Makanya, akan ling berbenturan seandainya sebuah diskursus moralitas jejalkan kepada diskursus moralitas lain, yang mempunyai penguasa" berbeda.

Baiklah, selanjutnya, kita turunkan rangka pemahaman di tas terhadap historiografi Indonesia. Dalam historiografi ndonesia, kesadaran untuk melakukan moralisasi sejarah telah ata menyebabkan kemacetan lalu lintas pemikiran. Wilayah ajian sejarah menjadi kaku dan sempit. Dan, ini yang rpenting, sejarah kemudian dipaksa untuk selalu "bermain" arena kontestasi "kemapanan moralitas" yang dilekati tanda esahihan/ketidaksahihan oleh pemegang otoritas—yang tapan. Akibatnya, sejarah pun berubah menjadi sebentuk enghakiman terhadap aktor-aktor di masa lampau—yang curigai akan mengganggu kemapanan.

Di antara yang terhakimi dalam historiografi Indonesia dalah kelompok komunis (Partai Komunis Indonesia, PKI), ga kelompok—meminjam istilah Pramoedya Ananta Toer—perawan remaja" pada masa pendudukan Jepang, yang lam teks-teks sejarah konvensional mereka dinamai: *Jugun anfu*. Di luar kedua kelompok itu, tentu saja, tersebar banyak elompok lainnya yang mengalami nasib serupa. Namun, ntuk sekadar memberikan contoh, kiranya sudah tepat menampilkan kedua kelompok yang tersebut di atas.

Tak dapat disangkal, kedua kelompok tadi, Komunis dan Perawan Remaja, sudah terbiasa dinarasikan dalam sejarah secara peyoratif. Ini artinya, posisi/peranan mereka dalam sejarah dipandang sebagai sebuah kenistaan, sebuah keaiban. Mereka diberi lekatan moral: jahat dan ternoda. Kemudian, efek simbolis yang didesakkan oleh narasi sejarah seperti itu sungguh luar biasa besarnya, dan untuk kedua kasus di atas sungguh sangat menyayat hati. Lihat saja, pada masa kini, keberadaan mereka masih tetap terhakimi, terpinggirkan, dan terlupakan. Mereka, oleh masyarakat yang terpengaruhi efek simbolis seperti yang telah tersebut tadi, disingkirkan dari riuh rendah kemapanan "peradaban moral".

Nah, sekarang, mari kita jelajahi lebih lanjut bagaimana moralisasi dalam sejarah menimbulkan kenyinyiran peradaban yang tak terperikan. Dalam historiografi Indonesia, kelompok yang pertama, kelompok komunis, selalu diidentikkan sebagai kaum pemberontak, kaum makar, kaum pengacau, dll. Artinya lebih jauh, mereka selalu disimbolkan dalam narasi sejarah sebagai kelompok yang mengancam "moralitas rakyat Indonesia". Mereka adalah orang-orang yang tak bertuhan, dan oleh karenanya sudah pasti akan terus mengganggu "kemapanan" orang yang bertuhan, orang yang beragama. Peristiwa Gerakan 30 September 1965, biasanya, dijadikan contoh terbaik dalam menjelaskan kepercayaan historiografis, yang telah termoralisasikan itu, kepada khalayak.

Kepercayaan historiografis, yang di dalamnya berisi penarasian moralisasi realitas (masa lampau), mempunyai efek simbolis ke khalayak masa kini dengan luar biasa besar pengaruhnya. Banyak kalangan di masa kini, apalagi yang sering disebut "kelompok fundamentalis", tak jemu-jemunya menggemakan seruan kepada khalayak ramai untuk terus mencurigai keberadaan kelompok komunis. Pelbagai atribut yang sekira mengarah kepada identitas komunis sudah pasti akan diganyangnya. Bahkan, anak-anak muda yang gemar membaca karya-karya para pemikir kritis, yang diidentikan dengan komunis seperti Karl Marx, mendapatkan teror yang cukup menakutkan.

Dan celakanya, kecurigaan ini bergerak berlebihan sehingga, selain ruang publik, ruang imajinasi bagi kelompok yang disebut terakhir itu pun dikekang dan diteror habis-habisan. Mereka dicurigai akan menurunkan kepercayaan "tak bermoralnya" kepada generasi sekarang. Contoh untuk membuktikan pembacaan di atas akan sangat mudah ditemukan. Kasus *sweeping* buku-buku sastra karya Pramoedya Ananta Toer adalah salah satunya.

Selanjutnya, kelompok kedua, adalah kelompok perawan remaja pada masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942—1945). Dalam historiografi Indonesia, kelompok yang lebih dikenal dengan nama *jugun ianfu* ini dinarasikan dengan bahasa yang tak sepantasnya: kaum (ter)pelacur(kan). Mereka dipandang sebagai perempuan-perempuan yang ternoda(i). Akibatnya, keberadaan mereka pun (dengan sengaja) dilupakan sama sekali dari keramaian zaman. Pramoedya Ananta Toer, dalam *Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer* (2001), dengan cemerlang menceritakan nasib tragis kelompok yang terlupakan ini. Dan, dengan sangat gemas, Pramoedya mengutuk pemerintah—dan khalayak ramai—atas ketakpeduliannya dalam memperhatikan nasib kelompok

Dream on The Coffee Cup

DOK. BAL

Veronica Kusuma
Pemimpin Umum
Majalah Mahasiswa BALAIRUNG UGM

Pada tanggal 28 Juli 2001, di tengah deru angin utara dan kabut yang turun di antara ilalang, teman saya menanyakan satu hal. "Apa yang masih menarik dari perdebatan tentang Balairung? Tentang pers mahasiswa? Apalagi yang harus kita bicarakan setelah semuanya habis di tengah deraian massa dan tuntutan-tuntutan perubahan? Adakah yang istimewa dari pers mahasiswa? Apapula urusannya dengan transisi demokrasi segala macam? Transisi demokrasi seperti apa? Memang pers mahasiswa itu siapa? Nabi, oportunis, ataukah yang dengan mulia, kita singgung selama ini sebagai kekuatan kontrol sosial?"

Beberapa hari sebelumnya, teman saya juga mengungkapkan hal yang sama. Mau kemana pers mahasiswa? Wong, kita tidak pernah kemana-mana, tambahnya.

Tentu saja kita, yang saya maksud persma, mengalami fase-fase bulan madu, fase-fase ketika kita dianggap nabi penyelamat demokrasi Indonesia. Dhaniel

akidae bahkan menyebut persma sebagai cagar alam ebebasan pers, tempat benih-benih demokratisasi anamkan dan dikembangkan. Hingga tahun 1998, kita asih merasakan betapa heroiknya kisah-kisah senior kita. ereka ikut memperjuangkan hak-hak demokrasi yang lama itu memang tidak diakui oleh negara.

Apabila menilik sejarah keberadaannya, persma memang hir oleh dan untuk idealisme tertentu. Tengok saja catatan erjalanannya sejak pra-kemerdekaan sampai masa Orde Baru. Kisah heroik intelektual sipil angkatan pertama, seperti Tirto Adi Suryo, Suwardhi Suryaningrat, Tjiptomangunkoesoemo, dan Soekarno dalam menjadikan ers sebagai media penyebaran ide-ide kemerdekaan dan ebangsaan. Kemudian perlawanan angkatan 66 melalui media-media seperti, *Mahasiswa Indonesia, Harian KAMI, Mimbar Demokrasi* dan *Gelora Mahasiswa Indonesia* dalam memaparkan kebobrokan sistem politik Demokrasi Terpimpin. Sampai bangkitnya era perjuangan melawan elaliman Orde Baru yang telah dirintis sejak tahun 70-an engan lahirnya *Salemba* (Universitas Indonesia), *Gelora Mahasiswa* (Universitas Gadjah Mada), dan *Kampus* (Institut Teknologi Bandung) hingga mencapai puncaknya di tahun 0-an ini.

Mengamati pola historis persma tersebut, tampak bahwa uansa "perjuangan" mewarnai dinamika gerak di setiap amannya. Sehingga, seperti yang dikatakan Sjahrir 1987:3)di setiap pundak pegiat persma ada beban kesejarahan" dari tradisi angkatan muda sebelumnya yang menjadi pelopor perubahan, baik yang berhasil maupun ang kurang berhasil. Kisah masa lalu itu sudah menjadi ritus ang sah.

Dari paparan di atas, tersirat bahwa media kemudian lebih merupakan alat bagi para aktivis persma dalam mewujudkan dealismenya daripada sebagai tujuan. Implikasi jurnalistik dari dealisme semacam ini adalah lahirnya sebutan Pers Alternatif agi persma. Pemaknaan pers alternatif disini tidak terbatas al pengangkatan tema saja, tetapi lebih luas merujuk epada cara penilaian berita, pengupasan, dan penyajiannya.

Tipikal pers seperti ini memang cukup berhasil ketika im negara berdiri sebagai kekuatan anti demokrasi yang at. Tetapi bagaimanakah ketika kekuatan anti demokrasi muncul bukan sebagai kekuatan yang hegemonik lagi.

Pasca-Mei 1998, banyak sekali pers mahasiswa yang ilangan orientasinya. Wacana pers alternatif sudah tidak lagi. Bahasa-bahasa pers mahasiswa yang menggedor-or rejim dengan kata-kata "Cabut Dwifungsi TNI" dan ntung Soeharto" telah berlalu. Mahasiswa pun tidak perlu cari pers alternatif untuk tahu soal korupsi, wacana unisme, ataupun wacana-wacana kritis lainnya. Semua ang dulunya hanya bisa diungkap oleh pers mahasiswa udah bisa didapatkan di pers umum; sebuah pers yang ditunjang kekuatan modal dan intelektual lebih memadai.

Pers mahasiswa kalah? Ya, dan itu harus diakui. Kendala-kendala klasik seperti permodalan, sistem manajerial, ternyata lebih menguras energi daripada debat berdarah-darah tentang ideologi.

Perubahan bentuk hegemoni dan represi dari rejim negara dan modal telah membuat pers mahasiswa gagap menyikapi kondisi objektif. Untuk kasus Indonesia, transformasi di tingkatan infrastruktur kekuasaan tidak kemudian menuju ke sebuah transisi demokrasi yang mulia dan berdarah itu. Dan pers mahasiswa berperan apa dalam proses yang gagal ini?

Saya tentu saja tidak sedang menghiperboliskan peranan pers mahasiswa. Meski, saya juga tidak menolak bahwa pers mahasiswa mempunyai peranan yang tidak kecil dalam proses diaspora wacana demokrasi itu. Ya, maksud saya, pers mahasiswa hanya mencari tempat di mana kita telah selalu berada. Lalu keberadaan kita dimana?

Jelasnya di komunitas kita sendiri, mahasiswa.

Apa yang menghidupkan kita bukan lagi deru tuntutan-tuntutan heroik ataupun kritik-kritik vis a vis negara yang menggedor-gedor telinga penguasa. Telinga dan mata penguasa ada di manapun. Dan kita bisa bergerak dari manapun, di dekat kita. Jadi tempat dimana kita telah selalu berada adalah media komunitas (*community paper*). Media komunitas merupakan jawaban terhadap kebutuhan isu yang dibutuhkan pembaca. Penyiasatan ini di tingkatan ideologis menghasilkan tuntutan penguatan komunitas sendiri. Sementara di tingkatan manajerialdan terutama permodalan, media komunitas bisa dibesarkan oleh iklan-iklan/modal komunitas. Media komunitas mengakomodasi pembangunan masyarakat sipil secara mikro yang nantinya bakal menjadi embrio gerakan demokratisasi di level yang lebih luas.

Di tingkatan ini, Balairung, 25 April 2000 lalu meluncurkan Balkon (Balairung Koran), sebuah mingguan berita kampus. Apa yang hendak digagas dari media sederhana ini? Tidak sesederhana bentuknya ternyata. Balairung Koran punya mimpi besar: wadah untuk aspirasi komunitas, masalah-masalah komunitas, demokratisasi komunitas. Mimpi besar itu telah bergulir selama dua tahun, mengembang, dan bermetamorfosis menjadi mimpi buruk yang seolah tak pernah selesai: apalagi yang bisa Balkon perbuat? Ternyata lagi-lagi tak sesederhana yang dirasa. Kita memang tak lagi bersombong ria sebagai agen perubahan. Tapi ternyata kita harus selalu melakukan sesuatu perubahan untuk bertahan. Waktu dua tahun belum cukup dan kita mesti melanjutkan mimpi buruk kita sebagai kelas menengah negara dunia ketiga yang mesti kritis dan sadar kelas.

Selamat ulang tahun, Balkon.

DOKUMEN JAWA POS

Ia dilahirkan di Batangbatang, sekira 20 km sebelah timur kota Sumenep. Sampai saat ini, ia merasa betah tinggal di kampungnya itu. Tak ada niatan untuk pindah ke Jakarta, seperti layaknya penyair besar lainnya. Baginya, kampung adalah surga untuk menggali ide-ide segar mencipta sajak, tempat di mana ia bergumul dengan ide-ide kreativitasnya.

Penampilannya sederhana. Senang berkelana sejak remaja. Bila diundang ke luar kota, ia lebih senang menginap di rumah kawannya atau bekas muridnya daripada menginap di hotel. "Saya senang bersilaturahmi dan ajaran agama mengajarkan demikian," ungkapnya.

Laut dan Madura adalah dua keping mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dan, D. Zawawi Imron ada di tengah dua kepingan itu. Baginya, laut dan Madura adalah sumber inspirasi yang tak ada habisnya.

Berikut adalah petikan perbincangannya dengan BALAIRUNG tentang laut, Madura, dan kepenyairannya.

D. ZAWAWI IMRON

Apontal Ombak Asapo

Bisa diceritakan proses perjalanan kreativitas kepenyairan Anda?

Saya habis SD ikut pesantren. Di pesantren, ada kegiatan menulis puisi—yang dalam bahasa Madura disebut syi'ir. Saya ikut juga menulis. Karena saya sekolah di pesantren tradisional yang tidak ada madrasahnya, kesempatan untuk belajar menulis minim sekali.

Ternyata, ustadz yang membaca puisi tahu syi'ir bahasa Madura menganggap puisi saya jelek. Sebagai anak muda yang berumur 13 tahun, ya...agak frustasi dengan bahasa Madura saya itu. Akhirnya, saya mencari kepuasaan dengan menulis dalam bahasa Indonesia. Di pondok tidaklah lama, hanya 18 bulan. Pulang dari pondok, saya mengajar di madrasah di sebuah pesantren kecil. *Nah*, disitu saya menulis puisi-puisi dalam bahasa Indonesia

Ternyata, kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada yang mengatakan jelek (tak seperti puisi yang ditulis dalam bahasa Madura—*Red.*). Akhirnya, dari sinilah menulis puisi menjadi bagian dari kebutuhan hidup saya. Dengan demikian, saya bisa mengekspresikan apa yang menjadi ganjalan kehidupan, unek-unek, rasa senang, cinta, *mangkel* dan rindu.

Apa atau siapa yang berpengaruh dalam proses kreativitas Anda?

Yang paling berpengaruh adalah kampung saya. Saya *kan* hidup di sebuah kampung di lembah sebuah bukit. Di selatan rumah saya, ada taman kecil berdiameter 3 meter, tempat saya mandi. Ada sawah bertingkat-tingkat. Di kejauhan, di bukit-bukit, terlihat pohon siwalan. Dan, kalau matahari atau bulan terbit di sebelah timur, mereka seolah-olah terbit dari celah bukit itu. Kemudian di depan rumah, dua tingkat dari tanah depan rumah saya, ada sumur yang dikelilingi pohon pisang. Kalau sore hari, sekira jam lima sore, burung kutilang beterbangan untuk bersarang di situ. Ini merupakan keindahan yang selalu mengelus-elus dada saya.

Selain itu, biasanya, setiap Selasa dan Sabtu, rombongan musik saronen selalu lewat di selatan rumah saya. Saya mendengarkannya bukan sekadar mendengarkan tapi hati saya juga ikut bermusik.

Kebudayaan setempat atau pengalaman empiris biasanya membentuk karakter dalam kepenyairan. Bagaimana dengan kepenyairan Anda?

Saya berasal dari kebudayaan pulau-pulau. Kalau saya naik pohon mente di bukit sebelah timur rumah, saya bisa melihat laut, juga layar putih di atas birunya laut. Ada sesuatu yang tak terungkap, lebih-lebih saat melihat garis horison di laut: di balik keluasan laut ada keluasan yang tak terhingga, yang tak terbayangkan. Itulah yang membuat saya selalu membayangkan apa yang ada di baliknya.

Di balik kicau burung, awan yang berarak, biru langit, atau cakrawala, timbul imajinasi-imajinasi yang tak terperikan indahnya. Mengharukan, tapi juga menantang rasa ingin tahu saya. Apalagi setelah warna laut itu berubah. Oleh arakan awan, kadang warna laut berwarna biru, kadang bagian tertentu berubah jadi ungu. Atau, laut itu kadang total merah karena ufuk senja juga kemerahan. Dan, itu menjadi sajian keindahan yang sangat estetis yang disajikan alam, dalam hal ini Tuhan.

Jadi, semangat dan vitalitas alam begitu berpengaruh dalam membentuk proses kepenyairan Anda?

Ya. Karena kabupaten saya, Sumenep, punya 70 pulau. Di Pulau Tombu dan Pulau Raas ada penyelam terumbu dan mutiara akar bahar. Mereka berlayar dengan perahu-perahu kecil sampai ke Pulau Laut. Jadi, etos kebaharian memang tinggi. Di Madura, jenis perahu saja ada 32 macam. Ada perahu *kacik, lamolean, majeng, sukang, sampan patuang*, dsb.

Ketika saya melihat laut, saya seperti melihat gelora kehidupan, seolah berharmoni dengan laut yang ada dalam hati saya. Kadang-kadang, ketika ombak menjerit parau dan perahu dimain-mainkan, ada suatu kekhawatiran. Tapi, kalau laut mulai tenang, ada suatu rasa senang. Berlayar di laut seperti sebuah senam rohani. Nah..itu pengalaman masa kecil saya sebelum umur 20 tahun.

Sampai sekarang alam Madura masih menjadi inspirasi Anda?

Saya kira masih, walau cara melihatnya sudah lain. Hal ini karena saya sudah tahu Jakarta, sudah tahu Singapura, sudah tahu Ujung Pandang.

Ya, Anda bisa membaca karya-karya saya di *Bulan Tertusuk Lalang* misalnya. Alam, sampai hal-hal yang paling kecil, menjadi perhatian saya. Puisi yang saya tulis menjelang tahun 2000 saja masih bicara tentang laut. Bahkan, satu kumpulan khusus saya yang terkumpul dalam *Bantalku Ombak Selimutku Angin* itu berasal dari pepatah lama Madura *Apontal Ombak Asapo Angin* yang kemudian menjadi nyanyian. *Bantalku Ombak Selimutku Angin* menggunakan simbol-simbol yang menunjukkan Madura sangat dekat dengan laut.

Di laut itu ada gelora, ada kehidupan, seolah-olah gelora laut itu adalah gelora darahku. Oleh karena itu, suatu ketika saya menulis puisi yang berjudul "Madura Akulah Lautmu". Artinya, di laut itu terdapat kehidupan

yang menantang, ada kedalaman yang tak terduga—yang ternyata setelah saya baca buku, di laut ada karang, aneka jenis ikan, baik ikan untuk dimakan maupun ikan hias, ada terumbu karang, ada lokan. Bahkan, di laut ada sumber minyak tanah. Itu *kan* hal-hal yang tak habis dibicarakan.

Menurut Anda, dari sudut kebudayaan, bagaimana pola pikir masyarakat pesisir?

Rata-rata orang laut bebas dalam menyatakan pikiran. Sebab apa? Orang laut bergaul dengan masyarakat etnis-etnis lain. Di Madura sendiri ada bermacam-macam etnis, terutama yang datang dari timur. Misal, suku Makassar, Bugis dan Mandar. Di wilayah Sumenep, banyak sekali orang Mandar, dan mereka sudah membaur dengan masyarakat. Bahkan, di pulau-pulau tertentu, seperti Pagurungan dan Sapeken, bahasa yang dipakai justru bahas Bugis dan Mandar. Pergaulan seperti ini menuntut adanya semacam komunikasi lintas budaya, lintas etnis.

Dari situ, saya katakan sebenarnya budaya laut atau budaya pesisir itu egaliter. Senantiasa ada proses, ada penyaringan, ada seleksi, siapa yang pantas menjadi pemimpin. Ini *kan* bisa dikembangkan untuk daratan. Sehingga, orang-orang yang ada di garis bawah, yang dalam sistem feodal banyak merugikan, bisa turut menikmati kehidupan ini. Mereka juga bisa diorangkan. Dan itu, terdapat di budaya pesisir.

Bagaimana pengaruh kebudayaan yang datang dari luar di Madura?

Orang Sumenep menembang pakai bahasa Jawa tapi dengan gaya Madura. Ada pengaruh-pengaruh Jawa pada bagian tertentu ke kebudayaan Madura. Salah satunya topeng. Topeng di Madura ada kemiripan dengan topeng di Jawa. Sementara, gendingnya masih menggunakan gamelan seperti gamelan Jawa, meski tariannya sudah lain. Di sini terlihat adanya dialog budaya. Ada proses untuk tidak meninggalkan jati diri kebudayaan Madura.

Madura dan laut seperti dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Bisa dikatakan, keduanya saling tergantung. Ada contoh yang menarik untuk menggambarkan hubungan itu?

Di daerah saya, pantai utaranya berpasir. Pasirnya berwarna krem mendekati putih. Pasir itu tidak bisa mengotori baju. Karena itu, di sebelah utara kampung saya, tepatnya Desa Tegung, ada budaya pasir. Pasir itu dijadikan kasur di dalam rumah. Jadi, di dalam rumah, ada bagian tertentu—sejenis kotak—yang diisi pasir yang tingginya atau tebalnya sekira 10 cm. Pasir itulah yang dijadikan tempat tidur. Dan lagi, kalau sedang musim panas, pasir itu terasa dingin, sementara kalau lagi dingin justru terasa hangat. Di samping itu, pasir pantai itu juga jadi tempat bercengkrama oleh perempuan-perempuan yang sedang menunggu suaminya pulang dari laut saat bulan purnama.

Selain budaya pasir, bagaimana tentang *local wisdom*? Kesenian, misalnya?

Sebagian lagu-lagu Madura akrab sekali dengan laut. Lagu *Ole Olang, O Ramba O Rambe, Pan Sampanan* itu sebenarnya lagu tentang laut. *Ole Olang* itu menggambarkan tentang olang-olengnya perahu. Di samping itu, pepatah untuk menggambarkan orang yang mengajari orang yang sudah mengerti disebut *abu jaba sakere* (menggarami laut). Yang lain, misalnya kata-kata "sebutir garam di laut pun akan terus mengasinkan." Bahkan, menurut Sulaiman, seorang peneliti, rumah tradisional Madura, yang disebut rumah *pegun* itu, di atasnya ada bentuk perahu. Jadi, perahu itu menjadi mahkota tiap-tiap rumah. Ya, mereka (orang Madura—*Red.*) tidak menggunakan simbol-simbol darat.

Melambangkan apa perahu di atap rumah tersebut?

Perahu-perahu itu adalah suatu bentuk kehidupan. Kata-kata *apontal ombak asapo angin* itu artinya bukan sekadar etos kelautan saja. Merantau itu penting, dan dalam rantauan itu tantangannya harus bisa kita tepis, bisa kita atasi.

Dari 14 juta orang Madura, yang tinggal di Madura hanya 3 juta. Orang Madura lebih banyak memilih untuk merantau. Apa secara ekonomi, laut tidak memberikan keuntungan bagi orang Madura?

Dulu, belum ada transportasi seperti sekarang. Ya, kalau mereka banyak menghasilkan ikan laut, siapa yang akan beli? Proses orang merantau itu terjadi sebelum zaman Trunojoyo, tepatnya pada zaman Arya Wiraraja, tahun 1290, akhir abad 13. Jadi, merantau itu sudah menjadi kebiasaan sejak dulu.

Oke, kembali ke proses kreativitas, pendidikan formal Anda tidak seperti penyair lainnya. Apa yang mendorong Anda menulis?

Yang paling kuat ada dorongan dari dalam, mengekspresikan diri dari dalam. Karena saya bernyanyi tidak bisa, mengidung tidak bisa, maka cara yang paling tepat mengekspresikan diri adalah dengan menulis, antara lain menulis puisi. Mungkin justru karena saya hanya sekolah SD, salah satu cara untuk menyatakan hidup adalah dengan menulis itu. Jadi menulis itu sebagai pernyataan hidup.

Mengapa pilihan Anda adalah menulis puisi?

Menulis puisi itu orgasme spiritual. Ada kenikmatan yang tak terbendung. Alam itu adalah lukisan Tuhan. Sekarang, bagaimana mengekspresikan keindahan alam itu? *Lha*, untuk ini dibutuhkan sikap yang selalu cerah menghadapi keindahan, sebagai sikap yang selalu menggunakan mata artistik, sehingga apa yang kita lihat bisa menjadi keindahan.

Bagi Anda laut adalah gelora kehidupan, apa yang Anda rasakan ketika memandang laut?

Kalau melihatnya dengan hati yang ingat kepada Sang Pencipta, kita akan mendapatkan cinta yang tak ternilai yang tumbuh dalam hati. Cinta alam, cinta kepada umat manusia, cinta Tuhan. Sehingga, seolah-olah laut itu sendiri seperti menjadi lautan cinta. Sampai di daratan tujuan, kita ingat daun-daun nyiur melambai seolah-olah mengucapkan selamat datang kepada kita. Lebih-lebih kalau kita pulang. Perahu kita mencium pantai kesayangan dengan membawa pengalaman dari rantau. Dada sesak rasanya oleh berbagai macam pengalaman. Begitu kita sampai di kampung halaman, senyum ibu akan menyambut kita dengan senyuman yang seolah-olah memantulkan senyuman surga.

Anas A.G
Indradya S.P.

Terima Kasih

kepada Anda yang telah menjadi Pelanggan Abadi BALAIRUNG

DANIEL DHAKIDAE

KITLV

AMIR EFFENDI SIREGAR

PROF DR H SOETINAH

HARI SANJOYO

A TONY PRASETYANTONO

MARZUKI USMAN

DJOKO SANTOSO

PROF IR EKO BUDIHARJO

REKTORAT UNDIP SEMARANG

GUNAWAN

SUDJARWADI

KABOEL HADI WASITO

IR ABDUL HAMID DIPOPRAMONO

A BUDI PURNOMO

Apakah Anda tertarik

menjadi bagian dari kami dalam membangun bangsa cerdas?
Bergabunglah dalam program PELANGGAN ABADI kami untuk mendapatkan setiap edisi terbaru BALAIRUNG seumur hidup hanya dengan donasi minimal sebesar Rp 250.000!

Ya!
Saya tertarik dengan program ini dan akan mengisi formulir berlangganan.

Tidak
Tetapi informasikan kepada saya apabila BALAIRUNG mempunyai promo lain.

Nama Lengkap

Alamat Pos

bersedia menjadi PELANGGAN ABADI Majalah BALAIRUNG
dan memberikan donasi berlangganan sebesar

melalui transfer Tahapan BCA Yogyakarta No. 0372072120 a.n. Widhi Budhiartati (lampirkan bukti transfer ke fax 0274 566171) atau via wesel ke alamat: Bulaksumur B-21, Yogyakarta 55281.

Tanda Tangan

BALAIRUNG

APA ITU BALAIRUNG?

Setelah Gama Intrauniversiter (1950-an) mati dan Gelora Mahasiswa (1970-an) dibredel, BALAIRUNG adalah generasi ketiga pers mahasiswa universitas terbesar Indonesia ini. Sejak berdiri pertama kali pada 29 Oktober 1985, BALAIRUNG mencoba menjadi suara yang lain bagi dunia pers Indonesia sebagaimana yang menjadi ranah pers mahasiswa. Tentu saja, mewarisi semangat generasi sebelumnya adalah yang utama.

Menjadi "cagar alam kebebasan pers", sebagaimana dikatakan Daniel Dhakidae, tentu bukan pekerjaan mudah. Untuk menjadi sesuatu yang alternatif diperlukan kecerdasan, keuletan, dan yang lebih penting adalah keberanian. Termasuk di dalamnya keberanian mengambil keputusan. Menempuh jalan yang kadang harus berlainan dengan jalur mainstream pers pada umumnya: logo BALAIRUNG yang vertikal, rubrik yang unik, perwajahan menarik, dan sistem jurnalisme yang integral.

Semua ditempuh karena BALAIRUNG, mengutip Prof T Jacob, ingin menjadi tempat mahasiswa mengasah pena, melatih diri untuk kehidupan pasca-universiter, dengan tidak meninggalkan ciri-ciri kemahasiswaan, yaitu ingin tahudan mencoba melihat segala sesuatu secara ilmiah. BALAIRUNG inin menjadi "balairung", tempat belajar, tempat berteduh, tempat bertemu banyak orang, banyak kepala, banyak keinginan, banyak cita-cita.

Sampai umurnya yang ke-17, BALAIRUNG telah menelurkan 34 edisi reguler dan 4 edisi jurnal, selain mingguan berita BALKON, situs balairung.org, dan Pusat Informasi Pers Mahasiswa Indonesia (PIPMI). Kerja keras ini berbuah manis dengan menyabet tiga kali berturut-turut juara I Lomba Penerbitan Pers Alternatif Institut Studi dan Arus Informasi (ISAI) Jakarta.

Dari Nelayan Mengurai Kemiskinan

Judul Buku
Pemberdayaan Masyarakat Nelayan
Penulis
Ary Wahyono, I G.P. Antariksa, Masyuri Imron, Ratna Indrawasih, Sudiyono (Tim LIPI)
Penerbit
Media Pressindo, Yogyakarta, Mei 2001

Indonesia adalah negara dengan berkah sumber daya laut yang melimpah. Sayangnya, berkah ini belum banyak tersentuh, meskipun kini pengolahannya semakin meningkat. Paling tidak, sebagai bukti kongkrit, angka Produk Domestik Bruto (PDB) yang disumbang sektor kelautan mulai merambat naik. Tapi tunggu dulu, indikasi ini tak sepenuhnya menunjukkan bahwa potensi laut telah dimanfaatkan secara baik.

Thailand agaknya bisa dijadikan perbandingan. Dengan garis pantai yang "hanya" 2.400 km—bandingkan dengan Indonesia yang 81 ribu kilometer—Thailand, pada 1998, berhasil meraup devisa sebanyak US$ 4,11 miliar dari ekspor perikanannya. Sedangkan pada tahun yang sama, devisa perikanan Indonesia cuma sebesar US$ 2 miliar. Begitu pula halnya ketika bicara persentase. Pada 1996, laut kita hanya sanggup menyumbang 22% dari total PDB nasional. Sangat jauh, misalnya dengan RRC, yang luas lautnya lebih kecil dibanding Indonesia, namun bisa menyumbang 48% dari total PDB.

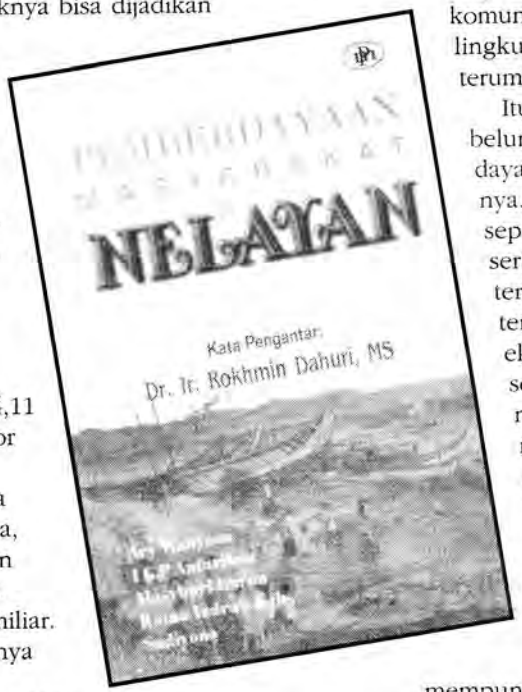

Ada banyak hal yang bisa ditengarai sebagai penyebab ompongnya sektor marina, salah satunya adalah pola pembangunan yang sentralistik (*top down*). Adanya pola ini kemudian telah mengikis pola kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Tak heran, tindakan-tindakan destruktif dan kurang peduli pada kelestarian biota laut pun lalu sering kali lahir. Penggunaan pukat harimau, misalnya. Alat ini bukan hanya bisa menangkap ikan, tapi juga membunuh komune ikan, merusak lingkungannya—amsalnya terumbu karang.

Itu baru SDA-nya, belum termasuk sumber daya manusia (SDM)-nya. Masyarakat pesisir, seperti nelayan, juga seringkali termarjinalkan, terutama secara ekonomi. Hanya sekira 25% saja nelayan kita yang maju, makmur, dan tentu saja berkapital. Sementara sisanya, harus berjuang melawan miskin. Tidak semua nelayan mempunyai alat tangkap yang memadai dan mampu melakukan ekspansi ke wilayah yang jauh. Tak heran jika tingkat produktivitas juga tak cukup baik.

Dalam rente ekonomi, pasar acapkali tidak bersahabat pada nelayan miskin yang jumlahnya 75% dari total

nelayan itu. Nelayan bermodal dan tengkulak lebih banyak menenggak keuntungan dalam kegiatan ekonomi pasar. Kebijakan pemerintah pun seringkali tidak menyentuh permasalahan ini. Padahal, sesuatu yang berakar dari permasalahan resources ini bukan tak mungkin menimbulkan efek sertaan, seperti konflik destruktif yang siap meledak setiap saat.

Berangkat dari sini, tim dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan riset di dua tempat, yakni Kabupaten Cirebon—sebagai representasi pantai utara—dan Kabupaten Cilacap—sebagai sample pantai selatan. Di Cirebon, nelayan nyata tidak mempunyai lembaga simpanan, seperti koperasi misalnya. Tak heran, jika dana bagi program-program pembinaan, pelatihan dan peralatan tak tersalurkan dengan mulus. Dan lagi, seringkali salah sasaran. Alih-alih untuk nelayan buruh (bidak), yang mendapat justru juragannya. Akibatnya, kucuran ini juga berpengaruh pada pendapatan nelayan buruh. Belum lagi, distribusi ikan seringkali dimonopoli oleh money lender (tengkulak) yang membeli ikan dari nelayan dengan harga rendah.

Tidak demikian halnya dengan nelayan Cilacap. Di sini, Koperasi Unit Desa (KUD) banyak memberi andil bagi peningkatan kehidupan nelayan, misalnya dengan meminjamkan uang untuk menalangi pembelian alat tangkap, jaminan kesejahteraan sosial, atau lainnya. KUD juga memasarkan hasil laut, sehingga nelayan tidak perlu lari ke tengkulak.

Kondisi ekstrem di kedua wilayah ini mendorong para peneliti menancapkan analisanya pada (salah) satu kata kunci, yakni tengkulak. Tengkulak bermain di banyak lini: penjualan, distribusi, dan perputaran modal. Mereka selalu berusaha melakukan monopoli, memiting nelayan pada posisi tawar yang rendah. Oleh karenanya, dibutuhkan lembaga yang bisa mengambil alih peran tengkulak, terutama dalam urusan simpan pinjam. Alur pengembalian angsuran pinjaman bisa disesuaikan dengan siklus pendapatan nelayan.

Pendirian koperasi atau kelompok usaha bersama (KUB) juga bisa memotong jalur distribusi ikan melalui tengkulak. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) juga mesti difungsikan benar. Sinergi yang baik antara koperasi dan TPI dapat membantu meningkatkan harga hasil produksi ikan. Dengan sistem lelang, nelayan lebih leluasa melakukan penawaran. Otomatis, harga jual dari nelayan juga akan meningkat.

Untuk meningkatkan produktivitas nelayan, buku ini merekomendasikan, sejatinya bantuan alat tangkap diarahkan kepada komunitas nelayan miskin. Di luar itu, perlindungan terhadap nelayan lokal—misalnya dengan memberi semacam hak ulayat untuk mengelola wilayah laut—perlu dilakukan untuk menghindari persaingan dengan nelayan luar daerah yang mempunyai peralatan lebih lengkap.

Langkah-langkah di atas tetap saja harus dipahami sebagai semacam panduan. Dalam penerapannya, harus digarisbawahi, setiap daerah mungkin membutuhkan perlakuan yang berbeda satu sama lain, sesuai karakteristik SDA dan pola adaftasi sosialnya.

Secara keseluruhan, buku ini, yang dilengkapi banyak tabel dan grafik, cukup layak dijadikan gambaran dan panduan bagi perumus kebijakan. Sehingga, pemberdayaan masyarakat nelayan bukan hanya sekadar bahan kajian dan penelitian belaka.

Indradya S.P.
Mahasiswa Sastra Perancis UGM

FC. SAHABAT
jilid skripsi cepat
menyediakan sampul metalik
foto copy gambar super gede
melayani: jilid skripsi, spiral, hard cover, foto copy super besar [a0]
Jl. Kaliurang Km.5 CT3/04 [0274] 564935 Yogyakarta [sebelah utara Pamor]

KAMI SOLUSINYA
UNTUK KEBUTUHAN KOMPUTER ANDA
KEPUASAN ANDA ADALAH TUJUAN KAMI
COMPUTER SOLUTIONS
MITRA GAMA GROUP
MGC : 0274-545916
PREMA : 0274-418994
ANANDAM : 0274-523539
MKC : 0274-549861
NP COMP : 0274-546647
MIDI COMP : 0274-544269
Shuttle
www.spacewalker.com

ISTIMEWA

Di hadapan ratusan siswa-siswi sekolah dasar Yogyakarta, tubuh kerempeng dan gundul itu mengemuka. Sembari mengumbar senyum, sosok bercelana pendek warna gelap dan atasan kaos tipis putih itu naik ke atas panggung Auditorium LIP (Lembaga Indonesia Perancis). Malam itu, Senin (29/10/01) lalu, Agus Nur Amal, sosok itu, mencoba memukau penonton kecilnya.

Agus adalah salah satu duta dongeng dari daerah yang banyak menyentak kesenduan, Aceh. Ia memulai karier mendongengnya dengan berguru pengalaman kepada Tengku H. Adnan di Desa Biang, Pidie, Aceh. "Dengan *mencangklong* tas butut, aku telah keliling ke segala penjuru nusantara. Aku keluarkan isi tas itu, kumunculkan benda-benda, dan kupermainkan. Dengan bernyanyi, menari, muncullah segala peristiwa, tempat, dan tokoh,"akunya.

Aksinya di LIP kali ini juga tak beda aksi-aksi sebelumnya. Ia banyak mengeluarkan pernak-pernik mendongeng yang unik kepada anak-anak. Ada sepatu *boat*, helm warna-warni, gayung air, selotip, sapu, dan berbagai benda *nyeleneh* lain. Kesemuanya merupakan barang-barang yang digunakan sebagai simbol dalam cerita-ceritanya.

Dengan dongeng bertajuk "Melawat ke Negeri Warna", Agus menunjukkan kemampuannya yang komunikatif kepada khalayak. Gayanya unik. Ia tidak nampak sedang mendongengi penonton, tapi mengajak mereka membangun satu cerita. Dengan meluncurkan berbagai pertanyaan, bersama penonton Agus membangun dongeng yang baru.

Dalam dirinya, memang ada keunikan tersendiri. Semua narasi tidak ia bawakan dengan cerita yang monoton. "Aku bangga bermain secara spontan, dan berinteraksi dengan penonton adalah kebahagiaan kita bersama dalam bercerita,"tuturnya jelas.

Pada aksinya di Yogya kali ini, seperti biasa, ia juga bertutur dengan dendangan Ranah Minang, tidak dengan tuturan teatrikal. Di dalam ceritanya itu, ia melakonkan dirinya sendiri. Melalui imajinasi dongeng, ia menggambarkan, Si Agus yang sedang murung meletakkan kepalanya di mulut jendela. Ternyata, ia merindukan anak-anak di seluruh dunia hadir di dekatnya dan mendengarkan ceritanya yang *anyar*. Ia tidak melanjutkan ceritanya itu dengan sekehendak hatinya, tapi bertanya pada penonton apa solusinya.

Penonton anak-anak pun berteriak serempak, "Berkirim surat...berkirim surat....!!" Demikianlah. Ia membebaskan imajinasi pembaca. Ia meletakkan dirinya, murni hanya sebagai perangsang imajinasi. Dongeng itu pun berlanjut dengan kesediaan para anak-anak sedunia untuk datang.

Kemudian, dalam menggambarkan proses kepergian anak-anak sedunia pun, ia kembali melontarkan pertanyaan pada penonton. Meluncurlah jawaban-jawaban lucu, unik, namun membuat penonton kecilnya mampu memetakan sisi antropologis masyarakat dunia. Anak-anak Afrika naik gajah, anak-anak Jepang naik helikopter, anak-anak Arab naik unta, dan anak-anak Indonesia naik kapal layar. Begitulah, suasana tidak seperti dalam ruang kelas, melainkan riuh-rendah bak acara ulang tahun.

Namun sayangnya dongeng ini harus terpenggal begitu saja. Waktu yang terbatas membuatnya tak bisa menyelesaikan cerita. Agus memang kelihatan kurang bisa mengontrol ritme narasi. Barangkali, ini karena ia

Melawat ke Negeri Warna Bersama Anak-Anak

berhadapan dengan penonton yang berbeda. Pada berpuluh pentas sebelumnya, penontonnya memang kebanyakan orang dewasa. Sementara kali ini, ia berhadapan dengan anak-anak dengan beragam imajinasi dan jawaban yang harus ia layani.

Hal ini cukup mengecewakan penonton. Banyak penonton yang merasa tidak mendapatkan unsur cerita yang menarik dari penampilan Agus. Cara narasi seperti itu dinilai terlalu banyak memakan waktu. Hampir dua jam habis hanya untuk tanya jawab dengan hadirin. Agaknya Agus memang perlu menyeleksi spontanitas penonton, agar tidak mengumbar imajinasi. Namun secara keseluruhan bukan berarti metode ini buruk. Ia cukup menawarkan keagungan. Anak-anak dibebaskan mengolah imajinasinya dengan merdeka. Mereka bebas menentukan jalan cerita. Lagipula, suasana komunikatif yang dibangun membuat penampilannya tidak menjemukan.

Agus Nur Amal memang seakan telah menyetiai dunia dongeng sebagai jalan hidupnya sejak 1992. Bahkan lebih dari itu, ia telah mampu menciptakan genre baru dalam gaya bercerita. Ia telah menjadi pelopor gaya mendongeng komunikatif bagi masyarakat. Ini adalah sumbangan yang berarti bagi dunia sastra, khususnya dunia dongeng.

Pentas kali ini hanyalah titik kecil dari rimba perjalanan Agus dalam menyuguhkan cerita. Mulai dari desa sampai kota, khitanan sampai perkawinan, lokasi pengungsian hingga diskotik, forum kesenian hingga politik, telah ia jelajahi. Telah lebih dari 150 kali ia bercerita.

Dalam hidupnya, persoalan kemanusiaan yang ada dicita-citakannya dapat terjawab. Ia ingin mengabdikan hidupnya untuk membahagiakan dan memberikan kesegaran baru kepada anak-anak, melepaskan mereka dari cengkeraman budaya takut yang telah mengakar. Agus juga banyak berimajinasi tentang keragaman hidup. Ia sedang merancang mendirikan Institut Tukang Cerita Nusantara.

Sejenak, di Yogya kemarin, ia seolah menggantikan peran para orang tua dalam mendongeng pada anaknya. Sepenggal peran yang dalam tradisi dahulu banyak dilakukan oleh para ibu, namun kini telah banyak dilupakan. Kenyataan memang berucap demikian. Kini hanya segelintir orang tua yang mau mendongeng untuk anaknya. Peran itu telah banyak digantikan oleh makhluk canggih bernama televisi.

Dalam kotak ajaib itu, kita tahu, dongeng telah diperkosa sedemikian rupa untuk menuruti kehendak dunia industri. Lihat saja, dongeng *Bawang Putih dan Bawang Merah* yang melegenda dengan berbagai versi di beberapa daerah Indonesia, dicuplik sebagian untuk iklan sabun cuci. Di sana, kekentalan sastra dari dongeng Bawang Putih telah bilur-bilur dipoles budaya modern. Ruh ceritanya lenyap sudah. Hanya menyisakan muatan hegemonik pemilik modal.

Keberadaan Agus Nur Amal—atau para pendongeng lain—dalam hal ini memang sangat dilematis. Cerita daerah sudah bukan lagi sesuatu yang menarik. Di televisi telah banyak ditawarkan cerita-cerita sinetron dan telenovela yang akrab mengisi tiap detik hidup anak-anak. Mereka lebih akrab dengan Gaby, Kassandra, ataupun Maria Marcedes, dibanding dengan Bawang Putih, Rara Anteng dan Joko Seger—dongeng terkenal dari Tengger, ataupun legenda terciptanya Telaga Banyuwangi.

Gelar dongeng yang dibegawani oleh Agus ini, barangkali, bisa menjadi salah satu upaya untuk mencegah dampak buruk kebudayaan modern. Dia menjadi tapal batas terakhir sebagai penjaga keberlangsungan budaya dongeng yang makin dijepit laju peradaban modern, sebuah peradaban yang semrawut. Tak lain.

M. Thowaf Z.

ISTIMEWA

Seragam dan

11 September 2001.

Saya tertidur dan bermimpi tentang nirwana. Bersama "si tua dari pojok kamar", kami menjelajah dunia yang serba indah, teratur. Kumpulan manusia berbalut kain putih dari dunia tanpa cela itu menyapa, penuh senyum. Damai. Tanpa batas.

Di tengah kedamaian itu, saya tersentak bangun. Realitas segera menghempas mimpi indah itu. Di ujung dunia lain, sepasang gedung kembar hancur berantakan oleh tabrakan pesawat yang terbajak. 6.500 nyawa luluh lantak bercampur debu dari puing World Trade Center.

Seluruh dunia, dalam hitungan detik, segera tercekam peristiwa buruk itu. Teknologi canggih yang merasuki setiap sudut rumah menyiarkan tragedi memedihkan itu bertubi-tubi. Esoknya, jutaan surat kabar menulis peristiwa itu, dengan cover tak jauh beda. Ketakutan segera melanda dunia. Terorisme yang dituding segera jadi musuh bersama. Di sisi lain, teori lemah Huntington tentang perang agama kembali mencuat ke permukaan. Si raksasa Amerika mengamuk. Berputar-putar mencari kambing hitam sebagai bahan tudingan.

Kali ini, sial menimpa Afganistan. Osama bin Laden menjadi orang yang paling dicari. Maka, negara fakir yang tak pernah berhenti berperang itu harus memulai perang barunya kembali. Amerika membombardir negara itu dengan bom, peluru kendali. Sementara sekutunya, Inggris, meluncur dengan pesawat-pesawat gagahnya, berputar-putar mencari mangsa. Dunia riuh-rendah. Kemarahan, tangis pilu, dan kebingungan bercampur jadi satu.

Dalam keterpanaan, saya membatin,"Mungkinkah perang dunia ketiga segera mulai?" Barangkali, ya. Amerika masih terus menghujani Afganistan dengan bom. Teknologi-teknologi keluaran generasi PDA (*personal digital assistant*) digunakan melawan senjata-senjata karatan rilisan zaman PD II. Di belahan dunia yang lain, masyarakat muslim berteriak jihad dan menuntut keadilan dari perang tak seimbang dan penuh prasangka ini. Dunia, dalam gambaran televisi, goncang oleh perang yang terlihat sangat dahsyat itu. Kecemasan semakin melanda diri saya: perang dunia!

Tapi ternyata saya salah. Perang tak berlangsung lama. Hanya dalam hitungan hari, Taliban, yang jadi penguasa Afganistan dan pelindung Bin Laden, seperti dapat diduga sebelumnya, kalah total.

Televisi terus menyiarkannya. Dibarengi senyum manis pembaca berita, dentuman ratusan, bahkan mungkin ribuan, rudal AS jadi pengiring sarapan pagi dan kopi panas kita. Ia pun kemudian tak lagi menarik kecuali ada wartawan nakal yang bisa membidik wajah gadis Afgan yang katanya mulai membuka *burqa*-nya. Orang-orang sudah mulai biasa dengan hilangnya satu-dua nyawa.

Saya lega, dunia tak jadi hancur. PD III tak jadi terjadi, paling tidak untuk saat ini. Tapi, di sisi lain, ada yang saya

Tak Seragam

BASKORO

emaskan. Dulu saya percaya pada ilusi bahwa pesatnya nformasi yang tersuguhkan dari kotak televisi akan endorong bangkitnya nilai-nilai universal. Saya percaya, erita-berita gembira di satu dunia yang satu akan menjadi gembiraan bagi jutaan umat yang lain, di sudut dunia yang n. Kesedihan di ujung dunia yang satu akan meluruhkan air a manusia di ujung dunia yang lain.

Toh, pada level tertentu ilusi saya benar. Ada banyak bol-simbol modernitas yang bertebaran, yang seragam, dan an-akan menjadi milik bersama masyarakat dunia. Model yang dibuat massal, jenis musik, merek pakaian terkenal, gaya hidup hedonis yang mirip hampir di seluruh dunia. Bahkan pada selera lidah yang biasanya sulit disesuaikan, keseragaman pun terjadi menjadi seragam. Ayam goreng dan kentang goreng cepat saji jadi hidangan favorit masyarakat perkotaan dunia. Sesuatu rasanya menjadi milik bersama.

Tetapi, ilusi tetap saja ilusi. Barangkali ilusi itu muncul dari jiwa saya yang masih terlalu kanak-kanak untuk memahami dunia yang saling silang sengkarut. Baru saya sadar bahwa dunia telah memasuki tahapannya yang baru, yang semakin centang perentang, penuh paradoks, dan sulit dipetakan. Perang di Afganistan tak lagi membawa kesedihan bersama umat manusia. Bahkan, ironisnya, ia jadi kesempatan emas bagi perdagangan senjata. Dan banyaknya korban jiwa dan rumah yang hancur adalah bahan iklan yang ampuh. Gemerincing uang keuntungan menutupi suara isak perempuan dan anak-anak korban perang.

Di Tangerang, buruh masih meneruskan perjuangannya menuntut kenaikan upah dan kesejahteraan. Di Afrika, kelaparan masih melilit orang-orang berkulit gelap yang sepertinya ditakdirkan untuk selalu lapar. Dan di belahan dunia yang lain, Kashmir, sengketa masih terus terjadi. Palestina dengan keletihannya terus berjuang melawan Israel, entah sampai kapan.

Semuanya berjalan sendiri-sendiri, seakan tak ada keterkaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Masing-masing berjuang untuk menyelesaikan persoalannya sendiri-sendiri. Buruh dengan ketertindasannya, Palestina dengan kemerdekaannya. Sementara untuk Afganistan, penderitaannya baru saja dimulai...

Bagi saya, berbagai paradoks yang terjadi menimbulkan kecemasan yang lebih mendalam. Masing-masing kelompok masyarakat berkutat dengan persolannya sendiri-sendiri. Berjuang sendiri membebaskan diri dari himpitan yang terus menerus mengungkung kehidupannya. Sementara, pada saat yang sama, banyak nilai yang semakin seragam, membombardir televisi lewat siaran internasionalnya, menerobos ruang-ruang privat masyarakat.

Paradoks itu lambat laun menggerus harapan saya tentang dunia yang damai. Karena, tidak ada isu besar bersama atas nama manusia yang layak diperjuangkan umat manusia. Bahkan, penderitaan, air mata tak mampu lagi mengikat satu dengan yang lain.

Mungkin dunia semakin renta dan letih. Ribuan tahun diterpa ulah manusia yang tak karuan, ia pun mulai kehilangan harapan. Harapan bahwa dunia, suatu saat entah kapan, akan lebih baik.

Tapi, hidup berjalan berdasarkan harapan bukan? Dan harapan, barangkali adalah satu-satunya hal yang tak boleh hilang, yang tersisa bagi manusia untuk bertahan hidup.

Maesita Maharani

Manusia Yang Paling Jujur Adalah Orang Gila

FATHUR

Demikian Jeremias Nyangoen, salah satu aktor film Beth, memberi komentar terhadap kacau-balaunya kondisi bangsa Indonesia saat ini. Menurut Jérry, begitu sapaannya, film bertemakan kegilaan ini memang dimaksudkan untuk menggambarkan perilaku orang-orang Indonesia yang tak bisa lagi dibedakan antara gila atau waras.

"Barangkali manusia yang paling jujur adalah orang gila. Kalau mati mungkin mereka akan masuk surga," kelakarnya pada diskusi film yang diperaninya itu di BPA Sospol UGM, 9 Desember 2001 lalu.

Bicara soal akting, lelaki gondrong dengan rambut di-layer oranye ini memilih seimbang. Maksudnya, akting dengan peran yang membutuhkan eksplorasi dengan peran yang lebih sedikit tantangannya tapi unsur finansialnya menawan. Ia bersedia main sinetron meski tak menutupi keprihatinannya terhadap mutu tayangan TV pada umumnya. "Kegelisahan itu pula yang menggerakkan saya, Aria (sutradara film Beth, Red), Ine (Febriyanti), dan kawan-kawan lain untuk membuat film ini." Saking semangatnya, para aktor yang bermain memilih untuk tak dibayar dan justru turut mencari pendanaan untuk film ini.

Selain di Beth, mahasiswa angkatan 1989 Jurusan Teater IKJ Jakarta ini juga pernah berperan di sinetron "Ali Topan" arahan Harry "Dagoe" Suharyadi, dan yang segera diputar, film "Tato" karya Hanny Saputra. Menanggapi kesan bahwa dia pilih-pilih dalam bermain film dan sinetron, dia bergelak,"Saya ini kan nggak laku!. Saya nggak bermaksud begitu. Saya ini lebih happy main di film-film seperti ini. Lingkungan saya memang di sini." ujarnya mantap.

Fulham

Resep Jitu, Rektor Baru

DOK. KOMPAS

Setelah melalui proses panjang dan berliku, Prof. DR. Sofian Effendi, MPIA akhirnya dilantik menjadi rektor UGM, 18 Maret 2002 lalu. Pakar administrasi publik yang pernah menjabat Ketua Jurusan Administrasi Negara, Fisipol, UGM, ternyata sudah punya resep jitu untuk merawat mahasiswa.

"Intelektualitas mahasiswa perlu dibina. Rencananya, program ini akan segera dilakukan setelah wakil rektor (warek) bidang kemahasiswaan terpilih,"ungkapnya serius. Warek bidang kemahasiswaan yang baru bersama-sama dengan KM dan UKM nantinya yang akan menyusun program-program untuk pengembangan mahasiswa. Menurut Sofian program-program yang akan diterapkan hampir sama dengan yang diterapkan di uiversitas-universitas luar negeri seperti: debating club, creative writing, language program, dan honour program. Khusus untuk honour program, diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa jenius. "Untuk orang-orang jenius ini, mereka bisa mengambil kombinasi mata kuliah. Mereka juga akan disubsidi dan diberi fasilitas," lanjut Sofian. Waduhh, terus untuk mahasiswa yang tidak jenius gimana?

Pandu, Lesa

Sambungan dari h. 85
"Artikel Lepas: Demoralisasi Sejarah"

elompok yang terlupakan ini. Dan, dengan sangat gemas, ramoedya mengutuk pemerintah—dan khalayak ramai—as ketakpeduliannya dalam memperhatikan nasib elompok perawan remaja ini. Padahal, demikian Pramoedya eyakinkan, di negara-negara lain, seperti Korea dan aiwan, pemerintah dan pelbagai lembaga kemanusian innya telah bergiat keras untuk memperjuangkan nasib elompok yang terlupakan akibat kekerasan Jepang pada erang Dunia ke-2 itu.

Di Indonesia, entah mengapa, alih-alih memperjuangkan, masyarakat—apalagi pemerintah—seakan menganggap ersoalan di atas sebagai sesuatu yang tak perlu iperbincangkan umum. Mungkin, saya percaya, masyarakat udah sedemikian terpengaruhi narasi sejarah yang enyebutkan kelompok perawan remaja ini sebagai kaum elacur, dan untuk itu sebaiknya dilupakan, atau bahkan disingkirkan".

Dalam sebuah harian ibukota, seorang bekas *jugun ianfu* enceritakan bagaimana kehidupannya pada masa sekarang angatlah getir. Untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya, a telah berusaha membuka usaha warung kecil-kecilan, ekadar untuk mendapatkan biaya makan ia sendiri—karena eluarga telah mencampakannya. Namun, apa yang terjadi? ernyata masyarakat dengan sangat tak berperikemanusiaan lah menyuruhnya untuk menghentikan usaha yang rintisnya itu. Masyarakat menganggap keberadaan erempuan tersebut akan "menodai" kehidupan "moral" enerasi sekarang. Inilah, saya kira, suatu ironi "moralitas" ng tak terampunkan!

Nah, itulah dua potong contoh untuk menjelaskan gaimana "kejamnya" sebuah narasi sejarah yang telah moralisasikan. Aktor-aktor di masa lampau telah epresentasikan dengan ukuran-ukuran moralitas sang ieknya, yaitu sejarawan, sehingga dalam hal ini sejarawan h "cukup bukti" untuk dijadikan "tersangka" dalam ironi manusiaan ini. Efek simbolis yang ditimbulkan sebuah asi sejarah memang sangat besar. Ini terkait dengan mahaman bahwa sejarah adalah satu-satunya alat untuk engisi ingatan kolektif sebuah masyarakat, disamping mahaman bahwa sejarah pula yang dijadikan alat aklukan kesadaran oleh sebuah entitas terhadap entitas nya.

Oleh karena itu, saya berpendapat, untuk menuntaskan kemanusiaan ini haruslah dilakukan langkah-langkah yang sesegera mungkin. Dan, untuk itu, saya menyarankan agar secepatnya dilakukan upaya-upaya demoralisasi sejarah. Maksudnya, sejarawan harus menghentikan keinginannya untuk memoralisasikan realitas masa lampau dalam narasi sejarah yang direkonstruksinya. Sejarah harus terbebas dari lekatan-lekatan moralitas yang diberikan oleh pemegang otoritas moralitas (yang mapan). Selain itu, perlu pula dibongkar tanda-tanda kesahihan/ketaksahihan dalam narasi-narasi sejarah yang merupakan produk sebuah jiwa zaman itu. Biarlah sejarah menjadi alat representasi diskursus masa lampau, tanpa dilanjutkan dengan usaha-usaha untuk memoralisasikannya.

Tetapi, patut disampaikan di sini, sebenarnya ada ruang kritik dalam gagasan demoralisasi sejarah ini. Salah satunya adalah kekhawatiran bahwa demoralisasi pada akhirnya akan terjebak pula pada *remoralisasi*, moralisasi ulang. Memang, saya kira itu hal yang tak dapat terhindarkan. Namun, saya berpandangan, keterjebakan pada remoralisasi harus disiasati jalan keluarnya, supaya remoralisasi itu tak sama dengan moralisasi yang pertama—yang tak mengindahkan nilai-nilai luhur kemanusian universal.

Di sini, sang subjek (sejarawan) bisa memasukkan nilai-nilai yang sekiranya tak merendahkan lagi nilai-nilai luhur kemanusiaan universal, seperti yang terjadi pada moralisasi sebelumnya. Misalnya, dari nilai-nilai yang bias gender menjadi nilai-nilai yang berperspektif gender, dari nilai-nilai yang bernuansa sakral menjadi nilai-nilai yang bernuansa profan, dari nilai-nilai yang berbau kekerasan menjadi nilai-nilai yang menyerukan perdamaian, dan nilai-nilai lainnya yang semuanya bermuara pada penghargaan hak-hak asasi kemanusiaan yang universal. Oleh karena itu, pada akhirnya, kehawatiran bahwa demoralisasi akan terjebak pula pada remoralisasi tidaklah perlu menjadi sesuatu kekhawatiran. Langkah-langkah sesegera mungkin untuk melakukan demoralisasi harus terus disuarakan, apapun reaksi balik yang akan ditimbulkannya, supaya sejarah tak lagi menjadi alat penindas yang menyakitkan oleh sekelompok orang yang mempunyai otoritas moralitas kaum (ter)mapan(kan).

Dilancarkannya demoralisasi sejarah, saya kira, akan turut memberikan sumbangan bagi terciptanya kehidupan yang lebih manusiawi. Hubungan antarindividu dan antarkelompok akan lebih wajar, tanpa perlu diikuti kecurigaan yang berlebihan. Juga, saya yakin, tak akan ada lagi kelompok yang terpinggirkan, terhakimi, atau terlupakan. Masa lampau jangan turut membebani kehidupan masa kini yang sudah sedemikian carut-marut ini. Singkatnya, nilai-nilai kemanusiaan universal pun akan secara perlahan berdiri kukuh dalam hembusan zaman yang menerpanya. ■

balkon
mingguan berita universitas gadjah mada
simak berita segar dan aktual seputar kampus
ambil gratis tiap senin pagi
BALKON DAPAT DIJUMPAI DI 18 FAKULTAS UGM, KOPMA UGM, PERPUSTAKAAN UGM, DAN BEBERAPA *PUBLIC SPACE* SEPUTAR KAMPUS. UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DAN PEMASANGAN IKLAN, HUBUNGI: ARDIANSYAH (085628880221) ATAU LANGSUNG KE BULAKSUMUR B-21 (DEKAT POS SATPAM UGM)

Bahasa Tubuh

Melihat Ina, anaknya yang gaul dan *fungkeh* tak becus berbahasa Jawa, Gus Dur pun memarahinya.

GD: Ina, kamu ini bagimana kok *ndak* bisa omong Jawa. Jelek-jelek *gini* bapak dan ibumu ini 'kan dari keluarga Jawa. *Mbok yao* belajar.
Ina: *Biarin*, lagi. Toh, Bapak kalau sama Ibu juga *nggak pake* bahasa Jawa.
GD: *Mosok* to? Bapakmu ini kok sekarang jadi pelupa ya.
Ina: Iya. Bapak kan kalau sama Ibu *pake* "bahasa tubuh"!
GD: Hus!

Fauzul

Pemilihan Rektor

Maret 2002. Tibalah saatnya bagi UGM untuk melaksanakan pergantian rektor. Bingung mencari pengganti, Ichlasul Amal, rektor UGM kala itu, meminta saran kepada Amien Rais, Ketua MPR yang juga karibnya. Kebetulan ketika ia *sowan* ke gedung MPR, Amien sedang *jagongan* dengan Megawati. "Mas Amien, untuk pemilihan rektor periode ini, saya sudah punya dua orang calon. Tapi saya kesulitan menentukan siapa yang lebih pantas. Mas Amien bisa membantu nggak?" Jawab Amien, "Gampang! Begini, Mbak Mega, saya mau tanya. Andaikan saja Ibumu punya dua orang anak. Tapi salah satu anaknya itu bukan kakakmu, dan bukan juga adikmu. Lalu siapakah dia?" "Wah, tentu saja itu saya!" jawab Mega dengan mantap. Mendengar jawaban itu, Amien bilang, "Tepat! Nah, Amal, caranya mudah kan? Itulah kenapa saya lebih memilih Mega menjadi Presiden ketimbang Gus Dur."

Dengan muka berseri-seri, Amal pulang dan kemudian memanggil para calon rektor pilihannya ke ruang kerjanya. Sofian, calon pertama, datang terlebih dahulu dan oleh Amal diberi pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan Amien kepada Mega. Namun Sofian kebingungan dan pergi keluar untuk mencari jawabannya. Namun, di depan pintu, ia bepapasan dengan Boma. Dengan khawatir ia pun menguping dari balik pintu. Terdengar suara Amal sedang memberikan pertanyaan yang sama dengan yang ia terima kepada Boma. Tanpa pikir panjang Boma menjawab, "Siapa lagi kalau bukan saya!"

Merasa jawaban pesaingnya itu benar, Sofian menyerbu masuk ruangan. "Saya tahu Pak! Orang itu adalah Boma!" teriaknya lantang. Mendengar jawaban kedua orang calonnya, Amal cuma geleng-geleng kepala. "Dasar bodoh, *masak* begitu saja *nggak* bisa menjawab!" katanya dengan nada kesal. "Yang benar, anak itu adalah Megawati!"

Asur

Kiai dan Pendeta

Seorang kiai dan pendeta hendak melakukan perjalanan malam untuk menghadiri dialog antarumat beragama. Ketika hendak duduk di kursi bus, Kiai bergumam,"**bismillah**" Pendeta yang mendengar gumaman itu jadi tercengang."Ini **bis malam**, Pak Kiai!" sanggah pendeta itu. Pak Kiai hanya tersenyum masam mendengarnya.

Ditengah perjalanan, tiba-tiba kilat menyambar dibarengi dentuman suara menggelegar. Sang pendeta yang terperanjat lantas berucap,"**haleluya**" Kontan ucapan pendeta itu diralat oleh kiai."Anda salah Pak Pendeta, tadi itu **halilintar**", tukasnya sambil terkekeh. "Sekarang skornya satu-satu", sambung Pak Kiai. "Good, good, good"jawab Pak Pendeta.

Ibaz

Huruf Moskow

Di masa perang dingin Amerika vs Uni Sovyet, seorang wartawan dari Indonesia melawat ke Rusia. Dia ingin mengetahui seberapa besar peran media dalam mendukung kebijakan Moskow. Begitu turun dari pesawat, langsung dibelinya sebuah koran terbitan lokal. Tapi ia lalu kebingungan. "Hurufnya kok semua kecil-kecil," gumamnya heran. Ketika menebarkan pandangnya, ia tambah heran. Mulai dari plang-plang nama jalan, petunjuk lalu lintas, hingga papan nama toko-toko, semua hurufnya kecil. Tak satu pun huruf **kapital** tertulis.

Masih tetap bingung, ia lalu melanjutkan perjalanannya ke pusat kota. Baru ketika sampai di Lapangan Merah, keheranannya hilang. Di sudut lapangan itu matanya tertumbuk pada sebuah baliho raksasa yang bertuliskan: *"ganyang kapitalisme!"*.

Iqbal dari Dave

ESCUDO 2.0

Beyond your imagination

MENGHANTAR BANGSA MENUJU INDONESIA BARU

MEDIA INDONESIA

Alamat : Komplek Delta Kedoya, Jl. Pilar Mas Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta 11520, Indonesia, Telp.: (62)(021) 581-2088 (Hunting System) Fax.: (62)(021) 581-2102, 581-2110, http ://www.mediaindo.co.id/, E-mail: cust-mi@mediaindonesia.co.id